



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



DOKUMEN
RPJMD 2018 - 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur yang tidak terhingga kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA jualah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dari penyusunan rancangan RPJMD Teknokratik, rancangan awal RPJMD, Forum Konsultasi Publik, Verifikasi Rancangan Renstra SKPD, Rapat dengan DPRD untuk dalam rangka menerima saran dan masukan sampai dengan Musrenbang RPJMD, terakhir evaluasi raperda RPJMD oleh Gubernur Kalimantan Selatan, maka tersusunlah Peraturan Daerah Tanah Laut tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Penetapan Peraturan Daerah RPJMD merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Makna dari suatu perencanaan adalah penetapan target dan sasaran yang akan dicapai dan program prioritas untuk mencapainya dalam kurun waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada Tahun 2018. Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu perlu saran dan masukan untuk perbaikan kedepannya.

Demikian Dokumen RPJMD ini dibuat sebagai bahan untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan, semoga segala upaya dan ikhtiar ini memperoleh rahmat dan ridho ALLAH SWT.

Pelaihari, Maret 2019
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	8
1.3.1 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019	10
1.3.2 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.....	12
1.3.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.....	13
1.3.4 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036	13
1.3.5 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	14
1.3.6 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	15
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	16
1.4.1 Maksud.....	16
1.4.2 Tujuan	17
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	20
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	20
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	20
2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	20
2.1.1.2 Kondisi Topografi	22
2.1.1.3 Kondisi Geologi	24
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	25
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	28
2.1.1.6 Karakteristik Tanah	32
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	34
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	35
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	46
2.1.4 Kondisi Demografi	54
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	58
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	58
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	58
2.2.1.2 Struktur Ekonomi.....	63
2.2.1.3 Inflasi	65
2.2.1.4 Pendapatan Perkapita	67
2.2.1.5 Indeks Gini	68
2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin	69



2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	72
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	72
2.2.2.2	Angka Melek Huruf.....	74
2.2.2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	75
2.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah	76
2.2.2.5	Angka Harapan Hidup	77
2.2.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78
2.2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	80
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	80
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	81
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	81
2.3.1.1	Pendidikan.....	81
2.3.1.2	Kesehatan.....	87
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	97
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	102
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	108
2.3.1.6	Sosial.....	112
2.3.1.7	Tenaga Kerja.....	116
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.....	121
2.3.1.9	Pangan	126
2.3.1.10	Pertanahan	128
2.3.1.11	Lingkungan Hidup	129
2.3.1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	134
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	135
2.3.1.15	Perhubungan	141
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika.....	146
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	150
2.3.1.18	Penanaman Modal	153
2.3.1.19	Kepemudaan dan Olah Raga	159
2.3.1.20	Statistik	163
2.3.1.21	Persandian.....	165
2.3.1.22	Kebudayaan.....	166
2.3.1.23	Perpustakaan.....	167
2.3.1.24	Kearsipan	168
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	168
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan.....	168
2.3.2.2	Pariwisata	177
2.3.2.3	Pertanian	183
2.3.2.4	Perdagangan	212
2.3.2.5	Perindustrian.....	216
2.3.2.6	Transmigrasi.....	219
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	220
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	220
2.4.1.1	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	220
2.4.1.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan	221
2.4.1.3	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	222
2.4.1.4	Nilai Tukar Petani	224
2.4.1.4	Produktivitas Total Daerah.....	225
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	226
2.4.2.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	226
2.4.2.2	Luas Wilayah Produktif.....	226
2.4.2.3	Luas Wilayah Industri.....	228
2.4.2.4	Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan	229
2.4.2.5	Luas Wilayah Perkotaan.....	231
2.4.2.6	Fasilitas Jasa Perbankan	232



2.4.2.7	Fasilitas Hotel dan Rumah Makan	234
2.4.2.8	Rumah Tangga Pelanggan Air Minum.....	235
2.4.2.9	Ketersediaan Daya Listrik	237
2.4.2.10	Ketersediaan Sarana Komunikasi.....	239
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	240
2.4.3.1	Angka Kriminalitas	240
2.4.3.2	Lama Proses Perizinan	241
2.4.3.3	Pajak dan Retribusi Daerah	243
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	245
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	246
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan.....	247
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	298
3.1	KINERJA KEUANGAN DAERAH	299
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD 2013-2017	299
3.1.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah.....	302
3.1.1.2	Realisasi Belanja Daerah.....	310
3.1.1.3	Realisasi Pembiayaan Daerah	316
3.1.2	Neraca Daerah	319
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	326
3.2.1	Proporsi Realisasi Belanja Daerah	327
3.2.1.1	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	327
3.2.1.2	Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	328
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	334
3.3	KERANGKA PENDANAAN	339
3.3.1	Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah	339
3.3.2	Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah	343
3.3.3	Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah	346
3.3.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan	348
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	353
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.....	353
4.2	ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT	374
4.2.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) 374	
4.2.2	Kawasan Industri Jorong.....	377
4.2.3	Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut.....	377
4.2.4	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	378
4.2.5	Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata	379
4.2.6	Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan	380
4.2.7	Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan ...	381
4.2.8	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	382
4.2.9	Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal	383
4.2.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan.....	384
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	385
5.1	VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.....	385
5.2	MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	388
5.3	TUJUAN DAN SASARAN	390
5.3.1	Tujuan dan Sasaran Misi Pertama	390
5.3.2	Tujuan dan Sasaran Misi Kedua	391



5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga.....	391
5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi Keempat.....	392
5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Kelima.....	392
5.4 SINKRONISASI SASARAN RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018- 2023 DENGAN SASARAN RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025 402	
5.5 SINKRONISASI TARGET RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018- 2023 DENGAN SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	411
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	418
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.....	418
6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.....	423
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT	425
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	456
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	650
BAB IX PENUTUP.....	719



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan, 2018	21
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	22
Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2018.....	23
Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungaidi Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	27
Tabel 2.5 Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2017	29
Tabel 2.6 Kelembaban Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017	29
Tabel 2.7 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (knot), 2017...30	
Tabel 2.8 Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017.....	30
Tabel 2.9 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm), 2017	31
Tabel 2.10 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut	36
Tabel 2.11 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut, 2000-2017.....	47
Tabel 2.12 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	48
Tabel 2.13 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	49
Tabel 2.14 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	49
Tabel 2.15 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut	50
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut	51
Tabel 2.17 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017...55	
Tabel 2.18 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	56
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	56
Tabel 2.20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2013-2017	61
Tabel 2.21 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2013-2017	64
Tabel 2.22 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	67
Tabel 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	72
Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	76
Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	77
Tabel 2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	78
Tabel 2.27 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	78
Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	79
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	80
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2018.....	82
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	84
Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	85
Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	86



Tabel 2.34 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	87
Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	88
Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	89
Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	90
Tabel 2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	91
Tabel 2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017	92
Tabel 2.40 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	93
Tabel 2.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2017	93
Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017	94
Tabel 2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017	94
Tabel 2.44 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	95
Tabel 2.45 Persentase Penduduk Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017	96
Tabel 2.46 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Aktivitas Merokok di Kabupaten Tanah Laut, 2017	97
Tabel 2.47 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017.....	97
Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017.....	98
Tabel 2.49 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017.....	99
Tabel 2.50 Persentase Rumah Tangga menurut Status Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017	103
Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017	104
Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017	105
Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017.....	106
Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017.....	107
Tabel 2.55 Persentase Rumah Tangga menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017.....	108
Tabel 2.56 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017	109
Tabel 2.57 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017	110
Tabel 2.58 Jumlah penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tanah Laut, 2017	111
Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	112
Tabel 2.60 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	113



Tabel 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	117
Tabel 2.62 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	117
Tabel 2.63 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	119
Tabel 2.64 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	120
Tabel 2.65 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017	122
Tabel 2.66 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2017.....	123
Tabel 2.67 Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017	124
Tabel 2.68 Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	125
Tabel 2.69 Jumlah Korban Kekerasan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	126
Tabel 2.70 Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran di Kabupaten Tanah Laut, 2017	127
Tabel 2.71 Produk Pelayanan Proyek/SPK oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	128
Tabel 2.72 Rekapitulasi Jenis Pelayanan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	129
Tabel 2.73 Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kabupaten Tanah Laut, 2018	131
Tabel 2.74 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	132
Tabel 2.75 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	132
Tabel 2.76 Jumlah Akta Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	133
Tabel 2.77 Jumlah Pemegang Akta Kematian di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	134
Tabel 2.78 Persentase Penduduk Berusia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	137
Tabel 2.79 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 20-24 Tahun Menurut Umur Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	138
Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB, 2012-2017	139
Tabel 2.81 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Tanah Laut, 2017	140
Tabel 2.82 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	142
Tabel 2.83 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	143
Tabel 2.84 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017	144
Tabel 2.85 Jumlah Transportasi Laut Berdasarkan Jenisnya, 2017	145
Tabel 2.86 Jumlah Kantor Pos Berdasarkan Jenisnya, 2012-2017.....	146
Tabel 2.87 Banyaknya Surat Pos yang Diterima Menurut Sifat Pengiriman, 2012-2017.....	146
Tabel 2.88 Jumlah Paket Pengiriman dan Penerimaan Paket Pos Menurut Kecamatan, 2017	147
Tabel 2.89 Jumlah Pengguna Layanan Internet Speedy dan Warung Internet, 2012-2017	148
Tabel 2.90 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2016-2017	149



Tabel 2.91 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	150
Tabel 2.92 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	151
Tabel 2.93 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Jumlah Simpanan (Rp Juta), 2017.....	152
Tabel 2.94 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal, 2017	153
Tabel 2.95 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018	155
Tabel 2.96 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018	156
Tabel 2.97Indikator Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	160
Tabel 2.98 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	164
Tabel 2.99 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2018	167
Tabel 2.100Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	171
Tabel 2.101Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Tanah Laut, 2017	173
Tabel 2.102 Jumlah Perahu Menurut Kecamatan dan Jenis (unit), 2017.....	174
Tabel 2.103 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	175
Tabel 2.104Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017	176
Tabel 2.105Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017.....	176
Tabel 2.106Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017.....	177
Tabel 2.107Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2018	178
Tabel 2.108 Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	181
Tabel 2.109Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing Asing dan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	182
Tabel 2.110Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Perjalanan Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017	183
Tabel 2.111 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2017	184
Tabel 2.112 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	185
Tabel 2.113Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	186
Tabel 2.114Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	187
Tabel 2.115Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	187
Tabel 2.116Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	188
Tabel 2.117 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kedelai di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	189



Tabel 2.118 Luas Panen dan Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	190
Tabel 2.119 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	190
Tabel 2.120 Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	191
Tabel 2.121 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	192
Tabel 2.122 Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	193
Tabel 2.123 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	194
Tabel 2.124 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	195
Tabel 2.125 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	196
Tabel 2.126 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	196
Tabel 2.127 Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), PPL, dan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	197
Tabel 2.128 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	199
Tabel 2.129 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	199
Tabel 2.130 Jumlah Panen Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017	200
Tabel 2.131 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	201
Tabel 2.132 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	203
Tabel 2.133 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi, Lada, dan Cengkeh di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	204
Tabel 2.134 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kemiri, Kapuk, dan Aren di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	205
Tabel 2.135 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2012-2017	206
Tabel 2.136 Populasi Ternak Besar dan Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017.....	207
Tabel 2.137 Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017.....	208
Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017.....	210
Tabel 2.139 Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017	211
Tabel 2.140 Perkembangan Produksi Telur Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2012-2017	212
Tabel 2.141 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	213
Tabel 2.142 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	214
Tabel 2.143 Perkembangan Ekspor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	215



Tabel 2.144	Perkembangan Impor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	216
Tabel 2.145	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Laut, 2016	218
Tabel 2.146	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	218
Tabel 2.147	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	223
Tabel 2.148	Nilai Tukar Petani di Kalimantan Selatan, 2012-2017	224
Tabel 2.149	Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta), 2017	225
Tabel 2.150	Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	232
Tabel 2.151	Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	235
Tabel 2.152	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Tanah Laut, 2017	236
Tabel 2.153	Jumlah Produksi, Penggunaan Air Minum yang Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017.....	237
Tabel 2.154	Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017.....	238
Tabel 2.155	Daya terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN di Kabupaten Tanah Laut, 2011-2017	238
Tabel 2.156	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Tipe KWh Meter di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	239
Tabel 2.157	Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	241
Tabel 2.158	Jenis dan Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	242
Tabel 2.159	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten tanah Laut, 2017	244
Tabel 2.160	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2011-2017.....	245
Tabel 2.161	Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016-2017	246
Tabel 2.162	Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017.....	247
Tabel 2.163	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut	249
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017.....	300
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017	304
Tabel 3.3	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017	308
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017	311
Tabel 3.5	Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017	315
Tabel 3.6	Perkembangan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp Juta), 2013-2017.....	318
Tabel 3.7	Perkembangan Neraca Daerah (Rp), 2015-2017.....	321
Tabel 3.8	Analisis Rasio Neraca Daerah, 2015-2017.....	325
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Daerah (%), 2013-2017.....	328
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp), 2013-2017.....	329
Tabel 3.11	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, 2013-2017.....	332
Tabel 3.12	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Rp), 2013-2017	333
Tabel 3.13	Analisis Proporsi Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas, 2013-2017.....	334
Tabel 3.14	Penutup Defisit Rill Anggaran (Rp), 2013-2017.....	336
Tabel 3.15	Komposisi Penutup Penutup Defisit Rill Anggaran (%), 2013-2017.....	337
Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, 2013-2017.....	337
Tabel 3.17	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenaan (Rp), 2013-2017	338
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp), 2018-2023.....	340



Tabel 3.19 Proyeksi Belanja Daerah (Rp), 2018-2023	345
Tabel 3.20 Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp), 2018-2023	347
Tabel 3.21 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp), 2018-2023.....	349
Tabel 3.22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah (Rp), 2018-2023	350
Tabel 3.23 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Rp), 2018-2023.....	351
Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Menurut Urusan Kewenangan.....	354
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	389
Tabel 5.7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	394
Tabel 5.8 Sinkronisasi Sasaran RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	411
Tabel 5.9 Harmonisasi Target Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019.....	412
Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	419
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	424
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	426
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	458
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	460
Tabel 7.3 Penyederhanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	465
Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	470
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023...	651
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	654



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	5
Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	9
Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019	11
Gambar 1.4 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.....	14
Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.....	14
Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	16
Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	20
Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2018.....	27
Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2018.....	33
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017	57
Gambar 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	59
Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017	61
Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2017	63
Gambar 2.8 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017	65
Gambar 2.9 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2013-2017.....	66
Gambar 2.10 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	68
Gambar 2.11 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017...69	
Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	70
Gambar 2.13 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017	71
Gambar 2.14 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017.....	73
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017.....	74
Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017	100
Gambar 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2017.....	101
Gambar 2.18 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tanah Laut (kasus), 2014-2017.....	109
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2013-2017	113
Gambar 2.20 Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan, 2013-2017	115
Gambar 2.21 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	170
Gambar 2.22 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	172
Gambar 2.23 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017	180
Gambar 2.24 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Sepeda Motor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	213



Gambar 2.25 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	217
Gambar 2.26 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Tanah Laut (Ribu Rp/ Tahun), 2012-2017	220
Gambar 2.27 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	222
Gambar 2.28 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut	230
Gambar 2.29 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut	230
Gambar 2.30 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut	231
Gambar 2.31 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017	234
Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	302
Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017	303
Gambar 3.3 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta), 2013-2017	305
Gambar 3.4 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan (Rp Juta), 2013-2017	305
Gambar 3.5 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp Juta), 2013-2017	306
Gambar 3.6 Struktur Pendapatan Daerah (%), 2013-2017	307
Gambar 3.7 Analisis Proyeksi Belanja Daerah	310
Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017	312
Gambar 3.9 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (Rp Juta), 2013-2017	312
Gambar 3.10 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Langsung (Rp Juta), 2013-2017	313
Gambar 3.11 Struktur Belanja Daerah (%), 2013-2017	314
Gambar 3.12 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah	316
Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023	389

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan



program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetapan pelaksanaan dokumen RPJMD, pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana pada ayat (4) dinyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD menekankan pentingnya menterjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. **Pendekatan politik** yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. **Pendekatan teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;



3. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*)** dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. **Pendekatan holistic-tematik** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan integratif** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. **Pendekatan spasial** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai dengan uraian di atas, RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2018-2023, yaitu **Sukamta** dan **Abdi Rahman** yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 19 September 2018. Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 khususnya terkait dengan arah pengembangan wilayah Kalimantan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2012-2025.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 adalah adalah **Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI** dimana untuk pencapaian visi



tersebut telah ditetapkan 5 misi pembangunan, yaitu (1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; (2) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; (3) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat; dan (5) Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 akan berfokus pada pembinaan desa dan penataan kota (**desa dibina kota ditata**) dengan **bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas**. Dalam rangka pembinaan desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan akan menjalankan berbagai program pembangunan di setiap urusan kewenangan yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk penataan kota, program pembangunan yang dijalankan akan berfokus pada upaya mendorong kota menjadi kota yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Pembinaan desa dan penataan kota akan dijalankan secara sinergis antar perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Proses serta tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);



10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
20. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi kalimantan selatan tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3).

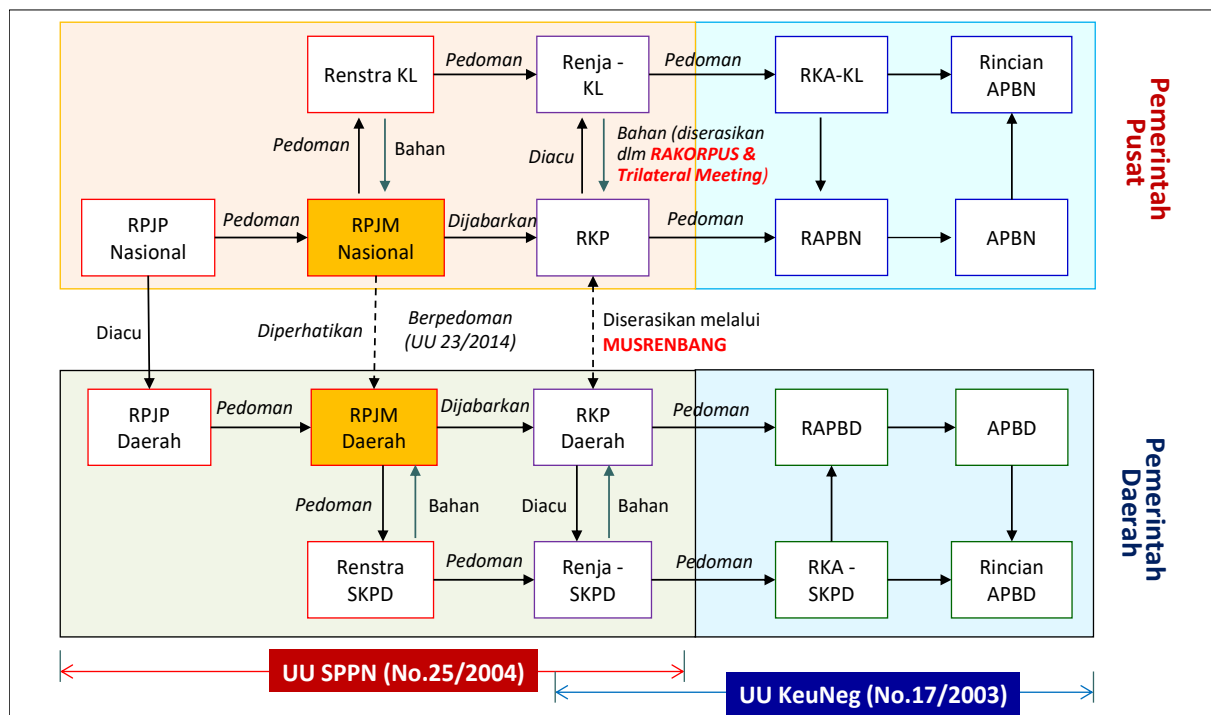
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan lainnya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
2. RPJMD Kabupaten/Kota memperhatikan Rencana Tata Ruang yang ada.
3. RPJMD Kabupaten/Kota menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen rencana tahunan masing-masing Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 berpedoman kepada: (1) RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, (2) RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen lain seperti: (1) RPJMN Tahun 2015 – 2019; (2) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017

1.3.1 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan kebijakan pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan Gotong Royong, untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu, prioritas pembangunan nasional 2015-2019 dalam mewujudkan visi dan misi RPJMN yang disebut dengan Nawa Cita, antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017

Agar RPJMN Tahun 2015-2019 mampu dioperasikan secara optimal dan tercipta harmonisasi dalam pembangunan, RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 wajib mengacu pokok-pokok “Nawa Cita” tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN yang relevan dengan kondisi umum Kabupaten Tanah Laut nantinya akan diadopsi ke dalam



berbagai program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMD

Pendekan yang dilakukan dalam konteks alokasi Pendanaan terhadap program adalah *money follow priority programme*. Hal ini berarti nomenklatur proyek harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.

Dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, adalah dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu **Holistik, Tematik, Spasial, serta Integratif**.

Paradigma holistik tematik menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Holistik tematik tersebut didukung paradigma spasial yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang. Sedangkan integratif adalah mengaitkan dan menghubungkan program pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri.

1.3.2 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

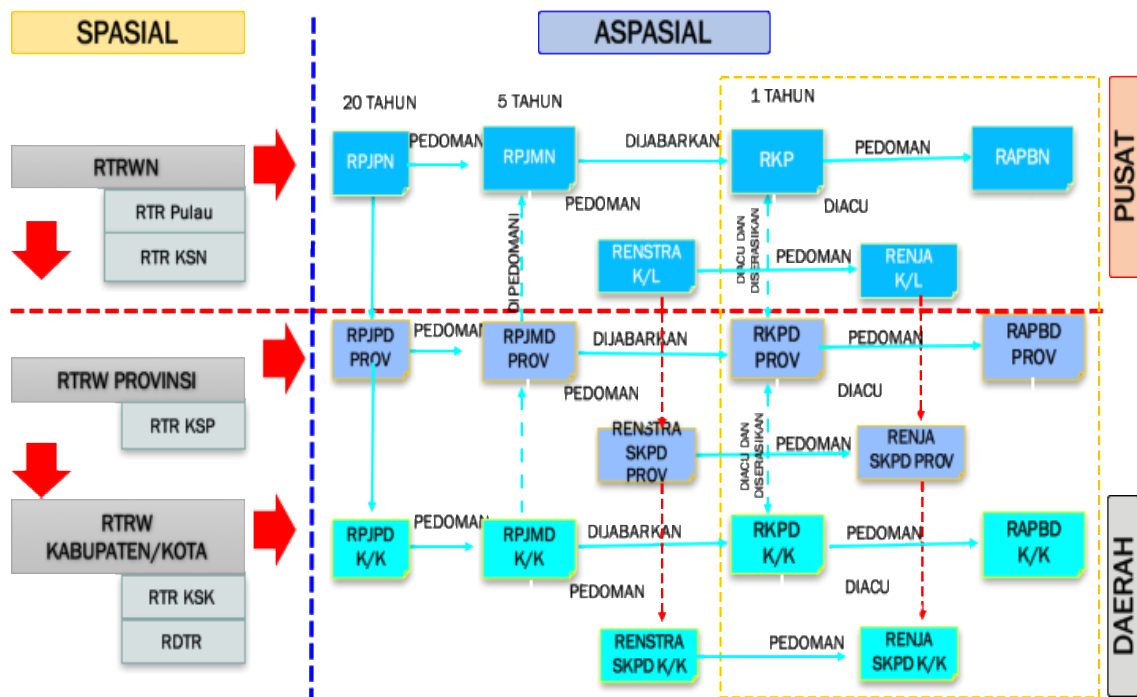
Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berdikari, dan Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan serta program pengembangan wilayah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah diadopsi sebagai satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Selain itu, indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga akan menjadi acuan dalam penentuan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.3.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut masa bakti tahun 2018-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.

1.3.4 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan RTRW Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanah Laut. RPJMD Kabupaten Tanah Laut juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Tanah Laut.

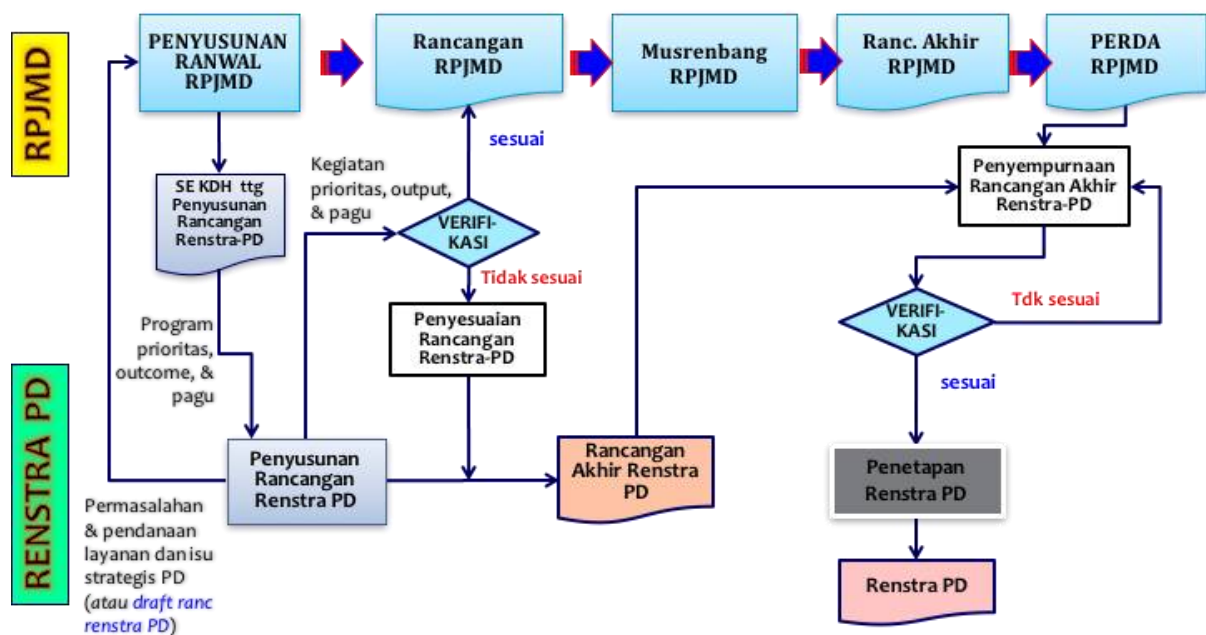


Gambar 1.4 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017

1.3.5 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017

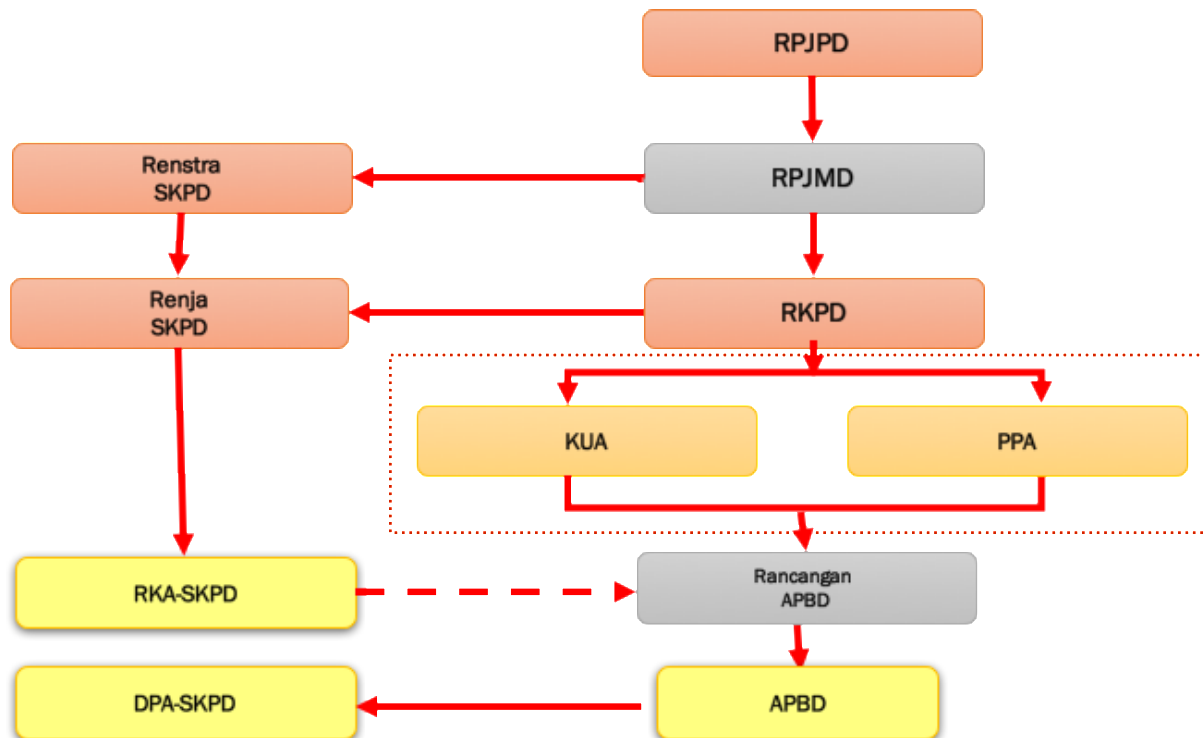
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan



pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.

1.3.6 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.



Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah



Laut sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmonis.

1.4.2 Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 disusun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra SKPD periode 2018-2023;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2018-2023;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023;
6. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018-2023;
8. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
9. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut;
11. Menjadi pedoman DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan



pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memberikan gambaran umum kondisi daerah yang menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Tanah Laut secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, dan (iv) daya saing daerah.

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

- 3.1. Kinerja Keuangan Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bagian ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan memberi pengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan dalam periode RPJMD mendatang.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode RPJMD, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menjelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IX Penutup

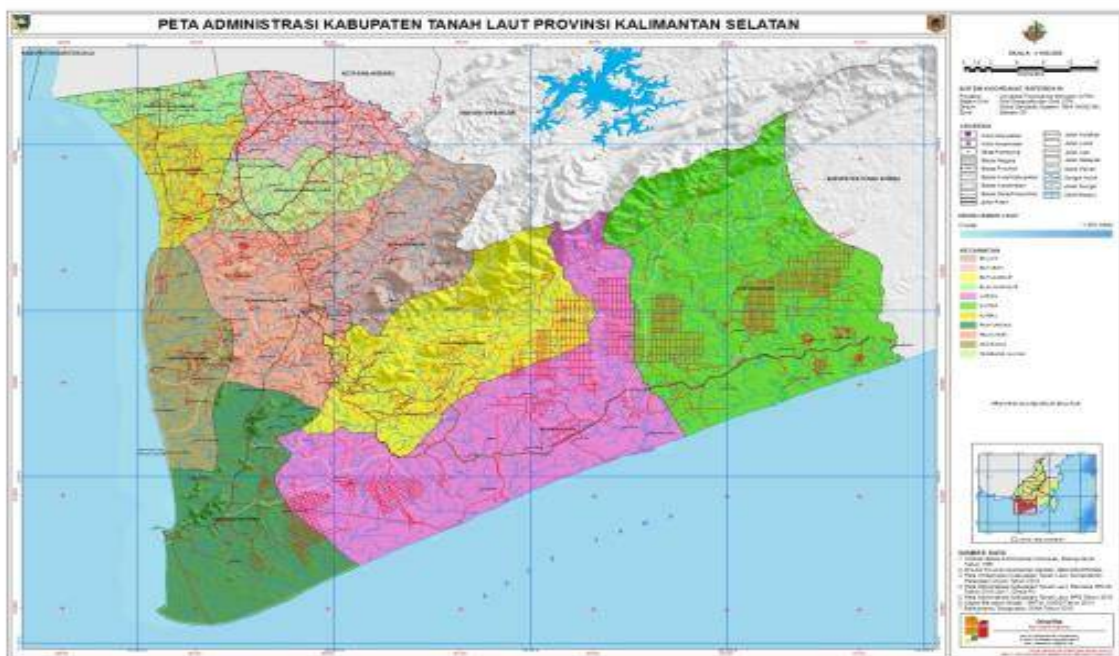
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 384.852 hektar dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.



Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Jorong dengan luasan mencapai 81.639 hektar (21,2%). Kecamatan Kintap berada pada posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 76.319 hektar (19,8%). Pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Kecamatan Batu Ampar dan Panyipatan dengan wilayah masing-masing seluas 45.908 hektar (11,9%) dan 40.613 hektar (10,6%). Sementara itu, Kecamatan Bumi Makmur merupakan wilayah dengan luasan terkecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu seluas 9.542 (2,5%).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan, 2018

No.	Kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Jorong	81.639	21,2
2.	Kintap	76.319	19,8
3.	Batu Ampar	45.908	11,9
4.	Panyipatan	40.613	10,6
5.	Pelaihari	31.871	8,3
6.	Bajuin	26.529	6,9
7.	Takisung	21.652	5,6
8.	Bati-bati	20.021	5,2
9.	Tambang Ulang	17.464	4,5
10.	Kurau	13.294	3,5
11.	Bumi Makmur	9.542	2,5
Kabupaten Tanah Laut		384.852	100,0%

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan (kondisi hingga akhir tahun 2016). Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa. Rincian jumlah

desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
Kabupaten Tanah Laut			130	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan berdasarkan karakteristik geografis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kecamatan yang berada di tepi laut di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 adalah Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Sementara itu, kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut adalah Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan

daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.(2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter.Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2018

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 - 8	Bergelombang/agak landai	44.830
8 - 15	Bergelombang/landai	31.600
15 - 25	Berbukit	21.805
25 - 40	Bergunung	10.690
40 - 60	Bergunung curam	13.545

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) 0–3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan). (2) 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan). (3) 8–15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan). (4) 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan). (5) 25–40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan). (6) 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan). Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebelah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan

membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupa. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu Satuan Morfologi Dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan Morfologi Dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0–10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati – Pelaihari – Asam-asam; Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung. Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Kabupaten Tanah Laut relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat urgen sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus

diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

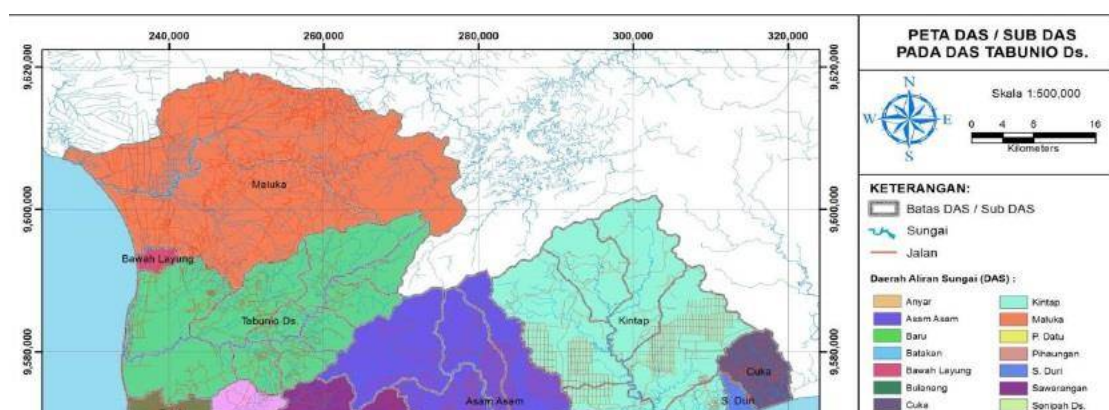
Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabulur (190 Km²), Sungai Sawarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Barat di abupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodic. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak paa ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai fakor fisik bersifat dinamis karena di pengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi factor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS):

Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tb. Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangka dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, Bumi Makmur dan Kurau	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihaungan	Sungai Pihaungan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2017, suhu udara rerata di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27-28,4°C. Suhu udara

maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada bulan Oktober dan November yang mencapai 36,2°C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 21°C pada bulan Juli-Agustus 2017.

Tabel 2.5 Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2017

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
Januari	21,8	36,0	26,8
Februari	24,0	35,6	27,4
Maret	24,8	35,4	28,4
April	23,2	35,1	27,0
Mei	25,0	35,6	27,9
Juni	24,8	35,5	27,9
Juli	21,0	36,0	27,1
Agustus	21,0	36,0	27,1
September	21,0	36,0	27,1
Oktober	23,3	36,2	27,3
November	23,0	36,2	27,9
Desember	21,8	36,0	27,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 83,6-88,2%. Pada tahun 2017, kelembaban udara tertinggi terjadi selama 9 bulan yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 52,0%. Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2017 cukup bervariasi yaitu diantara 1,8 hingga 2,4 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2017, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 2,4 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Mei dan Desember yaitu sebesar 1,8 knot.

Tabel 2.6 Kelembaban Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017

Bulan	Kelembaban Minimum	Kelembaban Maksimum	Kelembaban Rerata
Januari	52,0	98,0	83,6
Februari	67,0	98,0	87,3
Maret	70,0	97,0	88,2
April	67,0	95,0	85,7



Mei	76,0	98,0	87,4
Juni	68,0	98,0	86,3
Juli	70,0	97,0	87,1
Agustus	70,0	98,0	87,2
September	72,0	98,0	88,0
Oktober	67,0	98,0	87,1
November	58,0	98,0	84,2
Desember	60,0	98,0	85,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.7 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (knot), 2017

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	2,3
Februari	2,2
Maret	2,0
April	1,9
Mei	1,8
Juni	2,0
Juli	2,1
Agustus	2,1
September	2,1
Oktober	1,9
November	2,4
Desember	1,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan penyinaran matahari, durasi penyinaran matahari dengan presentase terendah berada di bulan Desember, yaitu hanya sekitar 21% per 12 jam. Sementara itu durasi penyinaran matahari yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 37,8% per 12 jam. Rincian mengenai rata-rata penyinaran matahari menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut;

Tabel 2.8 Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	27,9
Februari	26,6
Maret	34,2

Bulan	Kecepatan Rata-rata
April	29,6
Mei	37,8
Juni	23,6
Juli	27,5
Agustus	27,5
September	33,9
Oktober	34,1
November	24,3
Desember	21,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam periode tahun 2017, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2017, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 503,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yang hanya sebesar 126,7 mm. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2017 terjadi pada bulan Desember yakni mencapai 20 hari hujan. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 tampak pada tabel berikut;

Tabel 2.9 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm), 2017

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	209	21
Februari	227	22
Maret	352	26
April	589	28
Mei	427	25
Juni	362	12
Juli	189	9
Agustus	28	3
September	183	12
Oktober	220	17
November	151	25
Desember	408	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

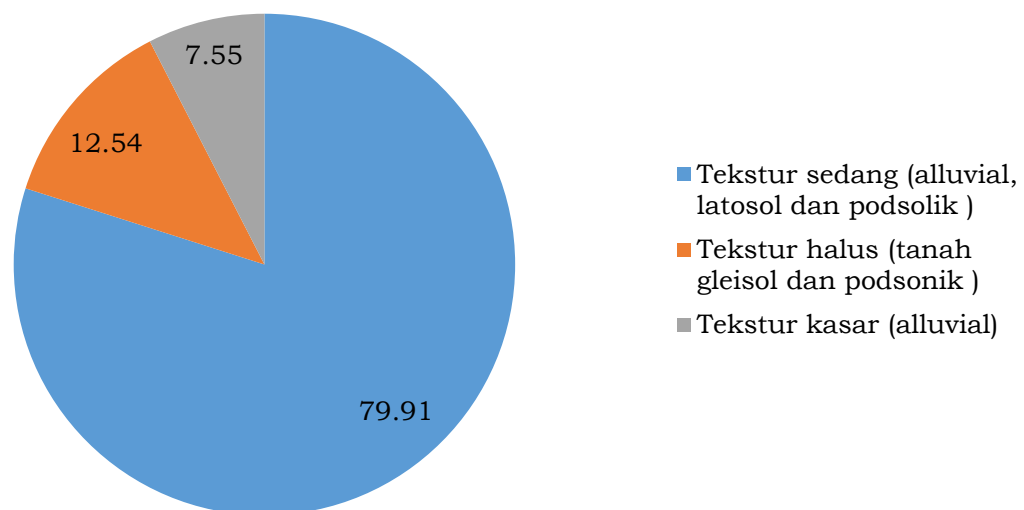
2.1.1.6 Karakteristik Tanah

Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

- Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
- Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
- Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur-unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus

dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2018

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (diolah)

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.55). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha

(7.55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang (eksisting) memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6 %) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2 %) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7 %) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11 %) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-

2036 Pasal 38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang



dimilikinya. Berikut ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

Tabel 2.10 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten				
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasn (pasar, dll)
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat
				Peningkatan fasilitas-2 pelayanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur, Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Pengembangan pelabuhan perikanan Pengembangan kawasan industri Pengembangan permukiman Rencana Pengembangan pelabuhan umum Rencana Pembangunan jalan lingkaran utara Pelabuhan – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional
		Sistem dan fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelabuhan, Bati Bati dan Kintap	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL Pengembangan Infrastruktur IKK
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Kolektor Primer Gambut-Pulosari
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat
				Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)
B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan				
1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong eksporhasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan
				Pengembangan Terminal Agrobisnis
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial - Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut
				Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan
				Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri
				Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional
				Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyanggga



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Perkembangan Perkotaan Pelaihari-Ibu Kota Kabupaten
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang
C. Pengembangan Prasarana Wilayah				
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	<p>Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis,</p> <p>Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap</p>
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	<p>Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan</p> <p>Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer</p> <p>Pengembangna Terminal Tipe B Ambungan</p> <p>Pemgembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap</p> <p>Peningkatan Jalan Ambungan Tajau</p>



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Pecah, Kab. Tanah Laut
				Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
				Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa
				Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	Studi Kelayakan Lokasi Studi Kebutuhan Pasar Pengembangan Kerjasama Bandar Udara
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap Pengembangan Alur di DAS Swarangan Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Datu - Tanjung Dewa
				Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama
				Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern
				Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Pengembangan pengelolaan DAS



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				<p>Tabanio, Kintap, Jorong</p> <p>Penanaman pohon pencegah longsor</p> <p>Pembangunan dan perbaikan pintu air</p> <p>Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)</p> <p>Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap</p> <p>Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung</p>
6.	Prasarana Energi/Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	<p>Penambahan dan perbaikan jaringan</p> <p>Peningkatan infrastruktur pendukung</p> <p>Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU)</p> <p>Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)</p>
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	<p>Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan</p> <p>1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l)</p> <p>2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut)</p> <p>3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo)</p>



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pembangunan TPST Penyediaan Komposter Aerob Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA 1. Metode Sanitary Landfill 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan
D. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten				
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat	Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku
				Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air
				Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir
				Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				kerjasama pengelolaan kawasan
2.	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Memelihara habitat dan keaslian ekosistem
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reboisasi tanaman untuk menahan tanah. ➤ Pengembangan aneka produk olahan ➤ Mengembangkan hutan rakyat
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari- Batu Ampar- Panyipatan. ➤ Pengembangan Pertanian Lahan Basah di wilayah Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. ➤ Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong
			Pengembangan Kawasan Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA ➤ Pengembangan Potensi Obyek ➤ Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional ➤ Peningkatan Promosi wisata. ➤ Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dalam rentang tahun 2000–2017 di Kabupaten Tanah Laut terdapat (tujuh) jenis bencana yang telah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi dan tanah longsor. Bencana yang terjadi menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut, 2000-2017

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal dan Hilang	Luka	Menderita dan Mengungsi	Rimah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Terendam
1.	Banjir	135	7	-	42.928	1	1	2	3.597
2.	Banjir Bandang	2	2	-	1.384	8	9	-	-
3.	Kekeringan	6	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	517	-	-	-	9	-	-	-
5.	Cuaca Ekstrim	27	-	1	553	105	24	43	-
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	954	23	-	39	-
7.	Tanah Longsor	3	-	-	-	3	-	-	-
Jumlah		691	9	1	45.819	149	34	84	3.597

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data Rekap Bencana BPBD Kabupaten Tanah Laut 2000-2017

Berdasarkan Tabel 2.11, terlihat bahwa pada rentang waktu 17 tahun yaitu dari tahun 2000 - 2017, secara keseluruhan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut yaitu 691 (enam ratus sembilan puluh satu). Dari 691 kejadian bencana tersebut bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) kali kejadian. Sedangkan bencana yang mempunyai jumlah kejadian paling sedikit yaitu gelombang ekstrim dan abrasi dengan 1 (satu) kali kejadian. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, bencana yang paling menimbulkan dampak terbesar adalah bencana banjir. Namun untuk korban per masing-masing bencana terlihat bahwa bencana banjir yang menimbulkan korban paling banyak yaitu 42,935 jiwa, selanjutnya bencana banjir bandang sebanyak 1,386 jiwa, gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 954 jiwa, cuaca ekstrim sebanyak 554 jiwa dan untuk bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor tidak menimbulkan korban jiwa.

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang

tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Tabel 2.12 menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

Tabel 2.12 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	JenisBencana	Luas (ha)	Kelas
1.	Banjir	182.755	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	212.073	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3.326	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	Sedang
7.	Tanah Longsor	26.298	Sedang
Jumlah		970.321	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Melihat potensi penduduk yang terpapar, bencana kekeringan, cuaca ekstrim, dan banjir merupakan hal yang harus diwaspadai mengingat jumlah penduduk yang terpapar bencana-bencana tersebut mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah penduduk yang terpapar bencana kekeringan mencapai

338.291 jiwa, bencana cuaca ekstrim sebanyak 336.286 jiwa, dan banjir sebanyak 242.312 jiwa.

Tabel 2.13 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kerugian fisik terbesar bencana di Kabupaten Tanah Laut berasal dari bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 1,88 triliun, sedangkan bencana banjir dapat menimbulkan kerugian fisik sebesar Rp 842,70 miliar. Untuk kerugian ekonomi, dampak kerugian terbesar ditimbulkan oleh bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 553,35 miliar dan bencana banjir bandang dapat menimbulkan kerugian sebesar Rp 106,72 miliar. Jika dilihat dari potensi kerusakan lingkungan, bencana kekeringan menimbulkan dampak kerugian terbesar dimana luas areal yang terdampak dapat mencapai 66.583 ha, disusul bencana kebakaran lahan dan hutan yang seluas 50.189 ha, dan bencana banjir seluas 42.463 ha.

Tabel 2.14 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan		
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1.	Banjir	182.755	82.135	924.837	Tinggi	42.463	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	106.716	122.774	Tinggi	3.623	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	212.073	553.348	2.432.266	Tinggi	-	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3.326	10.003	40.532	Tinggi	2.271	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan		
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	38.367	38.367	Tinggi	50.189	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	2.120	2.120	Sedang	66.583	Tinggi
7.	Tanah Longsor	26.298	53.149	59.711	Tinggi	12.771	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.15 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
1.	Banjir	Sedang	Rendah	Rendah
2.	Banjir Bandang	Sedang	Rendah	Rendah
3.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Rendah	Rendah
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	Rendah	Rendah
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah
7.	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil

rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, (KRB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d) kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
2. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Kecamatan Pelaihariterdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala



Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Desa Kunyit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.

3. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.
4. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.
5. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
6. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.
7. Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.
8. Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:
 - a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.
 - b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsung.
 - c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simp. Empat Sungai Baru.
 - d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Desa



- Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
- e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya, Desa Mekar Sari dan Desa Sebamban Baru.
 - f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni : Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:



- a. Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- d. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
- e. Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.
- f. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- g. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- h. Penetapan batas dataran banjir;
- i. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- j. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 334.328 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode

2010-2017 adalah sebesar 1,74%, sedangkan laju pertumbuhan dalam kurun waktu 2016-2017 adalah sebesar 1,53%.

Tabel 2.17 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017

No.	Kecamatan	2010	2016	2017	Laju Pertumbuhan 2010-2017	Laju Pertumbuhan 2016-2017
1.	Panyipatan	21.151	21.562	22.489	0,88	4,30
2.	Takisung	27.998	28.583	29.064	0,54	1,68
3.	Kurau	11.578	11.713	11.831	0,31	1,01
4.	Bumi Makmur	11.831	13.310	13.786	2,21	3,58
5.	Bati-Bati	38.645	39.496	39.537	0,33	0,10
6.	Tambang Ulang	14.925	16.549	16.703	1,62	0,93
7.	Pelaihari	63.895	64.678	65.248	0,30	0,88
8.	Bajuin	15.957	16.452	17.404	1,25	5,79
9.	Batu Ampar	23.233	25.883	26.740	2,03	3,31
10.	Jorong	29.002	39.880	40.198	4,77	0,80
11.	Kintap	38.118	51.180	51.328	4,34	0,29
Kabupaten Tanah Laut		296.333	329.286	334.328	1,74	1,53

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 65.248 jiwa (19,52%). Meskipun memiliki jumlah penduduk tertinggi, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pelaihari merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2010-2017 yaitu sebesar 0,30%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Kintap yaitu sebanyak 51.328 jiwa (15,33%), disusul Kecamatan Jorong sebanyak 40.198 jiwa (12,03%), dan Kecamatan Bati-Bati sebanyak 39.537 jiwa (11,83%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kurau yaitu 11.831 jiwa. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 172 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 168 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 101 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 49 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 64 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 67 jiwa per km².

Tabel 2.18 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Panyipatan	22.489	6,71	67
2.	Takisung	29.064	8,69	85
3.	Kurau	11.831	3,56	94
4.	Bumi Makmur	13.786	4,12	98
5.	Bati-Bati	39.537	11,83	168
6.	Tambang Ulang	16.703	5,00	104
7.	Pelaihari	65.248	19,52	172
8.	Bajuin	17.404	5,21	89
9.	Batu Ampar	26.740	8,00	49
10.	Jorong	40.198	12,03	64
11.	Kintap	51.328	15,33	95
Kabupaten Tanah Laut		334.328	100,00	92

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 171.480 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 162.848 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 105,30 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

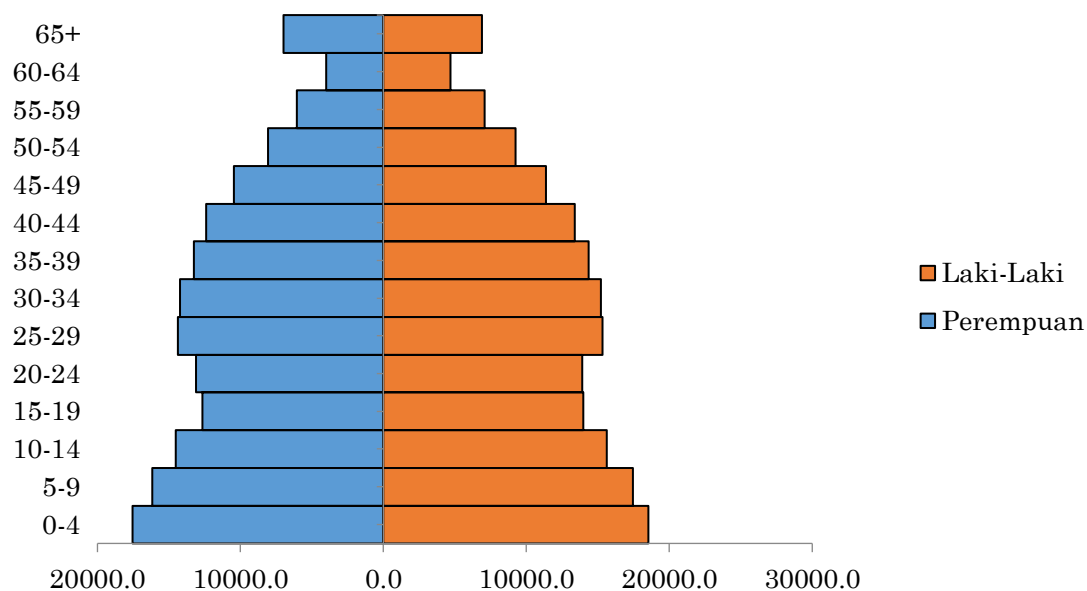
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Panyipatan	11.246	11.200	100,41
2.	Takisung	14.629	14.437	101,33
3.	Kurau	5.979	5.923	100,95
4.	Bumi Makmur	6.938	6.849	101,30
5.	Bati-Bati	20.131	19.407	103,73
6.	Tambang Ulang	8.519	8.184	104,09
7.	Pelaihari	33.169	32.082	103,39

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
8.	Bajuin	8.961	8.449	106,06
9.	Batu Ampar	13.812	12.927	106,85
10.	Jorong	21.196	19.037	111,34
11.	Kintap	26.900	24.353	110,46
Kabupaten Tanah Laut		171.480	161.848	105,30

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 34.542 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 33.078 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 29.600 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kabupaten Tanah Laut memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.



Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active*

population) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

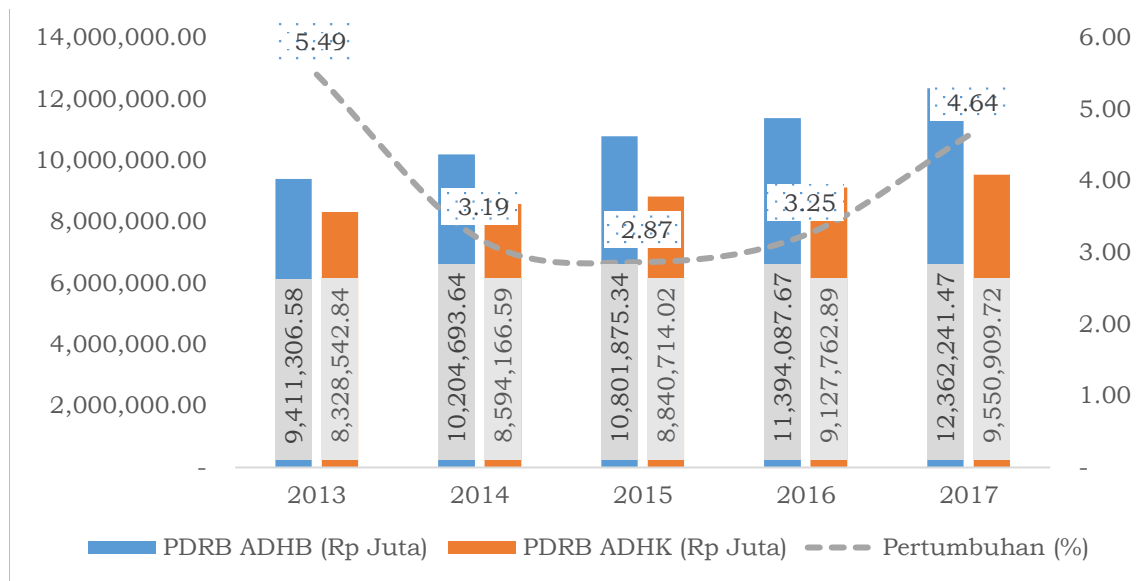
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. PDRB juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.



Gambar 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

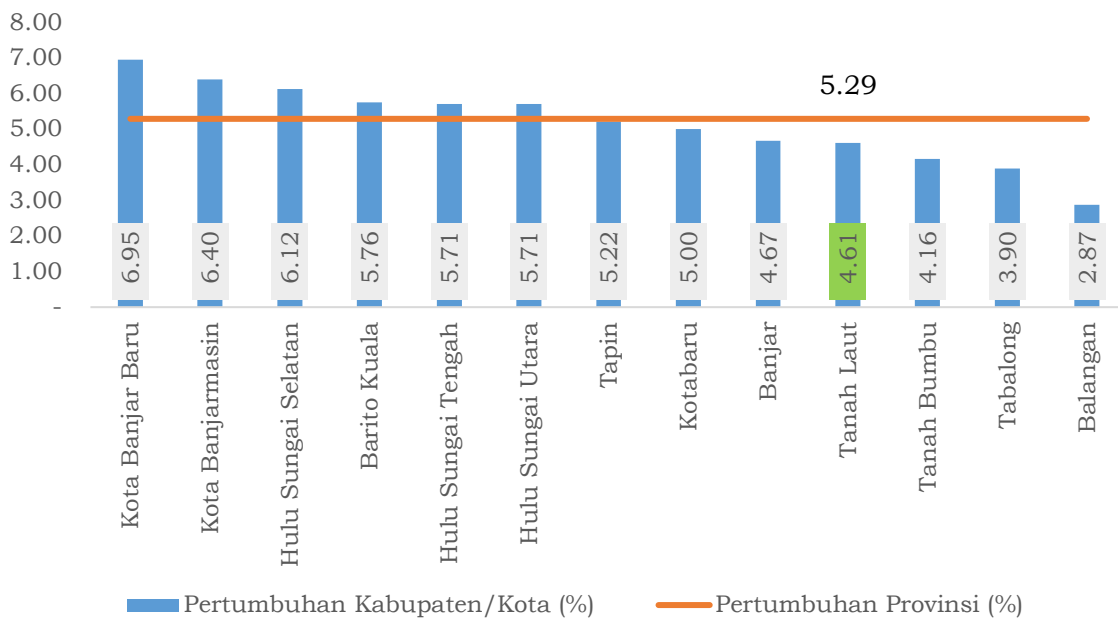
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk

mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2013-2017, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 9,41 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 12,36 triliun pada tahun 2017. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 8,33 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 9,55 triliun pada tahun 2017. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,89% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,87%. Pada tahun 2015 merupakan titik balik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 3,25% dan pada tahun 2017 tumbuh kembali sebesar 4,64%. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 10 (sepuluh) dari 12 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 mencapai 5,29%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin (Gambar 2.6).

PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa terdapat 16 sektor yang ada memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut ditunjukkan oleh sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 16,68%, kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,28% per tahun, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,99% per tahun. Selama periode 2013-2017, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan gejolak perekonomian Kabupaten Tanah Laut masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan, terutama pertambangan batubara. Harga batubara yang terus

melemah menyebabkan banyak pengusaha batubara di Kabupaten Tanah Laut memutuskan untuk vakum. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi selama periode 2014-2017 dengan kontraksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 4,83%. Tak hanya itu, perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi pada sektor pertanian, terutama perkebunan dan kehutanan.



Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Tabel 2.20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2013-2017

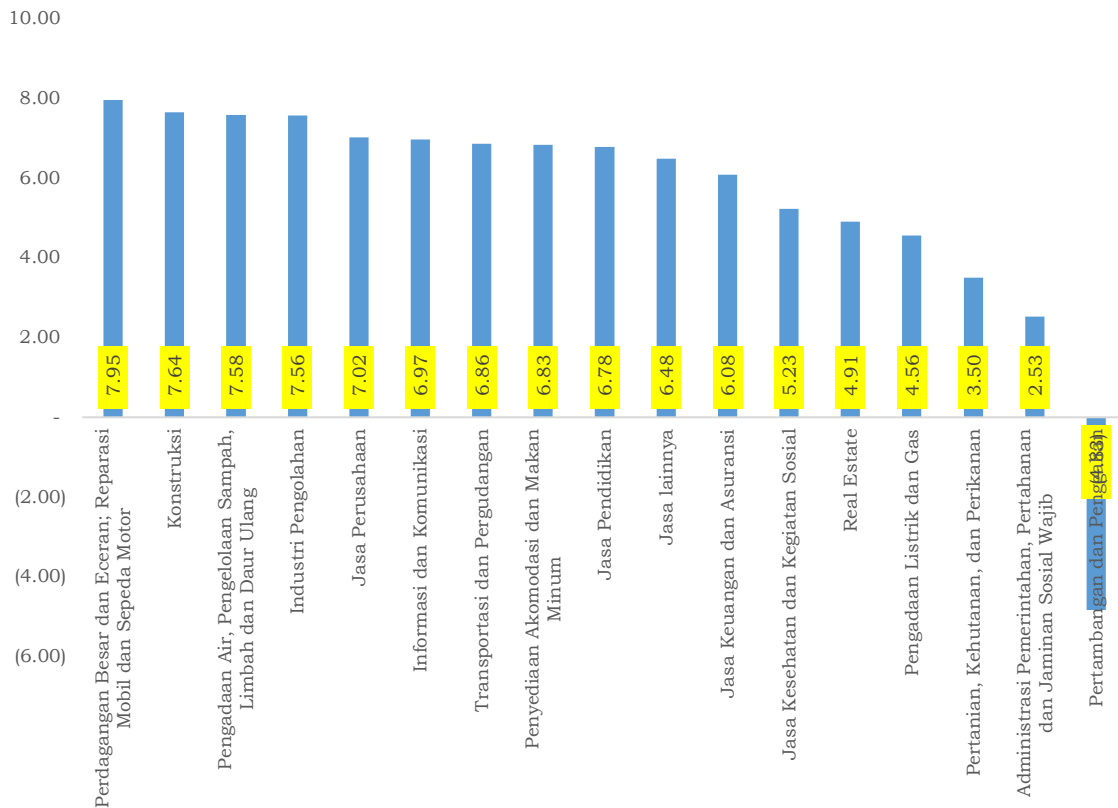
Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,83	2,31	2,22	3,84	3,50	3,14
Pertambangan dan Penggalian	4,94	(0,91)	(2,20)	(2,33)	(4,83)	(1,07)
Industri Pengolahan	4,67	4,64	4,33	7,57	7,56	5,75
Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	36,35	31,67	5,00	4,56	16,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	8,86	5,64	7,43	7,58	6,43
Konstruksi	5,75	6,47	6,34	5,23	7,64	6,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,81	8,20	7,88	7,95	8,28
Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,76	6,97	6,50	6,86	6,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,73	6,20	6,34	6,83	6,66



Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Informasi dan Komunikasi	6,52	9,36	8,37	8,75	6,97	7,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,02	7,24	4,92	5,71	6,08	7,59
Real Estate	6,73	5,46	5,65	6,47	4,91	5,84
Jasa Perusahaan	7,44	6,89	6,58	8,05	7,02	7,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	5,81	8,78	2,03	2,53	4,99
Jasa Pendidikan	7,40	8,14	8,76	7,87	6,78	7,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,44	6,75	7,53	9,05	5,23	7,80
Jasa lainnya	2,60	8,24	6,12	7,68	6,48	6,22
PDRB	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	3,89

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 7,95%, kemudian sektor konstruksi sebesar 7,64% pada posisi kedua, dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 7,58% pada posisi ketiga. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memiliki posisi terendah memiliki pertumbuhan sektor kurang dari 4% dan salah satunya memiliki pertumbuhan yang negatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,50%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,05%, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,83 persen.



Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2017
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

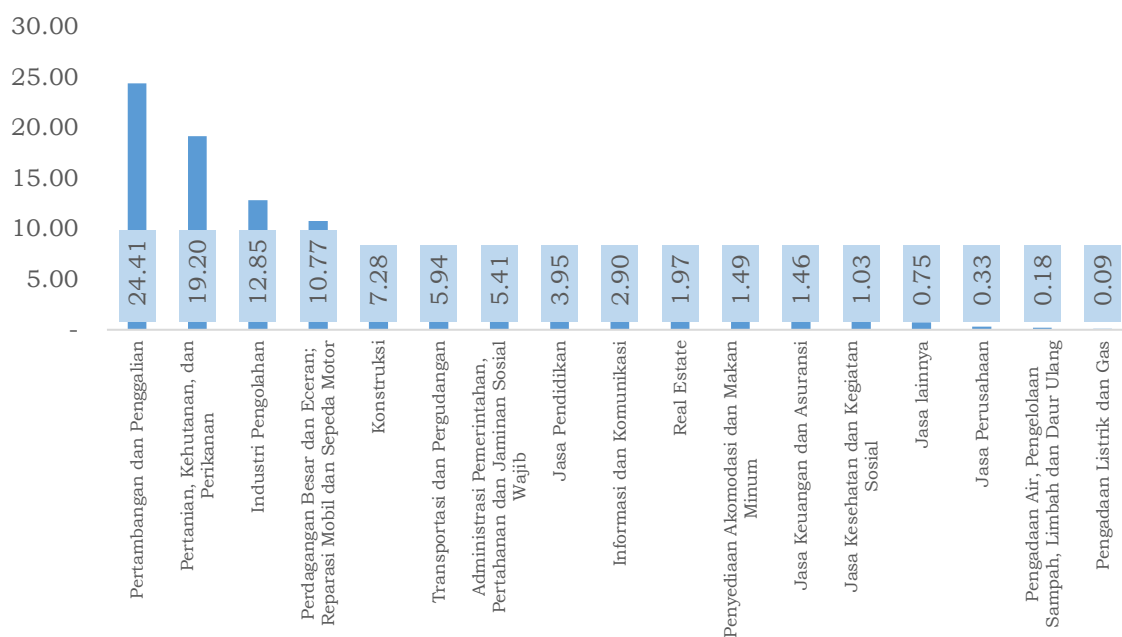
Tabel 2.21 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,70	18,75	19,35	19,64	19,20	19,13
Pertambangan dan Penggalian	35,15	32,62	28,13	25,05	24,41	29,07
Industri Pengolahan	10,45	10,71	11,37	12,23	12,85	11,52
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17
Konstruksi	5,83	6,20	6,79	7,01	7,28	6,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,40	9,03	9,73	10,42	10,77	9,67
Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,22	5,64	5,87	5,94	5,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,36	1,42	1,47	1,49	1,40
Informasi dan Komunikasi	2,45	2,60	2,71	2,84	2,90	2,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	1,36	1,42	1,46	1,46	1,40
Real Estate	1,77	1,86	1,94	2,00	1,97	1,91
Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,31	0,32	0,33	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,83	5,02	5,63	5,58	5,41	5,29
Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,67	4,06	3,95	3,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,87	0,97	1,04	1,03	0,94
Jasa lainnya	0,58	0,64	0,70	0,74	0,75	0,68
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Selama periode 2013-2017, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi yang mencapai 29,07% per tahun. Pada sektor ini kontribusi terbesar diberikan oleh produksi batu bara, kemudian produksi bijih besi, mangan, bijih nikel, dan batu kromit. Walaupun kontribusi sektor ini mengalami penurunan selama periode 2013-2017, sektor ini tetap menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2012-2016, tren sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2012 sektor ini sebesar 18,77% dan pada tahun 2016 mencapai 19,65%. Namun pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan menjadi 19,20%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir industri ini mengalami peningkatan dari 10,45% pada tahun 2013 menjadi sebesar 12,85% pada tahun 2017, dengan rata-rata kontribusi mencapai 11,52%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.



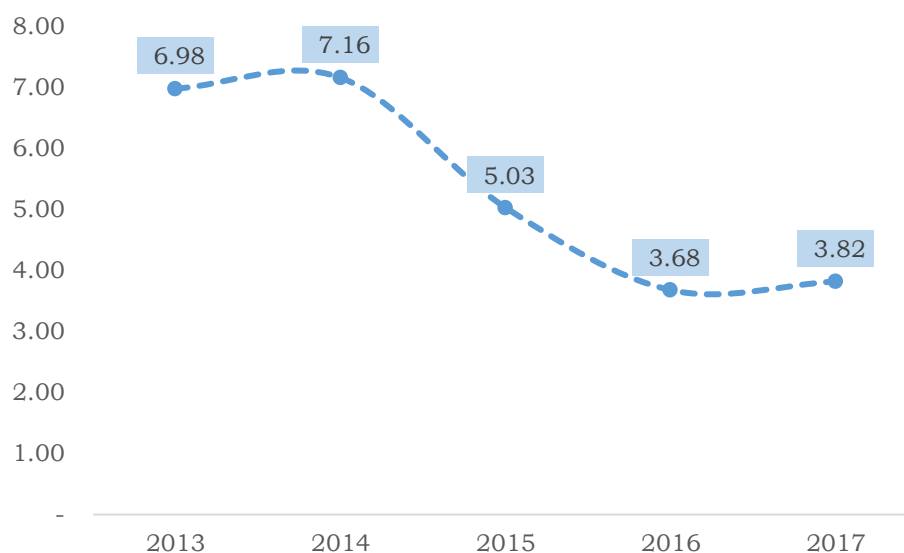
Gambar 2.8 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor

ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.



Gambar 2.9 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi 3,68% dan pada tahun 2017 meningkat

kembali menjadi 3,82%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

2.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 2.22 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Rp Ribu)	29.998,59	31.979,81	33.310,03	34.602,41	36.976,39
PDRB ADHK (Rp Ribu)	26.547,27	26.932,69	27.262,34	27.719,86	28.567,48
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,73	1,45	1,22	1,68	3,06

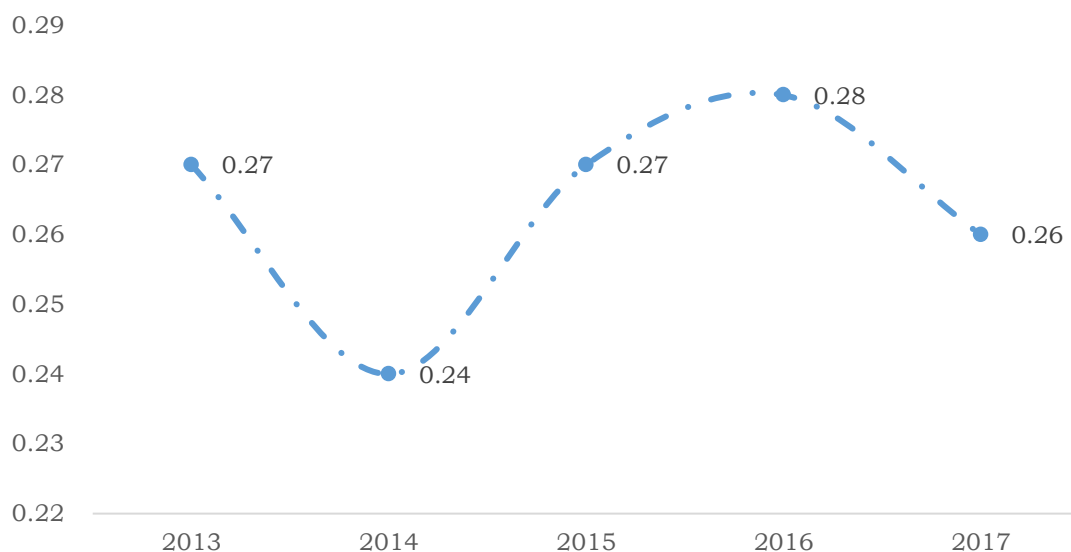
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut pada Tabel 2.22 memiliki tren yang cenderung positif, yang artinya meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2013 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 29,99 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 36,98 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK terus meningkat dari Rp 26,55 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 28,57 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 3,73%. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

2.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* $>0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* $0,3-0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* $<0,3$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

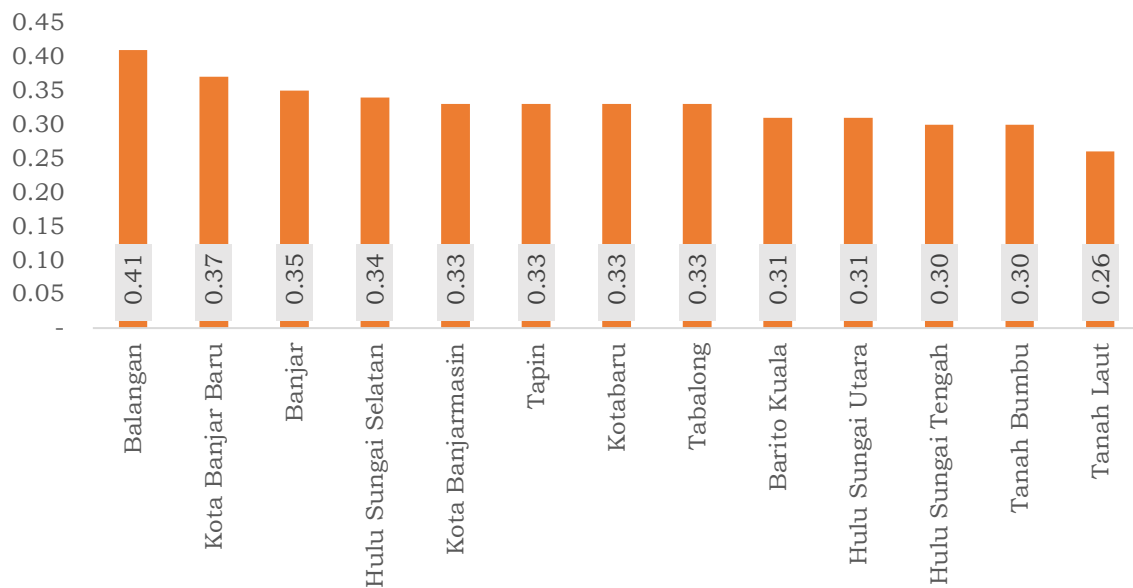


Gambar 2.10 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018
(diolah)

Berdasarkan Gambar 2.10, terlihat bahwa sepanjang periode 2013-2017, nilai rasio gini Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, nilai rasio gini adalah sebesar 0,27, kemudian menurun menjadi 0,24 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2016, nilai rasio gini meningkat kembali menjadi 0,28, dan pada tahun 2017, nilainya kembali mengalami penurunan menjadi 0,26. Selama periode 2013-2017, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten

Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2017. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,41, disusul Kota Banjar Baru sebesar 0,37, dan Kabupaten Banjar sebesar 0,35.

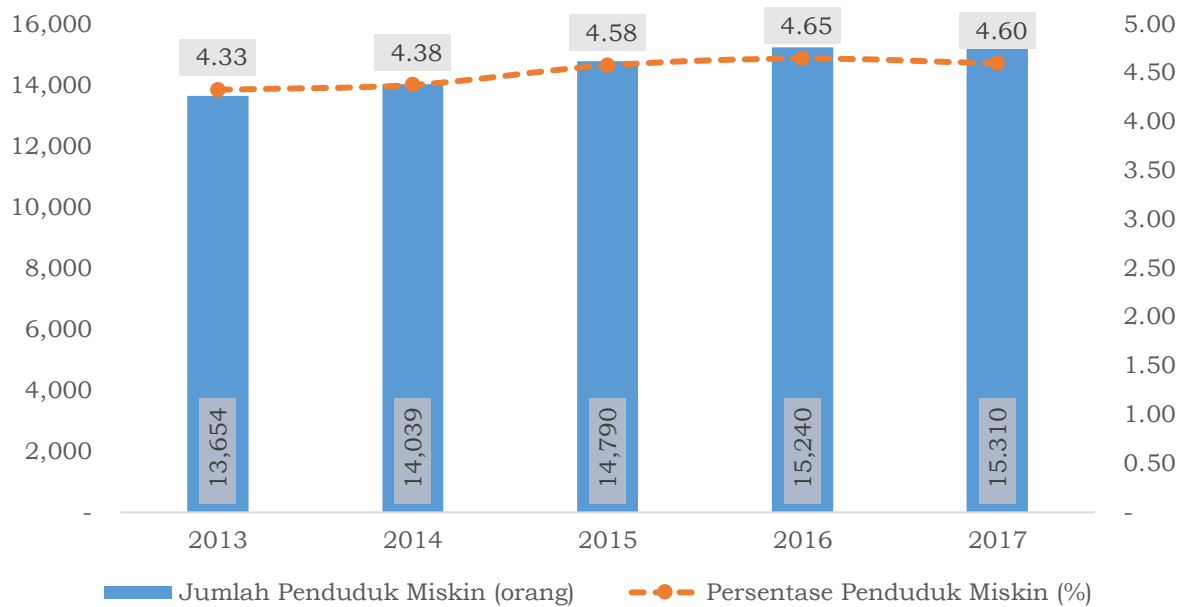


Gambar 2.11 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

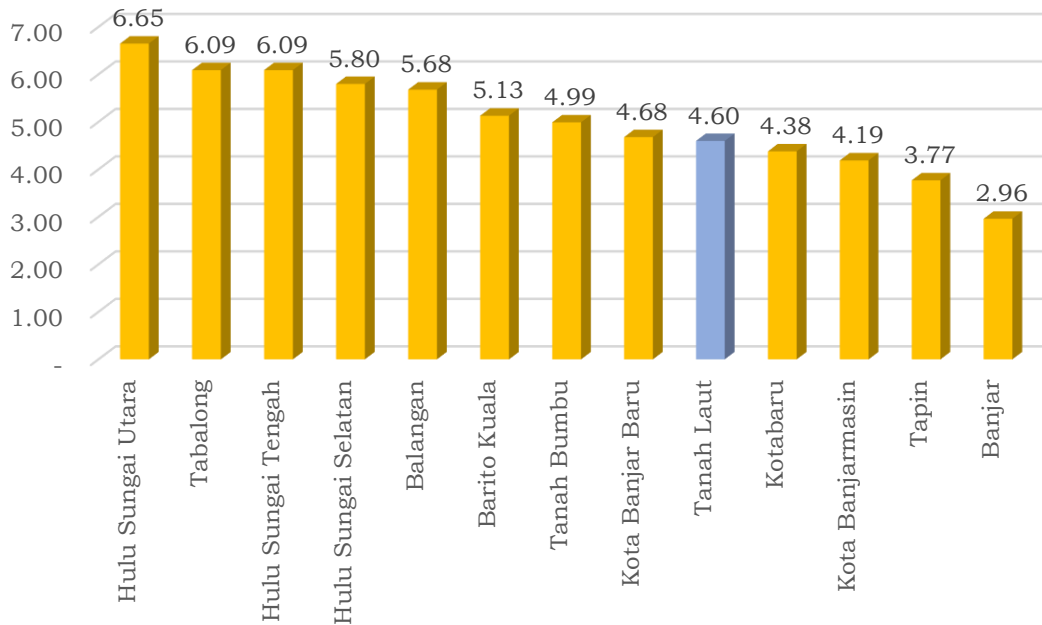
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2012-2017, garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.291.923 dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp.425.152.



Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2017 cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 13.654 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 15.310 orang. Dilihat dari sisi yang lain yaitu persentasenya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013-2016, persentase penduduk miskin meningkat dari sebesar 4,33% menjadi sebesar 4,65%. Pada tahun 2017, terdapat hasil yang cukup menggembirakan dimana persentase penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 4,60%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat ke-5 terkecil di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,60%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan persentas penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 4,70%. Wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan persentase sebesar 6,65%, disusul Kabupaten Tabalong sebesar 6,09%, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 6,09%. Sementara itu, wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah ditempati oleh Kabupaten Banjar dengan persentase sebesar 2,96%.



Gambar 2.13 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*-P1) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index*-P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2013-2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,49 menjadi 0,44, kemudian meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2015. Kemudian kembali turun pada tahun 2016 menjadi 0,64 dan meningkat kembali menjadi 0,71 pada tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin

jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2012-2015 terjadi kenaikan indeks dari 0,07 menjadi 0,18. Kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 0,16 dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 0,15, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun.

Tabel 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,44	0,47	0,76	0,64	0,71
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,09	0,11	0,18	0,16	0,15

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

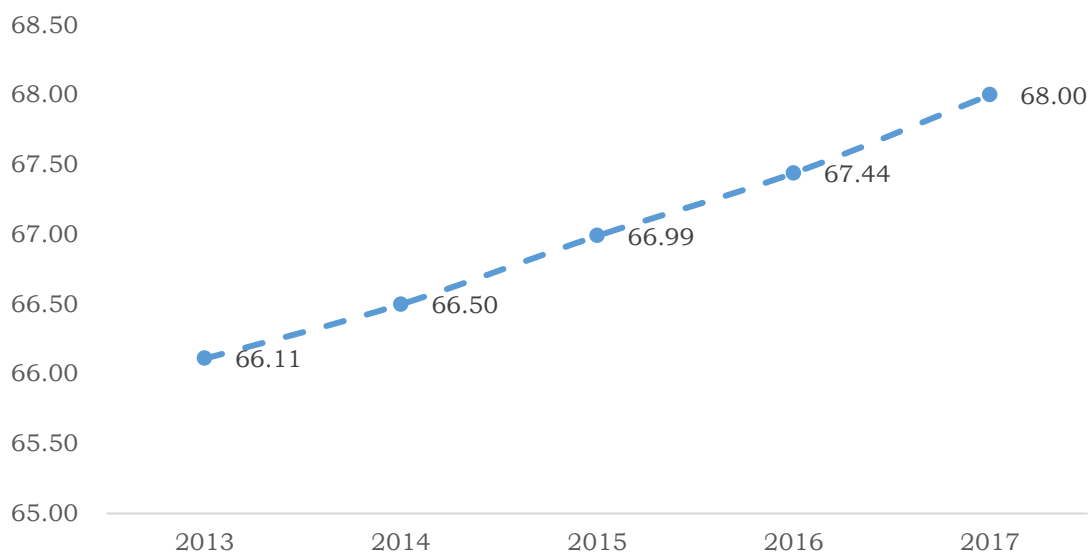
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk kategori rendah.

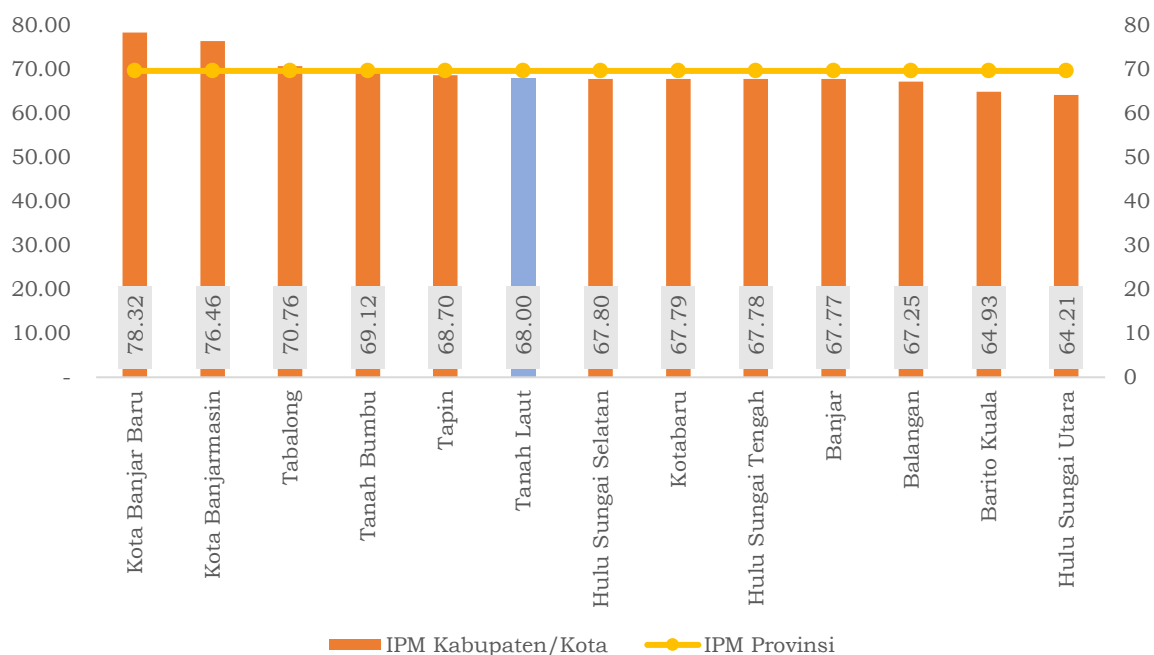


Gambar 2.14 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Selama periode 2013-2017, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 66,11, kemudian meningkat menjadi 66,50 pada tahun 2014, meningkat kembali menjadi 66,99 pada tahun 2015, dan kinerja IPM pada tahun 2017 adalah sebesar 68,00. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 berada pada posisi 6 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di

kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 78,32, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 76,46, dan Kabupaten Tabalong sebesar 70,76. Hanya ketiga wilayah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Kabupaten Tanah Laut sendiri bersama dengan wilayah lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang.



Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2010-2013, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggembarakan dengan

adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 93,89% pada tahun 2010 menjadi 96,77% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 3,23% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pada tahun 2017, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 96,07%. Angka melek huruf menurut agregasi jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih melek huruf dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu 97,65% untuk laki-laki dan 94,41% untuk perempuan. Lebih tingginya persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melek huruf dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat relatif sedikit ketimpangan antara penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2013-2017, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 adalah

sebesar 7,26 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,27 tahun pada tahun 2014, dan meningkat kembali menjadi 7,29 pada tahun 2015. Pada tahun 2017, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,37 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 7,99 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
RLS (tahun)	7,26	7,27	7,29	7,30	7,37

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
HLS (tahun)	10,83	11,09	11,25	11,50	11,82

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka HLS Kabupaten Tanah Laut hanya sebesar 10,83 tahun, kemudian meningkat menjadi 11,09 tahun pada tahun 2014. Angka HLS tersebut mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 11,822 pada tahun 2017. HLS sebesar 11,82 pada tahun 2017 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 11,21 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 2 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 12,46 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjar Baru yaitu sebesar 14,78 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, AHH di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 68,19 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 68,22 tahun pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 68,62 tahun, dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,89 tahun. AHH sebesar 68,89 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjaani hidup selama 69 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang

dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Tanah Laut tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. Angka AHH Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 68,02 tahun.

Tabel 2.26 Angka HarapanHidup di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
HLS (tahun)	68,19	68,22	68,62	68,76	68,89

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada dasarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.27Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
TPAK	69,41	72,42	68,72	68,72	67,27

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2013-2017, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, TPAK adalah sebesar 69,41%, kemudian meningkat menjadi sebesar 72,42% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, nilai masing-masing TPAK adalah sebesar 68,72%, dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 67,27%. Persentase angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 67,26%, sedangkan 32,74% dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2017 sebesar 86,54% persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 46,89%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Tanah Laut adalah kaum laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanah Laut, 2017

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (%)	86,53	46,90	67,26
Bukan Angkatan Kerja (%)	13,47	53,10	32,74
Jumlah (%)	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	86,54	46,89	67,27

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidakmungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulaibekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasimasalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada tahun 2016 yang sebesar 4,53%, maka pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase pengangguran yang cukup baik hingga TPT hanya menjadi sebesar 3,70%.

Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2017

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja (%)	86,53	46,90	67,26
Bukan Angkatan Kerja (%)	13,47	53,10	32,74
Jumlah (%)	100	100	100
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,94	5,19	3,70

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar

pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Makin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan

berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2018

Kelompok Usia	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI [7-12]	98,51	98,70	99,37	99,68	99,40	99,83
SMP/MTs [13-15]	88,57	96,33	96,05	92,16	91,59	91,13
SMA/MA/SMK [16-18]	59,33	68,01	57,89	56,88	62,84	68,47

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2013-2018, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 98,51%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 menjadi 99,68%. Untuk tahun 2017, APS kelompok umur 7-12 mengalami penurunan menjadi sebesar 99,40%, dan pada tahun 2018 meningkat kembali meningkat hingga mencapai level tertingginya yaitu sebesar 99,83%.

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 88,57%, kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 96,33% pada tahun 2014, pada tahun 2017, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 91,13%. Peningkatan nilai APS khususnya pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan target program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajib 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2017 adalah sebesar 109,54%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2017 adalah sebesar 80,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang

bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 80,16%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 70,71% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 70,71%.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	109,54	98,56
SMP/MTs	80,16	71,31
SMA/SMK/MA	70,71	52,98

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 98,56%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2017 adalah sebesar 71,31% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 71 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2017 adalah sebesar 52,98%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 53 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi

manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Pada jenjang pendidikan TK, jumlah unit TK pada tahun 2017 adalah sebanyak 208 unit dengan jumlah TK terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 48 unit. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan TK adalah sebanyak 11.169 orang dengan guru yang mendampingi sebanyak 1.050 orang. Dari 208 unit TK tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 520 ruang kelas. Dilihat dari rasio antara murid dan guru pada tahun 2017, rasionya adalah sebesar 1 : 11, yang berarti bahwa 1 orang guru TK di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 11 murid. Sementara itu, rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 21, yang berarti bahwa 1 ruang kelas TK di Kabupaten Tanah Laut berisi 21 murid. Secara rinci, jumlah unit, murid, dan guru pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	17	832	67	36	12	23
2.	Takisung	18	913	96	46	10	20
3.	Kurau	9	349	30	14	12	25
4.	Bumi Makmur	12	408	35	19	12	21
5.	Bati-bati	21	1.653	132	65	13	25
6.	Tambang Ulang	11	485	40	14	12	35
7.	Pelaihari	48	2.525	304	136	8	19
8.	Bajuin	15	642	65	34	10	19
9.	Batu Ampar	19	915	92	37	10	25
10.	Jorong	16	1.064	84	47	13	23
11.	Kintap	22	1.383	105	72	13	19
Jumlah		208	11.169	1.050	520	11	21

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 254 unit, yang terdiri dari 230 unit SD negeri, 6 unit SD swasta, 5 unit MI negeri, dan 13 unit MI swasta. Kecamatan yang memiliki jumlah SD/MI terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 46 unit, diikuti Kecamatan Kintap dan Bati-bati masing-masing sebanyak 28 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 24 unit. Dari 254 unit SD/MI, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 2.006 unit ruang kelas. Jumlah murid yang menempuh pendidikan SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 40.040 unit, dengan jumlah guru yang mengampu sebanyak 2.625 orang. Dilihat dari rasio antara murid dan guru, rasionya pada tahun 2017 adalah sebesar 1 : 15, yang berarti bahwa 1 guru SD di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 15 murid, sedangkan rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 20, yang berarti bahwa 1 ruang kelas SD di Kabupaten Tanah Laut berisi murid sebanyak 20 orang. Melihat data pada jenjang pendidikan SD/MI, terlihat bahwa fasilitas pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanah Laut cukup memadai dimana persebarannya berada di seluruh wilayah kecamatan dan ditunjang dengan ketersediaan guru dan ruang kelas yang cukup memadai.

Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	20	2.833	189	145	15	20
2.	Takisung	24	3.566	226	181	16	20
3.	Kurau	15	1.434	138	104	10	14
4.	Bumi Makmur	17	1.779	189	122	9	15
5.	Bati-bati	28	5.180	340	232	15	22
6.	Tambang Ulang	13	1.890	119	86	16	22
7.	Pelaihari	46	8.396	566	398	15	21
8.	Bajuin	19	2.132	175	130	12	16
9.	Batu Ampar	22	3.160	206	167	15	19
10.	Jorong	22	3.940	199	183	20	22
11.	Kintap	28	5.730	278	258	21	22
Jumlah		254	40.040	2.625	2.006	15	120

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah unit sekolah pada tahun 2017 adalah sebanyak 74 unit, yang terdiri dari 48 unit SMP negeri, 5 unit SMP swasta, 6 unit MTs negeri, dan 15 unit MTs swasta. Dari 74 unit SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 560 unit ruang kelas. Wilayah dengan jumlah unit SMP/MTs terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 12 unit, diikuti Kecamatan Bati-Bati sebanyak 10 unit, dan Kecamatan Jorong sebanyak 9 unit. Siswa yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 13.988 orang, dengan guru yang mengampu sebanyak 1.122 orang. Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 1 : 12, yang berarti bahwa 1 guru SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 12 orang murid, sedangkan rasio antara murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 25, yang berarti bahwa 1 unit ruang kelas menampung sebanyak 25 murid.

Tabel 2.34 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	8	1.186	126	30	9	40
2.	Takisung	6	1.030	95	50	11	21
3.	Kurau	4	615	58	29	11	21
4.	Bumi Makmur	3	454	36	22	13	21
5.	Bati-bati	10	2.087	163	76	13	27
6.	Tambang Ulang	4	493	38	18	13	27
7.	Pelaihari	12	3.159	230	123	14	26
8.	Bajuin	4	679	54	33	13	21
9.	Batu Ampar	7	1.355	116	64	12	21
10.	Jorong	9	1.222	94	52	13	24
11.	Kintap	7	1.708	112	63	15	27
Jumlah		74	13.988	1.122	560	12	25

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang

baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut:

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Polindes
1.	Panyipatan	-	-	2	25	-	2
2.	Takisung	-	-	1	26	-	-

3.	Kurau	-	-	2	25	-	2
4.	Bumi Makmur	-	-	1	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	2	25	-	3
6.	Tambang Ulang	-	-	1	19	-	-
7.	Pelaihari	1	3	3	52	9	8
8.	Bajuin	-	-	2	22	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	1	23	-	-
10.	Jorong	-	-	2	27	-	1
11.	Kintap	-	-	2	29	-	1
Jumlah		1	3	19	273	9	17

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Polindes. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 1 unit rumah sakit, 3 unit rumah bersalin, 3 unit Puskesmas, 52 unit Posyandu, 9 unit klinik balai kesehatan, dan 8 unit Polindes. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 19 unit. Sementara itu, terdapat 10 kecamatan yang memiliki Posyandu, dan 1 kecamatan tidak memiliki Posyandu yaitu Kecamatan Bumi Makmur.

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara rinci, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Lainnya
1.	Panyipatan	4	13	14	2	2
2.	Takisung	3	14	14	1	3
3.	Kurau	2	12	12	1	3
4.	Bumi Makmur	3	8	8	1	1
5.	Bati-bati	6	25	25	3	4

6.	Tambang Ulang	3	6	12	1	1
7.	Pelaihari	39	205	106	45	18
8.	Bajuin	6	18	19	2	4
9.	Batu Ampar	4	18	17	2	3
10.	Jorong	4	19	18	2	5
11.	Kintap	8	29	30	3	4
Jumlah		82	367	275	63	48

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Terkait dengan jumlah tenaga medis pada tahun 2017, tenaga medis di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Jumlah dokter spesialis pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 orang yang berada di Kecamatan Pelaihari dan sebagian besar ditempatkan di RSUD H. Boejasin Pelaihari. Untuk dokter umum, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 58 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan jumlah dokter gigi adalah sebanyak 14 orang yang tersebar di 8 kecamatan.

Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Panyipatan	-	2	2
2.	Takisung	-	2	1
3.	Kurau	-	2	-
4.	Bumi Makmur	-	3	-
5.	Bati-bati	-	5	1
6.	Tambang Ulang	-	2	1
7.	Pelaihari	10	25	4
8.	Bajuin	-	4	2
9.	Batu Ampar	-	3	1
10.	Jorong	-	4	-
11.	Kintap	-	6	2
Jumlah		10	58	14

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah dokter, pada tahun 2016 Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan memiliki 74 dokter yang terbagi menjadi dokter spesialis sebanyak 17 orang, dokter umum sebanyak 41 orang, dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Dilihat menurut kecamatan, secara keseluruhan Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah dokter terbanyak yakni 17 dokter spesialis, 15 dokter umum, dan 6 orang dokter gigi.

Penolong Kelahiran

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, baik desa yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, seluruh proses persalinannya menggunakan jasa tenaga kesehatan. Wilayah perdesaan, kelahiran yang dibantu oleh dokter adalah sebesar 21,01%, sedang yang dibantu bidan sebesar 78,99%. Untuk wilayah perkotaan, penolong kelahiran yang dibantu dokter sebesar 49,83% dan yang dibantu bidan sebesar 50,17%.

Tabel 2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Klasifikasi Desa	Dokter	Bidan	Jumlah
1.	Perdesaan	21,01	78,99	100,00
2.	Perkotaan	49,83	50,17	100,00

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2016, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,4% balita

telah mendapat imunisasi BCG, 79,2% balita telah mendapatkan imunisasi campak, 89,8% balita telah mendapat imunisasi DPT 1, 96,7% balita telah mendapat imunisasi polio 1, dan 85% balita telah mendapat imunisasi hepatitis B 3. Secara keseluruhan, imunisasi BCG merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Hepatitis B 3 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dimana dari 12 jenis imunisasi yang diberikan, terdapat 11 jenis imunisasi yang persentasenya lebih dari 90%, sedangkan imunisasi campak merupakan jenis imunisasi dengan persentase terendah yaitu sebesar 76,92%.

Tabel 2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Jenis Imunisasi	2014	2015	2016	2017
1.	BCG	95,37	96,45	95,40	95,23
2.	Campak	79,33	87,58	79,20	76,92
3.	DPT 1	91,29	88,03	89,80	93,18
4.	DPT 2	87,79	81,02	88,20	93,18
5.	DPT 3	85,86	52,16	81,20	93,18
6.	Polio 1	91,02	97,80	96,70	95,86
7.	Polio 2	79,77	92,44	89,40	95,86
8.	Polio 3	77,12	65,76	84,00	95,86
9.	Polio 4	-	-	78,40	95,86
10.	Hepatitis B1	88,42	83,98	85,00	93,55
11.	Hepatitis B2	67,82	73,10	81,70	93,55
12.	Hepatitis B3	63,56	52,48	71,10	93,55

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016, yaitu hipertensi primer, ISPA, Dyspepsia, Nasopharingitis Akut, Demam, Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal, Gastritis, Cepalgia, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, dan Myalgia. Pada tahun 2017, jenis penyakit yang paling banyak diderita adalah hipertensi primer yaitu sebanyak 34.876 kasus, disusul ISPA sebanyak 17.958 kasus, dan dyspepsia sebanyak 15.611 kasus.

Tabel 2.40Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1.	Hipertensi Primer	43.876
2.	ISPA	17.958
3.	Dyspepsia	15.611
4.	Nasopharingitis Akut	12.883
5.	Demam	9.249
6.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	8.321
7.	Gastritis	7.120
8.	Cepalgia	5.721
9.	Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental	3.866
10.	Myalgia	3.452

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain itu, penyakit lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria. Pada tahun 2016, kasus penyakit diare tercatat mencapai 5.572 kasus, disusul penyakit DBD dengan 397 kasus, TB sebanyak 333 kasus, malaria sebanyak 75 kasus, HIV 5 kasus dan AIDS 3 kasus, serta tidak terdapat kasus IMS di Kabupaten Tanah Laut. Untuk tahun 2017, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 29 kasus dan kasus DBD sebanyak 43 kasus. Untuk tahun 2017 sendiri, tidak terdapat kasus IMS, diare, TB, dan malaria.

Tabel 2.41Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	HIV/AIDS	DBD
1.	Panyipatan	-	7
2.	Takisung	3	3
3.	Kurau	2	-
4.	Bumi Makmur	1	-
5.	Bati-bati	1	-
6.	Tambang Ulang	2	-
7.	Pelaihari	3	13
8.	Bajuin	2	11
9.	Batu Ampar	2	-
10.	Jorong	9	8
11.	Kintap	4	1
Jumlah		29	43

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2014-2017 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2014, jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.094 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 289 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 2 bayi. Untuk tahun 2017, jumlah bayi lahir sebanyak 6.367 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 390 bayi dan yang dirujuk sebanyak 49 kasus. Sementara itu, bayi dengan gizi buruk di tahun 2017 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

Tahun	Bayi Lahir	BBLR	BBLR Dirujuk	Gizi Buruk
2014	6.094	289	-	2
2015	6.248	289	-	2
2016	6.094	357	158	2
2017	6.367	390	49	1

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kunjungan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2014-2017 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.609 ibu hamil menjadi sebanyak 7.728. Pada tahun 2017, dari 7.728 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.045 ibu hamil dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 5.966 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.175 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 5.612 ibu hamil.

Tabel 2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi
2014	6.609	6.899	5.561	-	5.625
2015	6.425	6.833	5.668	1.033	5.611
2016	6.608	6.742	5.431	1.204	5.561
2017	7.728	7.045	5.966	1.175	5.612

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 1 kasus yaitu di Kecamatan Panyipatan. Sementara itu, jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 6.367 bayi lahir hidup dan bayi lahir mati sebanyak 56 kasus. Jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 10 kasus, disusul Kecamatan Bati-bati sebanyak 9 kasus, dan Kecamatan Kintap sebanyak 7 kasus. Pada bayi berumur 0-6 hari, kematian yang disebabkan oleh asfiksia sebanyak 12 kasus, BBLR dan premature sebanyak 34 kasus, dan penyebab lainnya sebanyak 19 kasus. Untuk bayi berumur 7-28 hari, terdapat kematian yang disebabkan oleh BBLR dan premature sebanyak 4 kasus penyebab lainnya sebanyak 9 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi berumur 29 hari – 1 tahun sebanyak 11 kasus.

Tabel 2.44Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Jumlah Kematian Ibu	Bayi Lahir Mati
1.	Panyipatan	429	1	5
2.	Takisung	533	-	4
3.	Kurau	232	-	2
4.	Bumi Makmur	230	-	2
5.	Bati-bati	858	-	9
6.	Tambang Ulang	344	-	6
7.	Pelaihari	1.386	-	10
8.	Bajuin	330	-	2
9.	Batu Ampar	455	-	5
10.	Jorong	666	-	4
11.	Kintap	914	-	7
Jumlah		6.377	1	56

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan baik dari segi biaya maupun pelayanan. Oleh karena itu kepemilikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat bermanfaat sekali terutama untuk memproteksi kesehatan masyarakat. Penduduk kabupaten Tanah Laut tahun 2017 yang memiliki

jaminan kesehatan daerah salah satunya menggunakan KTP ketika berobat meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,23% sedangkan tahun 2016 hanya sebesar 11,53%. Namun sangat disayangkan, masih terdapat 57,86% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Hanya 13,95% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan Non PBI dan sebesar 6,74% memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.45 Persentase Penduduk Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Jenis Jeminan Kesehatan	2016	2017
BPJS Kesehatan Non PBI	19,73	13,95
BPJS Kesehatan PBI	8,02	6,74
Jamkesda	11,53	18,23
Lainnya	0,22	3,22
Tidak punya jaminan kesehatan	61,48	57,86

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perilaku Merokok

Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 21,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang merokok, sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, 41,10% penduduk laki-laki yang berusia 5 tahun ke atas merokok. Rata-rata penduduk tersebut merokok dengan jumlah batang per minggu sekitar 113 batang. Persentase merokok pada penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan indikator proksi (Indikator 3.A.1) untuk memantau SDGs Target 3.A yaitu memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Kriteria indikator merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang digunakan adalah merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dan rokok yang dihisap meliputi tembakau maupun cerutu. Jika dilihat pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, ada sebanyak 27,83% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang merokok, dan rata-rata mereka merokok sebanyak 113 batang. Uniknya, jika dilihat dari kuintil pengeluaran, ternyata semakin besar pengeluaran suatu rumah tangga, maka penduduk dalam rumah tangga tersebut cenderung merokok. Selanjutnya jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun

ke atas, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD merupakan kelompok penduduk dengan proporsi perokok terbesar, yaitu sebanyak 30,57%.

Tabel 2.46 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Aktivitas Merokok di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Terakhir	Persentase Perokok	Rata-rata Dihisap per Pekan
Tidak pernah sekolah	28,69	109
SD	30,57	122
SMP	25,39	112
SMA	25,78	105

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2017, panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yang berada pada kondisi baik yakni sepanjang 680,17 km, dalam kondisi sedang yakni sepanjang 303,80 km, dalam kondisi rusak yakni sepanjang 715,28 km, dan dalam kondisi rusak berat yakni sepanjang 127,39 km. secara keseluruhan, Panjang jalan yang dikelola oleh Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 1.826,63 km.

Tabel 2.47 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

Kondisi Jalan			
Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
680,17	303,80	715,28	127,39

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pelaihari merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yakni sepanjang 268,86 km. Kecamatan Kintap memiliki kondisi jalan rusak terpanjang di Kabupaten Tanah Laut yakni sepanjang 111,91 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, Kecamatan Takisung merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan rusak berat terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yakni sebesar 23,47 km.

Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1.	Panyipatan	43,89	42,11	74,20	11,81
2.	Takisung	68,26	23,24	39,95	23,47
3.	Kurau	8,72	10,81	21,99	3,98
4.	Bumi Makmur	14,68	6,18	25,06	7,07
5.	Bati-Bati	45,34	21,81	62,83	8,21
6.	Tambang Ulang	26,07	22,52	62,39	6,53
7.	Pelaihari	268,86	38,94	95,60	21,15
8.	Bajuin	23,08	17,45	70,61	7,86
9.	Batu Ampar	75,37	33,85	68,35	7,95
10.	Jorong	50,70	26,50	82,39	17,07
11.	Kintap	55,19	60,39	111,91	12,30
Jumlah		680,17	303,80	715,28	127,39

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dilihat berdasarkan jenis permukaan, sepanjang 816,57 km jalan di Kabupaten Tanah Laut memiliki permukaan aspal, sepanjang 917,12 km jalan memiliki permukaan kerikil, dan sepanjang 92,95 km memiliki permukaan tanah. Apabila dirinci per kecamatan pada tahun 2017, Kecamatan Pelaihari memiliki jalan dengan permukaan aspal terpanjang yakni sepanjang 269,60 km dan Kecamatan Kurau memiliki jalan dengan permukaan aspal terpendek yakni sebesar 15,36 km. Kemudian, Kecamatan Kintap memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpanjang yakni sepanjang 149,45 km dan Kecamatan Bumi Makmur memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpendek yakni sepanjang 21,30 km. Kecamatan Kintap juga menjadi kecamatan yang memiliki jalan dengan permukaan tanah

terpanjang yakni sepanjang 18,81 km dan Kecamatan Bajuin serta Kecamatan Jorong tidak memiliki jalan dengan permukaan tanah.

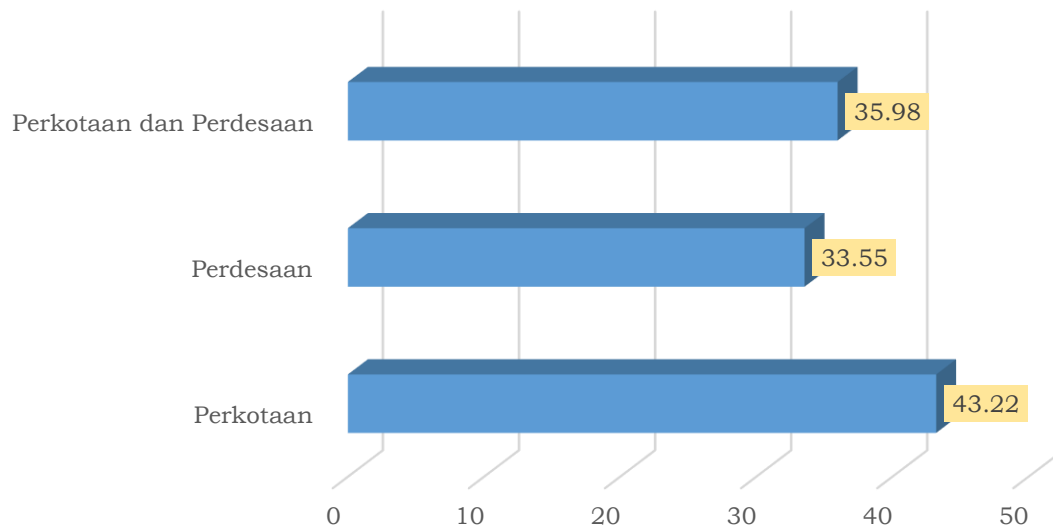
Tabel 2.49 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan		
		Aspal	Kerikil	Tanah
1.	Panyipatan	53,03	113,83	5,15
2.	Takisung	93,93	48,91	12,08
3.	Kurau	15,36	23,89	6,25
4.	Bumi Makmur	21,97	21,30	9,71
5.	Bati-Bati	54,84	79,68	3,67
6.	Tambang Ulang	28,09	76,74	12,68
7.	Pelaihari	269,60	141,22	13,72
8.	Bajuin	31,73	87,27	-
9.	Batu Ampar	81,47	93,19	10,86
10.	Jorong	95,02	81,64	-
11.	Kintap	71,53	149,45	18,81
Jumlah		816,57	917,12	92,94

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sanitasi Layak

Sanitasi menjadi isu yang penting untuk dibahas karena menjadi ukuran kesejahteraan rumah tangga yang berdampak langsung terhadap kesehatan. Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, diare masih merupakan penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun. Hal tersebut terjadi karena peran penting kebersihan sering diabaikan, padahal kematian dan penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat dicegah salah satunya melalui sanitasi yang layak. Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang memengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, dan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik atau SPAL (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

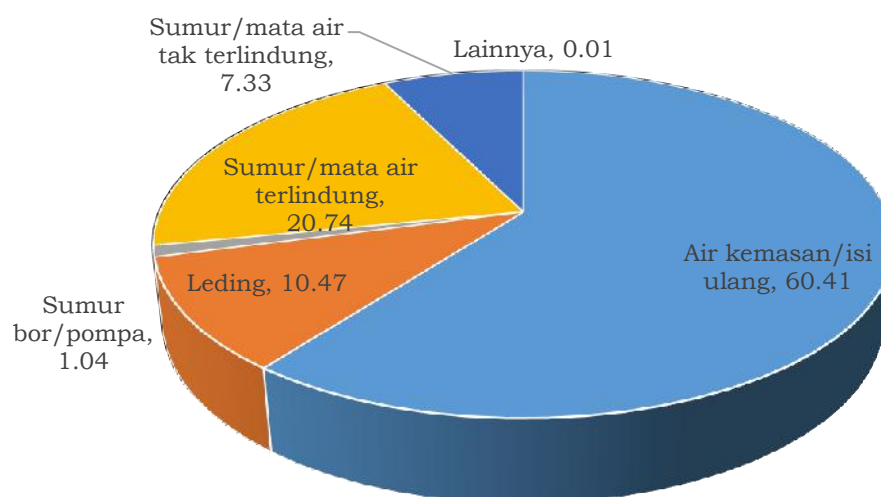
Gambar 2.16 menunjukkan bahwa sudah ada 35,98% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak di daerah perkotaan jauh lebih tinggi yakni 43,22% dibandingkan dengan rumah tangga di daerah perdesaan yang hanya sebesar 33,55%. Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih dari pihak terkait untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di daerah perdesaan. Tingginya angka sanitasi yang tidak layak di Kabupaten Tanah Laut, bahkan di daerah perdesaan mencapai 66,45 persen diduga karena kurangnya persentase rumah tangga pada salah satu indikator yang menjadi penilaian sanitasi layak yaitu tempat pembuangan akhir tinja. Banyak ditemukan rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang masih menggunakan pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah. Persentase rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja pada tahun 2017 ada sebanyak 57,29%. Selain itu, masih ada 10,61% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan jenis kloset berupa cemplung atau cubluk.

Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah(BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut menggunakan air kemasan atau air isi ulang sebagai sumber air minum utama, yaitu sebanyak 60,41%. Selanjutnya adalah air sumur atau mata air terlindung sebanyak 20,74%, menurun dari tahun 2016. Penurunan angka persentase penggunaan sumur pada rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut besar kemungkinan karena rumah tangga mulai beralih ke sumber air minum air kemasan bermerek atau air isi ulang dan sumber air minum lainnya seperti mata air. Kondisi ini sangat terlihat dari fenomena yang cukup menarik, dimana tahun 2016 pengguna air sumur atau mata air terlindung di Kabupaten Tanah Laut ada sebanyak 68,87%sedangkan pengguna air kemasan atau air isi ulang ada sebanyak 20,64%. Kondisi tersebut berkebalikan dengan kondisi di tahun 2017.



Gambar 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2017

Sumber: Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Selanjutnya berdasarkan jenisnya sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri

dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak lebih dari sama 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat. Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55% rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58% untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51%. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan akan papan yang ditunjukkan melalui perumahan diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kualitas dari perumahan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dari perumahan masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kualitas dari perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yaitu:

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Pada tahun 2015 sebagian besar rumah di Kabupaten Tanah Laut merupakan milik sendiri dengan persentase sebesar 88,79%. Namun, pada tahun 2016, terjadi sedikit penurunan menjadi 87,35%. Pada posisi kedua yaitu status bebas sewa dengan persentase sebesar 5,06% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 7,03%. Status rumah lainnya yakni kontrak/sewa sebesar 1,85% pada tahun 2015 dan 4,48% pada tahun 2016, rumah dinas sebesar 4,22% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 0,92% pada 2016, serta status lainnya.

Tabel 2.50 Persentase Rumah Tangga menurut Status Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Status Tempat Tinggal	2015	2016	2017
Milik Sendiri	88,79	87,35	82,69
Kontrak/Sewa	1,85	4,48	5,28
Bebas Sewa	5,06	7,03	8,67
Dinas	4,22	0,92	-
Lainnya	0,17	0,21	3,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Secara umum sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 memiliki rumah sendiri yaitu sebanyak 82,69%. Sisanya hanya 11,31% rumah tangga yang menempati rumah berstatus bukan milik rumah sendiri. Pada tahun 2017 rumah tangga yang bukan menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 8,67% menempati rumah bebas sewa, 5,28% menempati rumah kontrak atau sewa, dan sisanya sebanyak 3,36% menempati rumah berstatus lainnya seperti rumah dinas. Rumah tangga yang sudah memiliki rumah dengan status kepemilikan milik sendiri dapat dikatakan relatif tinggi yaitu sebanyak 8 dari 10 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017, dan sisanya menempati rumah bukan milik sendiri. Beberapa alasan yang memungkinkan rumah tangga tidak menempati rumah sendiri diantaranya adalah karena belum memiliki atau belum mampu, faktor jarak atau agar dekat dengan keluarga, dekat dengan tempat kerja, sarana transportasi atau sarana lain yang lebih baik, dan alasan lainnya.

Luas Lantai

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10m². Artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 4 orang, idealnya memiliki luas lantai minimal 40 m². Menurut ketentuan rumah sederhana sehat (RS Sehat) keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Luas Lantai Per Kapita	2015	2016	2017
Kurang dari 10 m ²	13,82	10,88	4,17
10 atau lebih m ²	86,18	89,12	95,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2015 hingga 2016 persentase rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki luas lantai kurang dari 10 m² mengalami penurunan, dari 13,82% menjadi 10,88%. Sedangkan pada rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih dari 10 m² mengalami peningkatan dari 86,18% menjadi 89,12%. Menurut penjelasan yang tertera pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut (2016) bahwa mengacu pada kementrian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi syarat sehat apabila memiliki luas lantai perkapita minimal 8 m². Pada tahun 2017 tercatat masih ada 4,17 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai tempat tinggalnya kurang dari 7,2 m² per anggota rumah tangga. Hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Berdasarkan hal itu, maka sebagian besar rumah di Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi persyaratan rumah sehat dilihat dari luas lantainya.

Jenis Lantai Tempat Tinggal

Lantai adalah bagian bawah atau dasar yang menjadi alas suatu ruangan baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin. Selain luas lantai per kapita indikator lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas rumah juga dapat dilihat dari jenis lantai. Lantai harus kuat untuk menahan beban di atasnya, tidak licin, stabil ketika dipijak, permukaan lantai mudah dibersihkan. Secara umum, rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang menggunakan jenis lantai dari semen, ubin, atau tanah.

Jika dilihat berdasarkan jenis lantai tempat tinggal, pada tahun 2015 hingga 2016 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki lantai yang berjenis bambu, kayu, dan papan kualitas rendah dengan persentase sebesar 30,50% pada tahun 2015 dan menjadi 35,55% pada tahun 2016. Selain itu, jenis lantai lain yang banyak dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni dengan jenis semen dan bata merah dengan persentase 25,74% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 29,85%. Jenis marmer, granit, dan keramik juga dimiliki oleh rumah tangga dengan persentase sebesar

22,40% pada tahun 2015 namun menurun pada tahun 2016 menjadi 22,23%. Jenis lantai lain yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni parket, vinil permadani, ubin, tegel, teraso, kemudian kayu, papan kualitas tinggi, dan tanah lainnya.

Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Lantai Terluas	2015	2016	2017
Marmer, Granit, Keramik	22,40	22,23	26,28
Parket, Vinil, Permadani, Ubin, Tegel, Teraso	0,66	0,54	-
Kayu, Papan Kualitas Tinggi	17,46	11,09	44,12
Semen, Bata Merah	25,74	29,85	28,02
Bambu, Kayu, Papan Kualitas Rendah	30,50	35,55	-
Tanah, lainnya	1,21	0,74	1,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan data Susenas 2017 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan angka 99,95% yang artinya hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki rumah dengan lantai terluas selain tanah. Konsentrasi jenis lantai terluas yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut terbagi menjadi 3, yaitu rumah dengan lantai terluas berupa marmer, granit, atau keramik, kemudian rumah tangga yang lantai terluasnya berupa semen atau bata merah, dan sebagian lagi adalah rumah tangga dengan lantai terluas berupa kayu dengan kualitas rendah. Jenis lantai yang digunakan oleh rumah tangga tentu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di daerah tersebut, namun secara umum penggunaan jenis lantai yang bukan tanah sudah dapat dikatakan baik.

Jenis Atap Terluas

Atap merupakan bagian bangunan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi penghuni rumah secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Kemampuan atap dalam melindungi penghuni dari cuaca yang tidak diinginkan tergantung dari jenis bahan dasar atap. Berdasarkan jenis atap terluas, maka pada tahun 2015 sebesar 36,13% rumah tangga di Kabupaten

Tanah Laut memiliki jenis atap seng. Selanjutnya, sebesar 33,11% rumah tangga memiliki jenis atap asbes. Pada tahun 2016, sebagian besar rumah tangga masih menggunakan jenis atap seng yakni sebesar 40,01% dan penggunaan jenis atap asbes mengalami penurunan menjadi 27,91%. Jenis atap lain yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni beton, genteng, bambu, kayu, dan sirap, serta jerami ijuk, daun, rumbia, dan lainnya. Jenis atap yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni beton.

Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Atap Terluas	2015	2016	2017
Beton	0,01	0,54	-
Genteng	16,03	11,78	11,31
Asbes	33,11	27,91	28,91
Seng	36,13	43,01	47,79
Bambu, Kayu, Sirap	12,13	13,00	11,71
Jerami, Ijuk, Daun, Rumbia, Lainnya	2,59	3,76	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang sudah tidak menggunakan atap berupa jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya. Penggunaan atap berupa jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan karena terkait sirkulasi yang digunakan dan penggunaan atap berupa bahan tersebut dapat mengurangi jarak antara langit-langit dengan atapnya. Pada tahun 2017, rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan atap berupa seng ada sebanyak 47,79% rumah tangga. Kemudian terbanyak kedua adalah penggunaan atap berupa asbes yaitu sebanyak 28,91%. Pengguna seng di Kabupaten Tanah Laut meningkat dari dua tahun terakhir dari yang hanya 36,13%, di tahun 2016 meningkat sebesar 6,89% dari persentase sebelumnya menjadi 43,01%, dan di tahun 2017 menjadi 47,79%.

Jenis Dinding Terluas

Dinding yang baik harus tegak lurus agar dapat memikul beban yang berat sendiri, beban tekanan angin dan bila sebagai dinding pemikul harus dapat memikul beban di atasnya, dinding pun harus terpisah dari pondasi oleh lapisan yang kedap air agar air tanah tidak meresap naik sehingga dinding terhindar dari

basah, lembab, dan tampak bersih tidak berlumut. Jenis bahan dinding yang kualitasnya paling baik adalah tembok. Berdasarkan jenis dinding terluas, maka sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki rumah dengan dinding berjenis kayu dan batang kayu, yakni sebesar 62,15% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 58,52%. Jenis dinding lain yang banyak digunakan adalah tembok, plasteran, anyaman bambu, dan kawat yakni sebesar 37,43% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada 2016 menjadi sebesar 39,99%.

Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Dinding	2015	2016	2017
Tembok, Plasteran Anyaman Bambu, Kawat	37,43	39,99	43,13
Kayu, Batang Kayu	62,15	58,52	55,54
Bambu, Anyaman Bambu, Lainnya	0,41	1,49	1,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase tertinggi dinding terluas yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut adalah berupa kayu atau batang kayu yaitu sebesar 55,54 persen. Meskipun demikian, angka tersebut sudah berkurang dari tahun 2016 yang sebanyak 58,52%. Salah satu penyebabnya adalah karena rumah tangga mulai beralih pada tembok, plasteran anyaman bambu, dan kawat. Rumah tangga yang menggunakan tembok pada tahun 2017 ada sebanyak 43,13%, meningkat dari tahun 2016 yang sebanyak 39,99%. Hal ini ditengarai bahwa terjadi peningkatan taraf hidup rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut karena sudah beralih ke dinding yang lebih baik dan kuat yaitu tembok.

Pengelolaan Persampahan

Kota yang bersih merupakan salah satu tuntutan masyarakat dan harus menjadi salah satu prioritas pelayanan pemerintah. Dalam rangka menjaga kebersihan kota, masyarakat juga dituntut ikut serta dalam menjaga kebersihan kota melalui pola hidup yang bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentunya difukung oleh berbagai sarana dan prasarana untuk menuju kota yang bersih dan membuat warganya nyaman. Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah diantaranya adalah truk sampah, truk ekskavator, truk amrol, loader,

dozer, bak kontainer, truk ninja, tangka air, truk dump pick up, bak sampah, TPA, tosa hercules, tractor mini, dan tenaga lapangan. Dalam kurun waktu 2015-2017, terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung terciptanya kebersihan kota terus meningkat dibuktikan dengan penambahan beberapa sarana seperti truk amrol yang meningkat menjadi sebanyak 27 unit, tosa hercules menjadi sebanyak 13 unit, dan bertambahnya tenaga lapangan menjadi sebanyak 163 unit.

Tabel 2.55 Persentase Rumah Tangga menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Sarana dan Prasarana	2015	2016	2017
Truk sampah	3	3	3
Truk ekskavator	1	1	1
Truk amrol	7	7	27
Loader	-	1	1
Dozer	1	1	1
Bak kontainer	15	13	11
Truk ninja	-	-	-
Tangki air	1	2	2
Truk dump pick up	2	2	2
Bak sampah	121	121	121
TPA	1	1	1
Tosa hercules	3	3	13
Traktor mini	-	-	-
Tenaga lapangan	79	85	163

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

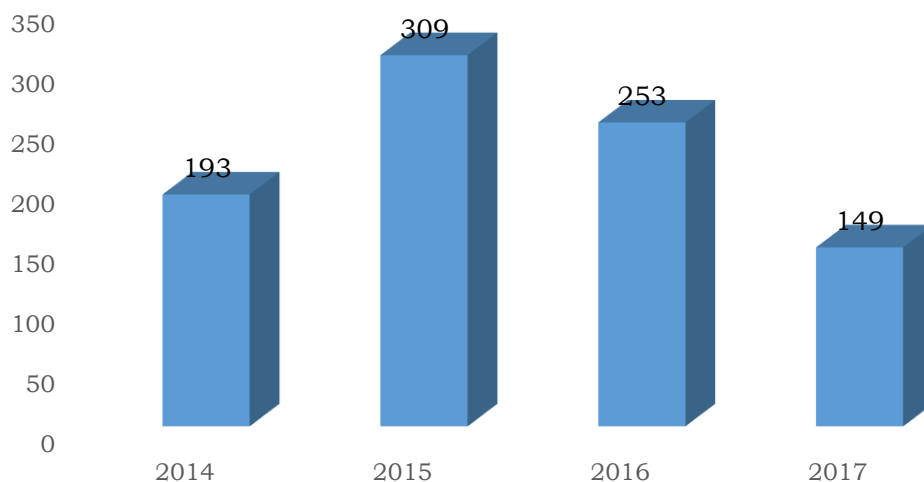
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Angka Kriminalitas dan Tindak Pidana

Angka ini menunjukkan jumlah kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah. Dalam 3 tahun terakhir, kasus kriminalitas yang terjadi di

Kabupaten Tanah Laut fluktuatif. Pada tahun 2014, jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 193 kasus. Kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2015 yakni sebesar 309 kasus, dan mengalami penurunan pada 2016 yakni sebesar 253 kasus. Selanjutnya di tahun 2017, jumlah tindak pidana di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi sebanyak 149 kasus. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Tanah Laut terjadi perbaikan ketentraman dan ketertiban umum (Gambar 2.18).



Gambar 2.18 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tanah Laut (kasus), 2014-2017
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Menurut data yang berasal dari masing-masing kepolisian sektor, pada tahun 2014 tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Jorong yakni sebesar 75 kasus. Kemudian pada tahun 2015, tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 75 kasus, dan pada tahun 2016 tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 58 kasus. Pada tahun 2017, jumlah tindak pidana terbanyak di Kabupaten Tanah Laut terjadi di Kecamatan Kintap dengan kasus sebanyak 21 kasus, diikuti Kecamatan Bati-bati dan Jorong masing-masing sebanyak 17 kasus, dan Kecamatan Takisung dan Pelaihari masing-masing sebanyak 16 kasus. Sementara itu, kasus tindak pidana terendah terjadi di Kecamatan Bajuin yaitu sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.56 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Kepolisian Sektor	2014	2015	2016	2017
1.	Panyipatan	1	3	5	15

No.	Kepolisian Sektor	2014	2015	2016	2017
2.	Takisung	6	8	16	16
3.	Kurau	5	20	12	10
4.	Bumi Makmur*	-	-	-	5
5.	Bati-Bati	29	38	38	17
6.	Tambang Ulang	17	26	24	15
7.	Pelaihari	26	44	28	16
8.	Bajuin*	-	-	-	2
9.	Batu Ampar	25	36	24	15
10.	Jorong	75	59	48	17
11.	Kintap	9	75	58	21
Jumlah		193	309	253	149

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

*: Bumi Makmur bergabung dengan Kurau; Bajuin bergabung dengan Pelaihari

Penyelesaian Tindak Pidana

Angka ini menunjukkan jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dijadikan indikator dengan mengetahui seberapa banyak kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2014 dan 2015, penyelesaian tindak pidana terbesar terjadi di Kecamatan Jorong yakni 51% dan 44% secara berurutan. Sedangkan pada tahun 2016, penyelesaian tindak pidana terbesar terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 41%. Pada tahun 2017, dari kasus pidanan sebanyak 149 kasus, jumlah kasus yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 116 kasus (77,85%). Jika dirinci menurut wilayah, kecamatan dengan persentase penyelesaian tindak pidanan tertinggi adalah Kecamatan Bajuin yaitu sebesar 100%, diikuti Kecamatan Jorong sebesar 88,24%, dan Kecamatan Pelaihari sebesar 87,50%.

Tabel 2.57 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Kepolisian Sektor	2014	2015	2016	2017
1.	Panyipatan	1	9	16	10
2.	Takisung	4	13	21	13
3.	Kurau	3	12	12	8
4.	Bumi Makmur*	-	-	-	2
5.	Bati-Bati	15	18	27	13
6.	Tambang Ulang	12	21	22	12
7.	Pelaihari	20	34	18	14



8.	Bajuin*	-	-	-	2
9.	Batu Ampar	7	15	20	10
10.	Jorong	51	44	37	15
11.	Kintap	7	35	41	17
Jumlah		120	201	214	116

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

*: Bumi Makmur bergabung dengan Kurau; Bajuin bergabung dengan Pelaihari

Agama

Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat merupakan wujud dari sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat khususnya generasi muda, agama dan kepercayaan berguna sebagai tuntunan serta pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih terarah sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Peningkatan kualitas pada sektor agama merupakan bagian dari upaya dalam meningkatkan kualitas manusia. Peningkatan kualitas manusia akan berkontribusi pada upaya pembangunan. Maka dari itu, agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Pada tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Laut memeluk agama Islam yakni sebanyak 315.124 jiwa. Kemudian, pada urutan selanjutnya penduduk pemeluk agama Protestan sebanyak 1.525 jiwa, pemeluk agama Katolik sebanyak 819 jiwa, pemeluk agama Hindu sebesar 1.412 jiwa, dan pemeluk agama Buddha sebesar 255 jiwa. Fasilitas tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 272 masjid, 651 musala, 12 gereja Protestan, 5 gereja Katolik, 4 pura, dan 1 vihara.

Tabel 2.58 Jumlah penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Panyipatan	24.430	86	13	-	-
2.	Takisung	29.395	30	8	-	6
3.	Kurau	12.237	2	-	-	-
4.	Bumi Makmur	13.616	2	-	-	2
5.	Bati-bati	38.388	33	98	-	-
6.	Tambang Ulang	16.427	52	7	14	4
7.	Pelaihari	67.646	316	320	193	231
8.	Bajuin	16.377	214	38	-	-
9.	Batu Ampar	21.607	271	152	802	-

10.	Jorong	34.280	90	28	6	3
11.	Kintap	40.721	429	155	397	9
Jumlah		315.124	1.525	819	1.412	255

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.6 Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka memfasilitasi penduduk miskin, Pemerintah mencanangkan berbagai program perlindungan sosial mulai dari bantuan beras hingga bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Tanah Laut, persentase rumah tangga yang menerima bantuan berupa Raskin/Rastra/BPNT pada tahun 2017 adalah sebesar 33,46%, Program Indonesia Pintar sebesar 10,53%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 11,67%, dan Program Keluarga Harapan sebesar 3,40%.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki maupun menerima jaminan sosial di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 13,48%, meningkat dari tahun 2016 yang hanya 11,79%. Penerima jaminan terbanyak adalah pada jaminan pensiun atau veteran yaitu sebanyak 3,60%. Di wilayah perkotaan, persentase terbesar rumah tangga yang memiliki jaminan sosial adalah berupa jaminan pensiun/veteran yaitu sebesar 11,98%. Sedangkan di daerah perdesaan persentase terbesar rumah tangga yang memiliki jaminan sosial adalah pada jaminan asuransi kecelakaan kerja sebesar 1,66%.

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis Program	Persentase (%)
Raskin/Rastra/BPNT	10,53
Program Indonesia Pintar	10,53
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	11,67
Program Keluarga Harapan	3,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

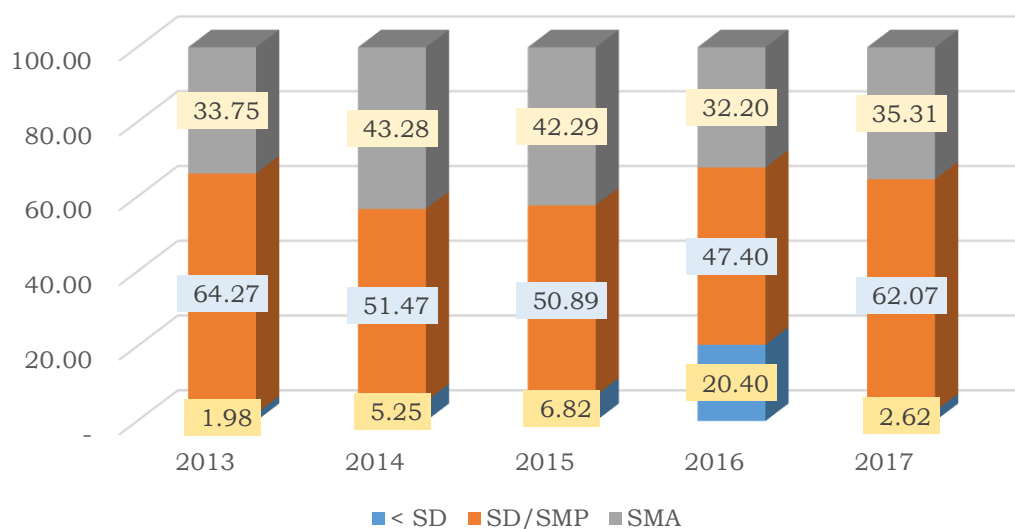
Tabel 2.60 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Maksud Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Jaminan Pensiun/Veteran	11,98	0,79	3,60
Jaminan Hari Tua	5,21	0,56	1,72
Asuransi Kecelakaan Kerja	7,67	1,66	3,17
Jaminan Asuransi Kematian	8,69	0,83	2,80
Pesangon PHK	4,91	1,28	2,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga Miskin

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan seseorang cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Pada tahun 2017 tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh penduduk yang tamat SD/SMP (62,07%). Angka tersebut sebenarnya angka yang terus menurun sejak tahun 2013 yang sebesar 64,27% hingga tahun 2016 mencapai 47,40% namun kembali meningkat di tahun 2017 ini (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

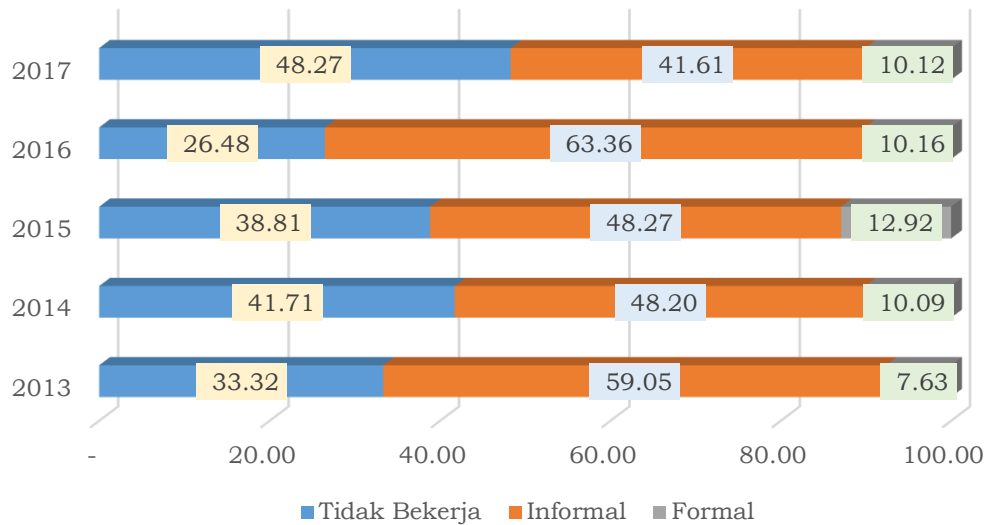
Karakteristik tersebut sejalan dengan fenomena yang sebelumnya terjadi, bahwa penduduk dengan pendidikan yang lebih baik (SMA ke atas) dapat memperbaiki taraf hidup mereka hingga akhirnya berada di atas garis kemiskinan. Dengan adanya hal ini sehingga persentase penduduk miskin yang berpendidikan SD atau SMP ke bawah mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menunjukkan proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu, yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, baik pada kelompok umur 7-12 tahun maupun kelompok umur 13-15 tahun. Di tahun 2017 ada sebanyak 88,52% penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut yang masih bersekolah, padahal beturut-turut 3 tahun sebelumnya mencapai angka 100%. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, ada sebanyak 82,50% penduduk miskin yang sedang bersekolah, juga menurun dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016. Turunnya penduduk miskin yang bersekolah seharusnya menjadi fokus program pemerintah dalam pengentasan penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut, mengingat terjadi penurunan hingga di atas 10 persen pada penduduk miskin yang bersekolah pada normalnya jenjang SD atau berusia 7-12 tahun. Selanjutnya, Angka Melek Huruf (AMH) juga dapat menjadi indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017, AMH penduduk miskin sudah berada pada taraf yang baik yaitu pada angka 99,95% (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin

Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Secara sederhana, pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah dan hal tersebut berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan. Sehingga indikator setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk

melihat karakteristik penduduk miskin yaitu ketenagakerjaan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Gambar 2.20 Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017, di Kabupaten Tanah Laut persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal pada tahun 2017 sebesar 41,61% dan angka ini memiliki kecenderungan fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya meskipun tidak begitu ekstrim. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal berada pada angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 63,35%. Penduduk miskin banyak yang bekerja pada sektor informal sehingga tak jarang sektor informal memunculkan permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Beberapa permasalahan yang seringkali muncul pada sektor informal sehingga membuat kemiskinan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meningkat diantaranya keterbatasan modal dan akses terhadap pasar, belum adanya upaya advokasi yang tumbuh dari dalam sektor informal itu sendiri, pelaku pekerja yang belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat pekerjaan lebih efisien, dan belum adanya wadah yang dapat menampung secara maksimal sektor informal melalui teknologi. Menurunnya penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, namun penduduk miskin yang bekerja di sektor informal jauh lebih banyak daripada sektor informal dapat memunculkan kesimpulan yang ganda (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Di satu sisi, pekerjaan sektor informal dapat menjadi indikasi “penolong” penduduk miskin yang berada mendekati garis kemiskinan dapat memperbaiki taraf hidup mereka, namun dapat juga berarti bahwa penduduk miskin sulit terlepas dari

kemiskinan karena alasan pekerjaan di sektor informal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentu diperlukan analisis lebih lanjut apabila pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan penanganan kemiskinan yang terfokus pada penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Selanjutnya adalah pada penduduk miskin yang tidak bekerja. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja, mencapai angka yang paling tinggi pada periode lima tahun terakhir, yaitu 48,27 persen. ini adalah pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian besar dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi penganggur (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Tertinggi	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak Sekolah	5,16	7,39	2,37	6,94	9,91
SD	6,67	11,96	12,42	9,00	0,05
SMP	28,42	15,25	31,22	21,29	5,04
SMA ke Atas	59,75	65,40	53,99	62,76	85,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan jenjang pendidikan, selama periode tahun 2013 hingga 2017 tren TPT cukup fluktuatif terjadi pada penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan SD. Namun, pada tahun 2017 mencapai pada angka yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 9,91%. Berbeda dengan para pengangguran dengan pendidikan tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, pengangguran di Kabupaten Tanah Laut dengan pendidikan terakhir SD dan SMP mengalami angka yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Terus menurunnya TPT di Kabupaten Tanah Laut ternyata berbanding terbalik dengan TPT pada penduduk yang berpendidikan SMA ke atas. Hal ini akan berdampak pada munculnya pengangguran terdidik di Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.62 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak Sekolah	19,14	26,34	21,54
SD	33,53	29,82	32,30
SMP	21,16	17,64	19,99
SMA ke Atas	26,16	26,19	26,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran terdidik dapat muncul karena ada beberapa faktor diantaranya adalah penduduk dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih suka memilih untuk menunggu pekerjaan yang dirasa cocok dengan pendidikan dan menolak untuk bekerja

dibidang lain, terutama jika upah yang diterima di bawah standar yang diinginkan. Faktor yang kedua adalah kurangnya minat penduduk untuk berwirausaha, mayoritas penduduk yang berpendidikan tinggi terutama pada lulusan universitas bertujuan hanya mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Menjadi seorang wirausaha adalah alternatif yang bijaksana, selain dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat membantu orang lain. Selanjutnya bila usahanya maju dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu lebih banyak orang (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Selain dapat dilihat adanya pengangguran terdidik, hal ini juga bisa menjadi suatu refleksi pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa dalam setahun terakhir, ketersediaan lapangan kerja untuk penduduk yang berpendidikan SD dan SMP telah cukup optimal. Sehingga selanjutnya pemerintah kabupaten Tanah Laut dapat mulai berfokus pada penyediaan lapangan kerja untuk pengangguran yang berpendidikan SD dan pendidikan Menengah Atas. Pemerintah tentu sudah melakukan upaya untuk terus menangani pengangguran di Kabupaten Tanah Laut, namun dengan melihat tren pengangguran terdidik yang terus meningkat, akan lebih baik jika pendidikan wirausaha diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan tinggi, karena cara berpikir/budaya Indonesia masih berpikir bagaimana mencari pekerjaan bukan bagaimana membuat lapangan kerja. Jika setiap lulusan memiliki jiwa wirausaha maka mereka akan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap pengangguran (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Hanya sektor industri yang agak mencolok mengalami perubahan dari angka berkisar pada tiga koma sekian menjadi enam koma sekian (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.63 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Lapangan Pekerjaan	2013	2014	2015	2017
Pertanian	47,36	48,12	48,29	50,99
Pertambangan dan Penggalian	7,61	7,80	3,97	6,50
Industri	3,67	3,78	3,33	6,91
Listrik, Gas, dan Air	0,17	0,19	1,34	0,76
Konstruksi	5,23	4,55	7,75	1,97
Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel	18,37	19,97	18,83	17,39
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,52	3,49	3,53	3,70
Asuransi, Real Estate, Tanah, dan Jasa Perusahaan	2,01	0,77	0,96	1,05
Jasa Kemasyarakatan	12,04	11,33	11,99	10,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan masih menjadi primadona di Kabupaten Tanah Laut yaitu 50,99% di tahun 2017 dan dengan angka yang terus meningkat dari tahun 2013. Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena pemerintah memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, komoditas pangan utama yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan prioritas nasional ketahanan pangan adalah padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut sendiri, komoditas jagung digadang-gadang menjadi komoditas yang seharusnya diunggulkan dari Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, tentu saja dijumpai berbagai permasalahan dan kendala. Secara umum permasalahan tersebut adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang dapat memenuhi peningkatan permintaan penduduk. Seiring dengan meningkatkan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, bisa dipastikan permintaan terhadap produk pertanian akan terus meningkat. Berkaitan dengan produksi pertanian, produktivitas yang relatif lambat peningkatannya dan luas areal tanaman yang

semakin terbatas menjadi penyebab utama rendahnya peningkatan produksi pangan utama. Penyusutan lahan sebagai akibat dari konversi lahan, jaringan irigasi yang rusak, sulitnya memperluas areal tanam baru dan perubahan iklim diduga dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan produksi yang belum sesuai dengan target. Lambatnya peningkatan produktivitas merupakan kendala dalam peningkatan produksi pangan. Penyebabnya antara lain adalah masih terbatasnya difusi benih unggul hasil penelitian dan pengembangan, terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan budidaya yang sesuai dengan anjuran (*good agricultural practices*), dan rendahnya akses petani terhadap sumber pembiayaan. Dengan kondisi demikian, pendampingan penyuluhan dan pelatihan bagi petani menjadi hal penting untuk diperhatikan, disamping perlunya perbaikan kelembagaan perkreditan untuk petani (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya jika dilihat menurut status dalam pekerjaan penduduk pada tahun 2017, terdapat perbedaan pola pada penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja. Penduduk laki-laki yang bekerja memiliki kecenderungan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sedangkan penduduk perempuan berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Dengan kata lain, 3 dari 10 penduduk laki-laki yang bekerja adalah mereka yang dipekerjakan oleh orang lain dengan gaji yang pasti baik sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai. Sedangkan 3 dari 10 penduduk perempuan, hanya menjadi pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Tabel 2.64 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Berusaha Sendiri	27,45	21,74	25,55

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	19,18	10,45	16,28
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,08	2,24	3,47
Buruh/Karyawan/Pegawai	34,12	25,03	31,10
Pekerja Bebas Pertanian	4,08	4,60	4,26
Pekerja Bebas Non Pertanian	3,63	2,18	3,14
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	7,45	33,75	16,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kenyataan ini berdampak pada pekerja rentan atau *vulnerable employment* yaitu pekerja yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pekerja rentan merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka yang jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan Pekerja Bukan Penerima Upah lainnya. Pekerja rentan pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Laut yang berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 61,80%, sedangkan penduduk yang bekerja yang berjenis kelamin perempuan 72,73 persennya adalah pekerja rentan. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka sebaiknya pemerintah dapat memberikan perlindungan secara sosial, jaminan hari tua dan kesejahteraan terhadap para pekerja rentan ini mengingat jumlahnya yang masih relatif besar di Kabupaten Tanah Laut.

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah. Seringkali, masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan seperti ketidakadilan gender terjadi sebagai akibat dari adanya sistem dan struktur sosial. Selain itu, masih adanya anggapan masyarakat mengenai perbedaan gender juga menjadi pemicu adanya ketidakadilan gender. Apabila keadilan gender tercapai, tentunya akan tercipta keseimbangan proporsi dan siklus antara perempuan dan laki-laki sehingga mewujudkan kondisi yang serasi, seimbang, dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disingkat menjadi IPG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan pencapaian kemampuan dasar pembangunan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks ini hampir serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun memperhatikan komponen ketimpangan gender yang mengarah pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPG sama dengan nilai IPM.

Tabel 2.65 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rasio IPG terhadap IPM (%)
2010	80.63	71.16	113.30
2011	83.41	72,00	115.84
2012	85.49	72.75	117.51
2013	86.88	73.46	118.26
2014	87.68	66,50	131.84
2015	87.50	66,99	130.61
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tren dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2010 hingga 2015 cenderung positif atau mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPG berada pada angka 80,63% yang kemudian meningkat hingga mencapai angka 87,50% pada tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun yang sama justru cenderung mengalami penurunan, yakni pada tahun 2010 berada pada angka 71,16% menurun hingga berada pada angka 66,99% di tahun 2015. Jika dilihat dari sisi kesenjangan gender, rasio IPG terhadap IPM menunjukkan rasio lebih dari 100% yang berarti bahwa masih terdapat kesenjangan gender di Kabupaten Tanah Laut dimana cenderung kepada penduduk perempuan. Hal tersebut juga ditunjukkan pula melalui angka IPG yang lebih besar dari angka IPM selama kurun waktu 2010-2015. Rasio IPG terhadap IPM di Kabupaten Tanah Laut berkisar pada angka 113-131%.

Partisipasi Perempuan di Kursi DPRD

Menurut BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), jumlah anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 35 orang yang terdiri dari 30 anggota laki-laki dan 5 anggota perempuan. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara anggota DPRD perempuan dan laki-laki adalah 1:6, dimana anggota laki-laki masih mendominasi kursi DPRD. Partai politik yang memiliki anggota DPRD perempuan pada tahun 2017 adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan Hanura dengan masing-masing anggota sebanyak 1 orang perempuan. Jika dilihat berdasarkan persentase, anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 14,29%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada lembaga DPRD masih kurang, karena masih didominasi oleh anggota laki-laki.

Tabel 2.66Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2017

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PDI-P	7	1	8
2.	Golkar	3	1	4
3.	Gerindra	5	-	5
4.	Demokrat	2	-	2
5.	Nasdem	3	1	4
6.	PPP	3	-	3
7.	PKB	1	1	2
8.	Hanura	1	1	2
9.	PKPI	1	-	1
10.	PAN	2	-	2
11.	PKS	2	-	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi penduduk perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat melalui jumlah pegawai negeri sipil (PNS) perempuan pada dinas/instansi pemerintah. Menurut data BPS Kabupaten Tanah Laut, jumlah pegawai negeri sipil pada dinas/instansi pemerintah yakni sebanyak 5.273 orang yang terdiri dari 2.829 PNS perempuan dan 2.444 PNS laki-laki. Tercatat bahwa PNS dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 385 orang daripada PNS dengan jenis kelamin laki-laki. Dinas/instansi dengan jumlah PNS perempuan terbanyak yakni guru, tata usaha, dan penjaga sekolah dengan jumlah 1.712. selain itu, instansi yang lebih banyak

didominasi perempuan pada tahun 2017 adalah UPTS Puskesmas dimana jumlah pegawai perempuan sebanyak 407 orang, sedangkan laki-laki hanya berjumlah 162 orang. Hal yang sama juga terjadi di instansi kesehatan lainnya yaitu RSUD H. Boejasin dimana pegawai perempuan berjumlah 167 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 90 orang. Persentase pegawai perempuan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa partisipasi penduduk perempuan di lembaga pemerintah sudah cukup baik.

Tabel 2.67 Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Dinas/Instansi Pemerintah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat Daerah	83	37	120
Sekretariat DPRD	26	11	37
Sekretariat KPU	7	3	10
Inspektorat	18	14	32
Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM	35	16	51
Badan Kesbangpol	17	11	28
BPBD	13	1	14
Badan Pendapatan Daerah	19	12	31
BPKAD	31	21	52
Bappeda	22	16	38
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	7	19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	12	27
Dinas Kesehatan	18	14	32
UPT Balai Laboratorium	4	3	7
UPT Instalasi Farmasi	2	5	7
UPT Puskesmas	162	407	569
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21	13	34
Diskominfo	15	7	22
Diskop, UKM, dan Perdagangan	35	7	42
Dinas Pariwisata	15	9	24
UPT Objek Wisata Pantai Takisung	2	-	2
Dinas PUPR dan Pertanahan	59	23	82
UPT Laboratorium PU	1	1	2
UPT Peralatan	4	1	5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	26	11	37
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13	8	21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33	19	52
UPT Disdikbud Kecamatan	65	15	80



Dinas/Instansi Pemerintah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
UPT SKB	3	4	7
Dinas PPKB dan PPPA	9	25	34
UPT DPPKB dan PPPA Kecamatan	27	18	45
Dinas Perhubungan	21	8	29
UPT Pelabuhan	12	-	12
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	2	-	2
UPT Terminal	2	1	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	7	20
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH	44	14	58
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31	17	48
Distan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunana	98	51	149
Disnaker dan Perindustrian	31	14	45
RSUD H. Boejasin	90	167	257
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	37	5	42
Kecamatan	162	74	236
Guru, TU, dan Penjaga Sekolah	1.077	1.712	2.789
Jumlah	2.444	2.829	5.273

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Penduduk Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 25 kasus. Berdasarkan jenis kekerasan yang diterima perempuan, kasus kekerasan fisik merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 11 kasus, disusul kekerasan seksual dan penelantaran masing-masing sebanyak 4 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 3 kasus. Sementara itu, jika dilihat dari unit pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan, sebanyak 14 kasus kekerasan ditangani oleh Unit P2PTP2A, 7 kasus ditangani oleh UPPA Polres, dan 4 kasus ditangani unit pelayanan lainnya

Tabel 2.68 Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kekerasan	P2PTP2A	UPPA Polres	Lainnya
Fisik	6	5	-
Psikis	3	-	-
Seksual	2	2	-
Penelantaran	2	-	2

Jenis Kekerasan	P2PTP2A	UPPA Polres	Lainnya
Lainnya	1	-	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Anak Korban Kekerasan

Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 101 kasus. Berdasarkan jenis kekerasan yang diterima anak, kasus kekerasan seksual merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 30 kasus, disusul kekerasan fisik sebanyak 25 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4 kasus. Sementara itu, jika dilihat dari unit pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan, sebanyak 53 kasus kekerasan ditangani oleh Unit P2PTP2A, 24 kasus ditangani oleh UPPA Polres, dan 24 kasus ditangani unit pelayanan lainnya

Tabel 2.69 Jumlah Korban Kekerasan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kekerasan	P2PTP2A	UPPA Polres	Lainnya
Fisik	6	16	3
Psikis	4	-	1
Seksual	16	7	7
Penelantaran	1	-	-
Lainnya	26	1	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.9 Pangan

Selain sandang dan papan, tentunya pangan menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. Pangan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kecukupan gizi. Semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik, meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang juga digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X, tahun 2012 menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per

hari masing-masing 2.150 kkal dan 57 gram protein (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Berdasarkan data Susenas 2016, angka kecukupan konsumsi di Kabupaten Tanah Laut yang dicerminkan melalui konsumsi kalori dan protein sudah berada diatas batas kecukupan konsumsi penduduk Indonesia. Namun, konsumsi kalori selama tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pada tahun 2015, konsumsi kalori di perkotaan yakni sebesar 2.324,87 kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi kalori di pedesaan yakni sebesar 2.307,48 kkal/kapita/hari. Konsumsi protein pada tahun 2015 di perkotaan yakni sebesar 66,74 gram/kapita/hari dan dipedesaan sebesar 64,70 gram/kkal/kapita/hari. Pada tahun 2016, konsumsi kalori menunjukkan penurunan yakni konsumsi diperkotaan sebesar 2.265,83 kkal/kapita/hari dan dipedesaan sebesar 2.122,16 kkal/hari/gram. Sedangkan konsumsi protein menunjukkan pola yang berbeda di perkotaan dan pedesaan. Konsumsi protein menunjukkan peningkatan di daerah perkotaan pada tahun 2016 yakni sebesar 67,05 gram/kapita/hari sedangkan di pedesaan menunjukkan penurunan yakni sebesar 60,24 gram/kapita/hari.

Tabel 2.70 Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kuintil	Kalori	Protein
Kuintil 1	1.718,48	49,48
Kuintil 2	2.058,33	61,82
Kuintil 3	2.119,68	64,21
Kuintil 4	2.317,10	70,69
Kuintil 5	2.558,08	82,74
Kabupaten Tanah Laut	2.154,68	65,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel di atas menunjukkan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017. Dibandingkan dengan kecukupan kalori dan protein di kabupaten Tanah Laut, maka penduduk yang berada pada kuintil 3 rata-rata telah mencukupi kebutuhan kalori minimal. Berbeda dengan kecukupan protein di Kabupaten Tanah Laut yang relatif lebih baik, rata-rata penduduk pada kuintil 2 sudah mencukupinya. Kurang terpenuhinya standar gizi pada penduduk kuintil 1 tersebut kemungkinan disebabkan karena 3 hal. Pertama, kesadaran bergizi masyarakat masih perlu ditingkatkan lewat berbagai penyuluhan langsung maupun lewat media komunikasi yang lainnya. Kedua, produksi komoditas yang

mengandung kalori dan protein masih dapat ditingkatkan lagi, hal ini sebagai akibat dari kurangnya pemahaman petani akan teknologi budidaya yang tepat dan benar. Ketiga dan yang paling utama, harga komoditas yang mengandung kalori dan protein diduga belum sepenuhnya terjangkau oleh kebanyakan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus untuk konsumsi kalori dan protein di wilayah perdesaan karena kedua kebutuhan inilah yang akan menunjang bagaimana kecukupan energi pada wilayah Kabupaten Tanah Laut dan pada jangka panjang sangat berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

2.3.1.10 Pertanian

Permasalahan mengenai pertanahan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Diberbagai daerah masih banyak ditemukan masalah salah satunya yakni tanah yang tidak memiliki sertifikat. Padahal, pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disertai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak tanah. Sebagai upaya pengukuran masalah pertanahan maka dapat menggunakan beberapa indikator seperti persentase lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Pada tahun 2017, layanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat adalah Prona, P3HT, tanah Pemda, Wakaf, dan Redistribusi tanah. Dari target yang ditetapkan sebanyak 9.263 layanan, jumlah layanan yang selesai adalah sebanyak 7.563 layanan.

Tabel 2.71 Produk Pelayanan Proyek/SPK oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kegiatan	Target	Diproses	Selesai	Sisa
Prona, P3HT	9.000	7.392	7.392	-
Tanah Pemda/Instansi	135	47	45	90
Wakaf	7.392	1	1	2
Redistribusi Tanah	125	125	125	-
Jumlah	9.263	7.565	7.563	92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Terkait dengan jenis pelayanan pertanahan pada tahun 2017, jenis layanan yang paling banyak masuk adalah informasi pertanahan yaitu sebanyak 1.752

layanan, disusul layanan peralihan hak sebanyak 936 layanan, pembebanan hak/hak tanggungan sebanyak 668 layanan, pengukuran dan pemetaan sebanyak 542 layanan, dan pendaftaran tanah pertama kali sebanyak 369 layanan. Dari 16 layanan yang tercatat, terdapat dua jenis layanan yang belum mencapai persentase 100% yaitu pengukuran dan pemetaan yang masih menyisakan 119 layanan dan permohonan hak/pemeriksaan tanah yang masih menyisakan 8 layanan.

Tabel 2.72 Rekapitulasi Jenis Pelayanan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Kegiatan	Masuk	Selesai	Sisa
1.	Informasi Pertanahan/Pengecekan	1.752	1.752	-
2.	Pengukuran dan Pemetaan	542	423	119
3.	SKPT	109	109	-
4.	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	369	369	-
5.	Peralihan Hak	936	936	-
6.	Pembebasan Hak/Hak Tanggungan	668	668	-
7.	Roya	347	347	-
8.	Pemisahan/Pemecahan Sertifikat	77	77	-
9.	Penggabungan Sertifikat	2	2	-
10.	Ganti Nama	-	-	-
11.	Penggantian Sertifikat	37	37	-
12.	Permohonan Hak/Pemeriksaan Tanah	360	352	8
13.	Perpanjangan SK	6	6	-
14.	Pertimbangan Teknis/Izin Lokasi	-	-	-
15.	Pertimbangan Teknis/Izin Perubahan	12	12	-
16.	Perubahan HGB menjadi Hak Milik	93	93	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya. Selain didukung dengan data dan penjelasan dari beberapa indikator tersebut, perlu adanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga memuat rencana mengenai pemanfaatan dana atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian utama dimana dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi persyaratan dalam pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan oleh dinas yang mengurus kewenangan lingkungan hidup diantaranya adalah izin lingkungan. Pada tahun 2018, izin lingkungan diberikan kepada Rumah Sakit Ammariz, PT Charoen Pokphand Jaya, PT Megah Mulia Jaya Persada, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2017, izin lingkungan diberikan diantaranya kepada PT Akbar Mitra Jaya, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Berkas Panyipatan Jaya, Endik Medical Clinic, dan perusahaan lainnya.

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftar pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Dalam rangka mewujudkan program strategi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan penataan pada bidang administrasi kependudukan. Salah satu usaha untuk mendukung keberhasilan program

tersebut adalah dengan memiliki database melalui penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Dengan adanya database tersebut, nantinya dapat digunakan sebagai acuan perumusan maupun perencanaan pembangunan nasional. KTP Nasional atau saat ini disebut sebagai e-KTP (KTP elektronik) diterapkan berbasis NIK, sehingga data yang didapat tunggal dan akurat sehingga mencegah serta mengurangi adanya potensi KTP ganda atau palsu. Selain itu, data yang telah direkam dapat diakses dari seluruh Indonesia. Tentunya hal ini sangat memudahkan pemerintah dalam urusan administratif penduduk. Di Kabupaten Tanah Laut, proses perekaman e-KTP berbasis NIK telah dilakukan sejak tahun 2012. Hingga tahun 2018, persentase laki-laki dan perempuan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Tanah Laut masing-masing adalah sebesar 99,98%. Untuk semua kelompok pengeluaran baik dari 40 persen terbawah, 40% tengah, dan 20% teratas. Dari tingkat pendidikan, penduduk yang berpendidikan hanya pada tingkat SD ke bawah dan SMP ke atas, persentase kepemilikan NIK adalah sebesar 99,98. Dengan persentase yang tinggi tersebut baik menurut kelompok pengeluaran dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran penduduk terhadap administrasi kependudukan sangat tinggi.

Tabel 2.73 Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99,97	99,98
Perempuan	99,97	99,98
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	99,97	99,98
40% Tengah	99,97	99,98
20% Teratas	99,98	99,98
Pendidikan Tertinggi		
SD ke Bawah	99,97	99,98
SMP ke Atas	99,98	99,98
Kabupaten Tanah Laut	99,98	99,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu arsip kependudukan mengenai pencatatan kelahiran yang penting dimiliki oleh setiap penduduk. Pembuatan

aktakelahiran ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen negara yang berisi identitas anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang dalam mengesahkan dokumen tersebut. Beberapa fungsi dari kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bukti sah hubungan anak dengan orang tua, identitas diri anak, syarat administrasi sekolah, syarat pembuatan KTP, SIM dan paspor, hingga melamar pekerjaan. Data menunjukkan dalam 4 tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut yakni tahun 2012 hingga 2015, jumlah pemegang akta kelahiran cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang mengajukan permohonan akta sebanyak 4.808 jiwa. Meningkat hampir lebih dari dua kali lipat pada tahun 2013 hingga mencapai 10.808 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah permohonan akta kelahiran menurun hingga mencapai 9.591 jiwa. Pada tahun selanjutnya yakni tahun 2015, jumlah permohonan akta kelahiran kembali menunjukkan penurunan hingga berada pada angka 8.453 jiwa.

Tabel 2.74 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Akta Kelahiran (jiwa)
2012	4.808
2013	10.808
2014	9.591
2015	8.453
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Pada tahun 2018, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut sebesar 94,55%. Menurut kelompok pengeluaran, persentase penduduk 40% terbawah adalah sebesar 93,03%, penduduk 40% tengah sebesar 95,08%, dan penduduk 20% teratas sebesar 97,52%. Sementara itu, jika melihat berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase penduduk berpendidikan SD ke bawah yang memiliki akta kelahiran sebesar 94,25% dan penduduk berpendidikan SMP ke Atas sebesar 94,92%

Tabel 2.75 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik	Penduduk 0-17 Tahun
Jenis Kelamin	

Karakteristik	Penduduk 0-17 Tahun
Laki-laki	96,13
Perempuan	92,94
Kelompok Pengeluaran	
40% Terbawah	93,03
40% Tengah	95,08
20% Teratas	97,52
Pendidikan Tertinggi	
SD ke Bawah	94,25
SMP ke Atas	94,92
Kabupaten Tanah Laut	94,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Akta Perkawinan

Berdasarkan data pada tahun 2012 hingga 2015, jumlah pemegang akta perkawinan di Kabupaten Tanah Laut juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan sebanyak 67 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2013 yakni mencapai angka 97 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan menurun hingga mencapai angka 61 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 44 jiwa.

Tabel 2.76 Jumlah Akta Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Akta (jiwa)
2012	67
2013	97
2014	61
2015	44
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Akta Kematian

Data menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 4 tahun antara tahun 2012 hingga 2015, jumlah akta kematian yang dimiliki penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah pemegang akta kematian sebanyak 73 jiwa. Kemudian menurun drastis pada tahun 2013 yakni hanya sebanyak 14

jiwa. Pada tahun 2014, pemegang akta kematian menunjukkan peningkatan namun tidak cukup signifikan yakni mencapai angka 18 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah pemegang akta kematian menunjukkan peningkatan hampir lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya yakni mencapai 182 jiwa.

Tabel 2.77 Jumlah Pemegang Akta Kematian di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Pemegang (jiwa)
2012	73
2013	14
2014	18
2015	182
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan lembaga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan desa dalam program serta kegiatan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong merumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa. Dalam upaya memutus mata rantai ketimpangan

pembangunan, maka dapat dilakukan dengan cara mendorong pembangunan dan peningkatan infrastuktur serta sumber daya manusia di desa, seperti peningkatan sarana dan prasarana desa seperti transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan perumahan; serta peningkatan makanan dan nutrisi, pendidikan dasar, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan dana dari pemerintah pusat kepada desa dalam rangka pembangunan desa. Keberhasilan implementasi dana desa akan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian desa.

Dalam rangka pembangunan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa program di bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi pemberdayaan usaha dan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pemerintah terus menggalakkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, serta pembinaan usaha ekonomi kreatif berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan pembinaan data dan profil desa, serta pembinaan adat dan budaya desa. Desa yang memiliki potensi selanjutnya akan dikembangkan baik terkait adat maupun budaya desa. Tidak hanya itu, pemberdayaan desa juga dilakukan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penataan administrasi pemerintahan desa, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Bimbingan teknis terus dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, dan lainnya.

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu caranya adanya dengan program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera. KB juga akan mendorong pencapaian SDGs (AKI) dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian dan perpindahan. Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk terus meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan berisiko menghambat pembangunan nasional (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan Angka Kelahiran Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator TFR memiliki kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010- 2020) di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan angka 2,84. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 sampai 3 anak. Ternyata, angka tersebut tidak banyak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, bahkan sedikit mengalami penambahan angka dari tahun 2010 yang hanya mencapai 2,61 meskipun peningkatan angka tersebut tidak begitu signifikan. Tidak banyak berubahnya angka TFR ini menunjukkan bahwa benar, bonus demografi sudah mulai terjadi di Kabupaten Tanah Laut. GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. GRR Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah 1,38, sedikit meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar 1,27 (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Status perkawinan penduduk erat kaitannya dengan indikator penduduk lainnya misalnya penggunaan alat/cara KB, pekerjaan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya. Status perkawinan dapat dikelompokkan menjadi belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Pengamatan status perkawinan ini sangat perlu dilakukan karena menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk. Persentase penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 yang berjenis kelamin laki-laki dengan status belum kawin lebih banyak daripada persentase penduduk berjenis kelamin perempuan, bahkan hampir mencapai dua kali lipatnya. Indikasi dari perbedaan persentase ini adalah bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki cenderung melakukan penundaan perkawinan dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.78 Persentase Penduduk Berusia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Belum Kawin	31,53	16,58	24,23
Kawin	62,25	79,82	72,36
Cerai Hidup	2,51	1,88	2,20
Cerai Mati	0,71	1,72	1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan penduduk di suatu daerah adalah tinggi rendahnya angka kelahiran. Disisi lain, tinggi rendahnya angka kelahiran tersebut sangat dipengaruhi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan karena secara kodrat perempuanlah yang melakukan fungsi reproduksi yakni melahirkan, khususnya mereka yang tergolong usia subur (rentang usia 15 – 49 tahun). Dengan adanya teori tersebut maka dapat ditarik premis bahwa semakin tinggi jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, semakin tinggi pula risiko melahirkan anak dalam jumlah besar secara agregat kewilayahan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Usia perkawinan pertama pada penduduk berjenis kelamin perempuan merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Pengaruhnya pada laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada asumsi bahwa semakin muda usia perkawinan pertama penduduk berjenis kelamin perempuan maka rentang waktu untuk dapat melahirkan akan semakin besar. Semakin besarnya rentang waktu untuk melahirkan akan

memunculkan risiko tingkat kelahiran yang semakin tinggi dan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya pengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa semakin muda usia perkawinan pertama, maka risiko kematian saat melahirkan menjadi sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan mengingat pada usia yang relatif muda kondisi fisik, psikologis maupun fungsi organ reproduksi relatif belum siap dan matang untuk dapat melahirkan secara normal (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.79 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 20-24 Tahun Menurut Umur Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Pendidikan	<18 Tahun	18 Tahun ke Atas
SD	56,42	43,58
SMP	41,40	58,60
SMA	21,08	78,92
Tanah Laut	39,44	60,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase penduduk berjenis kelamin perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2016 dan 2017 proporsi terbesar usia perkawinan pertama di Kabupaten Tanah Laut adalah pada kelompok perempuan yang berusia 18 tahun ke atas, yaitu sebesar 60,56%. Angka ini dapat menjadi indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Tanah Laut mulai menunda kawin pertama mereka yang tadinya di tahun 2016 ada sebanyak 48,83%. Usia kawin pertama yang semakin meningkat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan pemahaman terhadap perkawinan yang semakin baik, serta karena tuntutan ekonomi atau perkembangan zaman yang mengharuskan wanita bekerja yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kelahiran penduduk karena masa suburnya semakin berkurang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan tren meningkat dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan perempuan lulusan SMA hanya setengah dari perempuan lulusan SD yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Dengan adanya gambaran ini, dapat menjadi fokus pemerintah untuk membuat kebijakan terkait kesehatan ibu, keluarga berencana, dan kebijakan fertilitas lain yang didasarkan pada perempuan yang lulusan SD atau tidak lulus SD yang sudah kawin karena memiliki presentase terbesar dibandingkan pendidikan lainnya (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penggunaan Alat/Cara KB

Kebijakan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Salah satu program yang terus mendapat perhatian pemerintah, mengenai fertilitas adalah Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program ini ditentukan dari berbagai faktor baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Faktor pendidikan terakhir anggota keluarga, pengetahuan mengenai keluarga berencana, dan tingkat kemampuan ekonomi merupakan faktor internal dalam keluarga peserta KB yang berpengaruh pada partisipasi maupun pemilihan alat kontrasepsi. Dari Tabel 2,75 dapat dilihat bahwa masih ada 16,45% perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak menggunakan KB. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 2,33%. Hal ini menunjukkan pencapaian pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang membaik pada program Keluarga Berencana sehingga pengguna KB meningkat (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Alasan utama terbesar dari perempuan yang tidak menggunakan KB adalah karena responden sedang hamil, akses ke fasilitas kesehatan, biaya terlalu mahal, dan takut gemuk. Selain adalah tersebut, ada juga alasan lain seperti karena adanya alasan fertilitas seperti jarang “kumpul”, sudah memasuki masa menopause, mandul, ingin anak sebanyak mungkin, dan adanya kepercayaan atau tradisi tertentu. Selain dilihat dari persentase wanita yang tidak pernah menggunakan KB, juga dapat dilihat melalui persentase wanita yang pernah menggunakan, yang berarti sekarang sudah tidak menggunakan lagi, yang mengalami penurunan. Penurunan dari angka 16,36% pada tahun 2016 menjadi 15,05% pada tahun 2017, serta adanya peningkatan TFR menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut melakukan perencanaan dalam bereproduksi melalui program KB, karena mereka tetap menghasilkan keturunan (bertambah) namun pengguna KBnya bertambah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB, 2012-2017

Tahun	Jumlah Pasangan Usia	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB
	Subur	Aktif	(%)
2012	67.928	55.724	82,03
2013	67.928	57.557	84,73
2014	71.428	60.104	84,15
2015	71.207	58.468	82,11
2016	68.065	53.198	78,16

Tahun	Jumlah Pasangan Usia	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB
	Subur	Aktif	(%)
2017	64.928	51.143	78,77

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada Tabel 2.76 di atas tampak bahwa perkembangan rasio penggunaan akseptor KB meningkat pada periode 2012 hingga 2013. Namun pada perkembangannya di beberapa tahun terakhir rasio akseptor KB yang aktif menurun. Pada awalnya di tahun 2012, jumlah pasangan usia subur mencapai 67.928 sementara rasio akseptor KB sudah mencapai 82,03% dan bertambah menjadi 84,73% pada tahun 2013 dengan kondisi jumlah pasangan usia subur yang sama. Akan tetapi pada tahun selanjutnya justru turun menjadi 84,15% dengan jumlah pasangan usia subur mencapai 71.428. Selanjutnya pada tahun 2015 ketika jumlah pasangan usia subur mencapai 71.207, rasio akseptor KB turun kembali mencapai level 82,11% dan pada data terakhir tahun 2016 tingkat rasio akseptor KB menurun kembali hingga level 78,16% dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 68.065. Pada tahun 2017, Jumlah PUS di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 64.928 pasangan. Wilayah dengan PUS tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 13.046 PUS, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 8.896 PUS, dan Kecamatan Bati-bati sebanyak 7.420 PUS. Melihat dari peserta KB, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 51.143 peserta sehingga rasio akseptor KB aktif pada tahun 2017 adalah sebesar 78,77%. Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan yaitu sebanyak 26.861, disusul pil sebanyak 17.702, dan implant sebanyak 3.797.

Sementara itu terkait dengan keberadaan fasilitas kesehatan terkait dengan keluarga berencana, dapat dilihat melalui jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Kondisi yang ada pada tahun 2017 di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut:

Tabel 2.81 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	KKB	PPKBD
1.	Panyipatan	2	10
2.	Takisung	1	12
3.	Kurau	2	11
4.	Bumi Makmur	1	11

No.	Kecamatan	KKB	PPKBD
5.	Bati-Bati	4	14
6.	Tambang Ulang	1	9
7.	Pelaihari	4	20
8.	Bajuin	2	9
9.	Batu ampar	2	14
10.	Jorong	3	11
11.	Kintap	2	14
Jumlah		24	135

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada Tabel 2.81 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah KKB cukup bervariasi di setiap kecamatan. Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 memiliki 24 unit Klinik Keluarga Berencana yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah KKB di setiap kecamatan berkisar antara 1 hingga 4 unit KKB. Kecamatan yang memiliki fasilitas Klinik Keluarga Berencana terbanyak yaitu Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Pelaihari yang masing-masing memiliki 4 unit KKB. Sementara Kecamatan yang hanya memiliki 1 unit KKB adalah Kecamatan Takisung, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Tambang Ulang. Selanjutnya terkait dengan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD), di seluruh Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 tercatat memiliki 135 PPKBD yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah PPKBD cukup bervariasi di tiap kecamatannya, yang terbanyak berada di kecamatan pelaihari dengan 20 PPKBD. Sementara itu kecamatan yang memiliki PPKBD paling sedikit adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin yang masing-masing memiliki 9 PPKBD.

2.3.1.15 Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor ekonomi. Untuk itu, sarana dan prasarana transportasi yang bagus merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mobilitas antar kecamatan, ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi darat dibagi menjadi jaringan jalan

nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan, terminal penumpang, dan jaringan pelayanan angkutan umum. Pada Tabel 2.82 berikut dipaparkan jenis jalan yang menghubungkan berbagai tempat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017:

Tabel 2.82 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis	Keterangan
Sistem jaringan jalan nasional	a. jaringan jalan kolektor primer K-1, meliputi :
	1. sp. Liang Anggang – Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);
	2. Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) – Bati Bati;
	3. Bati Bati – Batas Kota Pelaihari;
	4. Batas Kota Pelaihari – KP. Asam Asam;
	5. KP. Asam Asam – Kintap;
	6. Kintap – Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);
	7. Jalan Gunung Kayangan;
	8. Jalan KH. Mansyur;
	9. Jalan Muslimin (Pelaihari);
	10. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);
	11. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);
	12. Jalan Perkantoran Gagah (Pelaihari).
	13. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi :
	14. Lianggang-Pelaihari dan
	15. Pelaihari-Pagatan.
	b. jaringan jalan strategis nasional rencana(Arteri Primer), meliputi :
	1. rencana pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis Jorong,
	2. Jalan akses menuju pelabuhan Pelaihari :
	3. Jalan akses pelabuhan pelaihari 4 km(bagian dari rencana pembangunan jalan missing link 1000 km),
	4. Jalan Kurau Pulau sari,
	5. Jalan Ambungan – Tajau Pecah dan Tajau Pecah – pelabuhan Swarangan,
	6. Jalan Gunung Kayangan (Pelaihari). Untuk akses Utara : Pelabuhan Swarangan – Salaman – Riam Adungan – utara(Kab. Banjar).
Sistem jaringan jalan provinsi	a. jaringan jalan kolektor primer K-2, meliputi:
	1. Banjarbaru – Bati-bati,
	2. Gambut – Pulau Sari,
	3. Pelaihari – Takisung, dan

Jenis	Keterangan
	4. Pelaihari – Batakan;
	b. jaringan jalan kolektor primer K-3, meliputi:
	1. Jalan Antasari (Pelaihari),
	2. Jalan arah Takisung dan
	3. Jalan arah Batakan.
Sistem jaringan jalan Kabupaten	Jaringan jalan lokal primer, meliputi : seluruh ruas jalan lokal di Pelaihari

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Perkembangan jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut akan membuat aktivitas ekonomi seluruh kabupaten menjadi Hidup. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Melihat perkembangan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah kendaraan dalam kurun waktu 2012-2017. Pada tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan adalah sebanyak 15.173 unit dan pada tahun 2017 berkurang menjadi sebanyak 9.121 unit. Dalam kurun waktu tersebut, jenis kendaraan yang mengalami pertambahan unit adalah mobil penumpang dari sebanyak 804 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 1.132 unit.

Tabel 2.83 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Mobil Ransus	Jumlah
2012	804	-	1.046	13.211	112	15.173
2013	766	5	973	11.519	97	13.360
2014	1.298	2	917	10.815	123	13.155
2015	1.098	-	857	6.699	147	8.801
2016	936	3	448	5.956	237	7.580
2017	1.132	1	557	7.387	44	9.121

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut yang salah satunya dilakukan dengan melakukan pengawasan kendaraan bermotor (uji berkala). Jumlah

kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 3.735 unit, yang terdiri dari 950 unit kendaraan umum, kereta tempel/gantungan sebanyak 2 unit, dan kendaraan tidak umum/dinas sebanyak 2.783 unit, diikuti pick up sebanyak 91 unit, dan bus sebanyak 24 unit. Kendaraan umum yang wajib melaksanakan uji paling banyak adalah truk yaitu sebanyak 826 unit. Sementara untuk kendaraan tidak umum/dinas yang paling banyak diwajibkan melakukan uji adalah mobil pick up yaitu sebanyak 2.364 unit disusul truk sebanyak 384 unit dan bus sebanyak 27 unit.

Tabel 2.84Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

No.	Jenis Kendaraan	2015	2016	2017
A.	Kendaraan Umum			
1.	Mobil Barang			
a.	Truk	729	823	826
b.	Pick Up	92	99	91
c.	Tangki	19	12	9
2.	Mobil Bus			
a.	Bus	39	36	24
Jumlah		879	970	950
B.	Kereta Tempel/Gandengan	1	2	2
C.	Tidak Umum/Dinas			
1.	Mobil Barang	432	372	384
a.	Pick Up	2.518	2.539	2.364
b.	Tangki	5	8	3
c.	Lainnya	2	5	5
2.	Mobil Bus	24	24	27
Jumlah		2.981	2.948	2.783

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Selanjutnya, berkaitan dengan transportasi laut yang ada di Kabupaten Tanah Laut merupakan moda transportasi yang cukup banyak digunakan. Berdasarkan data terakhir tersebut dapat dikatakan bahwa kapal motor merupakan moda transportasi laut pilihan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang jumlahnya mencapai 1953 unitdan tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh perahu tanpa motor yang berjumlah 90 unit, dan perahu motor temple sejumlah 24 unit.

Tabel 2.85 Jumlah Transportasi Laut Berdasarkan Jenisnya, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kendaraan		
		Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
1.	Panyipatan	54	-	357
2.	Takisung	6	23	590
3.	Kurau	15	-	217
4.	Bumi Makmur	-	-	282
5.	Bati-Bati	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-
10.	Jorong	-	1	289
11.	Kintap	15	-	218
Jumlah		90	24	1.953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam perkembangannya kedepan, dalam Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 dipaparkan juga mengenai system Jaringan Perkeretaapian. Sistem Jaringan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Rencana pengembangan sistem jaringan jalan kereta api, meliputi jalan angkutan penumpang Jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, yaitu ruas Banjarmasin – Pelaihari – Pelabuhan Pelaihari Jorong - Asam-Asam – Kintap - Satui – Pagatan – Pelabuhan Batulicin dan Kersik Putih Batulicin – Serongga – Senggayam – Tanah Grogot - Balikpapan. Selain itu ruas Pelaihari – Batakan (Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Dewa). Untuk pembangunan stasiun kereta api sebagai simpil jaringan jalur kereta api diarahkan pada ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Selain itu dalam Perda yang sama juga dibahas mengenai Sistem Jaringan Transportasi Udara. Sistem Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah rencana penyusunan Rencana Induk Pembangunan Bandar Udara Internasional sebagai bandar udara alternatif, yakni bandara Maluka Baulin di Kecamatan Kurau, seluas kurang lebih 939,58 (sembilan ratus tiga puluh Sembilan koma lima puluh delapan) hektar.

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Salah satu layanan komunikasi dan informatika yaitu menggunakan layanan komunikasi melalui kantor pos di Kabupaten Tanah Laut. Pada Tabel 2.86, di bawah ini adalah perkembangan jumlah kantor pos berdasarkan jenisnya di Kabupaten Tanah Laut pada periode 2012-2017:

Tabel 2.86 Jumlah Kantor Pos Berdasarkan Jenisnya, 2012-2017

Tahun	Kantor Pos	Pos Pembantu	Rumah Pos	Agen Pos	Jumlah
2012	7	1	0	0	8
2013	7	1	0	0	8
2014	8	0	1	4	13
2015	8	0	1	7	13
2016	8	0	1	9	18
2017	7	-	3	5	15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Untuk tahun 2017, jumlah layanan pos di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 15 unit yang terdiri dari 7 unit kantor pos, 3 unit rumah pos dan 5 unit agen pos. Kantor pos di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Kurau, Bati-Bati, Pelaihari, Jorong, dan Kintap. Pada tahun 2016 terdapat 18 (delapan belas) kantor pos di Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri dari 8 Kantor pos, 1 buah rumah pos, dan 9 agen pos. Jumlah ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kantor pos pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012-2013 hanya berjumlah 8 kantor pos, selanjutnya pada tahun 2014-2015 semakin bertambah menjadi 13 kantor pos, hingga pada tahun 2016 sudah mencapai 18 kantor pos di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya berkaitan dengan layanan surat yang diterima menurut sifat pengirimannya pada periode 2012-2017, jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.87 di bawah:

Tabel 2.87 Banyaknya Surat Pos yang Diterima Menurut Sifat Pengiriman, 2012-2017

Tahun	Kilat Khusus	Kilat	Surat Pos Biasa	Luar Negeri	Dinas
--------------	---------------------	--------------	------------------------	--------------------	--------------

2012	12.120	3020	750	41	372
2013	-	-	-	-	-
2014	15.107	-	4.652	21	474
2015	44.325	736	4.281	51	689
2016	-	-	-	-	-
2017	55.990	667	7.211	226	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, pada periode 2012-2017 terdapat lima jenis surat yang dikirim melalui kantor pos. Pada data terakhir yang sudah dipublikasikan, surat kilat khusus di Kabupaten Tanah Laut sejumlah 55.990 surat, surat kilat berjumlah 667 surat, surat pos biasa sejumlah 7.211 surat, dan surat luar negeri sejumlah 51 surat. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan tren pada jenis surat kilat khusus dan surat pos biasa. Akan tetapi menunjukkan tren yang turun pada jenis surat kilat. Sementara itu, untuk jumlah paket pos di Kabupaten Tanah Laut dibedakan menjadi paket kilat khusus dan kilat dimana jumlahnya masing-masing pada tahun 2017 sebanyak 18.969 paket dan 2.779 paket.

Tabel 2.88 Jumlah Peket Pengiriman dan Penerimaan Paket Pos Menurut Kecamatan, 2017

No.	Kantor Pos	Kilat Khusus	Kilat
1.	Panyipatan	435	-
2.	Takisung	1.273	-
3.	Kurau	1.600	250
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-Bati	6.503	681
6.	Tambang Ulang	-	-
7.	Pelaihari	6.970	1.267
8.	Bajuin	-	-
9.	Batu Ampar	920	206
10.	Jorong	456	375
11.	Kintap	812	-
Jumlah		18.969	2.779

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan Tabel 2.89 dapat dilihat tren yang cukup bervariasi bagi para pengguna layanan Speedy. Pada tahun 2012 penggunaannya mencapai 1.112 lalu naik menjadi 1.333 pada tahun 2013. Kenaikan tersebut tidak berlanjut ketika jumlah

pengguna layanan Speedy tercatat anjlok menjadi sejumlah 835 pengguna di tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2015 dan 2016 terjadi tren kenaikan jumlah pengguna layanan Speedy yang masing-masing sejumlah 937 dan 1154 pengguna. Selanjutnya di tahun 2017, jumlah pelanggan Sppedy mengalami lonjakan signifikan menjadi sebanyak 2.148 pengguna. Lain halnya dengan Jumlah warung internet atau *warnet* di Kabupaten Tanah Laut, jumlahnya secara perlahan mengalami penurunan, dan hanya sekali mengalami kenaikan di periode tahun 2014-2015 dari 15 menjadi 23 warung internet. Pada tahun 2012 jumlah warung internet yang ada di Kabupaten Tanah laut mencapai 29 buah, namun pada tahun 2016 jumlahnya tinggal 12 warung internet saja, dan pada tahun 2017 bertambah lagi menjadi sebanyak 13 unit.

Tabel 2.89 Jumlah Pengguna Layanan Internet Speedy dan Warung Internet, 2012-2017

Tahun	Pengguna Layanan Speedy	Jumlah Warung Internet
2012	1.112	29
2013	1.333	29
2014	835	15
2015	937	23
2016	1.154	12
2017	2.148	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perkembangan gawai cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi gawai membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan gawai/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya. Kegiatan sosial lain yang dilakukan penduduk adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi dan hiburan, seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar dan mengakses internet. Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media masa, salah satunya adalah internet.

Situs internet saat ini sangat beragam jenisnya, salah satunya adalah media sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan banyak media sosial lain. Namun di tahun 2017 penduduk Kabupaten Tanah Laut masih relatif rendah dalam mengakses internet yaitu sebanyak 22,25% bahkan angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016. Setelah dilihat datanya lebih detail, dapat dilihat bahwa sebenarnya kelompok jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya saja kelompok penduduk jenis kelamin perempuan di perdesaan mengalami penurunan yang memengaruhi angka agregasi pengguna internet di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017.

Tabel 2.90 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2016-2017

Jenis Kelamin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Laki-laki	35,45	39,17	18,84	18,97	23,00	24,19
Perempuan	33,65	36,43	18,23	14,68	22,01	20,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang mengakses internet lebih besar daripada penduduk berjenis kelamin perempuan baik di perdesaan maupun perkotaan, yaitu sebesar 24,19% untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 20,22% untuk penduduk berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan perbedaan desa kota, terdapat kesenjangan yang relatif besar. Pada tahun 2017 penduduk di daerah perkotaan yang mengakses internet ada sebanyak 37,84% sedangkan di perdesaan hanya sebanyak 16,88%. Angka pengguna internet di perdesaan bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Salah satu indikasi mengapa pengguna internet di perdesaan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan adalah karena adanya migrasi penduduk muda perempuan yang melek teknologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya adalah masyarakat menjadi semakin mudah dalam memperoleh akses internet sehingga masyarakat dapat mengakses beragam informasi yang akan menambah wawasan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Secara defimisi Koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan Koperasi di Kabupaten Tanah Laut jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi. Di Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa jenis koperasi seperti Koperasi Unit desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan jenis-jenis koperasi lainnya.

Tabel 2.91 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	KUD	KPR	KPN	Lainnya	Jumlah
2012	53	-	23	87	163
2013	53	-	23	91	167
2014	52	-	23	84	159
2015	53	-	22	87	162
2016	38	-	16	107	161
2017	38	14	16	78	146

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2012, total koperasi di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 163 koperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 53 Koperasi Unit Desa, 23 Koperasi Pegawai Negeri dan 87 Koperasi jenis lainnya. Pada tahun 2013 jumlah total naik menjadi 167 koperasi karena penambahan koperasi lainnya sebanyak 4 koperasi, sementara KUD dan KPN jumlahnya tetap. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Tanah Laut turun menjadi 159 Koperasi. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Unit Desa turun menjadi 52 koperasi dan koperasi jenis lain turun juga menjadi sejumlah 84 koperasi saja. Pada tahun 2015 jumlah koperasi secara keseluruhan naik menjadi 162 koperasi dikarenakan penambahan KUD menjadi 53 koperasi dan koperasi lainnya menjadi 87 buah, akan tetapi juga terjadi

penurunan pada jenis koperasi pegawai negeri menjadi 22 koperasi. Terakhir, pada tahun 2016 tercatat bahwa jumlah koperasi keseluruhan di Kabupaten Tanah laut sebanyak 161 Koperasi terdiri dari 38 Koperasi Unit Desa, 16 Koperasi Pegawai Negeri dan 107 koperasi lainnya. Secara mendetail, komposisi jumlah koperasi per kecamatan pada tahun 2017 tampak pada Tabel 2.92 berikut ini:

Tabel 2.92 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi				Jumlah
		KUD	KPR	KPN	Lainnya	
1.	Panyipatan	3	-	-	5	8
2.	Takisung	4	1	2	4	11
3.	Kurau	1	-	-	2	3
4.	Bumi Makmur	3	-	-	1	4
5.	Bati-Bati	3	2	1	2	8
6.	Tambang Ulang	2	-	1	5	8
7.	Pelaihari	4	3	11	27	45
8.	Bajuin	5	-	-	1	6
9.	Batu Ampar	3	3	1	7	14
10.	Jorong	5	2	-	13	20
11.	Kintap	5	3	-	111	19
Jumlah		38	14	16	78	146

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dari jumlah KUD sebanyak 38 unit pada tahun 2017, wilayah yang memiliki jumlah KUD terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki sebanyak 5 unit KUD. Jumlah keseluruhan anggota KUD pada tahun 2017 adalah sebanyak 12.522 anggota dimana jumlah anggota KUD tebranyak berasal dari Kecamatan Pelaihari yaitu 2.518 anggota. Secara keseluruhan jumlah simpanan anggota KUD adalah sebesar Rp 3,53 miliar dimana simpanan terbesar berada di Kecamatan Kintap yaitu sebesar Rp 640,32 juta. Sementara itu, dari jumlah koperasi Non KUD sebanyak 108 unit, sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 108 unit. Jumlah anggota koperasi Non KUD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 16.051 anggota dengan jumlah simpanan sebesar Rp 41,631 miliar.

Tabel 2.93 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Jumlah Simpanan (Rp Juta), 2017

No.	Kecamatan	KUD			Non KUD		
		Jumlah	Anggota	Simpanan	Jumlah	Anggota	Simpanan
1.	Panyipatan	3	614	592,14	5	889	579,51
2.	Takisung	4	1.038	601,99	7	1.025	3.209,86
3.	Kurau	1	48	61,11	2	71	-8,49
4.	Bumi Makmur	3	534	27,75	1	32	6,75
5.	Bati-Bati	3	309	145,40	5	1.621	6.059,77
6.	Tambang Ulang	2	1.223	45,36	6	314	218,92
7.	Pelaihari	4	2.518	147,75	41	5.528	10.233,13
8.	Bajuin	5	1.300	549,71	1	539	593,50
9.	Batu Ampar	3	1.613	324,56	11	2.532	1.924,41
10.	Jorong	5	1.931	389,52	15	738	16.164,62
11.	Kintap	5	1.393	640,32	14	2.762	2.649,06
Jumlah		38	12.522	3.525,61	108	16.051	41.631,04

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang juga dicakup dalam susenas adalah berkaitan dengan penerima kredit usaha. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dalam bentuk kredit usaha ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan UMKM, peningkatan produktifitas, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Beberapa contoh pemberian kredit usaha yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), kredit usaha rakyat, program koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 2017, rumah tangga penerima kredit usaha di Kabupaten Tanah Laut sebesar 17,04%, meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 6,51%. Jika dilihat menurut wilayah, jumlah rumah tangga penerima kredit perkotaan yaitu sebesar 21,43% dengan persentase yang lebih besar daripada wilayah perdesaan yaitu sebesar 15,91 persen. Dengan adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan ini menjadi sebuah indikasi bahwa di wilayah perkotaan akses untuk mendapatkan modal untuk melakukan usaha bagi para pengusaha terutama usaha informal, lebih baik daripada wilayah perdesaan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Secara umum, kredit usaha rakyat terbesar di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 adalah program bank selain KUR. Namun jika dilihat berdasarkan agregasi wilayah desa kota, dapat terjadi perbedaan kredit usaha rakyat yang digunakan. Di perkotaan, kredit dengan persentase terbesar adalah berupa program Bank selain KUR yaitu sebesar 9,28%. Kredit usaha dari Bank Umum selain KUR yaitu ketika ada rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha dari bank dengan cara

mengajmisalnya kredit perumahan seperti KPR, kredit usaha kecil seperti Kupedes, dsb. Sedangkan di perdesaan, persentase terbesar adalah program kredit usaha rakyat yaitu sebesar 5,96%. Hal ini menandakan bahwa salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat di wilayah perdesaan. Dengan adanya hal ini, diharapkan di wilayah perdesaan, UMKM dan koperasi mulai banyak yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Selain itu, diharapkan akan semakin sedikit masyarakat yang terjebak pada sistem rentenir dan ijon.

Tabel 2.94 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal, 2017

Jenis Kredit Usaha	Kota	Desa	KPN
Kredit Usaha Rakyat	5,06	5,96	5,47
Program Bank Selain KUR	9,28	2,63	4,30
BPR	0,18	0,21	0,20
Program Koperasi	0,00	3,16	2,37
Perorangan (Dengan Bunga)	0,71	0,78	0,77
Perusahaan Leasing	5,69	1,20	2,33
Lainnya	0,51	1,97	1,60

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Pada RPJMN 2015-2019 sudah tertuang pula poin mengenai peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, yang menandakan keseriusan dari pemerintah nasional untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk memudahkan proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyediakan website yang dapat menjadi panduan dalam pengurusan perizinan. Website yang ada telah menampilkan prosedur pendaftaran izin, simulasi perhitungan retribusi, cek status proses perizinan, dan berbagai informasi perizinan seperti TDP, SIUP, dan izin lainnya. Selain itu, website juga menampilkan potensi daerah unggulan berupa video yang

dapat menjadi pertimbangan calon investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Tanah Laut.

Perkembangan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2012-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, nilai investasi PMA adalah sebesar US\$ 64,15 juta dan pada tahun 2018, nilai investasi mengalami penurunan menjadi sebesar US\$ 2,88 juta. Dari sisi jumlah proyek yang dikerjakan, terdapat 84 proyek investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (Tabel 2.95). Melihat sektor yang menjadi primadonan bagi PMA, terlihat bahwa sebagian besar PMA menanamkan modalnya pada sektor pertambangan. Sektor lain yang menjadi primadona bagi PMA adalah sektor industri makanan dan sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Untuk investasi yang berasal dari Penanamam Modal Dalam Negeri (PMDN), terdapat 192 proyek yang dikerjakan dalam kurun waktu 2012-2018. Jika investasi PMA cenderung menurun, investasi yang berasal dari PMDN justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, investasi yang berasal dari PMDN adalah sebesar Rp 85,99 miliar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp 701,45 miliar. Di sektor primer, primadona PMDN adalah sektor pertambangan dan sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sektor lain yang menjadi primadona adalah sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Pada tahun 2017, sektor yang menerima investasi adalah sektor industri makanan dan sektor listrik, gas, dan air.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 2.95 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	3,4	-	-	-	-	3	5.980,0	2	749,2	2	3.029,9	1	-
	Kehutanan	1	6.000,0	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Pertambangan	4	48.961,9	5	-	3	7.211,4	4	3.600,0	6	857,3	5	-	5	1.706,4
	Jumlah	6	54.965,3	8	-	4	7.211,4	7	9.580,0	9	1.606,5	7	3.029,9	6	1.706,4
Sektor Sekunder	Industri Makanan	1	458,0	2	-	-	-	3	5.580,0	3	8.843,2	6	17.144,2	2	997,5
	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75,6	1	-	1	-
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	8.735,0	3	7.614,0	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	3	9.193,0	5	7.614,0	-	-	4	5.580,0	4	8.918,8	8	17.144,2	3	997,5
Sektor Tersier	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	273,3	2	16,6



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)
	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jasa Lainnya	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	160,4
	Jumlah	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	2	273,3	3	177,0
Total		9	64.158,3	14	7.614,0	5	7.211,4	11	15.160,0	16	10.525,3	17	20.447,4	12	2.880,9

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018

Tabel 2.96 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)	Proyek	Investasi (Rp Juta)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	1.810,1	4	-	2	66.902,4	6	120.405,8	4	-	6	752,9	4	-
	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	2	4.700,0	-	-	-	-	-	-
	Perikanan	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)
	Pertamban gan	-	-	2	534.830,7	-	3.000,0	2	-	-	-	10	35.247,7	8	0,6
	Jumlah	2	1.810,1	8	534.830,7	4	69.902,4	10	125.105,8	4	-	16	36.000,6	12	0,6
Sektor Sekunder	Industri Makanan	10	37.693,0	12	12.240,8	6	272.872,6	2	3.534,7	6	34.782,2	20	307.036,2	18	62.063,2
	Industri Kertas dan Percetaka n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Industri Karet dan Plastik	2	-	2	13.906,5	2	-	-	-	4	39.659,3	4	21,5	2	-
	Industri Mineral Non Logam	-	-	2	-	2	-	2	58.600,0	-	-	2	2.400,0	-	-
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan nya	4	20.353,0	2	149,1	-	-	2	70.107,5	2	-	2	-	-	-
	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Jumlah	16	58.046,0	18	26.296,4	10	272.872,6	6	132.242,2	12	74.441,5	30	309.457,7	24	62.063,2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)	Proy ek	Investasi (Rp Juta)
Sektor Tersier	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	639.389,6
	Perdagang an dan Reparasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Transport asi, Gudang, dan Telekomu nikasi	-	-	6	3.993.877,8	2	432.932,4	2	-	2	-	2	-	-	-
	Jasa Lainnya	2	26.131,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	26.131,5	6	3.993.877,8	2	432.932,4	2	-	2	-	2	-	4	639.389,6
	Total	20	85.987,6	32	4.555.004,9	16	775.707,4	18	257.348,0	18	74.441,5	48	345.458,3	40	701.453,4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Kepemudaan

Pembangunan Pemuda merupakan agenda strategis baik secara nasional maupun di daerah dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 12 pemuda di Kalimantan Selatan adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan pemuda ini perlu didukung dan ditopang oleh beragam kebijakan berbasis data dan informasi. Pada tahun 2017, Indonesia telah merilis data terkait Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *sustainable development goals*). Indeks tersebut mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, Kalimantan Selatan berada dalam kelompok terbawah bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Meski telah mencatat dua poin kenaikan indeks dari tahun sebelumnya, peringkat Kalimantan Selatan justru turun dari 31 ke 34. Hal ini sekali lagi menunjukkan pentingnya akselerasi pembangunan. Dalam pertumbuhan yang terbatas, capaian relatif suatu provinsi dapat tertinggal dari provinsi lain dengan pertumbuhan yang lebih besar, apalagi jika titik pijak IPP juga tertinggal. Kalimantan selatan sesungguhnya membukukan juga perubahan impresif hingga 10 poin dalam domain kesehatan dan kesejahteraan. Tidak dari empat indikator di dalamnya menunjukkan perbaikan. Walau demikian, domain-domain lain dan indikator-indikator penopangnya praktis tidak berubah. Bahkan, indikator APK perguruan tinggi menurun, karena nilai sub-indeksnya turun dari

tiga poin menjadi dua poin. Empat indikator lain yang terhitung rendah dan membutuhkan perhatian kebijakan adalah partisipasi pemuda dalam organisasi, pemuda memberikan pendapat dalam rapat kemasyarakatan, pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi, serta pemuda wirausaha (*white collar*) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada domain pendidikan, terdapat 3 indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi. Data rata-rata lama sekolah adalah berupa rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dialami. APK Sekolah Menengah adalah persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun. Kemudian APK Perguruan Tinggi merupakan persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun. Melihat data tersebut, perlu dilakukan peningkatan ketiga indikator tersebut, karena jika dibandingkan data tersebut dengan indikator dari kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tanah Laut cukup tertinggal pada ketiga indikator tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.97 Indikator Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Aspek	Indikator	Persentase
1.	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,30
		APK Sekolah Menengah	84,33
		APK Perguruan Tinggi	12,90
2.	Kesehatan	Angka Keaskitan Pemuda	9,64
		Pemuda Korban Kejahatan	0,90
		Pemuda Merokok	28,04
		Fertilitas Pemuda Perempuan	4,45
		Aktivitas Olahraga Pemuda	11,21
3.	Lapangan dan Kesempatan Kerja	Indikator Pemuda Wirausaha Keras Putih	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	-
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	-
		Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	-
		Pemuda Berpendapat dalam Rapat Kemasyarakatan	-
5.		Perkawinan Usia Anak	55,47

No.	Aspek	Indikator	Persentase
	Gender dan Diskriminasi	Pemuda Perempuan sedang Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	28,98
		Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	49,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Indikator yang menjadi cerminan atas domain kesehatan dan kesejahteraan, yaitu berupa angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, dan remaja perempuan yang sedang hamil. Selain itu, untuk memperkaya analisis domain ini juga ditambahkan indikator lainnya berupa aktivitas olahraga pemuda. Data remaja perempuan yang sedang hamil digunakan untuk melihat fertilitas pemuda perempuan, karena data tersebut tidak tersedia hingga pada tahun 2018, sehingga indikator tersebut didekati dari data remaja perempuan yang pernah melakukan kawin. Angka kesakitan pemuda merupakan data persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Pemuda korban kejahatan adalah pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Persentase pemuda merokok adalah persentase pemuda umur 16-30 tahun yang pernah merokok dalam seminggu terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Selanjutnya aktivitas olahraga pemuda adalah pemuda yang melakukan aktivitas olahraga pada selang waktu seminggu terakhir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan domain lapangan dan kesempatan kerja adalah indikator pemuda wirausaha kerah putih (*white collar*) yaitu persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan jenis jabatan white collar (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun. Indikator selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka pada pemuda yaitu persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16-30 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, tiga indikator digunakan untuk menggambarkan domain ini yaitu partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan yaitu persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Indikator kedua adalah partisipasi pemuda dalam organisasi yaitu persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Indikator ketiga adalah pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, yaitu persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut dalam kelompok umur 16-30 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018). Pada tahun 2017, Dalam rangka peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah merekrut 20 orang tenaga Pemuda Penggerak Pembangunan Perdesaan. Pemuda yang telah direkrut tersebut ditempatkan di 10 kecamatan dan tersebar di 20 desa pada kecamatan-kecamatan tersebut.

Domain gender dan diskriminasi diperoleh dari indikator berupa perkawinan usia anak, pemuda perempuan yang sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta indikator pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Indikator perkawinan usia anak adalah berupa persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun. Indikator kedua yaitu pemuda perempuan yang sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi diperoleh dari persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 16-24 tahun. Indikator ketiga adalah pemuda perempuan bekerja di sektor formal yaitu persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun. Indikator yang seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam domain ini namun belum dimasukkan ke dalam indikator adalah berupa kesenjangan akses yang dirasakan oleh pemuda disabilitas. Perlu adanya perhatian pemerintah kepada pemuda disabilitas mengingat diskriminasi seringkali terjadi pada pemuda disabilitas, baik berupa moral, material, maupun sarana dan prasarana yang diperoleh mereka (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Olah Raga

Untuk menunjang kegiatan olah raga di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 1 gelanggang olah raga di tingkat kabupaten yang cukup representatif untuk menyelenggarakan kegiatan di dalam ruangan yaitu Gelanggang Olah Raga (GOR) Pelaihari. Selain telah memiliki GOR, fasilitas kegiatan olahraga seperti sepakbola, basket, dan voli di Kabupaten Tanah Laut juga tersebar di seluruh kecamatan baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga telah memberikan insentif kepada 350 atlet dan 58 pelatih dari berbagai cabang olahraga. Insentif tersebut perlu diberikan agar atlet dan pelatih semakin bersemangat menghadapi Porprov yang akan menjadi ajang pembuktian mereka selanjutnya. Dalam kaitannya dengan peran serta Kabupaten Tanah Laut dalam memajukan urusan kepemudaan dan olahraga, pada bulan Juli 2017, Kabupaten Tanah Laut menjadi salahsatu kabupaten yang ditunjuk ditunjuk Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai tuan rumah Gowes Pesona Nusantara 2017. Kabupaten/kota di Kalsel yang ditunjuk Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai tuan rumah adalah, kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Acara Gowes Pesona Nusantara dilaksanakan serentak tanggal 22 Juli 2017. Gowes Pesona Nusantara dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia untuk sehat, bugar dan berkarakter melalui olahraga. Gowes Pesona Nusantara merupakan program nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk gemar berolahraga, khususnya bersepeda. Selain menjadi tuan rumah Gowes pesona Nusantara 2017. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pembinaan olahraga tradisional. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan melakukan seleksi atlit yang akan mengikuti Fetival Olahraga Tradisional. Jenis olahraga tradisional yang dibina diantaranya adalah Asinan, Batungkau, Kurtau, Balogo, Sumpit, Dagongan, dan Trompah.

2.3.1.20 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tanah Laut telah merangkum berbagai statistik Kabupaten Tanah Laut. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Tanah Laut. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kabupaten dalam angka; (2) Buku Statistik Daerah;

dan (3) Buku PDRB Kabupaten. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.98. Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2012-2017 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Tanah Laut dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.98 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

No.	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Tanah Laut yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Laut dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Tanah Laut baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2012-2017, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts 2008* seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations*. Tidak hanya data statistik yang bersumber dari Publikasi BPS, langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memuat seluruh data hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga adanya Tanah Laut Integrasi Data dimana hasil pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terkumpul dalam satu data integratif sehingga memudahkan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

2.3.1.21 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah

informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi perbulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, 2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.

2.3.1.22 Kebudayaan

Walaupun mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh Suku Banjar dan Suku Jawa, namun terdapat beberapa suku bangsa lainnya seperti Suku Madura, Sunda, Bukit, Bakumpai, Mandar, dll. Suku Dayak yaitu suku bangsa asli di Kalimantan yang tersebar di beberapa lokasi. Salah satu lokasinya berada di Kabupaten Tanah Laut. Suku Dayak atau sering disebut Suku Dayak Maratus yang berada di Kabupaten Tanah Laut adalah Dayak Bukit. Penduduk Suku Dayak yang tinggal di pedalaman biasanya memiliki kebiasaan dan tradisi yang khas, seperti pola huniannya. Pola hunian utama Suku Dayak yaitu pola rumah tunggal berbentuk rumah panggung yang mengelompok dan pola hunian di balai dengan tata ruang seragam. Dengan berbagai suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka berbagai budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut menjadi sebuah kekayaan yang bernilai bagi perkembangan seni budaya di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut juga memiliki tarian khas yaitu Tari Batatungkal, tarian ini diangkat dari upacara adat Suku Biaju dari Bajuin, upacara ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu dan untuk memperoleh semangat batu agar mendapatkan hasil panen yang lebih berkah. Selain itu terdapat pula upacara adat Balian, upacara adat ini merupakan kegiatan tradisi yang menggambarkan

aturan-aturan dari nenek moyang Suku Dayak Maratus dan bertujuan untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kampungnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan upacara adat ini dikelola oleh pemilik Belian yaitu meliputi Masni (Kepala Pimpinan Balian), Anang Idar, Nayan, Jainuddin sebagai penerjemahsaat penari belian dimasuki roh-roh nenek moyang Suku Dayak Maratus. Lokasi pelaksanaan acara adat Balian dilaksanakan di dalam balai kampung Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap (kalsel.kemenag.go.id).

Pada Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa terdapat empat obyek wisata budaya di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan cagar budaya Desa Riam Adungan yang berlokasi di Kecamatan Kintap, situs sejarah di Desa Tabanio Kecamatan Takisung, dan juga Bunker Jepang terletak di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036).

Tabel 2.99 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung
2.	Cagar Budaya Desa Riam Adungan	Riam Adungan, Kintap
3.	Bunker Jepang	Sungai Bakar, Bajuin

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.3.1.23 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah bahan pustaka yang disediakan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu. Tujuan dari perpustakaan sendiri yaitu untuk meningkatkan angka melek huruf, meningkatkan peran budaya baca dalam menyerap pengetahuan, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, dan juga sebagai salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan. Kabupaten Tanah Laut memiliki satu unit perpustakaan umum yaitu Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Angsau, Kecamatan Pelaihari.

Apabila dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut pun berbeda-beda di setiap tahunnya. Realisasi anggaran ada tahun 2011 sebesar Rp189.836.825, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi Rp145.895.100. Pada tahun 2013 realisasi anggarannya naik hingga mencapai Rp2.477.999.111, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi Rp2.165.235.301. sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 realisasi anggarannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan masing-masing sebesar

Rp8.470.984.250 dan Rp5.047.831.382, peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan gedung perpustakaan baru yang dimulai di tahun 2015. Program-program lain yang juga menjadi tanggung jawab urusan perpustakaan diantaranya pembangunan gedung perpustakaan dan prasarana perpustakaan, dan program pengadaan rak buku perpustakaan.

2.3.1.24 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Dalam menjalankan program-program tersebut pengalokasian anggaran dari pemerintah menjadi hal yang penting. Pada umumnya alokasi dana untuk bidang kearsipan menjadi satu dengan urusan perpustakaan, sehingga sulit untuk membedakan pos dana untuk kearsipan atau perpustakaan. Program-program yang ada di urusan perpustakaan antara lain program pengumpulan data kearsipan, program pemeliharaan jaringan informasi kearsipan, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen. Sedangkan indikator pencapaian bidang kearsipan dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dan juga dari peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu dengan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Garis pantai Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan Laut Jawa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial, yang meliputi sektor perikanan, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Akan tetapi, potensi di bidang kelautan dan perikanan tersebut belum termanfaatkan secara optimal, sehingga di masa mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, pemenuh kebutuhan konsumsi masyarakat,

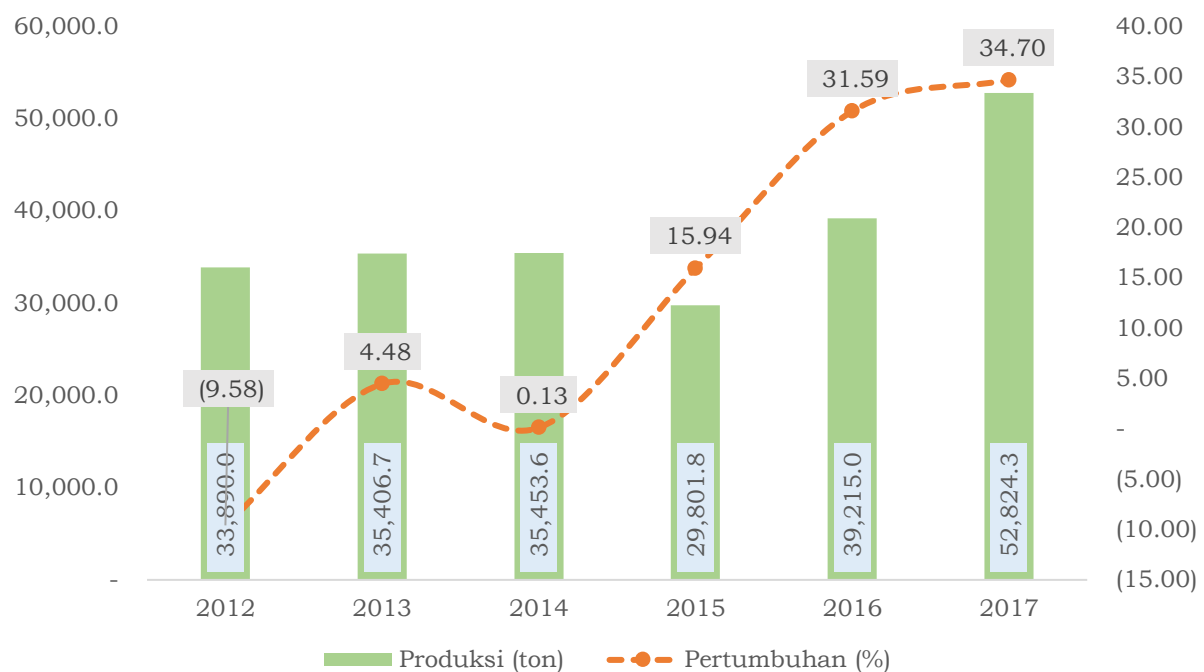
dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian kondisi perairan juga dipengaruhi oleh perubahan musim yaitu musim dari barat ke timur atau sebaliknya yang akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain.

Selain mengembangkan potensi yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perairan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan perubahannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem pesisir yang terdiri dari komponen hayati dan nirhayati saling berhubungan saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu dalam menjamin kelestarian sumber daya alam juga perlu memperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem. Program utama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perairan yaitu dengan mempertahankan ekosistem pantai seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan estuaria.

Kawasan konservasi atau lindung laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 yaitu meliputi kawasan konservasi tanaman bakau pesisir pantai dan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan. Kawasan konservasi pesisir pantai ini berada di Kecamatan Bumi Makmur dengan luas lahan kurang lebih 267,97 Ha. Sedangkan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan merupakan kawasan suaka alam Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas Kawasan Suaka Margasatwa Batakan kurang lebih 3.068,38 hektar, yang terdiri dari kawasan konservasi pesisir dan kawasan permukiman. Kawasan konservasi pesisir menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan memiliki luas kurang lebih 443,8685 Ha. Selain kawasan suaka margasatwa Desa batakan Kecamatan Panyipatan juga memiliki kawasan taman wisata alam Pantai Batakan dengan luas 1.368,02 hektar.

Jika dilihat dari volume produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Tanah Laut tahun 2012-2016 pada Gambar 2.21 terlihat bahwa dari waktu ke waktu

cenderung mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2012 hingga tahun 2014 masing-masing sebesar 33.890 ton, 35.406,7 ton dan 35.453,6 ton. Namun demikian, produksi di tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 15,94%, yaitu dengan jumlah produksi sebesar 29.801,8 ton. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 31,59%, yaitu dengan volume produksi mencapai 39.215 ton. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut mencapai level tertingginya yaitu sebesar 34,70% sehingga produksinya menjadi sebesar 52.824,3 ton. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut semakin optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan kapal motor sehingga jangkauannya makin luas. Peningkatan jumlah produksi tangkap laut juga dapat diupayakan dengan menambah fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai untuk bersandarnya kapal motor besar.



Gambar 2.21 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Melihat produksi per jenis ikan pada perikanan tangkap laut, terdapat 7 jenis komoditas ikan yang paling banyak ditangkap nelayan adalah udang putih dengan produksi sebesar 5.790 ton, diikuti manyung sebesar 5.617 ton, cumi-cumi sebesar 2.815 ton, pari sebesar 2.684 ton, gulamah sebesar 2.610 ton, peperek sebesar

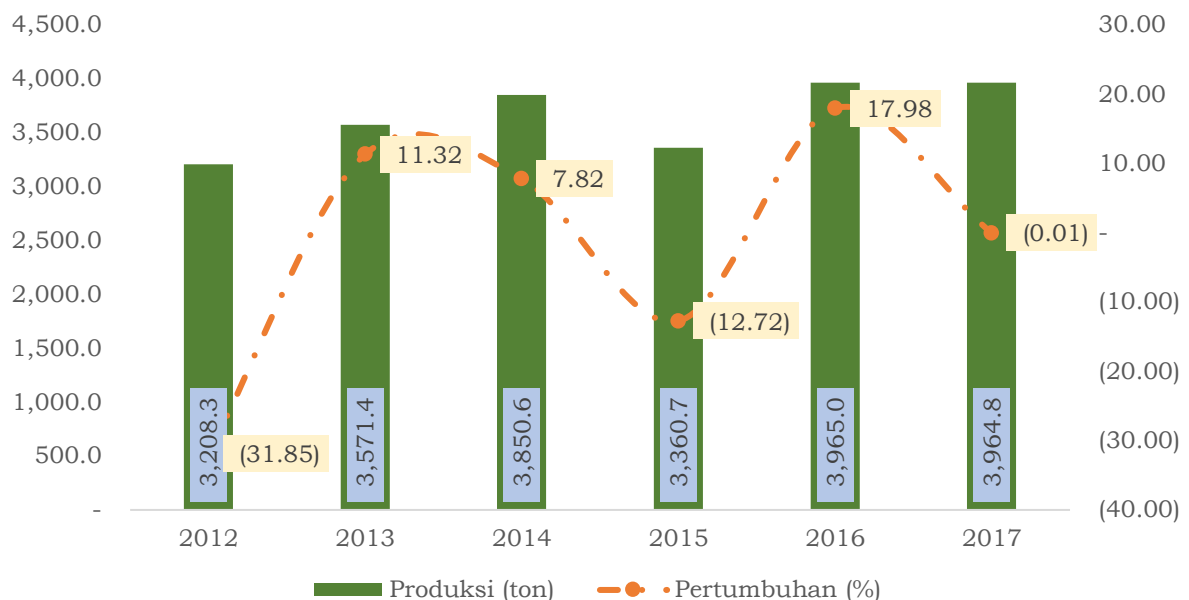
2.534 ton, dan udang windu sebesar 2.439 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa ada berragam jenis komoditas perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki nilai produksi tinggi terutama jenis udang-udangan, ikan demersal, dan ikan pelagis besar. Secara keseluruhan, nilai produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,21 triliun. Nilai produksi ikan terbesar adalah manyung dengan nilai produksi sebesar Rp 120,21 miliar, disusul udang windu sebesar Rp 118,53 miliar, udang putih sebesar Rp 110,74 miliar, cumu-cumi sebesar Rp 80,54 miliar, dan tenggiri sebesar Rp 61,09 miliar.

Tabel 2.100Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Peperek	2.534	23.710.638
2.	Manyung	5.617	120.208.602
3.	Bambangan	655	15.527.366
4.	Kakap Putih	1.222	34.973.478
5.	Gulamah	2.610	45.462.487
6.	Pari	2.684	47.983.394
7.	Bawal Putih	1.557	51.123.864
8.	Selar	2.131	20.560.000
9.	Belanak	28	20.677.351
10.	Kuro/Senangin	55	676.500
11.	Teri	684	18.250.960
12.	Tembang	45	52.746
13.	Tenggiri Papan	2.006	42.344.112
14.	Tongkol	2.229	54.163.224
15.	Tenggiri	2.420	65.544.526
16.	Udang Windu	2.439	118.531.610
17.	Udang Putih	5.790	110.739.568
18.	Udang Lain	9.030	245.818.046
19.	Cumi-cumi	2.815	80.540.000
20.	Kembung	350	5.292.431
21.	Ikan Lainnya	4.771	61.091.292
22.	Rajungan	1.152	26.502.900
Jumlah		52.824	1.209.775.095

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Selain potensi di perikanan tangkap laut, Kabupaten Tanah Laut juga berpotensi dalam perikanan tangkap perairan umum. Berdasarkan Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa selama periode 2012-2017 produksinya cenderung meningkat. Jumlah produksi perikanan perairan umum pada tahun 2012 merupakan produksi terendah sepanjang periode dengan penurunan dari tahun 2011 sebesar 31,85% atau produksi sebesar 3.208,3 ton. Kemudian pada dua tahun selanjutnya naik lagi secara berturut-turut masing-masing sebesar 3.571,4 ton dan 3.850,6 ton. Sama seperti produksi tangkap laut yang mengalami penurunan pada tahun 2015 produksi perikanan umum juga mengalami penurunan sebesar 12,72% menjadi 3.360,7 ton. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 17,98% dengan jumlah produksi sebesar 3.965 ton. Pada tahun 2017, produksi perikanan umum sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 3.964,8 ton.



Gambar 2.22 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Jika dilihat dari sisi produksi per jenis ikan pada perairan umum, produksi ikan terbesar adalah untuk komoditas gabus yaitu sebesar 703,9 ton, disusul oleh betook/papuyu sebesar 658,7 ton, tawes sebesar 496,6 ton, sepat siam sebesar 490,7 ton, dan sepat rawa sebesar 459,8 ton. Nilai produksi keseluruhan perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 67,72 miliar. Nilai terbesar komoditas perairan umum pada tahun 2017 adalah udang galah yaitu

sebesar Rp 15,78 miliar, diikuti gabus sebesar Rp 12,67 miliar, betook/papuyu sebesar Rp 11,86 miliar, baung sebesar Rp 8,1 miliar, dan sepat siam sebesar 5,89 miliar. Secara rinci, jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.101Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Betok/Papuyu	658,7	11.856.922
2.	Baung	324,0	8.100.620
3.	Sepat Rawa	459,8	4.597.942
4.	Sepat Siam	490,7	5.887.892
5.	Gabus	703,9	12.669.479
6.	Lele	14,6	116.570
7.	Tawes	496,6	4.965.958
8.	Lais	37,1	667.940
9.	Patin Jambal	71,8	718.211
10.	Ikan Lainnya	148,3	1.038.652
11.	Udang Galah	394,6	15.782.213
12.	Udang Lainnya	164,7	1.317.516
Jumlah		3.964,8	67.719.915

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Alat tangkap adalah sarana yang digunakan oleh manusisa untuk mempermudah penangkapan ikan dengan tujuan untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal. Jenis alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh terhadap jenis ikan yang ditangkap, sehingga alat tangkap merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan. Misalnya penggunaan alat tangkap pancing digunakakn untuk menangkap jenis ikan pelagis besar, sedangkan pukot cincin digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Selain itu berpengaruh pula pada jumlah produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan berbagai jenis alat tangkap di Kabupaten Tanah Laut akan berpengaruh pada beragamnya hasil tanggapan dan jumlah produksi ikan yang diperoleh. Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan adalah lampara, jaring insang hanyut (rengge), jaring insang tetap, pancing tonda, dan rawai.

Salah satu komponen penting yang berpengaruh pada jumlah produksi perikanan tangkap laut adalah jumlah dan komposisi armada penangkapan.

Penggunaan armada modern kapal motor yang semakin banyak akan memperluas jangkauan wilayahnya sehingga akan meningkatkan produktivitas per unit armada. Pada tahun 2017 jumlah armada perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.067 unit yang terdiri dari 90 unit perahu tanpa motor (PTM), 24 unit perahu motor tempel (PMT), dan 1.953 unit kapal motor. Tiga kecamatan yang menggunakan kapal motor terbanyak adalah Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 590 unit, Panyipatan sebanyak 357 unit, dan Jorong sebanyak 289 unit. Sedangkan penggunaan PTM terbanyak di Kecamatan Panyipatan sebanyak 54 unit, dan penggunaan perahu motor temple di Kecamatan Takisung dengan jumlah armada 23 unit. Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan kapal motor untuk menangkap ikan lebih banyak dari jenis perahu PTM dan perahu motor tempel sehingga wajar jika pada tahun 2016 jumlah produksi tangkap laut meningkat hingga mencapai 31,59%.

Tabel 2.102 Jumlah Perahu Menurut Kecamatan dan Jenis (unit), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Perahu		
		PTM	PMT	Kapal Motor
1.	Panyipatan	54	-	357
2.	Takisung	6	23	590
3.	Kurau	15	-	217
4.	Bumi Makmur	-	-	282
5.	Bati-Bati	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-
10.	Jorong	-	1	289
11.	Kintap	15	-	218
Jumlah		90	24	1.953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 2.213 unit. Angka tersebut bertambah jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebanyak 1.866 unit. Di Kabupaten Tanah Laut, rumah tangga perikanan tangkap laut tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Jorong, dan Kintap. Kecamatan dengan rumah

tangga perikanan tangkap laut terbanyak berada di Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 740 unit. Untuk rumah tangga perairan umum, jumlahnya secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.475 unit. Rumah tangga perairan umum sendiri tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bumi Makmur yaitu sebanyak 314 unit.

Tabel 2.103 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sub-sektor		
		Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
1.	Panyipatan	401	158	559
2.	Takisung	740	54	794
3.	Kurau	253	254	507
4.	Bumi Makmur	284	314	598
5.	Bati-Bati	-	248	248
6.	Tambang Ulang	-	50	50
7.	Pelaihari	-	165	165
8.	Bajuin	-	19	19
9.	Batu Ampar	-	9	9
10.	Jorong	306	200	506
11.	Kintap	229	4	233
Jumlah		2.213	1.475	3.688

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum Kabupaten Tanah Laut juga memiliki produksi perikanan yang berasal dari perikanan budidaya. Jenis budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah tambak, kolam, keramba, dan jaring apung. Pada tahun 2017, jumlah produksi perikanan budidaya adalah sebesar 1.157,46 ton. Produksi tambak adalah sebesar 933,76 ton dimana produksi berasal dari Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Kintap. Untuk kolam, produksinya berasal dari seluruh kecamatan dengan produksi total mencapai 171,3 ton. Produksi kolam terbesar berasal dari Kecamatan Pelaihari yang mencapai 94,5 ton, diikuti Kecamatan Jorong sebesar 23,83 ton, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 19,03 ton. Pada budidaya keramba, produksinya sebesar 30,50 ton dan berasal dari Kecamatan Bati-bati, sedang produksi jaring apung sebesar 21,90 ton berasal dari Kecamatan Pelaihari.

Tabel 2.104Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	3,88	-	-
2.	Takisung	-	7,34	-	-
3.	Kurau	43,04	2,00	-	-
4.	Bumi Makmur	592,96	2,30	-	-
5.	Bati-Bati	-	19,03	30,50	-
6.	Tambang Ulang	-	10,34	-	-
7.	Pelaihari	-	94,50	-	21,90
8.	Bajuin	-	1,65	-	-
9.	Batu Ampar	-	5,43	-	-
10.	Jorong	-	23,83	-	-
11.	Kintap	297,76	1,00	-	-
Jumlah		933,76	171,30	30,50	21,90

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Pada budidaya tambak, jenis ikan yang diproduksi adalah bandeng yaitu sebesar 583,60 ton, disusul udang windu sebesar 291,80 ton, dan udang putih sebesar 58,36 ton. Untuk budidaya kolam, jenis ikan yang diproduksi adalah lele (114 ton), patin (46 ton), nila (9 ton), dan ikan mas (1,10 ton). Pada budidaya karamba, komoditas yang dikembangkan adalah ikan mas dan nilai dengan produksi masing-masing sebesar 23,10 dan 7,40 ton, sedangkan ikan yang dikembangkan pada budidaya jaring apung adalah nila dengan produksi sebesar 21,90 ton. Nilai produksi budidaya tambak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 24,98 miliar, kolam sebesar Rp 2,78 miliar, keramba sebesar Rp 831,80 juta, dan jaring apung sebesar Rp 547,50 juta.

Tabel 2.105Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Bandeng	583,60	-	-	-
2.	Udang Windu	291,80	-	-	-
3.	Udang Putih	58,36	-	-	-
4.	Ikan Mas	-	1,10	23,10	-
5.	Nila	-	9,00	7,40	21,90
6.	Lele	-	114,00	-	-

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
7.	Patin	-	46,00	-	-
8.	Lainnya	-	1,20	-	-
Jumlah		933,76	171,30	30,50	21,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Rumah tangga perikanan yang terlibat dalam kegiatan perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah sebanyak 861 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 130 unit, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 121 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 94 unit. Dari sisi jenis budidaya, jumlah rumah tangga perikanan terbanyak adalah rumah tangga perikanan budidaya kolam yaitu sebanyak 676 unit, disusul rumah tangga perikanan budidaya tambak sebesar 137 unit, rumah tangga perikanan budidaya jaring apung sebanyak 30 unit, dan rumah tangga perikanan budidaya keramba sebanyak 18 unit.

Tabel 2.106 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	50	-	-
2.	Takisung	24	70	-	-
3.	Kurau	27	55	-	-
4.	Bumi Makmur	26	55	-	-
5.	Bati-Bati	-	70	18	-
6.	Tambang Ulang	-	45	-	-
7.	Pelaihari	-	100	-	30
8.	Bajuin	-	45	-	-
9.	Batu Ampar	-	70	-	-
10.	Jorong	-	55	-	-
11.	Kintap	60	61	-	-
Jumlah		137	676	18	30

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.2.2 Pariwisata

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya

secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain. Sementara itu menurut Bappenas (2015), arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, pembangunan industri pariwisata nasional dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk maupun jasa pariwisata nasional di setiap lokasi pariwisata yang ingin dipasarkan, dan pembangunan kelembagaan pariwisata yaitu melalui pembangunan sumberdaya manusia dan organisasi kepariwisataan nasional.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih terdapat berbagai jenis obyek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata pantai, wisata sejarah dan budaya, wisata alam, dan wisata taman. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), hingga saat ini terdapat 25 obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian masih ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi para wisatawan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung.

Hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama terutama destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran juga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dibidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah daftar obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.107 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2018

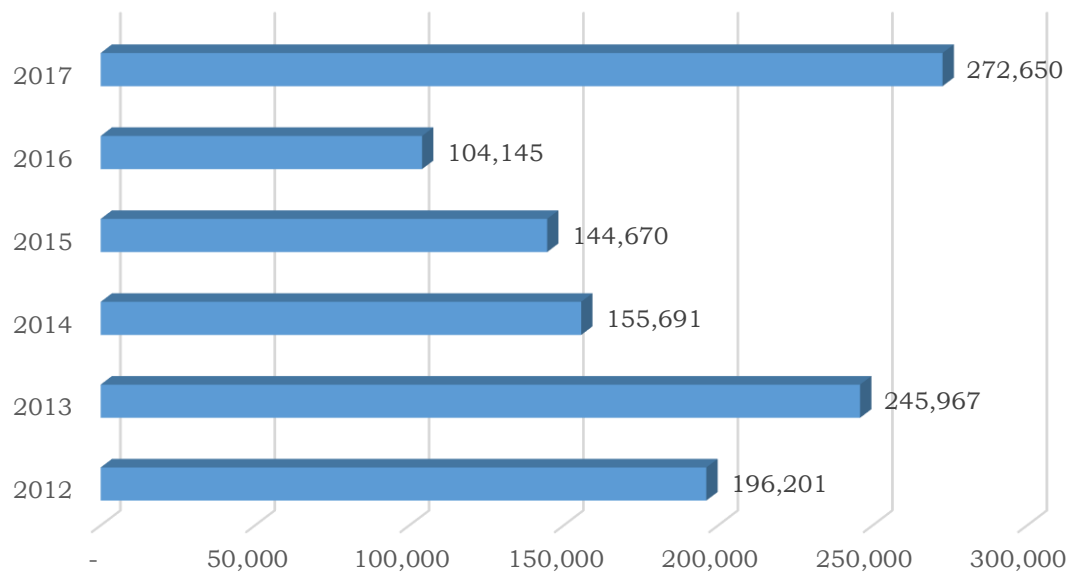
No.	Nama	Lokasi	Jenis	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
1.	Pantai Takisung	Takisung, Takisung	Alam	22 km
2.	Pantai Batakan	Batakan, Panyipatab	Alam	40 km



No.	Nama	Lokasi	Jenis	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
3.	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Alam	41 km
4.	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Alam	42 km
5.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
6.	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25 km
7.	Air Terjun Hamindra	Tanjung, Pelaihari	Alam	17 km
8.	Air Terjun Habulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18 km
9.	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 km
10.	Kawasan Goa Marmer	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
11.	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19 km
12.	Mina Tirta	Pusat Kota Pelaihari	Alam	1 km
13.	Tanjung Dewa	Tanjung Dewa, Panyipatan	Alam	40 km
14.	Kerbau Rawa	Benua Raya, Bati-bati	Alam	26 km
15.	Air Terjun Lalaran	Pamalongan, Bajuin	Alam	14 km
16.	Bekantan	Swarangan, Jorong	Alam	39 km
17.	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Alam	15 km
18.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung	Sejarah	25 km
19.	Pulau Datu Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Religius	38 km
20.	Datu Insad	Sambangan, Bati-bati	Religius	33 km
21.	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Religius	6 km
22.	Tanam Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1 km
23.	Taman Hutan Kota	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
24.	Taman Kijang Kencana	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
25.	Bumi Perkemahan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Buatan	9 km

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, obyek wisata yang diminati di Kabupaten Tanah Laut adalah pantai. Jumlah kunjungan tertinggi wisatawan di Kabupaten Tanah Laut adalah di Pantai Takisung yang dikunjungi 84.286 wisatawan. Obyek wisata selanjutnya yang menjadi favorit adalah Pantai Batakan yaitu sebanyak 29.924 wisatawan, dan Pantai Sarangan sebanyak 8.268 wisatawan. Obyek wisata lain yang juga cukup diminati wisatawan adalah Gunung Kayangan dan Air Terjun Bajuin yang masing-masing dikunjungi 9.500 dan 4.529 wisatawan. Melihat pada bulan kunjungan, terlihat bahwa pada bulan Januari, Mei, dan Juli menjadi puncak kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 2.23 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Selama periode 2012-2016 terlihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut semakin menurun. Jumlah pengunjung tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 245.967 pengunjung tumbuh sebesar 25,36% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 36,70% menjadi 155.691 pengunjung. Demikian pula pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami penurunan berturut-turut yaitu masing-masing sebesar 144.670 dan 104.145 pengunjung. Dari dapat tersebut menunjukkan bahwa semakin tidak diminatinya obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu dilakukan upaya-upaya seperti promosi perbaikan fasilitas pendukung dan juga mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengoptimalkan

potensi pariwisata. Pada tahun 2017, upaya promosi dan perbaikan fasilitas destinasi wisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana jumlah wisatawan melonjak signifikan menjadi sebanyak 272.650 wisatawan.

Data wisatawan asing dan domestik di tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya ada 15 orang wisatawan asing berkunjung di Kabupaten Tanah Laut yakni 3 orang di bulan Juni dan 12 orang di bulan Agustus. Sedangkan wisatawan domestik sepanjang tahun cukup berfluktuatif. Pengunjung domestik tertinggi di tahun 2017 pada bulan Januari yaitu sebanyak 60.611 wisatawan, disusul pada bulan Juli sebanyak 50.918 wisatawan, dan Desember sebanyak 33.324 wisatawan. Sedangkan pengunjung terendah pada bulan November yang hanya sebanyak 7.170 wisatawan. Dari segi fasilitas pendukung pariwisata, berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dipaparkan bahwa terdapat 27 hotel dengan 225 kamar yang tersebar di Kecamatan Pelaihari dan Jorong.

Tabel 2.108 Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	60.611	-
2.	Februari	16.935	-
3.	Maret	14.087	-
4.	April	15.388	-
5.	Mei	21.380	-
6.	Juni	11.258	3
7.	Juli	50.918	-
8.	Agustus	10.751	12
9.	September	19.698	-
10.	Oktober	11.115	-
11.	November	7.170	-
12.	Desember	33.324	-
Jumlah		272.635	15

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dengan target wisatawan yang sebagian besar domestik, rata-rata lama menginap wisatawan di Kabupaten Tanah Laut hanya berkisar antara 1-2 hari pada setiap kunjungan. Untuk wisatawan domestik, rata-rata lama tamu menginap adalah selama 1,01 hari dan pada bulan Agustus selama 1,12 hari. Sementara itu,

pada wisatawan domestik, rata-rata lama menginap tertinggi adalah pada bulan Juni yaitu selama 2,59 hari, disusul pada bulan Desember selama 2,23 hari, dan bulan Januari selama 2,14 hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Laut datang ke tempat wisata kemudian langsung pulang kembali setelah mengunjungi obyek wisata.

Tabel 2.109 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing Asing dan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	2,14	-
2.	Februari	1,15	-
3.	Maret	1,11	-
4.	April	1,44	-
5.	Mei	1,52	-
6.	Juni	2,59	1,01
7.	Juli	1,82	-
8.	Agustus	1,27	1,12
9.	September	1,21	-
10.	Oktober	1,56	-
11.	November	1,12	-
12.	Desember	2,23	-

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam susenas adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Data BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan persentase penduduk yang bepergian 6 bulan terakhir baik pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan di antara kedua tahun tersebut. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bepergian adalah 38,25% dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 38,37% dan penduduk berjenis kelamin perempuan yang bepergian sebanyak 38,12%

Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Perjalanan Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-laki	24,41	38,37
Perempuan	23,71	38,12
Laki-laki + Perempuan	24,06	38,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase penduduk Kabupaten Tanah Laut yang melakukan bepergian pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016. Peningkatan ini diduga karena sudah semakin *mobile*-nya penduduk dan menjadi suatu alasan munculnya hipotesis bahwa jika penduduk melakukan bepergian karena berlibur, maka penduduk Kabupaten Tanah Laut sudah semakin sejahtera. Lebih tingginya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melakukan bepergian pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa preferensi laki-laki untuk *mobile* atau melakukan bepergian cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan angka tersebut menjadi fenomena yang kerap terjadi di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Penduduk dengan jenis kelamin perempuan cenderung melakukan aktivitas yang mayoritas dilakukan di dalam rumah baik berupa pekerjaan maupun aktivitas lain. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih *mobile* untuk urusan terkait bisnis, pendidikan, profesi, dsb.

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

Tanaman Pangan

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan

untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 mencapai 74.061 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 7.209 ha dan sawah non irigasi seluas 66.852 ha. Sawah non irigasi di Kabupaten Tanah Laut tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan sawah irigasi hanya terdapat di 7 kecamatan. Luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 1.936 ha, sedangkan sawah non irigasi terluas berada di Kecamatan Bati-bati yaitu seluas 11.500 ha. Berdasarkan data luas sawah pada tabel dibawah maka dapat dikatakan bahwa sawah non irigasi mempunyai wilayah yang sangat luas dibandingkan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur pengairan sangat diperlukan, sehingga pengairan sawah tidak akan hanya bergantung pada air dari alam yang nantinya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan kemandirian pangan.

Tabel 2.111 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Panyipatan	1.389	8.130	9.519
2.	Takisung	1.625	5.646	7.271
3.	Kurau	-	8.257	8.257
4.	Bumi Makmur	-	5.098	5.098
5.	Bati-Bati	-	11.500	11.500
6.	Tambang Ulang	-	6.530	6.530
7.	Pelaihari	1.936	10.724	12.660
8.	Bajuin	1.249	5.123	6.372
9.	Batu Ampar	630	538	1.168
10.	Jorong	270	4.303	.,573
11.	Kintap	110	1.003	1.113
Jumlah		7.209	66.852	74.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain lahan sawah, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan data luas lahan yang ada, lahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar sudah dimanfaatkan. Hal ini terlihat pada luas lahan yang sementara tidak digunakan

mempunyai luas yang kecil yaitu sebesar 8.579 ha dibandingkan jumlah lahan tegal dan ladang yaitu sebesar 42.125 ha. Secara keseluruhan, luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 34.295 ha. Kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Takisung dengan luas 7.589 ha, disusul Kecamatan Panyipatan dengan luas 6.597 ha, dan Kecamatan Jorong dengan luas 5.572 ha. Sementara itu, luas ladang/huma di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 7.830 ha. Luasan ladang/huma terbesar berada di Kecamatan Palaihari yaitu sebesar 1.813 ha, diikuti oleh Kecamatan Bajuin sebesar 1.297 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 1.295 ha.

Tabel 2.112 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Lahan		
		Tegal/Kebun	Ladang/huma	Sementara Tidak Diusahakan
1.	Panyipatan	6.597	650	200
2.	Takisung	7.589	-	2.334
3.	Kurau	450	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	1.500	1.120	1.542
6.	Tambang Ulang	1.904	1.295	1.445
7.	Pelaihari	1.936	1.813	265
8.	Bajuin	1.264	1.297	337
9.	Batu Ampar	5.333	320	181
10.	Jorong	5.572	550	1.529
11.	Kintap	2.150	785	746
Jumlah		34.295	7.830	8.579

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi sawah merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen padi sawah pada tahun 2012 adalah seluas

43.642 ha, kemudian menurun hingga tahun 2014 menjadi seluas 45.513 ha. Selanjutnya hingga tahun 2017, luas panen padi sawah meningkat signifikan menjadi seluas 53.869 ha. Dari sisi produksi, dengan peningkatan luas panen, maka produksi padi sawah juga meningkat signifikan hingga mencapai 100%. Produksi padi sawah pada tahun 2012 adalah sebesar 153.095 ton dan pada tahun 2-17 meningkat menjadi sebesar 300.819 ton. Luas panen padi sawah juga meningkat dalam kurun waktu 2012-2017 dimana luas panen pada tahun 2012 adalah seluas 2.197 ha dan pada tahun 2017 meningkat menjadi seluas 2.967 ha. Peningkatan produksi yang signifikan juga terjadi pada produksi padi ladang, produksi padi ladang pada tahun 2012 adalah sebesar 4.4646 ton dan pada tahun 2017 meningkat hampir 3 kali lipat menjadi sebesar 11.169 ton.

Tabel 2.113 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	43.642	153.095	2.197	4.646
2013	42.836	161.818	2.373	6.660
2014	42.011	151.860	2.717	7.526
2015	45.513	167.041	1.852	5.315
2016	48.613	190.927	2.651	10.336
2017	53.869	300.819	2.967	11.169

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jika dirinci menurut kecamatan, luas panen padi sawah terbesar berada di Kecamatan Kurau yang mencapai 7.873 ha, disusul Kecamatan Bumi Makmur seluas 7.656 ha, dan Kecamatan Panyipatan seluas 7.185 ha. Dari sisi produksi, produsen padi sawah terbesar justru berasal dari Kecamatan Bumi Makmur yang mencapai 49.120 ton. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas padi sawah di Kecamatan Bumi Makmur lebih baik dibandingkan Kecamatan Kurau. Posisi kedua penghasil padi sawah terbesar adalah Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 48.274 ton, dan Kecamatan Kurau sebesar 48.274 ton. Untuk padi ladang, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki luasan padi ladang yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Pelaihari. Luas panen padi ladang terbesar berada di Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 776 ha dengan produksi mencapai 3.624 ton.

Tabel 2.114 Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	7.185	48.274	776	3.624
2.	Takisung	6.705	34.239	211	690
3.	Kurau	7.873	41.989	80	22
4.	Bumi Makmur	7.656	49.120	-	-
5.	Bati-bati	6.152	29.333	2	5
6.	Tambang Ulang	4.580	22.570	45	132
7.	Pelaihari	6.809	37.805	-	-
8.	Bajuin	2.499	17.492	580	2.413
9.	Batu Ampar	1.911	9.360	329	1.076
10.	Jorong	1.445	7.373	476	1.714
11.	Kintap	1.054	3.264	468	1.493
Jumlah		53.869	300.819	2.967	11.169

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Salah satu tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah jagung. Sama seperti padi sawah, jagung juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut setelah padi. Luas panen jagung pada tahun 2016 mencapai 19.135 ha. Luas panen jagung pada tahun tersebut merupakan nilai terluas selama periode 2012 hingga 2016. Selama periode tersebut, luas panen jagung mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2013, luas panen semakin melebar menjadi 14.420 ha di mana pada tahun sebelumnya luas panen jagung hanya mencapai 14.034 ha. Setelah tahun 2012, luas panen jagung terus mengalami penurunan yaitu mencapai 13.574 pada 2014 dan 12.932 pada 2015. Pada tahun 2017, luas panen jagung kembali mengalami peningkatan menjadi seluas 24.903 ha.

Tabel 2.115 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jagung	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	14.034	77.638
2013	14.420	77.999
2014	13.574	83.596

Tahun	Jagung	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2015	12.932	81.363
2016	19.135	115.834
2017	24.903	179.556

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sejalan dengan peningkatan luas panen jagung, produktivitas jagung pada tahun 2016 juga meningkat cukup banyak yaitu dari 81.363 ton pada tahun 2015 menjadi 115.834,3 ton pada tahun 2016. Namun, peningkatan kedua aspek tersebut ternyata tidak menjamin adanya peningkatan produktivitas jagung di Kabupaten Tanah Laut. Ketika produksi meningkat pada tahun 2016, produktivitas jagung pada tahun tersebut menurun dari 6.29 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 6,05 ton/ha pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen meningkat secara signifikan menjadi seluas 24.903 ha dan diiringi peningkatan produktivitas menjadi sebesar 7,21 ton/ha. Kecamatan dengan luas panen jagung tertinggi adalah Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 7.246 ha. Dengan tingginya luas panen, maka produksi jagung tertinggi juga berada di Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 61.446 ton.

Tabel 2.116 Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jagung	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	7.246	61.446
2.	Takisung	1.301	9.363
3.	Kurau	325	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	594	3.109
6.	Tambang Ulang	1.307	9.037
7.	Pelaihari	4.270	32.727
8.	Bajuin	1.252	9.687
9.	Batu Ampar	3.837	27.995
10.	Jorong	3.550	20.958
11.	Kintap	1.221	5.234
Jumlah		24.903	179.556

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah kedelai. Luas panen kedelai mengalami peningkatan yang tajam hingga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2014, di mana luas panen kedelai berturut-turut dari tahun 2012 adalah 706 ha (2012), 707 ha (2013), dan 1.759 ha (2014). Pada tahun 2015, luas panen kedelai masih mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.819 ha. Namun, luas panen kedelai mengalami penurunan yang cukup banyak pada tahun berikutnya. Luas panen kedelai pada tahun 2016 adalah 1.290 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen kedelai berkurang secara signifikan menjadi hanya 233 ha.

Tabel 2.117 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kedelai di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kedelai	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	706	854
2013	707	859
2014	1.759	2.379
2015	1.810	2.577
2016	1.290	1.940
2017	233	647

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peningkatan maupun penurunan pada luas panen kedelai diikuti oleh peningkatan dan penurunan produksi dari kedelai. Luas panen maupun produksi mempunyai pergerakan yang sama, di mana produksi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.577 ton. Secara berturut-turut produksi kedelai Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012 hingga 2014 adalah 854 ton, 859 ton, dan 2379 ton. Pada tahun 2016, penurunan luas panen menyebabkan penurunan produksi kedelai hingga produksi kedelai mencapai 1.940 ton. Tren yang sama antara luas panen dan produksi menyebabkan produktivitas tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Produktivitas kedelai Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut hanya mempunyai selisih yang kecil. Selama periode 2012 hingga 2016, produktivitas kedelai Kabupaten Tanah Laut secara berturut-turut adalah 1,21 ton/ha; 1,21 ton/ha; 1,35 ton/ha; 1,42; dan 1,5 ton/ha. Pada tahun 2017, produktivitas kedelai justru meningkat menjadi sebesar 2,78 ton/ha.

Tabel 2.118 Luas Panen dan Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kedelai	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	20	14
2.	Takisung	148	537
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-
7.	Pelaihari	1	3
8.	Bajuin	-	-
9.	Batu Ampar	44	91
10.	Jorong	1	2
11.	Kintap	19	-
Jumlah		233	647

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan yang memiliki tanaman kedelai pada tahun 2017 adalah Kecamatan Panyipatan, Takisung, Pelaihari, Batu Ampar, Jorong, dan Kintap. Luas panen kedelai tertinggi berada di Kecamatan Takisung yaitu seluas 148 ha. Dari sisi produksi, hanya terdapat 5 kecamatan yang menyumbang produksi kedelai yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong. Dengan luas panen tertinggi, maka produksi tertinggi kedelai juga berasal dari Kecamatan Takisung yaitu sebesar 537 ton.

Tabel 2.119 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kacang Tanah	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	954	1.330
2013	641	918
2014	908	1.337
2015	657	866
2016	666	943
2017	565	1.189

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2012-2017, luas panen kacang tanah Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Luas panen kacang tanah pada tahun 2012 adalah seluas 954 ha, kemudian mengalami penurunan yang cukup luas pada tahun selanjutnya menjadi 641 ha. Pada tahun 2014, luas panen kacang tanah mengalami peningkatan hingga mencapai 908 ha, tetapi luas panen mengalami penurunan lagi pada tahun selanjutnya menjadi 657 ha. Sementara itu, luas panen kacang tanah pada tahun 2016 meningkat kembali walaupun dengan nilai yang kecil. Pada tahun tersebut, luas panen kacang merah adalah seluas 666 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen kacang tanah menurun menjadi hanya seluas 565 ha. Produksi kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut mempunyai pergerakan yang fluktuatif dan mempunyai pergerakan yang sama dengan luas panen kacang tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada luas panen kacang tanah cenderung meningkatkan produksi kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut. Berbeda dengan luas panen maupun produksi kacang tanah, produktivitas kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut mempunyai sedikit perbedaan dengan pergerakan dari produksi maupun luas panen. Selama periode 2012-2014, produktivitas kacang tanah mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,39 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 1,43 ton/ha dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai 1,47 ton/ha. Untuk tahun selanjutnya, produktivitas kacang tanah menurun menjadi 1,32 ton/ha dan meningkat lagi menjadi 1,42 ton/ha pada tahun 2016.

Tabel 2.120 Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kacang Tanah	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	11	37
2.	Takisung	333	636
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	5	30
6.	Tambang Ulang	65	144
7.	Pelaihari	5	26
8.	Bajuin	57	175
9.	Batu Ampar	4	-
10.	Jorong	12	47
11.	Kintap	75	94

No.	Kecamatan	Kacang Tanah	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
	Jumlah	567	1.189

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan yang memiliki tanaman kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 tersebar di 9 kecamatan dimana terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki tanaman kacang tanah yaitu Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Kecamatan dengan luas panen kacang tanah tertinggi adalah Kecamatan Takisung yaitu seluas 333 ha, disusul Kecamatan Kintap seluas 75 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang seluas 65 ha. Untuk produksi kacang tanah, produsen kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Takisung yaitu sebesar 636 ton, diikuti Kecamatan Bajuin sebesar 175 ton, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 144 ton.

Seperti komoditi kacang tanah, kacang hijau mempunyai luas panen dan produksi dengan pergerakan yang sama dengan luas panen maupun produksi kacang tanah. Selama periode 2012-2016, penurunan luas panen kacang hijau terjadi pada tahun 2013, di mana luas panen menurun dari 111 ha pada tahun 2012 menjadi 81 ha pada tahun 2013. Selain itu penurunan luas panen juga terjadi pada tahun 2015, di mana pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, luas panen kacang hijau Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 93 ha. Selanjutnya pada tahun 2017, luas panen kacang tanah berkurang menjadi seluas 92 ha.

Tabel 2.121 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kacang Hijau	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	111	114
2013	81	86
2014	120	127
2015	80	76
2016	93	87
2017	92	77

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Produksi kacang hijau Kabupaten Tanah Laut mempunyai pergerakan yang fluktuatif sesuai dengan pergerakan dari luas panen kacang hijau. Produksi tertinggi tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 127 ton. Sama seperti luas panen kacang hijau, penurunan produksi terjadi pada tahun 2013, yaitu dari 114 ton pada tahun 2012 menjadi 86 ton pada tahun 2013, dan tahun 2015, di mana produksi kacang tanah menjadi 86,99 ton. Untuk produktivitas, produktivitas kacang hijau tidak mempunyai penurunan maupun peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, produksi kacang hijau turun menjadi sebesar 92 ton.

Tabel 2.122 Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kacang Hijau	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	2	-
2.	Takisung	66	55
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	3	2
7.	Pelaihari	5	7
8.	Bajuin	3	3
9.	Batu Ampar	-	-
10.	Jorong	-	-
11.	Kintap	13	10
Jumlah		92	77

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Rata-rata produktivitas kacang hijau selama periode 2012-2016 adalah sebesar 1,008 ton/ha. Produktivitas mengalami peningkatan hanya pada tahun 2013, yaitu dari produktivitas sebesar 1,03 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 1,06 pada tahun 2013. Pada tahun selanjutnya tidak terjadi perubahan nilai produktivitas, tetapi produktivitas kacang hijau terus mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan nilai berturut-turut adalah sebesar 0,95 ton/ha dan 0,94 ton/ha. Untuk tahun 2017, terjadi penurunan produktivitas lahan kacang hijau menjadi sebesar 0,83 ton/ha. Produsen terbesar kacang hijau pada tahun 2017 adalah Kecamatan Takisung dengan produksi sebesar 55 ton. Tingginya

produksi kacang hijau tersebut disebabkan karena luas panen kacang hijau di Kecamatan Takisung menempati urutan tertinggi yaitu seluas 66 ha.

Tabel 2.123 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Ubi Kayu	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	2.535	41.029
2013	1.440	27.901
2014	1.313	25.247
2015	1.156	23.022
2016	984	32.417
2017	743	736

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Komoditi tanaman pangan lainnya di Kabupaten Tanah Laut adalah komoditi ubi kayu. Luas panen ubi kayu di kabupaten ini terus mengalami penurunan selama periode 2012-2017. Pada tahun 2012, luas panen ubi kayu mencapai 2535 ha. Luas panen ubi kayu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016, luas panen hanya mencapai 984 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen ubi kayu juga mengalami penurunan menjadi seluas 92 ha. Sama seperti luas panen ubi kayu, produksi ubi kayu juga mengalami penurunan hingga tahun 2015. Selama periode 2012-2017, produkti tertinggi tercapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 41.029 ton dengan produktivitas sebesar 16,19 ton/ha. Produksi mengalami penurunan menjadi 27.901 ton pada tahun selanjutnya, tetapi produktivitas mengalami peningkatan menjadi 19,38 ton/ha. Pada tahun 2014, produksi maupun produktivitas kembali mengalami penurunan menjadi 25.247 ton dengan produktivitas sebesar 19,23 ton/ha. Selanjutnya, pada tahun 2015 penurunan produksi menjadi 23.022 ton tidak diikuti dengan penurunan produktivitas, di mana pada tahun tersebut produktivitas ubi kayu Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 19,90 ton/ha. Sementara itu, penurunan luas panen ubi kayu tidak mengakibatkan terjadinya penurunan produksi ubi kayu pada tahun 2016. Produksi ubi kayu pada tahun tersebut mengalami peningkatan hingga produksi ubi kayu mencapai 32.416,52 ton. Selanjutnya, penurunan luas panen dan produksi berdampak pada penurunan produktivitas ubi kayu hingga pada tahun 2017 produktivitas ubi kayu hanya sebesar 0,99 ton/ha.

Tabel 2.124 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	-	-
2.	Takisung	326	-
3.	Kurau	5	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	22	19
6.	Tambang Ulang	75	221
7.	Pelaihari	175	411
8.	Bajuin	39	-
9.	Batu Ampar	29	85
10.	Jorong	5	-
11.	Kintap	67	-
Jumlah		743	736

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jika dirinci menurut kecamatan pada tahun 2017, luas panen tertinggi ubi kayu berada di Kecamatan Takisung yang mencapai 326 ha, disusul Kecamatan Pelaihari seluas 175 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang seluas 75 ha. Namun dari sisi produksi, justru Kecamatan Pelaihari yang menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 411 ton, disusul Kecamatan Tambang Ulang sebesar 221 ton, dan Kecamatan Batu Ampar sebesar 85 ton. Selain ubi kayu, Kabupaten Tanah Laut juga memproduksi komoditi ubi jalar. Selama periode 2012-2017, luas panen ubi jalar mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Luas panen ubi jalar pada tahun 2017 adalah seluas 165 ha. Pada tahun 2012, luas panen ubi jalar adalah seluas 203 ha. Luas panen ubi jalar mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya berturut-turut adalah seluas 205 ha dan 228 ha. Pada tahun 2015, luas panen ubi jalar mengalami penurunan menjadi 198 ha. Luas panen ini terus mengalami penurunan sebesar 2 ha pada tahun selanjutnya, sehingga pada tahun tersebut tercatat bahwa luas panen ubi jalar adalah seluas 196 ha. Kemudian pada tahun 2017, seiring dengan penurunan luas panen, produksi ubi jalar juga mengalami penurunan menjadi sebesar 2.252 ton.

Tabel 2.125 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Ubi Kayu	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	203	2.117
2013	205	2.144
2014	228	2.789
2015	198	2.996
2016	196	2.970
2017	165	2.252

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2012-2017, produksi ubi jalar Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Produksi ubi jalar pada tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi penurunan produksi menunjukkan angka yang kecil, yaitu dari 2.996 ton pada tahun 2015 menjadi 2.970 ton pada tahun 2016. Walaupun terjadi penurunan produksi pada tahun tersebut, produktivitas ubi jalar mengalami peningkatan menjadi 13,65 ton/ha pada tahun 2017. Peningkatan produktivitas tidak hanya terjadi pada tahun 2017, tetapi sepanjang periode 2012-2017 yang mana pada tahun 2012 produktivitas ubi jalar hanya mencapai 10,43 ton/ha. Kecamatan yang memiliki luas panen ubi jalar terbesar adalah Kecamatan Takisung yang mencapai 75 ha sehingga menjadi produsen ubi jalar terbesar yang mencapai 996 ton. Produksi ubi jalar berasal dari 6 kecamatan dimana kecamatan yang tidak memiliki produksi adalah Kecamatan Panyipatan, Kurau, Bumi Makmur, Bati-bati, dan Batu Ampar.

Tabel 2.126 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	-	-
2.	Takisung	75	996
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	2	26
7.	Pelaihari	29	626

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
8.	Bajuin	26	383
9.	Batu Ampar	13	-
10.	Jorong	5	36
11.	Kintap	15	185
Jumlah		165	2.252

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peningkatan produksi pertanian tentunya didorong oleh ketersediaan lembaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jumlah keseluruhan Balai Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 adalah sebanyak 11 unit yang masing-masing berada di setiap kecamatan. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah sebanyak 107 orang yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Penyuluh terbanyak di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 17 orang, diikuti Kecamatan Bati-bati sebanyak 13 orang, dan Kecamatan Batu Ampar sebanyak 12 orang. Untuk kelompok tani, jumlahnya pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 1.591 kelompok dimana kecamatan dengan kelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (223 kelompok).

Tabel 2.127 Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), PPL, dan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	BPP	PPL	Kelompok Tani
1.	Panyipatan	1	7	190
2.	Takisung	1	10	205
3.	Kurau	1	7	105
4.	Bumi Makmur	1	9	112
5.	Bati-bati	1	13	145
6.	Tambang Ulang	1	9	131
7.	Pelaihari	1	17	223
8.	Bajuin	1	10	104
9.	Batu Ampar	1	12	143
10.	Jorong	1	5	114
11.	Kintap	1	8	119
Jumlah		11	107	1.591

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tanaman Hortikultura

Selain tanaman pangan, pertanian di Kabupaten Tanah Laut juga mencakup hortikultura. Usaha tanaman hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran terdiri dari 10 jenis sayuran yang dibudidayakan pada lahan panen seluas 1.255 ha pada tahun 2017. Jenis sayuran di Kabupaten Tanah Laut meliputi bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, kangkung, dan bayam. Pada tahun 2017, cabemerupakan jenis sayuran dengan luas panen terbesar yaitu seluas 278 ha. Cabe hampir dibudidayakan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut kecuali Kecamatan Bumi Makmur. Kecamatan dengan luas panen cabe terbesar adalah Kecamatan Batu Ampat dengan luas sebesar 50 ha. Kecamatan yang memiliki luas panen sayuran terbesar adalah Kecamatan Takisung dengan luasan mencapai 255 ha, disusul Kecamatan Batu Ampar seluas 144 ha, dan Kecamatan Pelaihari seluas 160 ha. Selain cabe, sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kacang panjang yaitu seluas 205 ha dimana luas panen terbesar berada di Kecamatan Takisung yaitu seluas 44 ha.

Dari sisi produksi, jenis sayuran yang mempunyai produksi terbesar pada tahun 2017 adalah cabe dengan produksi sebesar 10.931 ton. Kecamatan yang memproduksi cabe terbesar adalah Kecamatan Kurau yaitu sebesar 2.619 ton. Sementara itu, produksi kacang panjang pada tahun 2017 adalah sebesar 7.059 ton. Sama seperti cabe, produksi kacang panjang berasal dari 10 kecamatan dengan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Takisung (1.110 ton), disusul Kecamatan Kintap sebesar 1.108 ton, dan Kecamatan Batu Ampar sebesar 932 ton. Untuk terong, produksinya pada tahun 2017 adalah sebesar 8.071 ton. Produksi terong terbesar di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Tambang Ulang yaitu sebesar 1.503 ton dan Kecamatan Takisung sebesar 1.350 ton. Sayuran potensial lain yang dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah besar adalah tomat dengan produksi sebesar 5.905 ton. Secara rinci, luas panen dan produksi sayuran ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 2.128 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Bawang Merah	Sawi	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terong	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1.	Panyipatan	-	-	20	40	-	19	-	18	-	-
2.	Takisung	5	24	44	35	24	45	12	32	17	17
3.	Kurau	-	-	5	14	5	5	-	4	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	12	20	3	9	-	10	-	-
6.	Tambang Ulang	1	10	12	17	11	11	10	11	-	-
7.	Pelaihari	6	-	20	19	16	27	8	16	24	24
8.	Bajuin	2	-	16	42	15	17	11	16	9	10
9.	Batu Ampar	5	26	25	50	24	29	22	25	22	16
10.	Jorong	-	7	24	27	3	5	-	6	9	10
11.	Kintap	-	11	27	14	9	10	2	3	12	12
Jumlah		19	78	205	278	110	177	65	141	93	89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.129 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Bawang Merah	Sawi	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terong	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1.	Panyipatan	-	-	418	580	-	806	-	1.376	-	-
2.	Takisung	0,76	555	1.110	866	830	1.350	304	1.132	400	400
3.	Kurau	-	-	756	2.619	900	867	-	200	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	467	1.224	152	561	-	225	-	-
6.	Tambang Ulang	0,25	1.477	461	601	1.380	1.503	1.344	2.046	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Kecamatan	Bawang Merah	Sawi	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terong	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
7.	Pelaihari	0,22	-	482	857	953	804	200	844	319	272
8.	Bajuin	0,25	-	498	1.086	433	506	200	497	148	167
9.	Batu Ampar	0,60	652	932	1.591	787	908	778	1.115	497	319
10.	Jorong	-	265	827	857	97	314	-	274	219	230
11.	Kintap	-	333	1.108	650	373	452	50	61	240	241
Jumlah		2,08	3.282	7.059	10.931	5.905	8.071	2.876	7.770	1.823	1.629

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.130 Jumlah Panen Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Semangka	Rambutan	Duku	Sawi	Salak	Nangka	Jambu
1.	Panyipatan	450	800	1.775	5.500	1.600	3.810	-	-	300	-	1.375	490	1.850	405
2.	Takisung	-	2.200	2.400	14.760	495	1.920	-	33	875	200	330	700	4.950	750
3.	Kurau	780	-	-	4.773	217	880	-	-	-	-	299	-	301	197
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	5.496	2.735	5.040	6.326	38.151	4.423	-	9	3.406	456	2.004	-	23.200	1.427
6.	Tambang Ulang	1.436	845	5.500	11.750	11.150	1.290	170	14	4.400	65	350	-	110.950	985
7.	Pelaihari	-	2.127	-	19.287	4.567	4.141	-	28	4.125	-	1.492	-	11.709	2.215
8.	Bajuin	915	3.500	5	449	2.000	153	9	17	2.011	-	468	35	4.528	1.176
9.	Batu Ampar	545	2.457	1.138	11.270	731	773	-	16	572	-	590	262	73.257	586
10.	Jorong	-	2.076	1.736	13.690	687	11.904	-	34	2.791	215	541	85	1.863	947
11.	Kintap	-	150	480	4.900	125	325	10	14	65	-	70	270	76	97
Jumlah		9.622	16.890	18.074	92.705	59.723	29.619	189	165	18.545	936	7.519	1.842	232.684	8.785

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018



Tabel 2.131 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Semangka	Rambutan	Duku	Sawi	Salak	Nangka	Jambu
1.	Panyipatan	220	96	1.181	2.050	140	75	-	-	100	-	518	41	775	204
2.	Takisung	-	440	310	1.476	37	21	-	6.200	875	29	57	70	990	85
3.	Kurau	277	-	-	290	20	24	-	-	-	-	299	-	92	18
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	1.296	2.177	490	697	4.449	83	-	788	1.331	63	522	-	4.079	267
6.	Tambang Ulang	1.078	555	1.660	1.410	1.229	36	47	1.855	2.200	52	82	-	43.849	81
7.	Pelaihari	-	590	-	2.200	2.100	174	-	1.386	2.125	-	636	-	2.295	638
8.	Bajuin	620	720	4	210	1.325	10	11	562	871	-	231	3	2.615	264
9.	Batu Ampar	227	693	583	1.036	152	28	-	2.429	60	-	106	18	16.083	209
10.	Jorong	-	519	208	796	50	217	-	2.751	418	32	92	2	270	72
11.	Kintap	-	28	88	290	19	6	2	323	7	-	28	13	28	10
Jumlah		3.718	5.818	4.524	10.455	9.521	674	60	16.294	7.987	176	2.571	147	71.076	1.848

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman buah yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut adalah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, alpukat, semangka, rambutan, duku, sawi, salak, nangka dan jambu. Jumlah pohon buah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 497.298 pohon. Pohon buah yang banyak ditanam masyarakat adalah nangka (232.684 pohon), pisang (92.705 pohon), pepaya (59.723 pohon), nanas (29.619 pohon), dan rambutan (18.545 pohon). Untuk produksi, buah yang paling banyak diproduksi adalah nangka (71.076 ton), disusul semangka (16.294 ton), pisang (10.455 ton), pepaya (9.521 ton), dan rambutan (7.987 ton). Secara keseluruhan, produksi buah adalah sebesar 134.869 ton. Kecamatan penghasil buah terbesar adalah Kecamatan Tambang Ulang (54.134 ton), diikuti Kecamatan Batu Ampat (21.624 ton), dan Kecamatan Pelaihari (12.144 ton).

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kemiri, kapuk, dan aren. Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman karet, termasuk luas area yang belum menghasilkan dan rusak, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2012-2016. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2012 adalah seluas 13.271 ha dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2016 menjadi seluas 18.652 ha. Namun pada tahun 2017, luas areal tanaman karet mengalami penurunan menjadi 14.746 ha. Pada tahun 2017, luas areal tanaman yang belum menghasilkan (TBM) adalah seluas 5.433 ha, tanaman menghasilkan (TM) seluas 9.196 ha, dan tanaman tua/rusak (TT/TR) seluas 117 ha. Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman karet terbesar adalah Kecamatan Batu Ampar dimana luas areal TBM seluas 1.078 ha dan luas TM seluas 2.945 ha. Jika dari luas areal menunjukkan peningkatan, produksi karet selama periode 2012-2017 justru mengalami penurunan. Pada tahun 2012, produksi karet adalah sebesar 8.625 ton dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 6.437,2 ton. Penurunan produksi tersebut dimungkinkan mengingat struktur tanaman karet yang ada sekarang sebagian besar termasuk tanaman belum menghasilkan. Produksi maupun luas areal yang dijelaskan tersebut merupakan produksi dan luas dari perkebunan rakyat. Produksi dan luas areal yang ditunjukkan pada tabel-tabel perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di bawah tidak termasuk luas dan produksi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Tabel 2.132 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	13.271	8.625,0	1.117	1.242,0	11.152	9.814,0
2013	13.170	8.756,5	1.140	1.353,4	11.388	-
2014	14.433	-	1.146	-	11.651	14.383,0
2015	14.746	6.437,2	1.011	336,54	11.822	15.191,4
2016	18.652	6.407,8	844	327,04	11.823	15.339,3
2017	14.746	6.437,2	1.034	883,96	11.821	17.109,7

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Komoditi lainnya seperti kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Tanah Laut. Luas areal maupun produksi kelapa sawit selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan. Pada awal periode, luas areal kelapa sawit mencaoi 11.152 ha dengan produksi sebesar 9.814 ton. Luas maupun produksi terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 luas areal kelapa sawit mencapai 11.821 ha dengan produksi 17.109,7 ton. Kecamatan yang memiliki luas areal kelapa sawit terbesar adalah Kecamatan Pelaihari yaitu seluas 3.025 ha dengan produksi sebesar 6.451,5 ton.

Berbeda dengan luas dan produksi kelapa sawit yang terus meningkat, luas areal dan produksi komoditi kelapa cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2012, luas areal komoditi kelapa adalah seluas 1.117 ha dengan produksi sebesar 1.242 ton. Pada tahun selanjutnya, produksi kelapa meningkat mencapai 1.353 ton yang disebabkan karena meningkatnya luas areal tanam komoditi kelapa yaitu seluas 1.140 ha. Pada tahun 2015 maupun 2016, luas areal maupun produksi kelapa mengalami penurunan yaitu seluas 1.011 ha dengan produksi sebesar 336,54 ton pada tahun 2015 dan luas areal sebesar 843,5 ha dengan produksi sebesar 327,04 ton. Pada tahun 2017, luas areal kelapa meningkat menjadi 1.034 ton dengan produksi sebesar 883,96 ton. Kecamatan dengan luas areal kelapa terbesar adalah Kecamatan Pelaihari dengan luas TBM sebesar 36 ha, luas TM sebesar 264 ha, dan luas TT/TR sebesar 6 ha. Produksi kelapa di Kecamatan Pelaihari sendiri merupakan yang terbesar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yaitu sebesar 237,6 ton.

Kopi, lada, dan cengkeh merupakan jenis komoditi perkebunan lainnya di Kabupaten Tanah Laut. Perkembangan luas areal dan produksi kopi mempunyai

kecenderungan yang tidak menentu. Luas areal kopi terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 luas areal kopi sebesar 193 ha, sedangkan pada tahun 2015 luas areal kopi menjadi 148 ha. Pada tahun 2016, luas areal kopi mengalami kenaikan menjadi 154 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas areal kopi kembali menurun menjadi seluas 142 ha. Berbeda dengan luas areal, produksi kopi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu dari 78 ton menjadi 206,7 ton. Namun, pada tahun berikutnya produksi kopi menurun menjadi 72,5 ton dan menurun lagi menjadi 14,9 ton pada tahun 2016. Untuk jenis tanaman perkebunan lada dan cengkeh, kedua komoditi tersebut mempunyai perkembangan luas areal yang terus mengalami penurunan sepanjang periode 2012-2017. Luas areal tanaman lada pada tahun 2012 adalah seluas 22 ha pada, sedangkan komoditi cengkeh mempunyai luas areal sebesar 272 ha. Luas areal tanam kedua tanaman perkebunan tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 luas areal tanam lada adalah seluas 12 ha dan luas areal tanam cengkeh adalah seluas 53 ha. Dengan adanya penurunan luas areal tanam kedua komoditi perkebunan tersebut, produksi lada dan cengkeh Kabupaten Tanah Laut juga mengalami penurunan dari 11 ton pada tahun 2012 menjadi 4,2 ton pada tahun 2016 untuk lada dan 97 ton pada tahun 2012 menjadi 34,5 ton pada tahun 2017 untuk produksi cengkeh.

Tabel 2.133 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi, Lada, dan Cengkeh di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kopi		Lada		Cengkeh	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	193	78,0	22	11,0	272	97
2013	163	206,7	22	16.6	262	135.25
2014	149	-	20	-	246	-
2015	148	72,5	15	5,0	169	33.909
2016	154	14,9	15	7,0	164.5	1.36
2017	142	76,8	12	4,2	53	34,5

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman perkebunan lain yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah kemiri, kapuk, dan aren. Kemiri dan aren tidak mempunyai perbedaan yang signifikan pada luas areal tanamnya selama periode 2012-2017, sedangkan luas areal kapuk mengalami penurunan yang cukup banyak. Luas areal tanam kapuk

pada tahun 2012 adalah seluas 18 ha. Luas areal tanaman ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 luas tanam kapuk menjadi 1 ha. Dengan adanya penurunan luas areal tanam kapuk, produksi kapuk periode 2012-2017 juga mengalami penurunan. Produksi kapuk pada tahun 2012 adalah sebesar 6 ton dan pada tahun 2017 produksi hanya mencapai 1 ton. Sementara itu, luas areal tanam kemiri mempunyai kecenderungan untuk menurun. Luas arela tanam kemiri di Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 146 ha pada tahun 2012 dan 130 ha pada tahun 2017. Berbeda dengan luas areal tanamn yang menurun, produksi kemiri justru meningkat di mana pada tahun 2012 produksinya adalah sebesar 48 ton dan pada tahun 2017 adalah sebesar 51,6 ton. Seperti luas areal kemiri, luas areal tanam aren tidak mempunyai perubahan yang signifikan. Namun, produksi aren periode 2012-2017 mengalami kenaikan dari 276 ton pada tahun 2012 menjadi 510 tonpada tahun 2013. Peningkatan produksi pada tahun tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas tanaman aren mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015 dengan luas areal sebesar 87 ha, produksi aren hanya mencapai 31,99 ton dan meningkat lagi menjadi 156 ton pada tahun berikutnya dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 44,3 ton.

Tabel 2.134 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kemiri, Kapuk, dan Aren di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kemiri		Kapuk		Aren	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	146	48,0	18	6,0	83	276,0
2013	146	-	16	5,3	83	510,0
2014	136	-	14	-	83	-
2015	138	47,0	1	1,0	87	32,0
2016	138	16,0	1	0,1	82	156,0
2017	130	51,6	1	1,0	82	44,3

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peternakan

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Selama periode 2012-2017, populasi ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas

cenderung berfluktuatif. Populasi sapi perah di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami penurunan selama periode 2012 hingga 2015 dan meningkat pada tahun 2017. Populasi sapi perah pada tahun 2012 adalah sebanyak 50 ekor, selanjutnya menurun menjadi 45 ekor pada tahun berikutnya. Pada dua tahun berikutnya, populasi sapi perah masih mengalami penurunan yaitu menjadi 13 ekor pada tahun 2014 dan 11 ekor pada tahun 2015. Populasi sapi perah meningkat pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebanyak 24 ekor. Sama dengan populasi sapi perah, selama periode 2012-2017 populasi sapi potong juga mengalami penurunan pada awal periode. Perbedaannya adalah populasi sapi potong meningkat mulai tahun 2015. Populasi sapi potong pada tahun 2012 adalah sebanyak 62.235 ekor dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 populasi sapi potong menjadi 56.571 ekor. Pada dua tahun berikutnya, populasi sapi potong meningkat menjadi 61.225 ekor dan 65.155 pada tahun 2015 ekor pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, populasi sapi potong terus meningkat hingga mencapai populasi tertinggi menjadi sebanyak 75.641 ekor. Selama periode 2012-2017, populasi kerbau terbanyak terjadi pada tahun 2012 dengan populasi sebanyak 4.007 ekor. Pada tahun 2013, populasi kerbau turun cukup banyak yaitu menjadi 2.785 ekor. Pada tahun 2017, populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 3.692 ekor.

Tabel 2.135 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2012-2017

Jenis Ternak	Populasi (ekor)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ternak Besar						
Sapi Perah	50	45	13	11	14	24
Sapi Potong	62.235	51.190	56.571	61.225	65.155	75.641
Kerbau	4.007	2.785	3.265	3.280	3.078	3.692
Ternak Kecil						
Kambing	19.447	14.072	14.829	14.797	14.784	20.808
Domba	447	305	292	244	202	178
Babi	69	29	15	-	-	-
Ternak Unggas						
Ayam Buras	1.134.746	1.205.061	1.686.487	2.210.147	2.733.807	2.426.741
Ayam Petelur	2.342.776	2.777.266	4.023.256	5.244.362	6.473.994	6.729.689
Ayam Pedaging	13.139.320	21.970.607	26.438.945	49.061.691	50.693.299	51.375.593
Itik	208.230	227.585	267.505	256.511	232.959	192.333

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi kambing terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 20.808 ekor, sementara untuk domba populasinya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, populasi domba adalah sebanyak 447 ekor dan pada tahun 2017 berkurang menjadi sebanyak 178 ekor. Berbeda dengan ternak besar dan kecil yang rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan pada populasinya, populasi jenis unggas cenderung mengalami peningkatan selama periode 2012-2017 kecuali itik. Pada tahun 2012 populasi ayam buras dan ayam ras adalah 1.134.746 ekor ayam buras, 2.342.776 ekor ayam petelur, dan 13.139.320 ekor ayam pedaging. Populasi ketiga jenis unggas tersebut terus meningkat hingga pada 2017 populasinya adalah sebanyak 2.426.741 ekor ayam buras, 6.729.689 ekor ayam petelur, dan 51.375.593 ekor ayam pedaging. Sementara itu, populasi itik di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 populasi itik mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017, populasi itik mencapai titik terendahnya menjadi hanya sebanyak 192.333 ekor.

Tabel 2.136 Populasi Ternak Besar dan Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017

No.	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1.	Panyipatan	-	13.873	95	15	2.500	10
2.	Takisung	7	15.470	108	-	3.299	-
3.	Kurau	-	523	-	-	642	-
4.	Bumi Makmur	-	51	-	-	589	-
5.	Bati-Bati	-	2.085	78	-	341	-
6.	Tambang Ulang	-	2.435	18	-	2.329	-
7.	Pelaihari	17	18.989	73	-	870	133
8.	Bajuin	-	7.328	298	-	397	-
9.	Batu Ampar	-	8.584	453	-	2.664	21
10.	Jorong	-	3.482	1.864	-	2.842	14
11.	Kintap	-	2.821	705	-	4.335	-
	Jumlah	24	75.641	3.692	15	20.808	178

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, populasi sapi potong terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 18.989 ekor, Kecamatan Takisung menempati posisi kedua dengan populasi sebanyak 15.470 ekor, disusul Kecamatan Panyipatan dengan populasi sebanyak 13.873 ekor. Total populasi sapi potong di Kabupaten Tanah Laut adalah

sebanyak 75.641 ekor pada tahun 2017. Untuk sapi perah, populasi hewan ternak tersebut adalah sebanyak 24 ekor yang berada di Kecamatan Takisung dengan jumlah 7 ekor dan di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah 17 ekor. Hewan ternak besar yang lain adalah kerbau, di mana total populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 3.692 ekor pada tahun 2017. Populasi kerbau terbesar berada di Kecamatan Jorong dengan jumlah sebanyak 1.864 ekor. Ternak kecil yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah kambing dan domba. Pada tahun 2016, tiga kecamatan dengan populasi kambing terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Kintap dengan jumlah sebanyak 4.335 ekor, Kecamatan Takisung dengan jumlah sebanyak 3.299 ekor, dan Kecamatan Jorong dengan jumlah sebanyak 2.842 ekor. Untuk hewan ternak domba, populasi terbesar berada di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah sebanyak 133 ekor domba. Selain Kecamatan tersebut, wilayah lain yang mempunyai populasi domba adalah Kecamatan Panyipatan (10 ekor), Batu Ampar (21 ekor), dan Jorong (14 ekor).

Tabel 2.137 Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Unggas			
		Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1.	Panyipatan	95.654	86.727	6.087.169	19.584
2.	Takisung	104.676	885.542	7.372.000	4.515
3.	Kurau	60.121	-	746.686	47.752
4.	Bumi Makmur	44.129	-	107.626	63.176
5.	Bati-Bati	679.527	1.388.797	10.554.900	6.517
6.	Tambang Ulang	134.553	2.261.230	4.903.261	5.367
7.	Pelaihari	541.538	165.533	9.512.713	9.569
8.	Bajuin	226.919	574.479	4.404.054	133
9.	Batu Ampar	230.886	153.570	4.359.958	11.111
10.	Jorong	159.364	1.105.253	2.275.400	2.112
11.	Kintap	185.374	109.908	1.051.826	22.497
	Jumlah	2.462.741	6.729.689	51.375.593	192.333

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut meliputi ayam buras yang sering disebut sebagai ayam kampung, ayam ras yang terdiri dari ayam petelur dan ayam pedaging, serta itik. Pada tahun 2017, populasi ayam buras di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 2.462.741 ekor.

Tiga kecamatan dengan populasi ayam buras terbesar adalah Kecamatan Bati-bati yaitu sebanyak 679.527 ekor, disusul Kecamatan Pelaihari dengan jumlah ayam sebanyak 541.538 ekor, dan Kecamatan Batu Ampar dengan jumlah sebanyak 230.886 ekor. Sementara itu, populasi ayam ras petelur di Kabupaten Tanah Laut lebih besar dibandingkan ayam buras yaitu sebanyak 6.729.689 ekor dengan populasi terbanyak berada di Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 2.261.230 ekor, Kecamatan Bati-bati sebanyak 1.388.797 ekor, dan Kecamatan Jorong sebanyak 1.105.253 ekor. Ayam ras yang lain yaitu ayam pedaging merupakan jenis unggas dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Populasi ayam pedaging di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 51.375.593 ekor. Populasi ayam pedaging terbesar berada di Kecamatan Bati-bati yaitu sebanyak 10.554.900 ekor, diikuti Kecamatan Pelaihari sebanyak 9.512.713 ekor, dan Kecamatan Takisung sebanyak 7.372.000 ekor. Jenis unggas terakhir yang dikembangkan masyarakat Tanah Laut adalah itik. Populasi itik pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 192.333 ekor dengan populasi tersebar di seluruh kecamatan. Populasi terbesar itik dengan jumlah sebanyak 63.176 ekor berada di Kecamatan Bumi Makmur.

Produksi pangan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan diantaranya adalah daging dan telur. Produksi daging sapi menunjukkan peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dari 422.438 kg pada tahun 2011 menjadi 942.045 kg pada tahun 2012 dan 1.058.463 kg pada tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi sapi mengalami penurunan menjadi 323.745 kg pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 263.356 kg. Produksi daging kerbau dan kambing mempunyai pergerakan yang sama, di mana populasi kedua hewan ternak tersebut meningkat selama periode 2011-2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2011, produksi daging kerbau adalah sebanyak 35.724 kg dan daging kambing adalah sebanyak 32.032 kg. Pada tahun 2017, produksi daging kerbau menurun dibandingkan produksi daging kerbau pada tahun 2015 yaitu dari 94.002 kg menjadi 50.204 kg. Sementara itu, produksi daging kambing juga mengalami penurunan sehingga produksi daging pada tahun 2017 mempunyai jumlah yang lebih sedikit dibandingkan produksi tahun 2011 yaitu sebesar 12.608 kg.

Produksi daging jenis ternak kecil lainnya yaitu domba dan babi di Kabupaten Tanah Laut cukup berfluktuatif. Produksi daging domba mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu dari 791 kg menjadi 689 kg. Pada tahun berikutnya, produksi daging domba mengalami peningkatan menjadi 791 kg. Selanjutnya,

produksi daging domba mengalami penurunan dengan jumlah yang cukup banyak melebihi kenaikan jumlah produksi daging sebelumnya pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, produksi daging hanya mencapai 396 kg. Produksi daging domba mengalami kenaikan walaupun tidak mencapai jumlah produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 536 kg. Produksi daging domba pada tahun 2017 adalah sebanyak 408 kg. Sementara itu, produksi daging babi terus mengalami penurunan selama periode 2011-2017. Produksi daging babi pada tahun 2011 adalah sebesar 3.447 kg dan terus menurun menjadi tidak diproduksi pada tahun 2017.

Tabel 2.138Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2011	422.438	35.724	32.032	791	3.447
2012	942.045	79.846	57.617	689	5.228
2013	1.058.463	88.030	62.336	791	3.447
2014	615.508	94.002	63.886	396	1.724
2015	323.745	58.613	15.268	536	632
2016	-	-	-	-	-
2017	263.356	50.204	12.608	408	-

Sumber: SIPD *cit.*Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Produksi daging ternak unggas di Kabupaten Tanah Laut berasal dari ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Jumlah produksi ayam buras dan ayam ras (ayam petelur dan pedaging) cenderung berfluktuasi. Produksi daging dari ayam buras dan ayam petelur meningkat pada tahun 2012 yaitu dari 454.663 kg menjadi 628.051 kg untuk ayam buras dan 391.095 kg menjadi 690.665 kg untuk ayam petelur. Pada tahun berikutnya, kedua produksi jenis unggas tersebut mengalami penurunan menjadi 585.514 kg untuk ayam buras dan 633.600 untuk ayam petelur. Produksi daging kedua jenis unggas ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi sebanyak 486.904 kg untuk ayam buras dan 1.170.480 untuk ayam petelur. Pada tahun 2017, produksi daging ayam buras dan ayam petelur kembali meningkat sehingga masing-masing menjadi sebesar 500.787 kg dan 1.224.846 kg.

Produksi daging dari ayam pedaging mengalami peningkatan selama periode 2011-2013. Produksi daging jenis unggas ini mencapai 5.000.009 kg pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 11.202.024 kg pada tahun 2013. Produksi daging

ayam pedaging menurun setengahnya pada tahun berikutnya yaitu menjadi 5.121.556 kg. Pada tahun 2015, produksi daging ayam pedaging meningkat walaupun peningkatannya sangat kecil tidak mencapai jumlah produksi daging pada tahun 2013. Produksi daging jenis unggas ini yaitu sebesar 5.149.139 kg. Pada tahun 2017, produksi daging unggas yang berasal dari ayam pedaging meningkat kembali menjadi sebesar 6.859.018 kg. Produksi daging jenis unggas yang lain yaitu itik, mempunyai kecenderungan untuk meningkat selama periode 2011-2015. Produksi daging itik adalah sebanyak 49.050 kg pada tahun 2011 dan menjadi 84.688 kg pada tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2017, produksi daging itik mengalami penurunan menjadi sebesar 70.958 kg.

Tabel 2.139 Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017

Tahun	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2011	454.663	391.095	5.000.009	49.050
2012	628.051	690.665	9.390.968	56.620
2013	585.514	633.600	11.202.074	63.926
2014	976.418	1.782.876	5.121.556	78.960
2015	486.904	1.170.480	5.149.139	84.688
2016	-	-	-	-
2017	500.787	1.224.846	6.859.018	70.958

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain daging, produksi hasil ternak yang lain adalah telur. Produksi telur tersebut berasal dari ternak unggas yaitu ayam ras (ayam petelur dan pedaging), ayam buras, dan itik. Selama periode 2012-2017, produksi telur ayam selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Produksi telur ayam ras adalah sebesar 24.599.148 kg pada tahun 2012 dan menjadi 55.065.801 kg pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2017, produksi telur ayam ras melonjak signifikan menjadi sebesar 70.662.576 kg. Sama dengan produksi telur ayam ras yang selalu meningkat tiap tahunnya, produksi telur ayam buras juga meningkat tiap tahunnya selama periode 2012-2017. Produksi telur ayam buras pada tahun 2012 adalah sebesar 928.429 kg dan menjadi 2.014.969 kg pada tahun 2017. Sementara itu, produksi telur itik meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Produksi telur itik meningkat dari 1.427.863 kg pada tahun 2012 menjadi 1.560.583 kg pada tahun 2013 dan 1.765.749 kg pada tahun 2014. Pada tahun 2015, produksi telur itik

menurun menjadi 1.758.933 kg. Selanjutnya pada tahun 2017, produksi telur itik kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1.318.854 kg. Selain daging dan telur, tercatat bahwa produk lain dari ternak adalah jeroan. Produksi jeroan sapi pada tahun 2017 adalah sebesar 80.318 kg, jeroan kerbau sebesar 14.127 kg, jeroan kambing sebesar 2.660 kg, jeroan domba sebesar 102 kg, jeroan ayam ras petelur sebesar 113.168 kg, jeroan ayam ras pedaging sebesar 623.547 kg, jeroan ayam buras sebesar 111.286 kg, dan jeroan itik sebesar 7.469 kg.

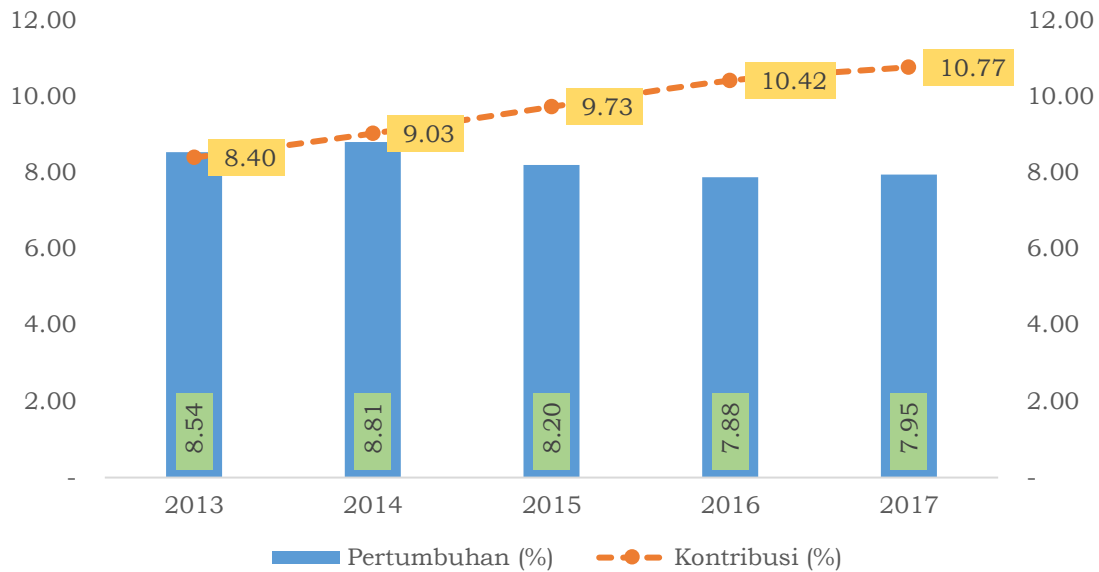
Tabel 2.140 Perkembangan Produksi Telur Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2012-2017

Tahun	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2012	928.429	24.599.148	1.427.863
2013	985.959	29.161.293	1.560.583
2014	1.379.853	42.244.188	1.765.749
2015	1.808.302	55.065.801	1.758.933
2016	-	-	-
2017	2.014.969	70.662.576	1.318.854

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.2.4 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013, kontribusinya adalah sebesar 8,40%, pada tahun 2017 kontribusinya terus meningkat setiap tahun hingga menjadi sebesar 7,95%. Di sisi pertumbuhan, terlihat selama periode 2013-2017 sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor terus tumbuh setiap tahunnya di atas angka 7%. Pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 8,81%. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut mengindikasikan bahwa sektor tersier di Kabupaten Tanah Laut akan menjadi penopang perekonomian daerah.



Gambar 2.24 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Sepeda Motor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Unit usaha perdagangan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Jumlah pedagang besar pada tahun 2017 adalah sebanyak 23 unit usaha yang tersebar di 6 kecamatan. Sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelayhari memiliki unit pedagang besar terbanyak yaitu sebanyak 15 unit. Kecamatan lain yang memiliki unit pedagang besar adalah Kecamatan Bati-bati, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki 2 unit dan Kecamatan Takisung dan Batu Ampar yang masing-masing memiliki 1 unit pedagang. Untuk pedagang menengah, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 290 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Sama seperti pada pedagang besar, Kecamatan Pelayhari juga memiliki jumlah unit pedagang menengah terbesar yaitu sebanyak 68 unit, disusul Kecamatan Takisung sebanyak 38 unit, dan Kecamatan Bati-bati sebanyak 37 unit. Untuk pedagang kecil, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 9.554 unit. Sama seperti pada pedagang menengah, unitnya tersebar di seluruh kecamatan dengan kecamatan yang paling banyak memiliki unit pedagang kecil adalah Kecamatan Pelayhari (2.751 unit).

Tabel 2.141 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
1.	Panyipatan	-	15	171

No.	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
2.	Takisung	1	38	1.102
3.	Kurau	-	21	181
4.	Bumi Makmur	-	10	132
5.	Bati-bati	2	37	1.109
6.	Tambang Ulang	-	11	125
7.	Pelaihari	15	68	2.751
8.	Bajuin	-	11	121
9.	Batu Ampar	1	26	721
10.	Jorong	2	22	1.358
11.	Kintap	2	31	1.783
Jumlah		23	290	9.554

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain manusia yang menjadi pedagang, dalam kegiatan perdagangan juga membutuhkan sarana perdagangan. Di Kabupaten Tanah Laut, sarana perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pasar, toko, kios, dan warung. Jumlah pasar dalam periode 2013-2017, jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 32 unit pada tahun 2013 menjadi sebanyak 36 unit pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada toko, kios, dan warung yang meningkat dalam kurun waktu tersebut. Jumlah toko meningkat dari 571 unit menjadi sebanyak 596 unit, kios meningkat dari 1.250 unit menjadi sebanyak 1.940 unit, dan warung meningkat dari 3.250 unit menjadi sebanyak 4.012 unit.

Tabel 2.142 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Tahun	Pasar	Toko	Kios	Warung
2013	32	571	1.250	3.250
2014	33	579	1.321	3.371
2015	33	582	1.381	3.856
2016	34	585	1.571	3.978
2017	36	596	1.940	4.012

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Tanah Laut, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu

kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar Rp 9.543,68 miliar menurun menjadi sebesar Rp 9.154,51 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar Rp 8.928,21 miliar; Rp 8.914,19 miliar dan Rp 10.532,58 miliar. Pertumbuhan riil total ekspor selama kurun waktu 2013-2016 hanya berkisar diangka 0,25% sampai 9,11%. Bahkan di tahun 2015, angka pertumbuhan ekspor bernilai negatif, yaitu -7,18%. Angka pertumbuhan yang kecil tersebut disebabkan adanya penurunan produksi batubara serta anjloknya harga komoditas ini yang mendorong semakin menurunnya permintaan ekspor komoditas ini (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.143 Perkembangan Ekspor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total Nilai Ekspor ADHB (Rp miliar)	9.543,68	9.154,51	8.928,21	8.914,19	10.532,58
Total Nilai Ekspor ADHK (Rp miliar)	8.601,94	8.510,71	7.919,65	7.919,65	8.641,02
Proporsi terhadap PDRB ADHB (% ADHB)	101,41	89,71	78,24	78,24	85,20
Pertumbuhan (%)	0,34	-1,06	-7,18	0,25	9,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Tanah Laut di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Tanah Laut terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar

negeri. Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Tanah Laut berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.680,57 miliar, kemudian menurun di tahun 2014 menjadi Rp 6.582,90 miliar, Rp 6.432,04 miliar pada tahun 2015, Rp 6.410,19 miliar pada tahun 2016, dan menjadi Rp 6.994,44 miliar pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 78,64%. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 71,27%, 68,22% pada tahun 2015 dan 72,77% tahun 2017(BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

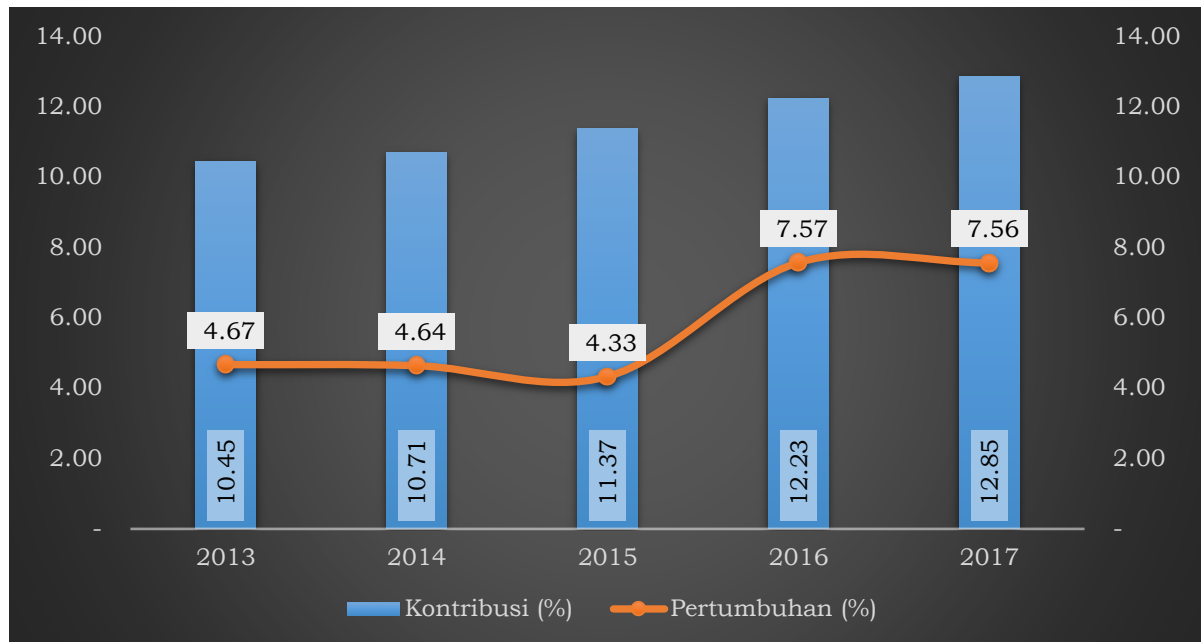
Tabel 2.144Perkembangan Impor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total Nilai Ekspor ADHB (Rp miliar)	7.401,23	7.272,85	7.369,42	7.594,24	8.995,63
Total Nilai Ekspor ADHK (Rp miliar)	6.680,57	6.582,90	6.432,04	6.410,19	6.994,44
Proporsi terhadap PDRB ADHB (% ADHB)	78,64	71,27	68,22	66,65	72,77
Pertumbuhan (%)	-1,92	-1,46	-2,29	-0,34	9,11

Sumber: Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.2.5 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kabupaten Tanah Laut, dan juga pertumbuhannya lebih cepat disbanding sektor lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat sepanjang periode 2013-2017. Pada tahun 2013, kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar 10,45%, kemudian meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,85%. Di sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan juga terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,75%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 7,56%, sedangkan pertumbuhan terendah berlangsung pada tahun 2015 yang hanya sebesar 4,33%.



Gambar 2.25 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Laut beraneka ragam dari industri kecil seperti industri makanan hingga industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Jumlah industri yang paling banyak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah industri makanan yang mencapai 1.004 unit dengan tenaga kerja sebanyak 2.353 tenaga kerja dan nilai produksi mencapai Rp 174,61 miliar. Industri lain yang berkembang adalah industri pakaian jadi yang pada tahun 2017 berjumlah 143 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 263 tenaga kerja dan nilai produksi sebesar Rp 19,08 miliar. Industri lain yang memberikan nilai produksi yang cukup besar adalah industri bahan galian bukan logam yang berjumlah 60 unit dengan tenaga kerja sebanyak 192 tenaga kerja dan nilai produksi sebesar Rp 51,33 miliar. Industri furnitur juga memberikan dampak yang signifikan dengan nilai produksi sebesar Rp 42,45 miliar. Jumlah industri furniture pada tahun 2017 adalah sebanyak 92 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 214 tenaga kerja.



Tabel 2.145 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Kode KBU	Deskripsi	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp miliar)
10	Industri makanan	1.004	2.353	174,61
11	Industri minuman	50	95	4,02
13	Industri tekstil	7	59	0,90
14	Industri pakaian Jjdi	143	263	19,08
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	97	255	7,58
18	Industri pencetakan umum	10	44	2,11
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	17	110	2,04
21	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	20	28	1,55
23	Industri barang galian bukan logam	60	192	51,33
31	Industri furnitur	92	214	42,45

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan persebarannya jumlah industri pengolahan terbesar berada di Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 383 unit, kemudian Kecamatan Panyipatan sebanyak 383 unit, dan Kecamatan Pelaihari sebanyak 340 unit. Total tenaga kerja yang terserap dari sebanyak 1.966 unit perusahaan adalah 4.493 tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah di Kecamatan Takisung yang mencapai 1.009 orang. Nilai produksi perusahaan-perusahaan tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 5,05 triliun.

Tabel 2.146 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp miliar)
1.	Panyipatan	381	717	74,58
2.	Takisung	383	1.009	76,77

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp miliar)
3.	Kurau	57	138	10,16
4.	Bumi Makmur	99	288	13,52
5.	Bati-Bati	125	281	12,41
6.	Tambang Ulang	78	184	4,65
7.	Pelaihari	340	705	100,02
8.	Bajuin	190	366	19,40
9.	Batu Ampar	83	242	18,84
10.	Jorong	164	402	62,72
11.	Kintap	66	161	14,80

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.3.2.6 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedangkan transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan.

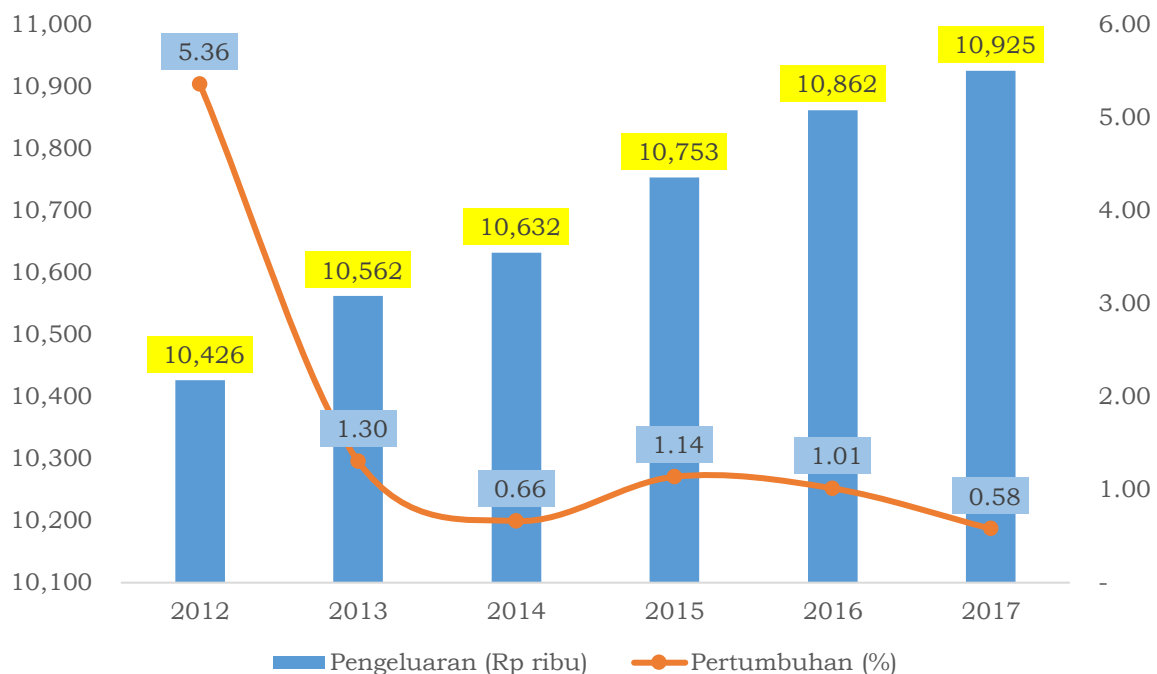
Transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut terakhir berjalan pada tahun 2008 dengan jumlah transmigran sebesar 100 KK. Program transmigrasi yang direncanakan pada tahun 2015 tidak bisa berjalan karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan permasalahan pasca transmigran menempati lokasi transmigrasi tersebut maka program transmigrasi tahun 2015 tidak dilaksanakan. Demikian pula pada tahun 2016 dan 2017 juga tidak ada data mengenai transmigrasi karena tidak adanya program transmigrasi di tahun tersebut.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui beberapa aspek yakni pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, kecenderungan akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Selain itu, pola pengeluaran konsumsi seseorang juga akan berubah dari pengeluaran untuk makanan ke non makanan. Hal tersebut dikarenakan jika kebutuhan seseorang terhadap makanan sudah terpenuhi dan mencapai kepuasan maksimum maka seseorang akan mulai mengonsumsi non makanan.



Gambar 2.26 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Tanah Laut (Ribu Rp/Tahun), 2012-2017

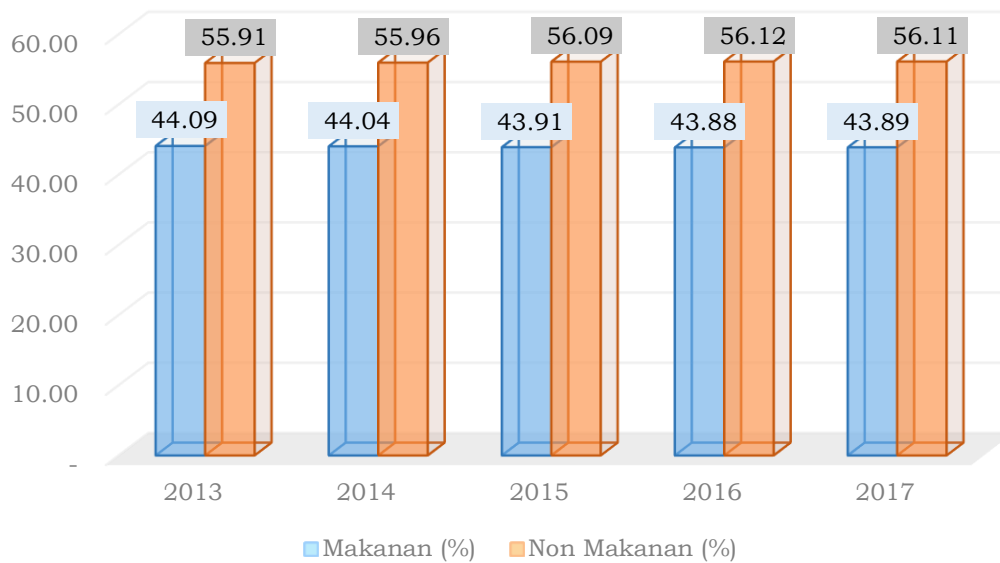
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Selama tahun 2012-2017, tingkat kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2012, pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp10,43 juta, meningkat 5,36% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, pengeluaran perkapita naik 1,30% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 10,56 juta dan pada tahun 2014 pengeluaran perkapita naik 0,66% menjadi Rp 10,63 juta. Kemudian pada 2015-2016, pengeluaran perkapita naik masing-masing sebesar

1,14% dan 1,01% yaitu menjadi Rp 10,75 juta pada tahun 2015 dan Rp 10,86 juta pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, besaran pengeluaran perkapita kembali meningkat menjadi sebesar Rp 10,93 juta. Kenaikan pengeluaran perkapita tertinggi selama periode tersebut yakni pada tahun 2012 dengan kenaikan nominal sebesar 5,36% dari tahun sebelumnya dan kenaikan terendah yakni pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,58% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya pengeluaran perkapita ini, maka terdapat indikasi bahwa kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua yakni pengeluaran konsumsi untuk makanan dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan. Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila rumah tangga memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran konsumsi makanan maka tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut lebih baik. Selama 5 tahun terakhir yakni selama periode 2013 hingga 2017, pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan masih pada konsumsi makanan. Pada tahun 2013, persentase pengeluaran konsumsi makanan yakni sebesar 44,09% dan konsumsi non makanan sebesar 55,91%. Pada tahun 2014-2016, pengeluaran konsumsi makanan terus mengalami penurunan sedangkan pengeluaran konsumsi untuk non makanan mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pada tahun 2012-2016 turun menjadi 43,88%, sedangkan konsumsi makanan naik menjadi 56,12%. Pada tahun 2017, pengeluaran untuk makanan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,89%. Jika dilihat struktur pengeluaran non makanan pada tahun 2017, persentase pengeluaran terbesar digunakan untuk pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya dengan persentase sebesar 27,58%. Porsi pengeluaran konsumsi non makanan terbesar kedua digunakan untuk kegiatan pengeluaran perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dengan persentase sebesar 9,43%. Dengan melihat pola konsumsi makanan dan non makanan maka dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut sudah mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan dan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat.



Gambar 2.27 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.4.1.3 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tanah laut ternyata digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tanah laut maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Tabel 2.143 menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya, kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Selama periode 2013-2017, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB cenderung fluktuatif, pada tahun 2013, proporsinya adalah sebesar 42,24%, kemudian pada tahun 2014-2016 meningkat setiap tahun hingga menjadi sebesar 45,42%. Namun pada tahun 2017, besaran proporsi mengalami penurunan menjadi sebesar 44,98%. Menurut BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), pada masa pemulihan ekonomi, institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atas pola

konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum, tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.147Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total konsumsi rumah tangga ADHB (Rp miliar)	3.975,50	4.409,22	4.797,70	5.175,3	5.560,38
Total konsumsi rumah tangga ADHK (Rp miliar)	3.565,21	3.744,41	3.913,85	4.095,65	4.280,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,24	43,21	44,42	45,42	44,98
Rata-rata konsumsi per kapita ADHB (Rp juta)	12,67	13,82	14,79	15,72	16,63
Rata-rata konsumsi per kapita ADHK (Rp juta)	11,36	11,73	12,07	12,44	12,80
Pertumbuhan total konsumsi rumah tangga (%)	4,40	5,03	4,53	3,06	2,94
Pertumbuhan per kapita (%)	2,67	3,26	2,85	3,06	2,94

Sumber: Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut ADHB amupun ADHK. Pada tahun 2013, setiap penduduk di Kabupaten Tanah Laut menghabiskan dana sekitar Rp 12,67 juta setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 16,31 juta. Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 2,96% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,26%. Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas maupun secara nilai. Rata-rata konsumsi perkapita riil meningkat pada kisaran 2,67-3,26%. Pada tahun 2013, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,40% dan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,452%. Dari data perbandingan antara rata-rata konsumsi rumah tangga dan perkapita, terlihat bahwa telah terjadi peningkatan konsumsi riil rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan konsumsi perkapita yang berada pada kisaran 4,70%. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.4.1.4 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (2018), nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani dalam bentuk persentase. Nilai tukar petani menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang atau produk yang dihasilkan oleh petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai tukar petani berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk petani, melihat perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu, dan menunjukkan daya saing produk petani. Berdasarkan perhitungannya, apabila NTP >100 maka petani mengalami surplus. Kenaikan harga produksi lebih besar dari harga konsumsi yang menyebabkan pendapatan petani naik dan pengeluaran petani turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani lebih baik. Apabila NTP = 100 maka petani mengalami impas, yakni ketika kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi. Apabila NTP <100 maka petani mengalami defisit. Hal tersebut terjadi jika kenaikan harga produksi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi.

Tabel 2.148 Nilai Tukar Petani di Kalimantan Selatan, 2012-2017

Tahun	Nilai Tukar Petani
2012	107,85
2013	105,51
2014	99,83
2015	99,99
2016	97,52
2017	96,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Data yang bersumber dari BPS Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa selama periode 2012-2017 nilai tukar petani Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan, cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, NTP di Kalimantan Selatan berada pada angka >100 yakni 107,85. Pada tahun 2013, NTP mengalami penurunan namun masih diatas nilai 100 yakni sebesar 107,51. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2013 petani mengalami surplus. Pada tahun 2014-2016, NTP Kalimantan Selatan menunjukkan angka < 100 yang berarti petani mengalami defisit. Tahun 2014 NTP berada pada angka 99,83, naik menjadi 99,99 di tahun 2015 dan kembali menurun hingga tahun 2017 menjadi 96,68. Hal ini berarti pada tahun 2017, rata-rata laju kenaikan harga barang-barang konsumsi dan rata-rata laju kenaikan harga barang-barang yang digunakan sebagai biaya produksi lebih cepat dibandingkan rata-rata laju kenaikan harga hasil produksi pertanian para petani. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir.

2.4.1.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah adalah salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Nilai dari produktivitas total daerah menunjukkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor terhadap perekonomian suatu daerah. Nilai produktivitas sendiri dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas masing-masing sektor per angkatan kerja, yaitu dengan membagi output lapangan usaha dalam PDRB dengan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya tiga sektor utama di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, setelah itu Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, dan yang terakhir sektor Industri Pengolahan, dan berikut adalah nilai produktivitas di masing-masing sektor tersebut.

Tabel 2.149 Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta), 2017

No.	Lapangan Usaha	Produktivitas (Rp juta)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	22,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	294,87
3.	Industri Pengolahan	105,22
4.	Lainnya	71,88
Produktivitas Total Daerah		494,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas total daerah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 mencapai Rp 494,74 juta per tenaga kerja. Dari ketiga sektor tersebut produktivitas tertinggi yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 294,87 juta, lalu sektor industri pengolahan sebesar Rp 105,22 juta, dan sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

sebesar Rp 22,77 juta. Sedangkan sektor selain ketiga sektor utama tersebut mencapai nilai produktivitas sebesar Rp 71,88 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor lain diluar sektor dominan juga memiliki kemampuan ekonomi dalam mendorong perekonomian daerah.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong pekonomian daerah kerana adanya kemudahan aksesibilitas.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas transportasi seperti jalan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi infrastruktur. Dengan tersedianya akses melalui ketersediaan jalan maka konektivitas antarwilayah akan semakin mudah sehingga dapat berdampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut (2018), pada tahun 2017, Panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan sepanjang 2.215,78 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 141,83 km, jalan provinsi sepanjang 247,32 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.826,63 km. Tercatat bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten tanah Laut terdapat 9.121 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 1.132 unit mobil penumpang, 1 unit bus, 557 mobil barang, 7.387 unit sepeda motor, dan 44 unit mobil ransus. Apabila dihitung menggunakan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan maka didapatkan hasil yakni sebesar 4,11 unit per km yang berarti bahwa setiap jalan sepanjang 1 km dapat diakes oleh 4 unit kendaraan.

2.4.2.2 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km². Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan

peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan terdiri atas: (a) kawasan perikanan tangkap, (b) kawasan perikanan budidaya, (c) kawasan pengolahan perikanan, dan (d) kawasan konservasi sumberdaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap sebesar kurang lebih 219.498,44 ha. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat padaperikanan tangkap darat tersebar di seluruh kecamatan terutama di kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung. Bumi Makmur dan Kurau, dengan komoditas unggulan berupa ikan gabus, betok, nila, patin, udang serta pengembangan rumput laut. Perikanan tangkap laut terdapat pada hampir semua kawasan perairan sampai 4 mil laut di luar peruntukan alur; dan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Kintap.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan,

Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha yang terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

2.4.2.3 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

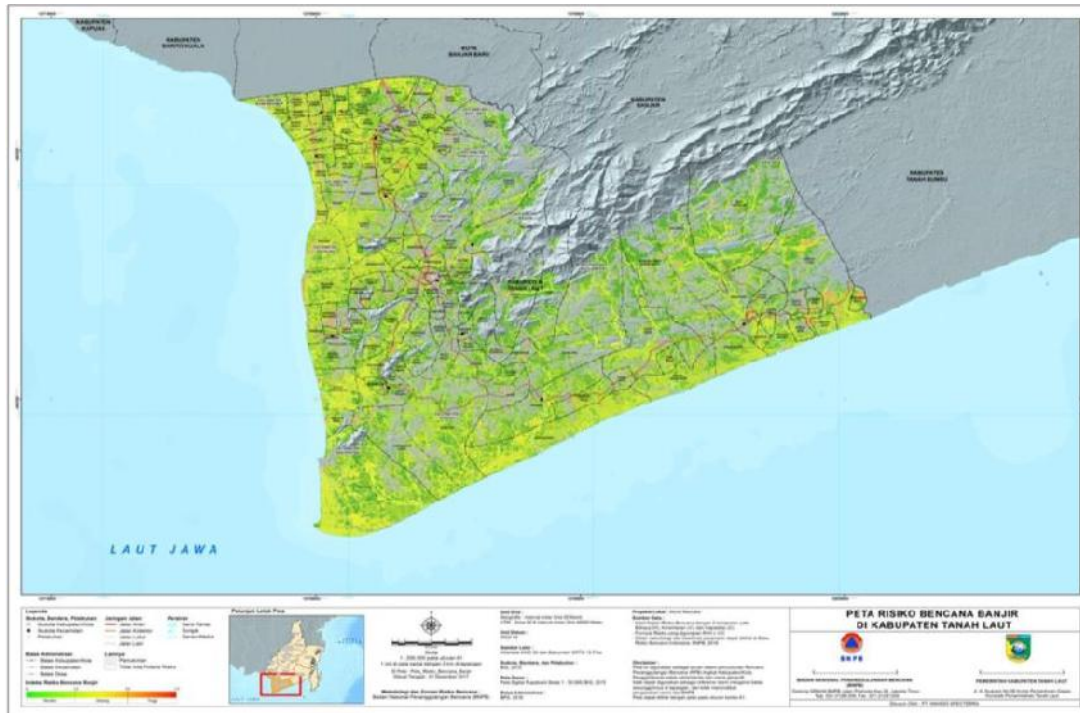
Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan

peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati – Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

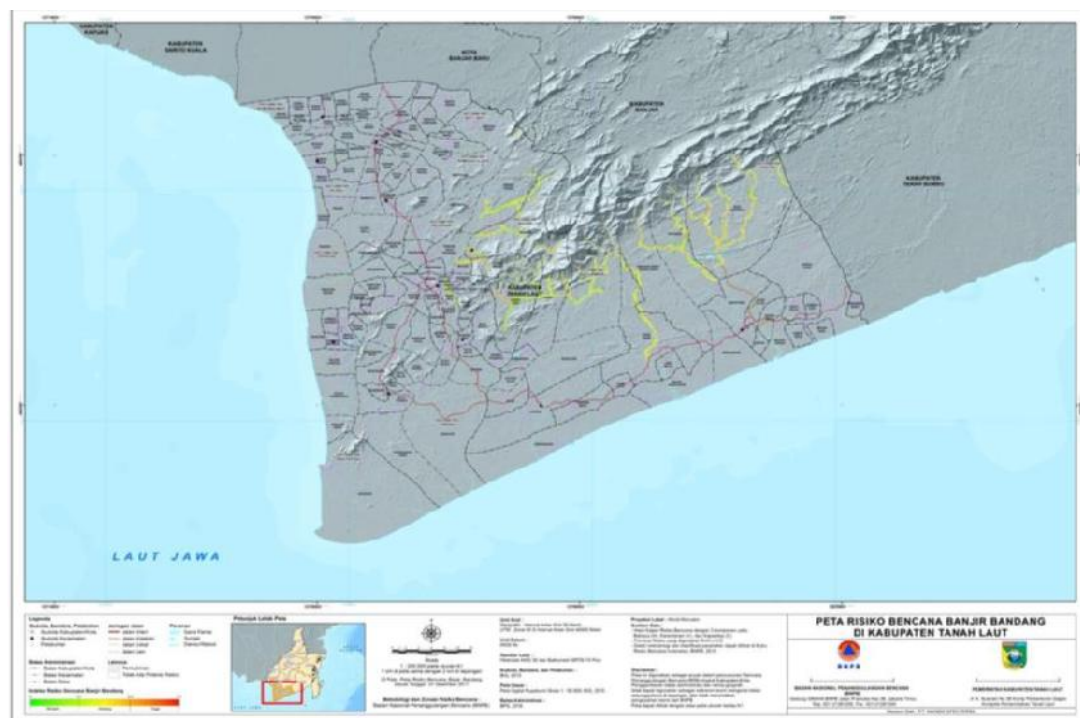
2.4.2.4 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi (a) Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan; (b) hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Kuala Tambangan, Takisung, Gunung Makmur, Benua Tengah, dan Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Jorong, Asam-Asam, Swarangan, dan Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatan di Desa Kuringkit, Batu Mulya dan Bumi Asih; (f) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Kintapura, Riam Adungan, Muara Kintap, Salaman, Kintap Kecil, dan Pasir Putih; (g) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (h) Kecamatan Batu Ampar; (i) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Kunyit, dan Sungai Bakar; dan (j) hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur. Dalam kurun waktu 2000-2017, jumlah bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 137 kejadian dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 9 orang dan rumah yang terendam mencapai 3.697 rumah. Ancaman bahaya banjir di Kabupaten Tanah Laut termasuk pada kelas tinggi dengan areal yang terdampak bisa mencapai 182.755 ha.

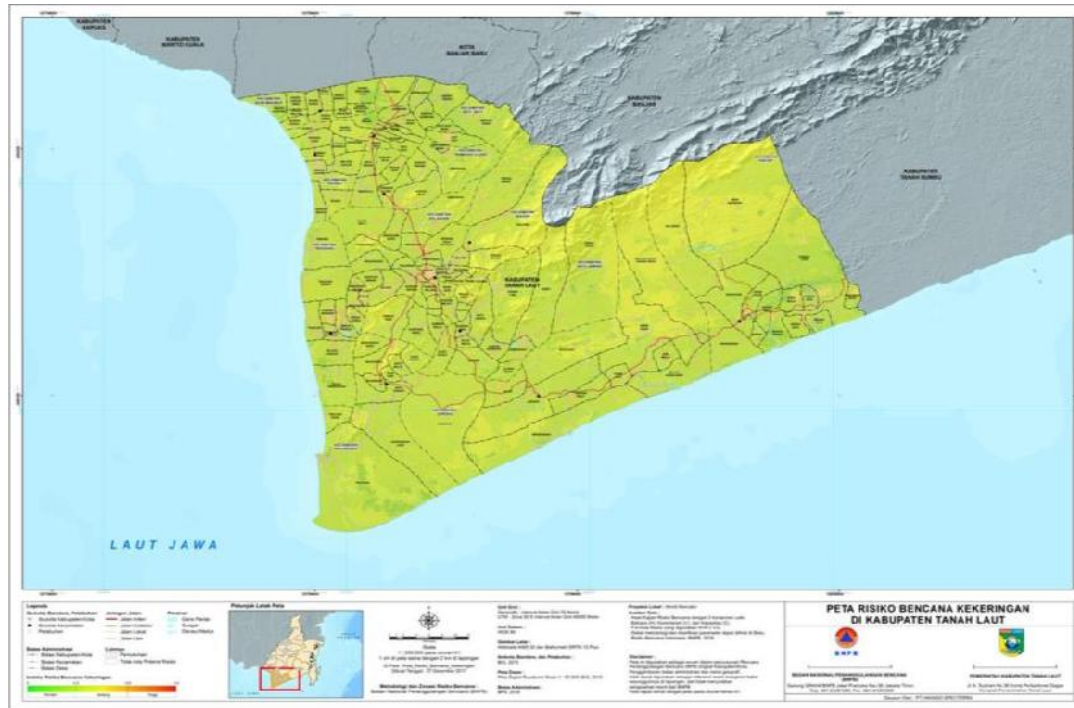
Untuk bencana kekeringan, potensi bahayanya termasuk dalam kategori sedang dengan luasan terdampak dapat mencapai 363.135 ha. Potensi penduduk yang terpapar kekeringan adalah sebanyak 338.291 jiwa dimana kelompok umur rentan yang terpapar mencapai 23.809 jiwa, penduduk miskin sebanyak 56.698 jiwa, dan penduduk cacat sebanyak 802 jiwa. Potensi kerugian akibat kekeringan di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai Rp 2,12 miliar dengan potensi kerusakan lingkungan seluas 66.583 ha. Di satu sisi, kelas ketahanan daerah dalam menghadapi kekeringan masih dalam kategori sedang dengan kelas kesiapsiagaan yang rendah sehingga kelas kapasitas daerah masih dalam kategori rendah.



Gambar 2.28 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018



Gambar 2.29 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018



Gambar 2.30 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.4.2.5 Luas Wilayah Perkotaan

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2016-2036. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan terdiri dari Pusat kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Pelaihari yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas daerah perkotaan sekitar 60 km². Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yakni Perkotaan Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula dengan luas perkotaan kurang lebih 28 km², dan Perkotaan Jorong sebagai Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai kawasan industri, luas Perkotaan Jorong kurang lebih 76 km². Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari Perkotaan Takisung dan Kintap. Perkotaan Takisung berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun

jasa dalam skala kecamatan, dan juga sebagai pelayanan kegiatan pariwisata di beberapa desa untuk skala lokal dan provinsi. Luas kawasan perkotaan takisung sekitar 45 km². Sedangkan Perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan, luas Perkotaan Kintap sekitar 48 km². Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL menurut RTRW Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Desa Kurau Kecamatan Kurau, Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, Desa Tambang Kecamatan Tambang Ulang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan. Dan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin.

2.4.2.6 Fasilitas Jasa Perbankan

Fasilitas jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Perbankan memiliki peran penting yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Sehingga bank dapat menjadi salah satu pihak yang membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 8 bank nasional yang beroperasi yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah baik berupa bank cabang, cabang pembantu, atau bank unit.

Tabel 2.150Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam
			Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar
			Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang
			Kantor Kas BRI Teras Angsau
			Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah
			Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari
			Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin
			BRI Teras Keliling
			KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka
			KCP Bank BRI Unit Kintap

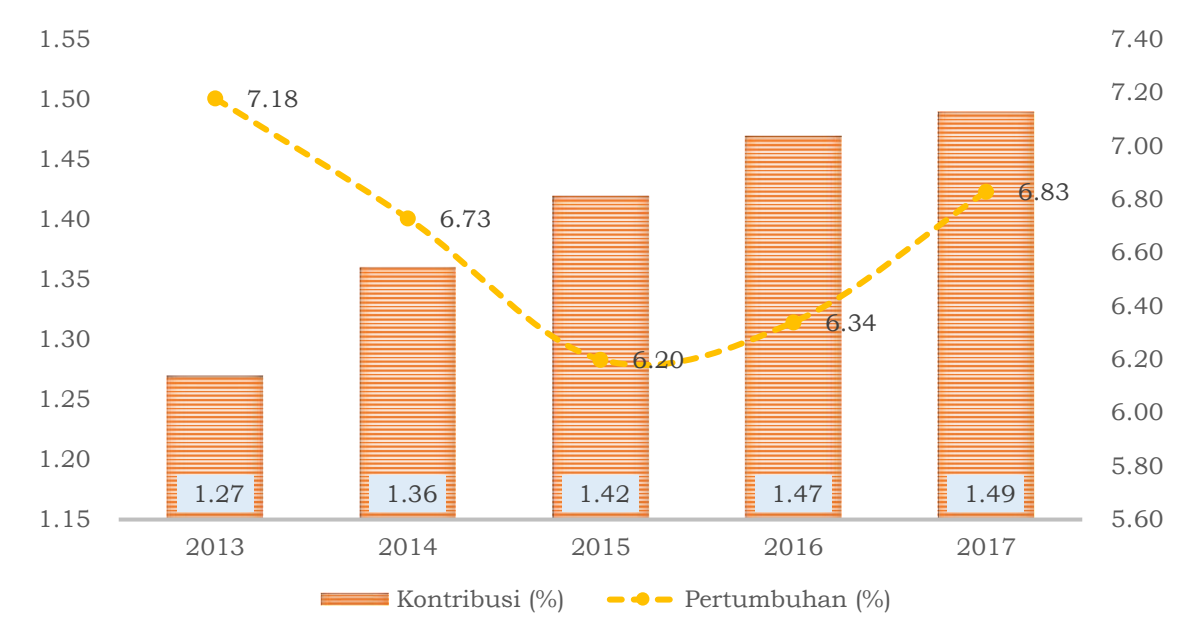


No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
			KCP Bank BRI Unit Bati-Bati
			KCP Bank BRI Unit Gagasan
			KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota
			KCP Bank BRI Unit Takisung
			KCP Bank BRI Unit Jorong
			KCP Bank BRI Unit Asam-Asam
			Kantor Cabang BRI Pelaihari
3.	BTN	7	Kantor Kas BTN Pelaihari
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
			Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
			Kantor Kas BTN Bat-Bati
4.	Bank Mandiri	2	Kantor Fungsional Bank Mandiri Pasar Pelaihari
			KCP Bank Mandiri Pelaihari
5.	Bank Mandiri Syariah	1	KCP Bank Mandiri Syariah Pelaihari
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam
			KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati
			KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
			Bank Kalsel Keliling
			Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari
			Kantor Cabang Bank Kalsel Pelaihari
7.	Bank BTPN	1	KCP BTPN Pelaihari
8.	Bank Danamon	1	KCP Bank Danamon Tapandang Berseri Pelaihari

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.4.2.7 Fasilitas Hotel dan Rumah Makan

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebesar 1,27% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,49%. Dari sisi pertumbuhan, sektor tersebut juga terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66% per tahun. Pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,18%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,20%.



Gambar 2.31 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan. Perkembangan jumlah penginapan sendiri dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 17 hotel yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 14 unit dan Kecamatan Jorong sebanyak 3 unit. Ketersediaan kamar pada hotel-hotel tersebut adalah sebanyak 225 kamar dengan tempat tidur sebanyak 254 unit. Sedangkan jumlah rumah

makan/restoran dari tahun 2015 ke tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 64 unit, dengan lokasi restoran terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sejumlah 32 unit.

Tabel 2.151Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1.	Panyipatan	-	-	-	4
2.	Takisung	-	-	-	4
3.	Kurau	-	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	-	6
6.	Tambang Ulang	-	-	-	8
7.	Pelaihari	14	205	234	32
8.	Bajuin	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	-
10.	Jorong	3	20	20	10
11.	Kintap	-	-	-	-
Jumlah		17	225	254	64

Sumber: SIPD *cit.*Badan Pusat StatistikKabupaten Tanah Laut, 2018

2.4.2.8 Rumah Tangga Pelanggan Air Minum

Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55 persen rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58 persen untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51 persen. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

Tabel 2.152 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sosial	1.101	19.025	48.211.900
2.	Rumah Tangga	43.839	720.402	2.682.634.300
3.	Instansi Pemerintah	981	40.173	141.748.100
4.	Niaga	696	20.443	88.899.500
5.	Industri	398	61.324	186.096.700
6.	Khusus	1.435	21.250	58.482.350
Jumlah		48.450	882.617	3.206.072.850

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan air di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri, dan khusus. Jumlah pelanggan air secara keseluruhan adalah sebanyak 48.450 pelanggan dengan pelanggan terbesar adalah kelompok rumah tangga yang mencapai 43.839 pelanggan. Volume air yang disalurkan PDAM Kabupaten Tanah Laut pada 6 kelompok tersebut adalah sebesar 882.617 m³. Penjualan tertinggi air pada tahun 2017 adalah pada kelompok rumah tangga yang mencapai 720.402 m³, disusul kelompok industri sebesar 61.324 m³, dan kelompok instansi pemerintah sebesar 40.173 m³. Nilai keseluruhan penjualan air tersebut adalah sebesar Rp 3,21 miliar dimana kelompok rumah tangga menyumbang penjualan air sebesar Rp 2,68 miliar, disusul kelompok industri sebesar Rp 186,10 juta, dan kelompok instansi pemerintah sebesar Rp 141,75 juta. Melihat data yang ada, terlihat bahwa cakupan penyediaan air bagi rumah tangga telah memadai di Kabupaten Tanah Laut. Cakupan penyediaan air minum oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut, terlihat bahwa pelayanan PDAM masih terbatas pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Bati-bati, Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong. Penjualan air tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 668.413 m³, disusul Kecamatan Jorong sebesar 128.501 m³, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 37.899 m³.

Tabel 2.153 Jumlah Produksi, Penggunaan Air Minum yang Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi (m ³)	Penggunaan (m ³)	Terjual (m ³)
1.	Panyipatan	16.070	16.070	13.574
2.	Takisung	29.385	19.603	12.761
3.	Kurau	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	59.616	53.136	37.899
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	1.625.580	888.258	668.413
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	32.141	32.141	21.469
10.	Jorong	215.240	192.917	128.501
11.	Kintap	-	-	-
Jumlah		1.978.032	1.202.125	882.617

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.4.2.9 Ketersediaan Daya Listrik

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah tangga menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya fasilitas penerangan yang memadai. Fasilitas penerangan rumah terdiri atas rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan Non-PLN) dan rumah tangga yang tidak menggunakan penerangan. Rumah tangga yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk ke dalam kelompok rumah tangga yang tidak menggunakan penerangan. Pemakaian penerangan berupa listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya. Sumber penerangan pada Susenas 2017 terdiri dari listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), listrik non PLN, dan bukan listrik (petromak, lampu aladin, pelita, sentir, dan obor). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN mengindikasikan keterjangkauan listrik PLN di Indonesia. Sebaliknya persentase rumah tangga pengguna listrik non PLN maupun bukan listrik memberikan gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan listrik PLN.

Tabel 2.154 Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Sumber Penerangan	2016	2017
Listrik PLN	97,78	99,85
Listrik Non-PLN	1,77	0,01
Bukan Listrik	0,45	0,14

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan penerangan listrik PLN dengan persentase sebesar 97,78%. Akan tetapi masih ada rumah tangga yang menggunakan penerangan dengan listrik non-PLN sebesar 1,77%, sedangkan yang menggunakan bukan listrik masih ada 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk dapat mengakses penerangan yang memadai berupa listrik PLN.

Tabel 2.155 Daya terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN di Kabupaten Tanah Laut, 2011-2017

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
2011	45.092.530	101.480.860	89.115.713
2012	51.259.780	118.783.620	103.573.943
2013	64.600.130	141.614.134	121.440.135
2014	72.531.380	142.239.541	136.227.770
2015	77.182.100	171.882.396	150.863.892
2016	86.218.800	180.505.454	164.628.169
2017	95.053.800	195.716.108	176.755.685

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut termasuk fasilitas kelistrikan untuk menyediakan kebutuhan listrik baik itu untuk pembangunan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Produksi listrik dapat ditingkatkan melalui pembangunan pembangkit yang harapannya mampu meningkatkan rasio elektrifikasi dan juga mendorong tumbuhnya industri. Selama periode 2011-2017, daya terpasang listrik di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, daya terpasang listrik adalah sebesar 45.092.530 KW dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 95.053.800 KW. Dengan

adanya peningkatan daya terpasang, maka produksi listrik juga mengalami lonjakan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2011, produksi listrik di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 101.480.860 KWh dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 195.716.108 KWh. Pelanggan listrik juga turut melonjak dari sebanyak 51.574 pelanggan pada tahun 2011 menjadi sebanyak 69.689 pelanggan pada tahun 2017. Pelanggan prabayar pada tahun 2017 adalah sebanyak 28.538 pelanggan dan pelanggan pasca bayar sebanyak 41.151 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

Tabel 2.156 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Tipe KWh Meter di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Prabayar	Pasca Bayar
2012	6.998	44.576
2013	13.568	42.883
2014	17.486	42.376
2015	21.194	41.864
2016	24.631	41.587
2017	28.538	41.151

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.4.2.10 Ketersediaan Sarana Komunikasi

Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi terbantu oleh banyaknya alat teknologi informasi dan teknologi yang berkembang saat ini seperti komputer, internet, dan telepon seluler. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut perkembangan teknologi informasi menunjukkan peningkatan yang dilihat dari jumlah kepemilikan internet speedy dan jumlah warung internet. Pada tahun 2014 pelanggan jaringan internet speedy sebanyak 835 pelanggan, kemudian naik di tahun 2015 menjadi 937 pelanggan, dan pada 2016 naik lagi sebesar 23% menjadi 1.154 unit. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan kembali mengalami peningkatan sebanyak 2.148 pelanggan. Pelanggan internet tersebut berada di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Takisung (65 pelanggan), Kecamatan Bati-bati (107 pelanggan), Kecamatan Tambang Ulang (10 pelanggan), Kecamatan Pelaihari (1.866 pelanggan), dan Kecamatan Jorong (100 pelanggan). Berbeda dengan jumlah warung internet di Kabupaten Tanah Laut, pada 2014 jumlah warung internet sebanyak 15 unit, kemudian naik di tahun 2015 menjadi

23 unit, namun turun kembali menjadi 12 unit pada 2016 yang tersebar di Kecamatan Pelaihari 10 unit, Kecamatan Bati-Bati 1 unit, dan Kecamatan Takisung 1 unit. Pada tahun 2017, jumlah warung internet meningkat menjadi 13 unit yang tersebar di Kecamatan Takisung (1 unit), Kecamatan Pelaihari (9 unit), dan Kecamatan Jorong (3 unit). Penurunan jumlah warung internet di Kecamatan Bati-bati dan Pelaihari mungkin disebabkan oleh berpindahnya pelanggan dari warung internet ke pelanggan internet speedy, karena penggunaan internet pribadi lebih praktis dan fleksibel. Sehingga kedepannya dimungkinkan juga terjadi siklus yang sama yaitu peningkatan jumlah pelanggan speedy.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi di suatu wilayah dapat dipengaruhi salah satunya oleh angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin rendah angka kriminalitas maka dapat menciptakan kondisi yang aman dan terjamin sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya karena alasan keamanan yang dapat berakibat pada ketidakpastian usaha. Selama 5 tahun terakhir yakni periode 2012-2017, angka kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut cenderung rendah dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, angka kriminalitas Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,12%, kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 0,11%. Penurunan angka kriminalitas juga terjadi pada tahun 2014 sehingga menjadi 0,06%. Namun, pada tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan angka kriminalitas

tetapi tidak signifikan sehingga menjadi 0,09%. Pada tahun 2016, angka kriminalitas Kabupaten Tanah Laut kembali menurun menjadi 0,07% dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 0,04%. Selama periode 2012-2017, tindak kriminalitas terbanyak terjadi pada tahun 2012 yakni 381 kasus, sedangkan tindak kriminal terendah terjadi pada 2017 yakni 149 kasus.

Tabel 2.157 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (kasus)	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas (%)
2012	381	308.818	0,12
2013	343	313.725	0,11
2014	193	319.098	0,06
2015	309	337.291	0,09
2016	253	340.909	0,07
2017	149	334.328	0,04

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.4.3.2 Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi pkegiatan enanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat http://dpmpmsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin. Rincian dan lama proses perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.158 Jenis dan Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan	Lama Proses Perizinan	Biaya (Rp)
1.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
2.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
4.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
5.	Izin Gangguan (HO)	Diketahui	-	Sesuai Perda
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
7.	Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB)	Diketahui	7	Sesuai Perda
8.	Izin Usaha Perkebunan	Diketahui	15	Tanpa Biaya
9.	Izin Usaha Hiburan Umum	Diketahui	3	Tanpa Biaya
10.	Izin Usaha Perhotelan/Penginapan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
11.	Izin Usaha Rumah Makan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
12.	Izin Reklame	Diketahui	3	Sesuai Perda
13.	Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet	Diketahui	7	Tanpa Biaya
14.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Diketahui	3	Sesuai Perda
15.	Izin Usaha Peternakan	Diketahui	7	Tanpa Biaya
16.	Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat	Diketahui	7	Tanpa Biaya
17.	Izin Penggilingan Padi	Diketahui	7	Tanpa Biaya
18.	Izin Usaha Perbengkelan	Diketahui	3	Tanpa Biaya
19.	Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
20.	Izin Praktek Dokter Hewan	Diketahui	4	Tanpa Biaya
21.	Izin Penyelenggaraan Kursus	Diketahui	3	Tanpa Biaya
22.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	Diketahui	7	Sesuai Perda
23.	Izin Usaha Kepariwisata	Diketahui	5	Tanpa Biaya
24.	Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta	Diketahui	12	Tanpa Biaya
25.	Izin Klinik Swasta	Diketahui	6	Tanpa Biaya
26.	Izin Klinik Perusahaan	Diketahui	6	Tanpa Biaya
27.	Izin Apotek	Diketahui	12	Tanpa Biaya
28.	Izin Toko Obat	Diketahui	12	Tanpa Biaya

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan	Lama Proses Perizinan	Biaya (Rp)
29.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Diketahui	12	Tanpa Biaya
30.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Diketahui	12	Tanpa Biaya
31.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
32.	Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
33.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Diketahui	-	-
34.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
35.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
36.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-
37.	Izin Usaha Penanaman Modal	Diketahui	-	-
38.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
39.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
40.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-
41.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah Kabupaten Tanah Laut	Diketahui	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.4.3.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian peningkatan potensi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi juga memperhatikan prinsip pelayanan optimal yang tidak memberatkan masyarakat. Peningkatan PAD yang disertai dengan peningkatan kontribusi PAD pada pendapatan daerah menunjukkan adanya ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan.

Sumber PAD sendiri berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pungutan retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha yang jenis retribusinya memiliki turunan masing-masing dan ragamnya disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing.

Tabel 2.159 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten tanah Laut, 2017

No.	Uraian	Jenis Pajak dan Retribusi
1.	Pajak Daerah	Pajak Hotel
		Pajak Restoran
		Pajak Hiburan
		Pajak Reklame
		Pajak Penerangan Jalan
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
		Pajak Parkir
		Pajak Air Bawah Tanah
		Pajak Bumi dan Bangunan
		Pajak BPHTB
2.	Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehata
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
		Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
		Retribusi Pelayanan Pasar
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
		Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
		Retribusi Terminal
		Retribusi Tempat Khusus Parkir
		Retribusi Rumah Potong Hewan
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
		Retribusi Izin Gangguan Keramaian /HO

No.	Uraian	Jenis Pajak dan Retribusi
		Retribusi Pemberian Izin Trayek

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut, 2017

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah periode 2011-2017, penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011 yaitu sebesar Rp 5,24 miliar hingga pada tahun 2015 dengan realisasi pajak sebesar Rp 20,86 miliar. Namun demikian, pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp 18,94 miliar. Pada tahun 2017, penerimaan pajak daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 28,85 miliar. Berbeda dengan penerimaan pajak yang trennya meningkat, penerimaan retribusi daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi sebesar Rp 4,12 miliar, kemudian meningkat pada dua tahun selanjutnya hingga mencapai Rp 7,49 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 5,63 miliar, dan naik kembali di tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi sebesar Rp 6,98 miliar dan Rp 7,93 miliar.

Tabel 2.160 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2011-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2011	5.238.621.626,00	4.121,980.346,00
2012	6.905.138.950,00	3.934,102.980,00
2013	9.631.149.328,00	4.680,960.696,00
2014	14.731.607.725,00	7.492,552.435,00
2015	20.857.114.355,00	5.633,292.680,00
2016	18.939.010.059,50	6.979,519.851,00
2017	28.854.073.560,00	7.934.695.295,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut, 2011-2017

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek penting dalam pembangunan daerah maupun nasional, karena manusia merupakan obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, harapannya pembangunan SDM dapat meningkatkan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional, dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu dan teknologi yang inovatif yang berguna untuk mendorong pembangunan nasional. Aspek daya saing SDM

Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan ratio ketergantungannya.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dalam kerangka pembangunan daerah. Kualitas SDM dapat dicerminkan melalui kualitas dari tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin baik kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2017), pada tahun 2016 sebagian besar penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang bekerja masih memiliki pendidikan yang rendah. Sebanyak 20,20% penduduk tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD dan 31,98% merupakan lulusan SD. Sedangkan 22,64% merupakan lulusan sekolah menengah pertama dan 19,58% merupakan lulusan sekolah menengah atas. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan diploma I/II/III/Akademi sebesar 2,09% dan berpendidikan S1/S2/S3 hanya sebesar 3,51%.

Tabel 2.161 Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016-2017

Pendidikan	2016	2017
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	20,20	21,54
Sekolah Dasar	31,98	32,97
Sekolah Menengah Pertama	22,64	21,69
Sekolah Menengah Atas	19,58	16,49
Diploma I/II/III/Akademi	2,09	1,13
Universitas (S1/S2/S3)	3,51	6,18

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan universitas melonjak signifikan dari hanya sebesar 3,51% menjadi sebesar 6,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan universitas banyak yang langsung masuk pasar tenaga kerja dan langsung mendapatkan pekerjaan pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi pada penduduk yang tidak sekolah dan masuk ke pasar tenaga kerja dimana persentasenya meningkat menjadi 21,54%. Kenaikan yang sama juga terjadi pada penduduk

berpendidikan SD yang masuk pasar tenaga kerja dibuktikan dengan kenaikan persentase menjadi 32,97%. Kenaikan persentase penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD bahkan tidak sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sifat pekerjaan dengan tingkat pendidikan tersebut sangat rentan akan masuk ke dalam kelompok pengangguran.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Penduduk produktif yakni penduduk dengan usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif yakni penduduk dengan usia 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Tabel 2.162 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	>65 tahun	Rasio Ketergantungan (%)
2012	29,87	66,40	3,73	50,60
2013	29,76	66,44	3,80	50,49
2014	29,63	66,50	3,87	50,37
2015	29,48	66,56	3,96	50,24
2016	29,27	66,90	3,83	49,47
2017	29,09	66,75	4,16	49,81

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, yakni tahun 2012-2016, rasio ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penurunan. Jika angka beban ketergantungan semakin kecil, maka akan menyebabkan munculnya peluang keuntungan demografi yang dikenal dengan bonus demografi, meskipun secara skala nasional bonus demografi diprediksikan baru akan terjadi pada tahun 2025-2030. Pada tahun 2012, rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 50,60%, menurun pada tahun 2013 menjadi 50,49%. Kemudian pada tahun



2014 rasio ketergantungan yakni sebesar 50,37% dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 50,24%. Selanjutnya rasio ketergantungan terus menurun menjadi 49,47% pada 2016 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 49,81%. Hal tersebut berarti pada tahun 2017, dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 49 sampai 50 penduduk usia tidak produktif. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan perkembangan yang baik karena beban penduduk produktif menjadi berkurang.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 2.163 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1.1.1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	<7	<
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	<7	<
1.1.1.2	Tingkat Inflasi Daerah (%)	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82	4	>
1.1.1.3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	26,55	26,93	27,26	27,72	28,57	26,00	>
1.1.1.4	Indeks Gini (skor)	0,27	0,24	0,27	0,28	0,26	-	-
1.1.1.5	Penduduk miskin (orang)	13.654	14.039	14.790	15.240	15.308	-	-
	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,33	4,38	4,58	4,65	4,60	<4	<
1.1.1.6	Indeks Pembangunan Manusia (skor)	66,11	66,50	66,99	67,44	68,00	75-80	<
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Angka melek huruf (%)	96,77	-	-	-	-	99,22	<
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,26	7,27	7,29	7,30	7,37	-	-
1.2.3	Harapan lama sekolah (tahun)	10,83	11,09	11,25	11,50	11,82	-	-
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	-	-	-	-	109,54	-	-
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	-	-	-	-	80,16	-	-
1.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	-	-	-	-	98,56	-	-
1.2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	-	-	-	-	71,31	-	-
1.2.8	Angka harapan hidup (tahun)	68,19	68,22	68,62	68,76	68,76	-	-
1.2.9	Persentase balita gizi buruk (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Persentase balita gizi kurang (%)	-	-	-	-	6,90	-	-
1.2.11	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
1.2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,41	72,42	68,72	68,72	67,27	-	-
1.2.13	Rasio penduduk yang bekerja (%)					64,77	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.2.14	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	-	-	-	-	-	-	-
1.2.16	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
1.2.17	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,12	8,45	11,17	11,23	10,31	-	-
1.2.18	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
1.2.19	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.20	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	-	-	-	-	84,60	-	-
1.2.21	Desa Berketahanan Pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.22	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.23	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.24	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.25	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.26	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.27	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	8,54	8,81	8,20	7,88	7,95	-	-
1.2.28	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	4,67	4,64	4,33	7,57	7,56	-	-
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga							
1.3.1	Jumlah grup kesenian	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Jumlah gedung olahraga	-	-	-	-	-	-	-
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Angka melek huruf (%)	96,77	-	-	-	-	99,22	-
2.1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,26	7,27	7,29	7,30	7,37	-	-
2.1.1.3	Harapan lama sekolah (tahun)	10,83	11,09	11,25	11,50	11,82	-	-
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Rasio Murid-Guru PAUD (rasio)	-	-	-	-	1 : 8	-	-
2.1.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	-	-	-	-	109,54	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	-	-	-	-	80,16	-	-
2.1.1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	-	-	-	-	98,56	-	-
2.1.1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	-	-	-	-	71,31	-	-
2.1.1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	4,12	98,70	99,37	99,68	99,40	-	-
2.1.1.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	88,57	96,33	96,05	92,16	91,59	-	-
2.1.1.12	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	-	-	-	-	1,17	-	-
2.1.1.13	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	-	-	-	-	0,39	-	-
2.1.1.14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	-	-	-	-	98,83	-	-
2.1.1.17	Cakupan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.18	Cakupan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (rasio)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (rasio)	-	-	-	-	1 : 15	-	-
2.1.1.21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	-	-	-	-	1 : 20	-	-
2.1.1.22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.1.1.23	Cakupan siswa SD yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.1.1.24	Cakupan siswa SMP yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.25	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	-	-	-	-	65,28	-	-
2.1.1.26	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.27	Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup yang meningkat keterampilannya (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.28	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.29	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.30	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.31	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.32	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SD (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.33	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.34	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses listrik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.35	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses internet untuk tujuan pengajaran (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.36	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.37	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses air minum layak	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.38	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas dasar per jenis kelamin (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.39	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas cuci tangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.40	Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.41	Jumlah Desa yang memiliki PKBM aktif (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.42	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Angka harapan hidup (tahun)	68,19	68,22	68,62	68,76	68,76	-	-
2.1.2.2	Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5) (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.3	Persentase balita gizi buruk (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4	Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.5	Cakupan <i>buffer stock</i> obat Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.6	Persentase Instalasi farmasi kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.9	Cakupan puskesmas terakreditasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.10	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (tema)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.11	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.13	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.14	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.15	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.16	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang yang dapat ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.18	Angka kematian akibat keracunan (kasus)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.19	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.20	Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk (kasus)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.21	Tingkat kematian akibat malaria (kasus)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.22	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.24	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.25	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.27	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.28	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.29	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.30	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.31	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.32	Penderita diare yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.33	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.34	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.36	Jumlah Lembaga Mitra Pembangunan Kesehatan (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.37	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.38	Persentase penyalahgunaan narkotika yang menyelesaikan program rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.39	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.40	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.41	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.42	Unmet need pelayanan kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.43	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.44	Bidan yang Kompeten PPIA (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.45	Cakupan perawatan balita gizi buruk (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.46	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.47	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.48	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.49	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.50	Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.51	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.52	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.53	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	14,00	-	-
2.1.2.54	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	16,00	-	-
2.1.2.55	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.56	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.57	Cakupan penanganan kesehatan bayi (%)	-	-	-	-	89,10	-	-
2.1.2.58	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	-	-	-	-	65,29	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.59	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	-	-	-	-	986,00	-	-
2.1.2.60	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.61	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.62	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.63	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.64	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.65	Cakupan pelayanan nifas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.66	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.67	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.68	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.69	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	-	-	-	56,93	-	-
2.1.2.70	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.72	Cakupan Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.73	Cakupan SDM kesehatan yang terakreditasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.74	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	-	-	-	-	1 : 5263	-	-
2.1.2.75	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	-	-	-	-	1 : 100.000	-	-
2.1.2.76	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	-	-	-	-	1 : 1.219	-	-
2.1.2.77	Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	-	-	-	-	1 : 121	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.78	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.79	Cakupan masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.80	Angka kematian dari percobaan bunuh diri (kasus)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.81	Cakupan Rumah sakit yang sudah terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.82	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.83	Indeks Kinerja Pelayanan RSUD dan Pelayanan Puskesmas (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.84	Nilai Capaian SPM Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.85	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.86	Jumlah desa yang memiliki kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.87	Cakupan Kelurahan/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	-	-	-	-	91,40	-	-
2.1.2.88	Persentase desa yang memiliki rumah tangga berPHBS (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.89	Persentase desa ODF	-	-	-	-	10,00	-	-
2.1.2.90	Persentase desa STBM	-	-	-	-	29,03	-	-
2.1.2.91	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.92	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.93	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.94	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.95	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.96	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.97	Indeks keuangan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.98	Indeks utilisasi (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.99	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.100	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.101	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.102	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.103	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.104	Indeks pendidikan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.105	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.106	Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.107	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.108	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.109	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.110	Indeks level IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.111	Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.112	Jumlah inovasi pelayanan di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.113	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.114	Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.2.115	Jumlah inovasi pelayanan di masing-masing puskesmas	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Persentase terhubungnya antar wilayah kecamatan melalui transportasi darat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.3.3	Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatnya kualitasnya (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	Persentase jalan yang dipelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.3.6	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.3.7	Panjang jalan di Kota Pelaihari yang dilebarkan (km)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Cakupan pengerasan dan pengaspalan Jalan Swarangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.15	Cakupan pembangunan Kantor Bupati (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.16	Cakupan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.17	Tersedianya standar satuan harga jasa konstruksi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.3.18	Cakupan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.3.19	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.20	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.21	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.22	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.3.23	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.24	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun (kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.25	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.26	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.27	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.28	Persentase pengawasan dalam pembangunan jalan desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.29	Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.30	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.31	Persentase teknologi konstruksi terbaru yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.32	Cakupan pemeliharaan alat-alat konstruksi yang dimiliki (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.1.4.1	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.4.7	Jumlah kawasan pengembangan rumah komersil yang dibangun (kawasan)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (unit RTH)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.10	Jumlah inovasi pelayanan di bidang perumahan dan rakyat dan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	0	=
2.1.5.3	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.4	Komunitas Sedekah Lingkup Birokrasi yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.5	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	=
2.1.5.6	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.7	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.8	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.9	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.10	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.11	Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.12	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.14	Cakupan fasilitasi pembinaan seni budaya daerah bagi remaja usia sekolah (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.5.15	Cakupan fasilitasi pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat miskin (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.16	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.5.17	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.18	Jumlah Desa sadar politik (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.19	Jumlah Desa Peduli Toleransi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.20	Jumlah inovasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.21	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.22	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.23	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.24	Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.25	Jumlah tindak pidana (kasus)	-	193	309	253	149	-	-
2.1.5.26	Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.27	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.28	Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.29	Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.30	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.31	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.32	Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.33	Jumlah inovasi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.6.2	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.4	Persentase PMKS yang tertangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.6	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.7	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.8	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.9	Cakupan peningkatan SDM kesejahteraan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.10	Cakupan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.11	Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.12	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.13	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.14	Jumlah inovasi pelayanan Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.15	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.16	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.17	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.18	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.19	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.20	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.6.21	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.22	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.23	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.24	Desa tangguh bencana (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.25	Jumlah inovasi pelayanan BPBD	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.2.1	Tenaga Kerja							
2.2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,41	72,42	68,72	68,72	67,27		
2.2.1.2	Rasio penduduk yang bekerja (%)					64,77		
2.2.1.3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Tingkat Pengangguran (%)	-	-	-	-	3,70	4,20	<
2.2.1.6	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.7	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.10	Penetapan UMK (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.2.1.11	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.12	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.13	Persentase tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan setelah mendapatkan pelatihan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.14	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.15	Jumlah inovasi pelayanan bidang tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	-	-	-	-	68,36	-	-
2.2.2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	-	86,88	87,68	-	-	-	-
2.2.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Laut (%)	-	87,68	-	-	-	-	-
2.2.2.4	Proporsi kursi perempuan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kalimantan Selatan	-	3,66	3,66	3,66	3,66	-	-
2.2.2.5	Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	-	-	-	-	46,89	-	-
2.2.2.7	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.8	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.9	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.10	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.11	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.12	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.13	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.14	Kabupaten Layak Anak (kategori)	-	-	-	-	Pratama	-	-
2.2.2.15	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.2.16	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.2.17	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.18	Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.2.19	Rasio KDRT (rasio)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.2.20	Desa peduli perempuan dan anak (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.21	Jumlah inovasi pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Pangan							
2.2.3.1	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	-	-	-	-	84,60	-	-
2.2.3.3	Cakupan ketersediaan data harga pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.4	Cakupan pengawasan mutu dan keamanan pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5	Cakupan pemantauan distribusi pangan di pintu masuk utama kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7	Desa Berketahanan Pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8	Jumlah inovasi pelayanan bidang pangan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Pertanahan							
2.2.4.1	Cakupan fasilitasi penyediaan tanah untuk Kawasan Industri Jorong	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Cakupan penyelesaian konflik tanah	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.3	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.5	Jumlah inovasi pelayanan bidang pertanahan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Lingkungan Hidup							
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.3	Indeks Kualitas Air (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.5	Cakupan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.6	Cakupan ketersediaan data lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.5.7	Persentase sungai yang dipantau baku mutunya (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Rasio kualitas udara yang dipantau pada titik pengamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.10	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.11	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.12	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.13	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.14	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.15	Jumlah inovasi pelayanan bidang lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.16	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.17	Cakupan penyediaan alat-alat laboratorium prioritas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.6.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.4	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.5	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.6	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.7	Rasio pasangan berakte nikah (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.6.8	Persentase kepemilikan KK (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Cakupan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.10	Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.11	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (inovasi)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.12	Cakupan kerjasama administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.13	Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.14	Jumlah inovasi pelayanan bidang lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.7.1	Indeks Desa Membangun (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.3	Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.4	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.5	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6	Cakupan pendampingan penyusunan RPJM Desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.7	Cakupan pendampingan evaluasi kinerja RPJM Desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.8	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.9	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.10	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan BUMDES (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.11	Jumlah desa yang memiliki BUMDES yang bergerak di industri kreatif (desa)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.7.12	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.13	Persentase LPM berprestasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.14	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.15	Persentase PKK aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.16	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.17	Cakupan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.18	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.19	Cakupan desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.20	Cakupan desa yang tertib administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.21	Jumlah inovasi pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	-	-	-	-	2,20	-	-
2.2.8.3	Ketersediaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Ketersediaan regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.2.8.6	Laju pertumbuhan penduduk (%)	-	-	-	-	1,53	2,00	>
2.2.8.7	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (%)	-	-	-	-	78,76	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.8.9	Peserta anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti KB (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.10	Persentase anggota Bina Keluarga (BKR) Berstatus Ber-KB (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.11	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.12	Persentase PUS yang mendapat KIE (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.13	Unmeet need KB pada pasangan usia subur (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.14	Desa sadar KB (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.15	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9	Perhubungan							
2.2.9.1	Jumlah kasus kecelakaan (kasus)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Cakupan revitalisasi terminal yang dikelola kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum (Rp Juta)	-	-	-	-	12,60	-	-
2.2.9.4	Penerimaan retribusi pengelolaan terminal (Rp Juta)	-	-	-	-	122,29	-	-
2.2.9.5	Persentase angkutan umum yang layak digunakan di terminal (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.6	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.7	Cakupan pemasangan petunjuk jalan di ruas jalan kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.8	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.9.9	Cakupan penegakan pelanggaran lalu lintas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.10	Cakupan kesiapsiagaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam acara prioritas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.9.11	Pertumbuhan arus penumpang angkutan darat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.12	Pertumbuhan barang yang terangkut angkutan darat (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.9.13	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan darat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.14	Cakupan ketersediaan akses perhubungan menuju Pelabuhan Jorong (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.15	Cakupan monitoring sarana pehubungan laut, sungai, dan penyeberangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.2.9.16	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.17	Pertumbuhan barang yang melalui dermaga pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.18	Cakupan ketersediaan sarana navigasi angkutan laut, sungai, dan penyeberangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.2.9.19	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.20	Cakupan ketersediaan alat untuk pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.2.9.21	Persentase pelayanan tepat waktu dalam pengujian kendaraan bermotor (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.22	Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp Juta)					433,85		
2.2.9.23	Cakupan fasilitas pembangunan Pelabuhan Jorong (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.24	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Komunikasi dan Informatika							
2.2.10.1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh OPD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.2	Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.3	Cakupan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.10.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.5	Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.6	Cakupan fasilitasi pembangunan BTS di Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.7	Cakupan ketersediaan sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.8	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.9	Persentase OPD yang mempublikasikan kinerjanya dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.10	Persentase OPD di Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan dan terhubung sistem e-Government (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.11	Persentase OPD yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.12	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat syarat	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.13	Cakupan desa yang dapat mengakses layanan telekomunikasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.14	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.2.11.1	Persentase unit UMKM yang Terfasilitasi melalui Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% (Program Unggulan # 1) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.2	Jumlah UMKM yang berkembang (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.3	Jumlah UMKM baru yang terbentuk (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.4	Cakupan pembinaan UMKM dalam manajemen usaha dan pemasaran (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.11.5	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.6	Cakupan penerbitan izin UKM yang tepat syarat dan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.7	Jumlah koperasi baru yang terbentuk (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.8	Persentase koperasi aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.9	Persentase koperasi maju (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.10	Cakupan pembinaan koperasi terkait manajemen dan pengembangan usaha koperasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.11	Desa koperasi (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.12	Desa tematik UKM (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.13	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12	Penanaman Modal							
2.2.12.1	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	-	-	-	-	30	-	-
2.2.12.2	Realisasi Investasi (Rp miliar)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.3	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.5	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.6	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/PMDN (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.7	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.9	Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.10	Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.11	Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.12.12	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.13	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.14	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.15	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.16	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.17	Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.18	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
2.2.13.1	Persentase Wirausaha Muda (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.2	Organisasi pemuda aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.3	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.4	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.5	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.6	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.7	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.13.8	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.9	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.10	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.11	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.12	Kejuaraan cabang olahraga antar desa tingkat kabupaten (Ada/Tidak)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.13	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.14	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.15	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pemuda dan olahraga	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Statistik							
2.2.14.1	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14.2	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.14.3	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.14.4	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.14.5	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.14.6	Ketersediaan Buku Statistik Daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
2.2.14.7	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14.8	Ketersediaan data kinerja sektoral dalam SIPD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14.9	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang statistik	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Persandian							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.15.1	Persentase perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi penting milik pemerintah daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15.2	Persentase konten informasi prioritas yang telah diamankan dengan menggunakan persandian dibandingkan jumlah seluruh konten informasi yang ada (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15.3	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang persandian	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Kebudayaan							
2.2.16.1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.2	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.3	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.4	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.5	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.6	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.7	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.8	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.9	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.10	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang persandian	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Perpustakaan							
2.2.17.1	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17.2	Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan keliling (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.17.3	Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17.4	Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.17.5	Desa Gemar Membaca (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17.6	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Kearsipan							
2.2.18.1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.18.2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18.3	Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.18.4	Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.18.5	Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
2.2.18.6	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18.7	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kearsipan	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Urusan Pilihan							
2.3.1	Kelautan dan Perikanan							
2.3.1.1	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Produksi perikanan budidaya air tawar (ton)	-	-	-	-	165,60	-	-
2.3.1.3	Produksi perikanan budidaya air payau (ton)	-	-	-	-	933,00	-	-
2.3.1.4	Nilai tukar pembudidaya ikan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5	Cakupan pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6	Jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang dikembangkan (kawasan)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.7	Produksi perikanan tangkap laut (ton)	35.406,70	35.453,60	29.801,80	39.215,00	52.824,30	-	-
2.3.1.8	Produksi perikanan tangkap perairan umum (ton)	3.571,40	3.850,60	3.360,70	3.965,00	3.964,80	-	-
2.3.1.9	Nilai tukar nelayan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.10	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.3.1.11	Cakupan pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.1.12	Jumlah sentra produksi perikanan tangkap yang dikembangkan (kawasan)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.13	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	-	-	-	-	1.135,00	-	-
2.3.1.14	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang/tahun)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.15	Cakupan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.16	Jumlah sentra produksi olahan produk ikan yang dikembangkan (kawasan)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.17	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Pariwisata							
2.3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	-	-	-	-	275.000	-	-
2.3.2.2	PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	-	-	-	-	460,50	-	-
2.3.2.3	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.5	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6	Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7	Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.9	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.10	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.11	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Pertanian							
2.3.3.1	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.3.2	Produksi padi (ton)	161.818	151.860	167.041	190.927	311.988	-	-
2.3.3.3	Produksi jagung (ton)	77.999	83.596	81.363	115.834	179.556	-	-
2.3.3.4	Produksi kedelai (ton)	859	2.379	2.577	1.940	647	-	-
2.3.3.5	Produksi kacang tanah (ton)	918	1.337	866	943	1.189	-	-
2.3.3.6	Produksi kacang hijau (ton)	86	127	76	87	77	-	-
2.3.3.7	Produksi ubi kayu (ton)	27.901	25.247	23.022	32.417	736	-	-
2.3.3.8	Produksi ubi jalar (ton)	2.144	2.789	2.996	2.970	2.252	-	-
2.3.3.9	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas tanaman pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.10	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.11	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman pangan secara tepat syarat dan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.12	NTP Tanaman Pangan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.13	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.14	Produksi cabe besar (kuintal)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.15	Produksi cabe rawit (kuintal)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.16	Produksi tomat (ton)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.17	Produksi bawang merah (ton)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.18	Produksi buah naga (ton)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.19	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas hortikultura unggulan daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.20	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman hortikultura (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.21	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman hortikultura secara tepat syarat dan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.22	NTP Hortikultura (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.23	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.24	Produksi karet (ton)	8.756,50	-	6.437,20	6.407,80	6.437	-	-
2.3.3.25	Produksi kelapa sawit (ton)	-	14.383,00	0,76	15.339,30	17.110	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.3.26	Cakupan fasilitasi pengembangan dan peremajaan komoditas perkebunan unggulan daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.27	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman perkebunan secara tepat syarat dan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.28	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman perkebunan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.29	NTP Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.30	Cakupan petani yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.31	Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan mikro (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.32	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi produksi pertanian terbaru (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.33	Penerapan Demplot teknologi pertanian (lokasi)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.34	Jumlah kelompok tani baru (pemula) (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.35	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Pemula - Lanjut (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.36	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Lanjut - Madya (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.37	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Madya - Utama (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.38	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani (kali per tahun)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.39	Cakupan pengadaan sarana dan alat mesin pertanian sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.40	Cakupan pemberian saran dan alat mesin pertanian kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.41	Fasilitasi pengembangan percontaan sawah/perluasan area tanam (Ha)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.3.42	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan usaha tani (km)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.43	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan produksi (km)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.44	Fasilitasi pengembangan/pembuatan embung (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.45	Fasilitasi pengembangan jaringan irigasi (ha)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.46	Fasilitasi optimalisasi pengelolaan lahan (Ha)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.47	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.48	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.49	Cakupan peternak yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.50	Persentase kelompok peternak yang dapat mengembangkan usahanya (%)	-	-	-	-	10,00	-	-
2.3.3.51	Cakupan ketersediaan data profil dan potensi pengembangan peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.52	Persentase pelaku usaha peternakan binaan yang bermitra dengan pihak lain	-	-	-	-	5,00	-	-
2.3.3.53	Realisasi investasi sektor peternakan (Rp miliar)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.54	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana peternakansesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.55	Cakupan pemberian sarana dan prasarana peternakan kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.56	Produksi daging sapi (kg)	1.058.463,00	615.508,00	323.745,00	-	263.356	-	-
2.3.3.57	Produksi daging kerbau (kg)	88.030,00	94.002,00	58.613,00	-	50.204	-	-
2.3.3.58	Produksi daging kambing (kg)	62.336,00	63.886,00	15.268,00	-	12.608	-	-
2.3.3.59	Produksi daging domba (kg)	791,00	396,00	536,00	-	408	-	-
2.3.3.60	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	633.600,00	1.782.876,00	1.170.480,00	-	1.224.846	-	-
2.3.3.61	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	633.600,00	1.782.876,00	1.170.480,00	-	1.224.846	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.3.62	Produksi daging ayam ras buras (kg)	11.202.074,00	5.121.556,00	5.149.139,00	-	6.859.018	-	-
2.3.3.63	Produksi daging itik (kg)	63.926,00	78.960,00	84.688,00	-	70.958	-	-
2.3.3.64	Produksi telur ayam ras (kg)	29.161.293	42.244.188	55.065.801	-	70.662.576	-	-
2.3.3.65	Produksi telur ayam buras (kg)	985.959,00	1.379.853,00	1.808.302,00	-	2.014.969	-	-
2.3.3.66	Produksi telur itik (kg)	1.560.583,00	1.765.749,00	1.758.933,00	-	1.318.854	-	-
2.3.3.67	Cakupan fasilitasi pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.68	Cakupan fasilitasi pengembangan pakan ternak unggul bagi peternak (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.69	Cakupan fasilitasi pendistribusian semen bibit ternak unggul (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.70	Cakupan fasilitasi pelaksanaan inseminasi buatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.71	Jumlah Desa Lumbung Ternak (desa)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.72	Cakupan fasilitasi pencegahan penyakit ternak (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.73	Cakupan fasilitasi pemeriksaan penyakit ternak (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.74	Cakupan pengawasan produk asal hewan di wilayah prioritas (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.75	Persentase jaminan pangan asal hewan yang ASUH (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.76	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.77	Cakupan pembinaan kelompok pengolah hasil peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.78	Cakupan fasilitasi pemasaran produk pasca panen hasil peternakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.79	NTP Peternakan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.80	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Perdagangan							
2.3.4.1	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	8,54	8,81	8,20	7,88	7,95	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.4.2	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.3	Persentase penyelesaian keluhan konsumen yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.4	Cakupan monitoring ketersediaan stok dan harga barang (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.5	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.6	Cakupan fasilitasi peningkatan pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.7	Cakupan fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.8	Cakupan pengembangan BPPMB (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.9	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.10	Cakupan pelayanan kemetrolagian daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.11	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.12	Cakupan pembinaan bagi pedagang kakilima dan asongan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.13	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.14	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.15	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pasar daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.16	Penerimaan retribusi pelayanan pasar (Rp)	-	-	-	-	1.113.011.500	-	-
2.3.4.17	Cakupan ketersediaan data profil pasar daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.18	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Perindustrian							
2.3.5.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	4,67	4,64	4,33	7,57	7,56	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Usuran/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.3.5.2	Pertumbuhan jumlah IKM	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Jumlah IKM berkembang	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Jumlah sentra industri rakyat	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.6	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.7	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.8	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.9	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.10	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.11	Cakupan fasilitasi rencana pengembangan Kawasan Industri Jorong (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.12	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
2.4.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
2.4.1.1	Cakupan penyepakatan batas antar kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Cakupan penyepakatan batas wilayah Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.4	Peringkat LPPD (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.5	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	=
2.4.1.6	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.7	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.8	Cakupan Fasilitas pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9	Cakupan pemenuhan IKK (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.10	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.11	Persentase OPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.12	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.13	Persentase produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang harmonis, menjamin kepastian hukum dan mengayomi kepentingan daerah dan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.14	Persentase produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri dan Gubernur (%)	0	0	0	0	0	0	=
2.4.1.15	Cakupan penanganan masalah hukum non litigasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.16	Persentase pelayanan bantuan hukum/konsultasi/advokasi hukum bagi aparatur, masyarakat dan pemerintah desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.17	Persentase pelayanan advokasi hukum bidang tindak pidana bagi masyarakat melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.18	Persentase terpublikasikannya produk hukum daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.19	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.20	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.21	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.22	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.23	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.24	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.25	Penghargaan inovasi publik (jumlah)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.26	Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.27	Indeks keterbukaan informasi publik (skor)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.28	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (OPD) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.29	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.30	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.31	Cakupan OPD Kabupaten Tanah laut yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.32	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.33	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.34	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.35	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.36	Cakupan Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.37	Persentase Rekomendasi dari TPID yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.38	Tingkat Inflasi Daerah (%)	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82	4	>
2.4.1.39	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.40	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.41	Cakupan monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.42	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Perekonomian Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.42	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.43	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.44	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa (%)	0	0	0	0	0	0	=
2.4.1.45	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa (dokumen)	1	1	1	1	1	1	=
2.4.1.46	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.47	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.48	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.49	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syariaah Keagamaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.50	Persentase Permohonan Bantuan Hibah yang terlaksana secara tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.51	Jumlah Guru TPA, Madin, Ponpes dan PAH yang aktif (orang)	-	-	-	-	3.060	-	-
2.4.1.52	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.52	Cakupan ketersediaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.53	Cakupan pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspose ke media	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.54	Cakupan kegiatan keprotokolan KDH/ WKDH/ Kepada SKPD / tamu Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.55	Cakupan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.56	Cakupan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.57	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.57	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa perkantoran (makanan dan minuman, komunikasi, air, listrik, kendaraan dinas/ operasional, dan perlengkapan) untuk kantor dan rumah jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.58	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.59	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.60	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana / aset milik Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.61	Cakupan BMD yang telah diappraisal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.62	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	=
2.4.1.63	Persentase OPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.64	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.1.65	Tersedianya Kodifikasi Barang Milik Daerah se-Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.1.66	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.1.67	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.68	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, penunjang SKPD, dan administrasi keuangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.69	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.70	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=
2.4.1.71	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=
2.4.1.72	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.73	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.74	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.75	Cakupan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.76	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Usaha dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.77	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.78	Cakupan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.79	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.80	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Prolegda (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.81	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.82	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.83	Cakupan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.84	Cakupan fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.85	Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.86	Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.87	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.88	Cakupan informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.89	Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.90	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.91	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.92	Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.93	Jumlah inovasi pelayanan di Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.94	Cakupan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan umum di kecamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.95	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.96	Cakupan perwakilan desa yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan di kecamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.97	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.98	Cakupan monitoring dan evaluasi hasil Musrenbang Desa (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.99	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.100	Cakupan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan SOP (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.101	Jumlah inovasi pelayanan di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.102	Cakupan ketersediaan profil yang berisi data potensi pengembangan kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.103	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.104	Cakupan RW yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi di lingkup kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.105	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.106	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lingkup kelurahan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.107	Jumlah inovasi pelayanan di lingkup kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan							
2.4.2.1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.3	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.4	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.2.5	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.6	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.7	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.8	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten Tanah Laut (kategori)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.9	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.10	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.11	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.12	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.13	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.14	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.15	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.16	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.17	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.18	Cakupan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.2.19	Jumlah inovasi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan							
2.4.3.1	Cakupan kajian kelitbangan yang disusun menjadi rekomendasi kebijakan daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.2	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.3	Cakupan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.4	Jumlah inovasi pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan							
2.4.4.1	Cakupan pegawai uang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.2	Cakupan pegawai uang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.4	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	0	0	0	0	0	0	=
2.4.4.5	Persentase peserta ujian dinas yang lulus (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.6	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.7	Cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural secara tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.8	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	-	-	-	-	19	-	-
2.4.4.9	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.4.10	Cakupan ketersediaan sistem administrasi kepegawaian secara online (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.11	Cakupan ketersediaan data aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.12	Cakupan ketersediaan pembinaan dan pengembangan karir PNS (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.4.13	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan							
2.4.5.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8,45	11,17	11,23	10,31	10,69	-	-
2.4.5.2	Pertumbuhan PAD (%)	31,08	28,92	13,99	- 1,66	(6,56)	-	-
2.4.5.3	Persentase pelanggaran wajib pajak daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.4	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.5	Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.6	Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.7	Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.8	Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.9	Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.10	Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.11	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.12	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.4.5.13	Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.5.14	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.5.15	Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	-	-	-	-	15,00	-	-
2.4.5.16	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	-	-	-	-	15,00	-	-
2.4.5.17	Persentase belanja pendidikan 20%	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	-	-
2.4.5.18	Persentase belanja kesehatan 10%	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	-	-
2.4.5.19	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.5.20	Persentase OPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrua (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.5.21	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.22	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.5.23	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.5.24	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan							
2.4.6.1	Tingkat Maturitas Penerapan SPIP (skor)	-	-	-	-	2,4 (Berkembang)	-	-
2.4.6.2	Cakupan OPD yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.3	Persentase OPD yang menyatakan puas atas layanan konsultasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.4	Persentase pengawas APIP yang memiliki standar kompetensi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.5	Persentase OPD dengan pelayanan sesuai SPM (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.6	Persentase pencapaian RAD-PPK (Rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi) (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.7	Persentase OPD yang telah melaksanakan SPIP pada level berkembang (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.8	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.9	Cakupan pengawasan pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.10	Cakupan fasilitasi tim saber pungi kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.11	Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan tindak pidana korupsi material (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.12	Persentase OPD yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal (%)	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.6.13	Persentase OPD yang tertib administrasi barang/aset daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.14	Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.15	Persentase OPD Kabupaten Tanah Laut dengan pelayanan pengaduan berbasis IT	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.16	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
3	ASPEK DAYA SAING							
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran per kapita penduduk per tahun (Rp)	-	-	-	-	10.925,00	-	-
3.1.1.2	Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	-	-	-	-	56,53	-	-
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.3.1	NTP Tanaman Pangan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	NTP Hortikultura (skor)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	NTP Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	NTP Peternakan (skor)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Kawasan industri yang dikembangkan (kawasan)	-	-	-	-	1	1	=
3.3.8	Jumlah hotel (unit)	-	-	-	-	17	-	-
3.3.9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.3.1	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
3.3.2	Jumlah demo	-	-	-	-	2	-	-
3.3.3	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	=
3.3.5	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	3,51	6,18	-	-
3.4.2	Rasio ketergantungan (%)	50,49	50,37	50,24	49,47	49,85	-	-

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/ sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, sebenarnya dapat kita telusuri dari kondisi anggarannya, *“The budget should be a financial mirror of society’s and social choices”*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis

pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah “*a key instrument*” dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 2013-2017

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah struktur APBD Kabupaten Tanah Laut terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1,225,813,810,722.50	1,195,273,911,861.09	1,357,968,720,410.47	1,449,949,460,709.24	1,364,055,056,539.43	4.48
1.1	Pendapatan Asli Daerah	103,525,787,133.50	133,464,861,067.09	152,142,659,011.47	148,684,016,493.24	187,174,984,474.43	19.52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,631,149,328.00	14,731,607,725.00	20,857,114,355.00	18,819,153,369.50	28,731,494,191.00	35.38
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,680,960,696.00	7,492,552,435.00	5,633,292,680.00	6,973,142,351.00	7,949,865,095.00	18.41
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,614,075,537.00	6,063,996,815.00	8,765,898,469.00	11,192,883,223.00	11,247,397,477.00	35.19
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84,599,601,572.50	105,176,704,092.09	116,886,353,507.47	111,698,837,549.74	139,246,227,711.43	16.99
1.2	Dana Perimbangan	860,032,216,387.00	822,386,677,448.00	961,047,379,972.00	1,136,058,762,324.00	919,129,656,785.00	3.74
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	406,131,032,387.00	341,293,928,448.00	420,475,612,972.00	366,007,198,763.00	216,475,791,297.00	(8.15)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	439,195,379,000.00	463,309,949,000.00	438,283,639,000.00	538,370,006,633.00	528,690,162,000.00	6.25
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	14,705,805,000.00	17,782,800,000.00	102,288,128,000.00	231,681,556,928.00	173,963,703,488.00	113.98
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	262,255,807,202.00	239,422,373,346.00	244,778,681,427.00	165,206,681,892.00	257,750,415,280.00	6.42
1.3.1	Pendapatan Hibah	97,876,044,996.00	53,864,214,710.00	15,274,159,801.00	4,738,217,988.00	15,575,695,925.00	14.32
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92,772,094,793.00	100,805,661,636.00	91,206,018,626.00	75,441,197,904.00	88,963,502,355.00	(0.91)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69,707,667,413.00	84,752,497,000.00	132,666,616,000.00	85,027,266,000.00	153,211,217,000.00	29.93
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,900,000,000.00	-	5,631,887,000.00	-	-	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	913,897,000,000.00	1,150,958,000,000.00	1,547,853,000,000.00	1,793,810,000,000.00	1,619,983,000,000.00	15.78
2.1	Belanja Tidak Langsung	439,884,000,000.00	500,183,000,000.00	624,663,000,000.00	751,329,000,000.00	708,956,000,000.00	9.61
2.1.1	Belanja Pegawai	397,893,000,000.00	455,842,000,000.00	492,328,000,000.00	548,262,000,000.00	503,696,000,000.00	5.79
2.1.2	Belanja Hibah	19,845,000,000.00	10,912,000,000.00	11,723,000,000.00	12,138,000,000.00	21,451,000,000.00	(11.04)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	788,000,000.00	1,819,000,000.00	1,419,000,000.00	138,000,000.00	4,842,000,000.00	(148.36)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,083,000,000.00	2,536,000,000.00	2,495,000,000.00	222,000,000.00	3,358,000,000.00	8.61
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	19,104,000,000.00	29,075,000,000.00	115,885,000,000.00	188,571,000,000.00	175,609,000,000.00	29.29
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	170,000,000.00	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	474,013,000,000.00	650,775,000,000.00	92,319,000,000.00	1,042,481,000,000.00	911,027,000,000.00	14.68
2.2.1	Belanja Pegawai	50,362,000,000.00	52,387,000,000.00	61,313,000,000.00	21,989,000,000.00	32,562,000,000.00	(21.73)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181,959,000,000.00	262,675,000,000.00	330,013,000,000.00	406,286,000,000.00	369,374,000,000.00	11.22
2.2.3	Belanja Modal	241,692,000,000.00	335,713,000,000.00	531,865,000,000.00	614,206,000,000.00	50,909,000,000.00	20.90
3	PEMBIAYAAN	933,332,430,000.00	1,190,249,230,000.00	1,229,118,180,000.00	1,039,234,180,000.00	692,821,200,000.00	100.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	941,832,430,000.00	1,245,249,230,000.00	1,234,564,250,000.00	1,039,234,180,000.00	695,373,800,000.00	100.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	941,832,430,000.00	1,245,249,230,000.00	1,234,564,250,000.00	1,039,234,180,000.00	695,373,800,000.00	100.00
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8,500,000,000.00	55,000,000,000.00	5,446,070,000.00	-	2,552,600,000.00	99.80
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,500,000,000.00	55,000,000,000.00	5,446,070,000.00	-	2,000,000,000.00	100.00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	552,600,000.00	99.40

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan Negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dari formulasi tersebut diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah yang secara kumulatif mencerminkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Angka pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang.



Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

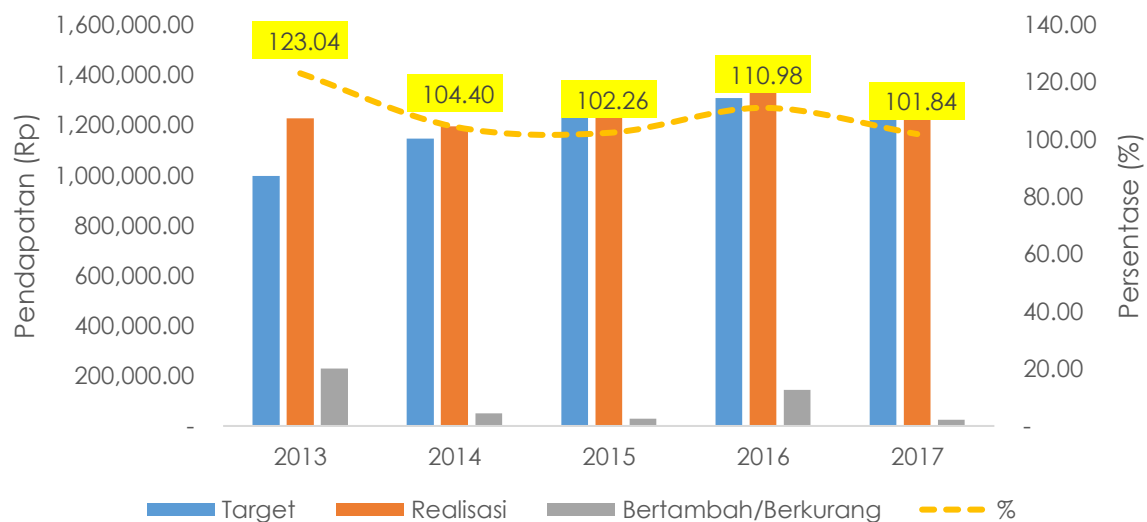
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pendapatan daerah dikelompokkan menjadi (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; serta; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan optimalisasi mobilisasi pendapatan daerah selama ini, antara lain:

- Belum optimalnya strategi inteksifikasi dan ekstensifikasi potensipendapatan daerah;
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Belum berkembangnya upaya peningkatan pendapatan daerah dari berbagai potensi sumber daya alam selain dari pajak dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan dan kontribusi BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Selama periode 2013-2016, target pendapatan yang ditetapkan selalu tercapai dengan pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 123,04%.

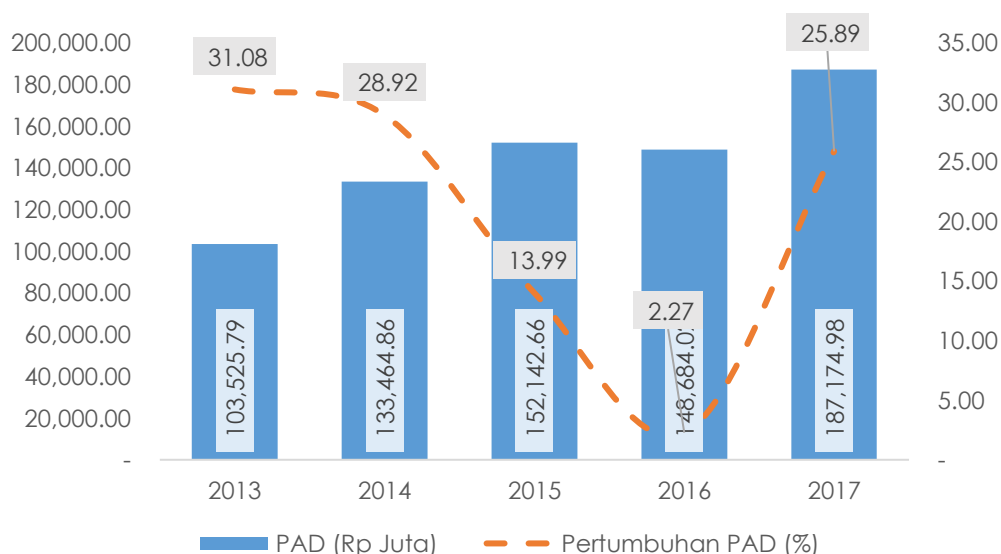
Namun pada tahun 2017, target pendapatan yang ditetapkan telah tercapai sebesar 101,84%. Target pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1,34 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,36 triliun sehingga terdapat selisih sebesar Rp 24,59 miliar (Tabel 3.2). Dengan tidak tercapainya target pendapatan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mencari alternatif sumber pendapatan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Persentase (%)
2013	996.273,07	1.225.813,81	229.540,74	123,04
2014	1.144.908,71	1.195.273,91	50.365,21	104,40
2015	1.327.908,48	1.357.968,72	30.060,24	102,26
2016	1.306.485,87	1.449.949,46	143.463,59	110,98
2017	1.339.460,39	1.364.055,06	24.594,67	101,84

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

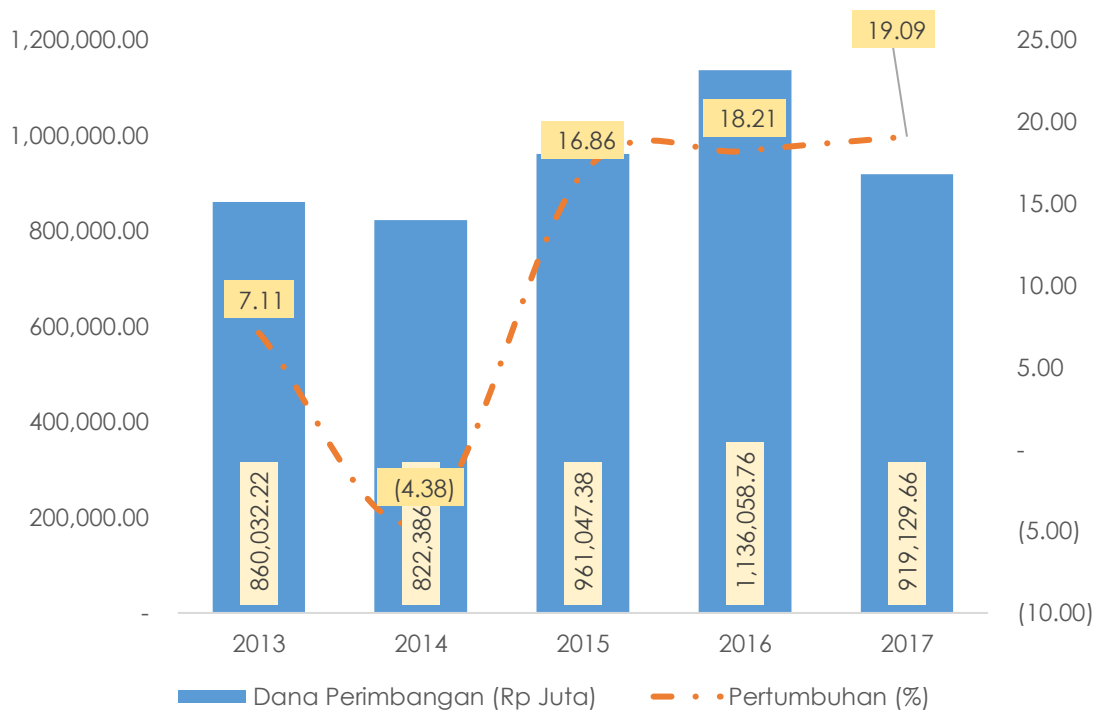
Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 4,48% per tahun selama periode 2013-2017. Pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 13,61%. Sementara itu, pada tahun 2014 dan 2017, pendapatan daerah mengalami penurunan dengan persentase penurunan masing-masing sebesar 2,49% dan 5,91%. Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1,23 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 1,36 triliun pada tahun 2017.



Gambar 3.3 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Pada pos Pendapatan Asli Daerah, besaran pendapatan meningkat dari sebesar Rp 103,53 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 187,17 miliar pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan PAD selama periode tersebut adalah sebesar 19,52% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 31,08%. Pada pos PAD, kontribusi terbesar pendapatan berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pada pos PAD terjadi pada pendapatan pajak daerah yang tumbuh sebesar 35,38% per tahun dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 35,19% per tahun.

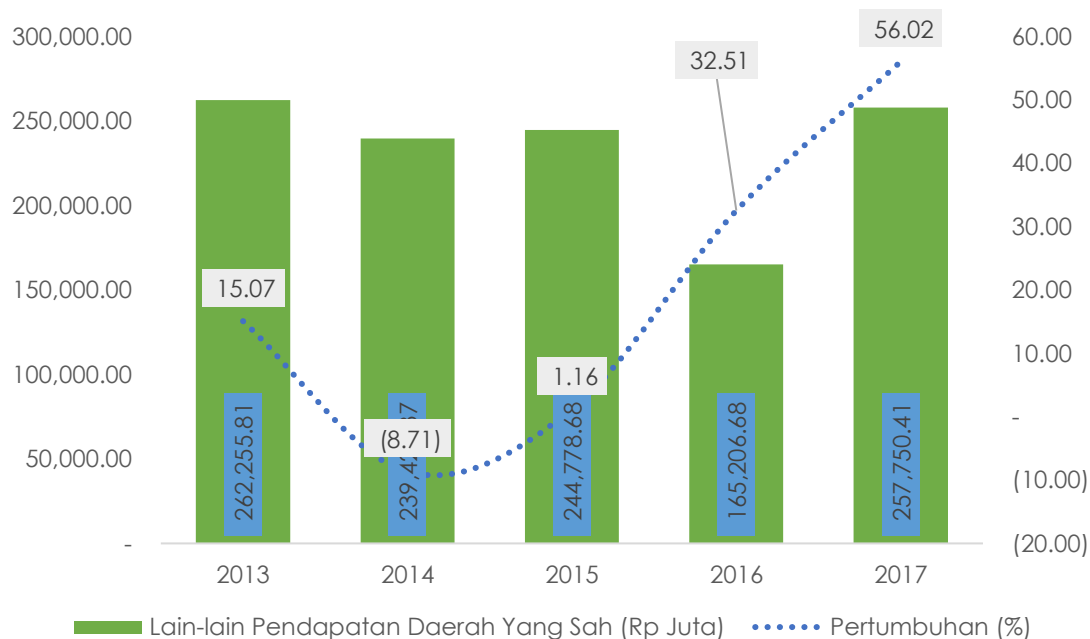


Gambar 3.4 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Pada pos dana perimbangan, terjadi kenaikan besaran pendapatan dari sebesar Rp 860,03 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 919,13 miliar pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan adalah sebesar 3,74% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,21%. Sama seperti pada pos PAD, pendapatan

daerah yang berasal dari dana perimbangan juga mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 19,09% pada tahun 2017. Dengan dominannya pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, maka ketika terjadi penurunan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Untuk pos dana perimbangan, kontribusi terbesar berasal dari dana alokasi umum dan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Pada pos dana alokasi umum, terjadi peningkatan besaran pendapatan dari sebesar Rp 439,20 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 528,69 miliar pada Tahun 2017.

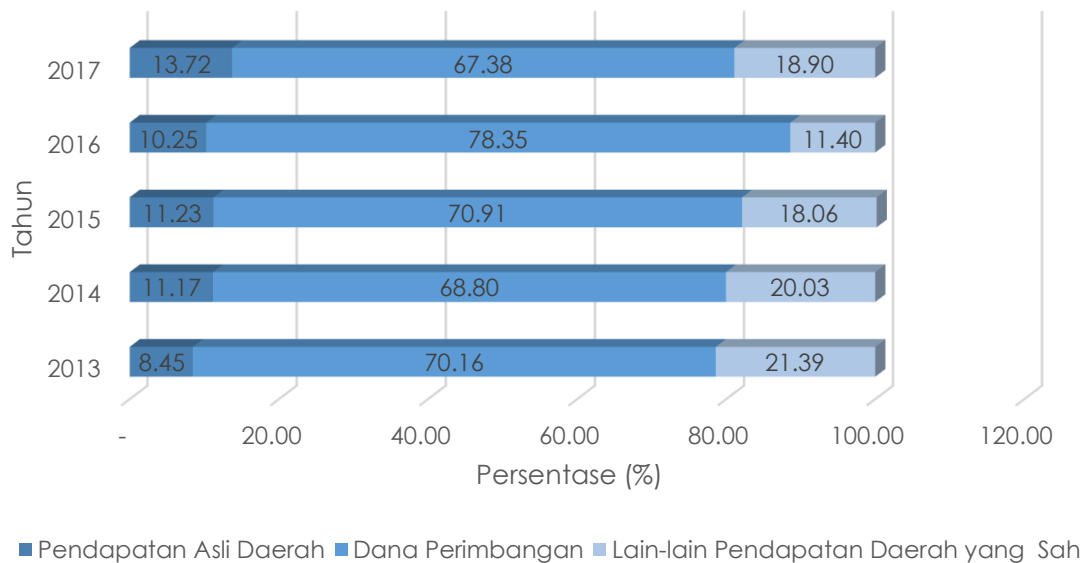


Gambar 3.5 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, besaran pendapatannya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, besarannya adalah sebesar Rp 262,26 miliar, kemudian terus menurun menjadi sebesar Rp 165,21 miliar pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 257,75 miliar. Selama periode 2013-2017, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 6,42 % per tahun. Pada pos ini, pendapatan terbesar berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Untuk pendapatan hibah, terjadi penurunan yang signifikan selama

periode 2013-2017 dari sebesar Rp 97,88 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 15,57 miliar pada tahun 2017. Walaupun tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti pada pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya juga mengalami penurunan dari sebesar Rp 92,77 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 88,96 miliar pada tahun 2017. Sementara itu, dana penyesuaian dan otonomi khusus justru meningkat dari sebesar Rp 69,71 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 153,21 miliar pada tahun 2017.



Gambar 3.6 Struktur Pendapatan Daerah (%), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan hampir sama dengan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh tingginya kontribusi dana perimbangan dan belum signifikannya kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif walaupun mengalami peningkatan dari sebesar 70,16% pada tahun 2013 menjadi sebesar 67,38% pada 2017. Pada periode tersebut, pendapatan asli daerah yang menjadi indikator kemandirian daerah memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah meningkat dari sebesar 8,45% pada tahun 2013 menjadi sebesar 13,72% pada tahun 2017. Lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami penurunan kontribusi dari sebesar 21,39% pada tahun 2013 menjadi sebesar 18,90% pada tahun 2017.



Tabel 3.3 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017			Pertumbuhan Realisasi Pendapatan (%)
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	
Pendapatan	996.273	1.225.814	123	1.144.909	1.195.274	104	1.327.908	1.357.969	102	1.306.486	1.449.949	111	1.339.460	1.364.055	102	4,48
Pendapatan Asli Daerah	78.655	103.526	132	93.772	133.465	142	123.377	152.143	123	143.000	148.684	105	170.818	187.175	110	19,52
Pendapatan Pajak Daerah	8.500	9.631	113	10.703	14.732	138	19.836	20.857	105	17.020	18.819	111	23.110	28.731	125	35,38
Hasil Retribusi Daerah	4.440	4.681	105	7.644	7.493	98	5.056	5.633	111	6.203	6.973	113	6.946	7.950	114	18,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.475	4.614	103	6.064	6.064	100	8.766	8.766	100	11.193	11.193	100	11.247	11.247	100	35,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.240	84.600	138	69.361	105.177	152	89.720	116.886	130	108.585	111.699	104	129.514	139.246	108	16,99
Dana Perimbangan	688.215	860.032	125	832.071	822.387	99	951.713	961.047	101	1.004.181	1.136.058	112	934.381	919.130	98	3,74
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	229.412	406.131	177	345.051	341.294	99	385.569	420.476	109	310.101	366.007	115	218.227	216.476	99	-8,15
Dana Alokasi Umum	439.195	439.195	100	463.310	463.310	100	438.284	438.284	100	440.705	538.370	122	528.690	528.690	100	6,25
Dana Alokasi Khusus	19.608	14.706	75	23.710	17.783	75	127.860	102.288	80	253.375	231.682	91	187.464	173.964	93	113,98
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	229.403	262.256	114	219.066	239.422	109	252.819	244.779	97	159.305	165.207	110	234.261	257.750	110	6,42



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017			Pertumbuhan Realisasi Pendapatan (%)
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	
Pendapatan Hibah	79.393	97.876	123	54.340	53.864	99	7.460	15.274	205	4.277	4.738	116	6.050	15.576	257	14,32
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.550	92.772	118	80.060	100.806	126	107.060	91.206	85	70.000	75.441	122	75.000	88.964	119	-0,91
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69.560	69.708	100	84.666	84.752	100	132.667	132.667	100	85.027	85.027	100	153.211	153.211	100	29,93
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.900	1.900	100	-	-	-	5.632	5.632	100	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.



Gambar 3.7 Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi

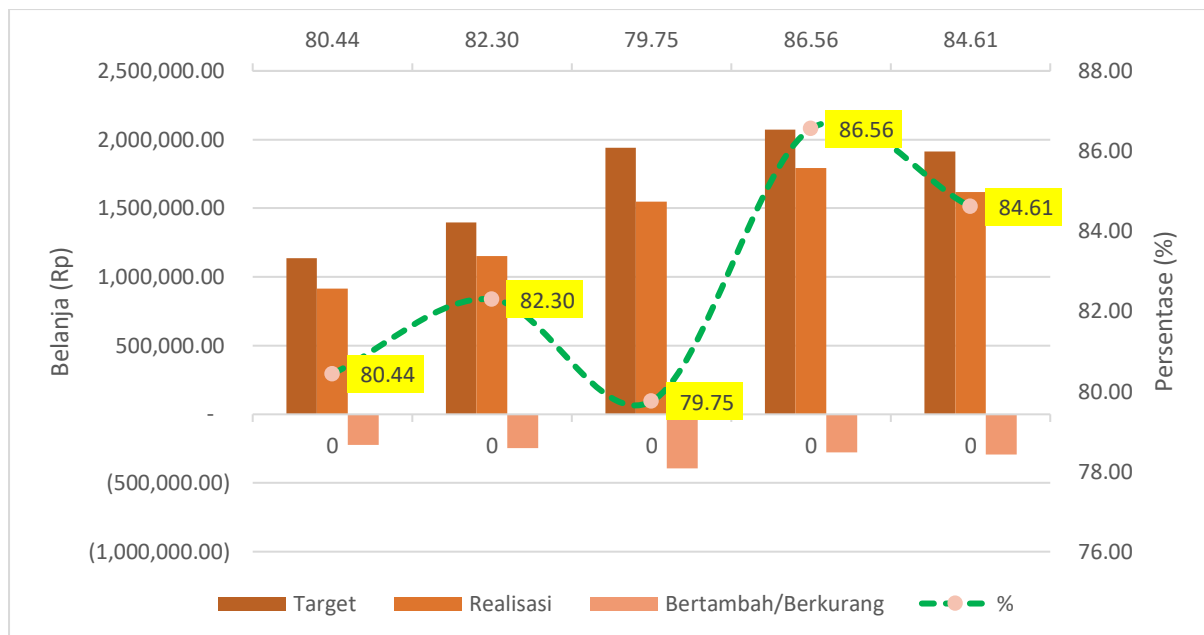
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
2013	1,136,099.61	913,897.02	(222,202.59)	80.44
2014	1,398,454.50	1,150,958.46	(247,496.04)	82.30
2015	1,940,769.46	1,547,852.72	(392,916.74)	79.75
2016	2,072,449.30	1,793,809.84	(278,639.46)	86.56
2017	1,914,548.92	1,619,982.83	(294,566.09)	84.61

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

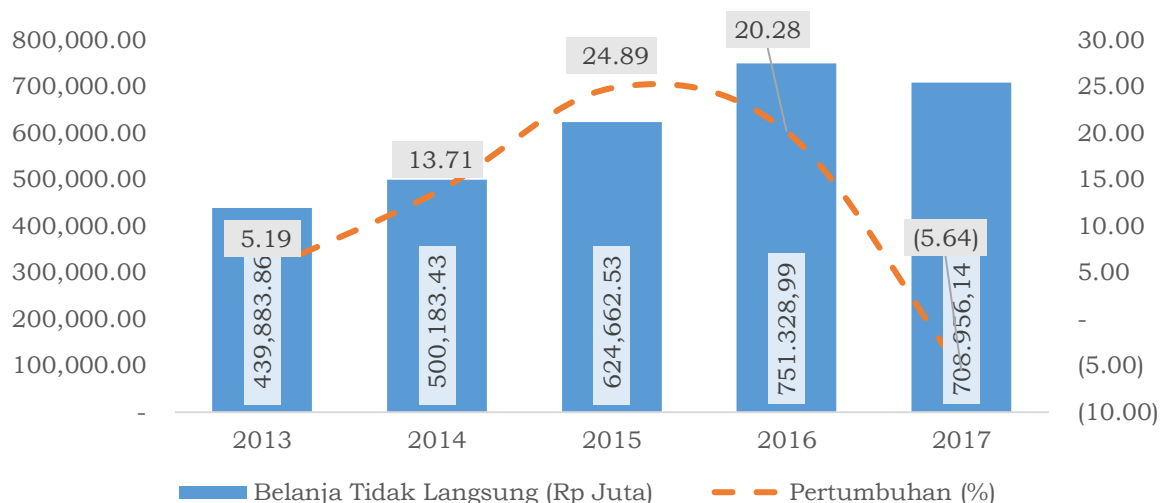
Target belanja daerah yang ditetapkan selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1,14 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1,91 triliun pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja yang ditetapkan dalam penyusunan APBD, terlihat bahwa target belanja belum dapat terpenuhi dengan baik dimana realisasi belanja masih di bawah angka 100%. Realisasi capaian tertinggi belanja adalah sebesar 86,56% pada tahun 2016, sedangkan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya sebesar 79,75%.



Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Melihat dari realisasi belanja selama periode 2013-2017, terlihat bahwa besaran belanja terus meningkat sepanjang tahun 2013-2016 dari sebesar Rp 913,90 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1,79 triliun pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017, besaran belanja mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1,62 triliun. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah dalam periode tersebut adalah sebesar 15,78% per tahun dengan pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 34,48%.

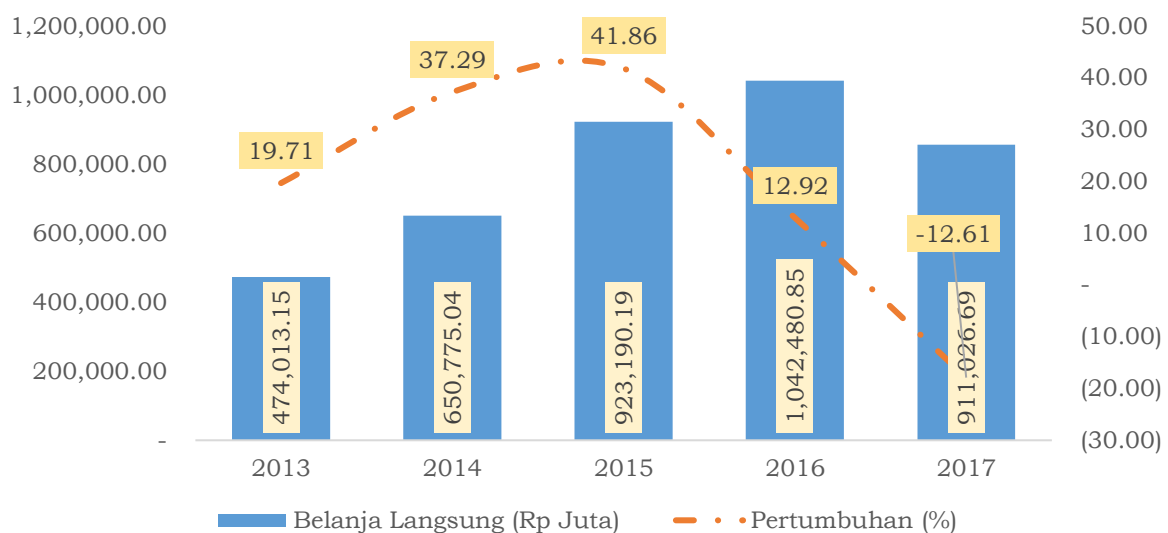


Gambar 3.9 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (Rp Juta), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Seiring dengan peningkatan belanja daerah, besaran belanja tidak langsung juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, besaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 439,88 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 708,96 miliar pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 11,68% per tahun. Pada pos belanja tidak langsung, sebagian besar pendanaan dialokasikan pada belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan partai politik. Mengikuti pola belanja tidak langsung, besaran belanja langsung juga meningkat dari sebesar Rp 474,01 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 911,03 miliar pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung selama periode tersebut adalah sebesar 19,83%. Alokasi belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Melihat perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung, terlihat bahwa persentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, besaran belanja tidak langsung terhadap belanja daerah adalah sebesar 48,13% dan menurun menjadi 40,36% pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016-2017, persentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah terus meningkat hingga menjadi sebesar 43,76% pada tahun 2017.

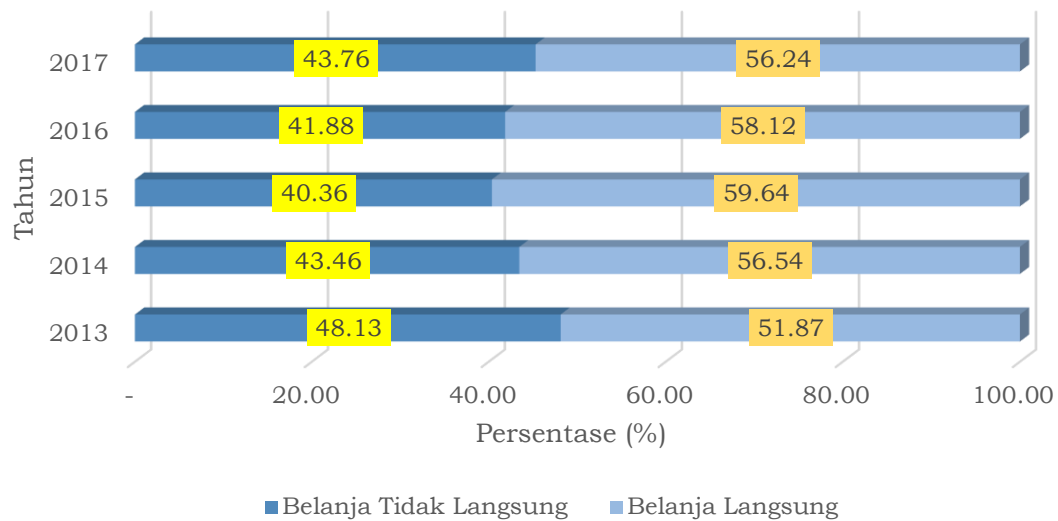


Gambar 3.10 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Langsung (Rp Miliar), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Gambar 3.11 Struktur Belanja Daerah (%), 2013-2017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.5 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017			Pertumbuhan Realisasi Belanja
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	
Belanja	1.136.100	913.897	80	1.388.454	1.150.958	83	1.940.769	1.547.853	80	2.072.449	1.793.810	87	1.914.549	1.619.983	85	15,78
Belanja Tidak Langsung	534.605	439.884	82	595.743	500.183	84	758.367	624.663	82	840.130	751.329	89	904.219	708.956	78	9,61
Belanja Pegawai	473.957	397.893	84	554.539	455.842	82	620.467	492.328	79	637.048	548.262	86	690.916	503.696	73	5,79
Belanja Hibah	32.640	19.845	61	12.177	10.912	90	12.666	11.723	93	7.331	12.138	166	22.169	21.451	97	(11,04)
Belanja Bantuan Sosial	2.502	788	31	3.316	1.819	55	1.945	1.419	73	916	138	15	6.566	4842	74	(148,36)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.131	2.083	98	2.641	2.536	96	2.495	2.495	100	2.220	2.220	100	3.364	3.358	100	8,61
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	20.270	19.104	94	19.780	29.075	147	116.794	115.885	99	188.615	188.571	100	177.204	175.609	99	29,29
Belanja Tidak Terduga	3.104	170	5	3.291	-	-	4.000	812	20	4.000	-	-	4.000	-	-	-
Belanja Langsung	601.495	474.013	79	792.711	650.775	82	1.182.403	923.190	78	1.232.319	1.042.481	85	1.010.329	911.027	90	14,68
Belanja Pegawai	60.777	50.362	83	57.766	52.387	91	72.788	61.313	84	25.554	21.989	86	36.854	32.562	88	(21,73)
Belanja Barang dan Jasa	246.957	181.959	74	329.098	262.675	80	439.141	330.013	75	492.281	406.286	83	446.071	369.374	83	11,22
Belanja Modal	293.761	241.692	82	405.848	335.713	83	670.474	531.865	79	714.484	614.206	86	527.404	509.090	10	20,90

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Gambar 3.12 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Komponen penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat



bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.6 Perkembangan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp Juta), 2013-2017

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Surplus/ Defisit	(139.826,54)	311.916,79	(223)	(253.545,79)	44.315,45	(17)	(612.860,98)	(189.884,00)	31	(765.963,43)	(342.927,33)	45	(575.088,53)	(255.927,77)	44,5
Penerimaan Pembiayaan Daerah	942.332,43	941.832,43	100	1.245.423,13	1.245.249,23	100	1.234.564,68	1.234.564,25	100	1.039.234,18	1.039.234,18	100	695.373,80	695.373,80	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	941.832,43	941.832,43	100	1.245.423,13	1.245.249,23	100	1.234.564,68	1.234.564,25	100	1.039.234,18	1.039.234,18	100	695.373,80	695.373,80	100
Penerimaan Piutang Daerah	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500,00	8.500,00	100	60.620,51	55.000,00	91	11.066,58	5.446,07	49	-	-	-	2.555,67	2.552,60	99,8
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500,00	8.500,00	100	55.000,00	55.000,00	100	5.446,07	5.446,07	100	-	-	-	2.000,00	2.000,00	100
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	5.620,51	-	-	5.620,51	-	-	-	-	-	555,67	552,60	99,4
Pembiayaan Netto	933.832,43	933.332,43	100	1.184.802,63	1.190.249,23	100	1.223.498,10	1.229.118,18	100	1.039.234,18	1.039.234,18	100	692.818,13	692.821,20	100
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	794.005,89	1.245.249,23	157	931.256,84	1.234.564,68	133	610.637,12	1.039.234,18	170	273.270,75	696.306,85	255	117.729,60	436.893,43	371

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Keterangan

A = Anggaran

R = Realisasi

% = Capaian Realisasi Terhadap Anggaran

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal aset daerah mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2015, nilai total aset daerah adalah sebesar Rp 3,11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 3,52 triliun pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp 3,54 triliun (Tabel 3.6). Rata-rata pertumbuhan aset daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 6,75% per tahun. Faktor utama yang menyebabkan naiknya nilai total aset daerah adalah pemberlakuan basis akrual akuntansi keuangan daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah, sehingga nilai aset tetap yang tersaji di neraca adalah nilai bukunya. Nilai aset tetap daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1,80 triliun dan meningkat signifikan menjadi sebesar Rp 2,87 triliun pada tahun 2017.

Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2015-2017 jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya terdistribusi ke dalam kewajiban jangka pendek. Dari data neraca terlihat bahwa sepanjang tahun 2015-2017, jumlah kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar Rp 35,32 miliar (2015) menjadi sebesar Rp 216,58 miliar (2017). Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.



Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (1) ekuitas dana lancar, (2) ekuitas dana investasi, dan (3) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.



Tabel 3.7 Perkembangan Neraca Daerah (Rp), 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset	3.113.700.596.266	3.521.742.763.797	3.535.401.671.674	6,75
Aset Lancar	1.144.553.625.170	753.336.018.041	497.667.737.253	(34,06)
Kas di Kas Daerah	1.021.831.105.738	673.417.813.829	412.799.705.910	(36,40)
Kas di Bendahara Penerimaan	173.500	15.199.300	9.632.000	4.311,89
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	14.971.546.717	19.050.237.357	17.442.015.866	9,40
Kas Lainnya	-	-	-	-
Setara Kas	-	-	-	-
Kas di Dana Kapitasi JKN	2.434.420.056	2.908.795.971	3.562.721.185	20,98
Kas di Dana BOS	13.164.828.879	3.609.609.460	3.079.363.908	(43,64)
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	89.198.388.962	49.035.990.149	16.983.012.434	(55,20)
Piutang Lainnya	2.420.251.601	2.718.290.350	41.527.837.085	720,02
Penyisihan Piutang	(9.168.094.383)	(12.307.765.954)	(14.313.803.876)	25,27
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	9.701.004.099	14.887.847.579	16.577.252.740	32,41
R/K SKPD	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang	108.940.847.078	105.710.194.346	107.601.504.655	(0,59)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	18.013.567.511	17.961.474.416	17.945.762.216	(0,19)
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Dana Bergulir	-	-	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	18.013.567.511	17.961.474.416	17.945.762.216	(0,19)
Investasi Jangka Panjang Permanen	93.502.279.567	90.318.719.930	92.159.117.439	(0,68)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	93.502.279.567	90.318.719.930	92.159.117.439	(0,68)
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	(2.575.000.000)	(2.570.000.000)	(2.503.375.000)	(1,39)
Penyisihan INP Dana Bergulir	(2.575.000.000)	(2.570.000.000)	(2.503.375.000)	(1,39)
Aset Tetap	1.801.348.034.377	2.534.320.221.827	2.869.370.116.116	26,96
Tanah	446.008.345.350	764.587.788.480	766.274.237.020	35,82
Peralatan dan Mesin	235.389.409.813	274.260.997.820	305.537.834.287	13,96
Gedung dan Bangunan	606.283.151.935	682.655.262.105	750.046.274.801	11,23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.058.268.941.966	1.429.297.950.408	1.657.208.257.201	25,50
Aset Tetap Lainnya	4.358.504.825	4.195.939.757	4.462.690.957	1,31
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.481.839.357	57.043.022.237	218.700.400.015	427,96
Akumulasi Penyusutan	(557.442.158.868)	(677.720.738.981)	(832.859.578.166)	22,23
Dana Cadangan	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-
Aset Lainnya	58.858.089.641	128.376.329.583	60.762.313.650	32,72
Tagihan Jangka Panjang	268.206.750	256.206.750	244.206.750	(4,58)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.888.560.000	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	1.252.817.767	707.279.200	715.317.200	(21,20)
Aset Lain-lain	55.448.505.124	127.412.843.633	59.802.789.700	38,36



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kewajiban	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465	234,97
Kewajiban Jangka Pendek	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465	234,97
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.886.356.847	26.886.364.838	26.567.895.800	(0,59)
Utang Bunga	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	77.343.765	38.353.417	88.220.000	39,80
Utang beban	10.147.167	1.664.450	48.149.215	1.354,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.347.481.286	171.066.305.974	189.878.667.450	980,16
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Ekuitas Dana	3.078.379.267.201	3.323.750.075.120	3.318.818.739.209	3,91
Ekuitas	3.078.379.267.201	3.323.750.075.120	3.318.818.739.209	3,91
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	3.113.700.596.266	3.521.742.763.799	3.535.401.671.674	6,75

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva pada kegiatan tertentu. Rasio aktivitas yang digunakan yaitu: Rata-rata umur piutang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat; Rata-rata umur persediaan menandakan berapa lama waktu perputaran persediaan. Semakin besar rata-rata umur persediaan menandakan efektifitas manajemen persediaan. Sebaliknya, rata-rata umur persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif.

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas, nilai rasio lancar neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2015, nilai rasio lancar adalah sebesar 3.240,40% dan menurun signifikan menjadi sebesar 229,78% pada tahun 2017. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. *Quick ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sama seperti pada rasio lancar, nilai quick

ratio juga mengalami penurunan dari sebesar 3212,94% (2015) menjadi sebesar 222,13% (2017).

Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Selama periode 2015-2017, nilai rasio total hutang terus mengalami peningkatan setiap tahun dari sebesar 1,13% (2015) menjadi sebesar 6,13% (2017). Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Selama periode 2015-2017, nilai rasio hutang dengan modal juga mengalami peningkatan setiap tahun dari sebesar 1,15% (2015) menjadi sebesar 6,53% (2017).

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

Tabel 3.8 Analisis Rasio Neraca Daerah, 2015-2017

Rasio	Rumus	2015	2016	2017
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	1.144.553.625.170	753.336.018.041	497.667.737.253
	Kewajiban Jangka Pendek	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465
	Rasio Lancar/ Current Ratio (%)	3.240,40	380,49	229,78
	Aset Lancar – Persediaan	1.134.852.621.071	738.448.170.462	481.090.484.513
	Kewajiban Jangka Pendek	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465
	Rasio Quick/Quick Ratio (%)	3.212,94	372,97	222,13
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465
	Total Aset	3.113.700.596.266	3.521.742.763.797	3.535.401.671.674

Rasio	Rumus	2015	2016	2017
	Rasio Total Hutang/Debt Ratio (%)	1,13	5,62	6,13
	Total Hutang	35.321.329.065	197.992.688.679	216.582.932.465
	Total Ekuitas	3.078.379.267.201	3.323.750.075.120	3.318.818.739.209
	Rasio Hutang dengan Modal/Debt to Equity Ratio (%)	1,15	5,96	6,53

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017 (diolah)

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah;

penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.2.1 Proporsi Realisasi Belanja Daerah

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2017, rata-rata realisasi belanja daerah adalah sebesar 82,73% per tahun dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 86,56%. Pada kelompok belanja tidak langsung, rata-rata realisasinya adalah sebesar 83,01% per tahun. Capaian realisasi tertinggi belanja tidak langsung adalah sebesar 89,43% (2016), sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya sebesar 78,41%. Sementara itu, rata-rata capaian realisasi belanja langsung adalah sebesar 82,75% per tahun. Capaian realisasi tertinggi untuk belanja langsung yaitu sebesar 90,17% pada tahun 2017.

Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah (%), 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
A.	Belanja Tidak Langsung	82,28	82,57	82,37	89,43	78,41	83,01
1.	Belanja Pegawai	83,95	82,20	79,35	86,06	72,90	80,89
2.	Belanja Hibah	60,80	89,61	92,56	165,58	96,76	101,06
3.	Belanja Bantuan Sosial	31,50	54,85	72,96	15,06	73,75	49,63
4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	97,74	96,02	100,00	100,00	99,81	98,71
5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	94,25	97,63	99,22	99,98	99,10	98,04
6.	Belanja Tidak Terduga	5,49	-	20,31	-	-	5,16
B.	Belanja Langsung	78,81	82,09	78,08	84,60	90,17	82,75
1.	Belanja Pegawai	82,86	90,69	84,23	86,05	88,35	86,44
2.	Belanja Barang dan Jasa	73,68	79,82	75,15	82,53	82,81	78,80
3.	Belanja Modal	82,27	82,72	79,33	85,97	96,53	85,36
	Belanja	80,44	82,30	79,75	86,56	84,61	82,73

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

3.2.1.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Melihat pada Tabel 3.10, terlihat bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Tanah Laut secara umum mengalami peningkatan dari sebesar Rp 592,20 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 792,18 miliar pada tahun 2017. Secara rinci, gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tanah Laut tertuang pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp), 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja	592.202.139.709	708.401.816.759	790.508.414.687	833.700.362.982	792.179.064.181
Belanja Tidak Langsung	397.938.063.864	455.841.785.500	492.327.936.582	548.261.753.441	503.700.731.099
Belanja Pegawai	397.938.063.864	455.841.785.500	492.327.936.582	548.261.753.441	503.700.731.099
Gaji dan Tunjangan	286.686.247.092	306.615.276.234	334.280.502.263	451.080.706.240	411.126.857.633
Tambahan Penghasilan PNS	51.163.253.066	145.754.235.523	153.858.764.467	92.943.757.161	86.948.528.940
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	1.803.600.000	2.694.000.000	3.046.000.000	3.146.000.000	4.149.800.000
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	183.780.000	-	-	-	-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	425.000.000	485.125.000	916.654.938	820.687.500	1.155.504.400
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	174.608.106	293.148.743	226.014.914	270.602.540	320.040.126
Tunjangan Profesi Guru	57.501.575.600	-	-	-	-
Belanja Langsung	194.264.075.845	252.560.031.259	298.180.478.105	285.438.609.541	288.478.333.082
Belanja Pegawai	50.362.153.090	52.386.918.238	61.312.697.100	5.045.568.247	27.141.647.650
Honorarium PNS	9.742.200.400	10.437.556.500	16.830.113.750	1.882.596.247	19.888.772.650
Honorarium Non PNS	35.384.195.041	32.851.726.000	38.497.525.250	1.391.922.000	5.118.675.000
Uang Lembur	5.031.407.649	5.361.989.700	4.948.058.100	-	-
Belanja Pegawai BLUD	204.350.000	300.400.000	1.037.000.000	1.771.050.000	2.134.200.000
Belanja Pegawai BOS	-	3.435.246.038	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	120.831.536.847	167.089.760.426	176.588.188.193	232.311.550.244	231.759.416.584
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.327.085.660	14.367.054.801	14.493.340.310	1.369.706.106	12.898.662.862
Belanja Bahan/Material	7.539.401.359	6.430.307.483	8.491.644.431	15.569.509.029	8.079.374.837
Belanja Jasa Kantor	25.452.505.398	46.060.471.855	51.864.349.555	103.445.598.649	99.108.187.305
Belanja Premi Asuransi	325.301.000	182.733.250	33.772.200	160.010.916	573.986.903
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.608.546.503	5.147.273.958	6.897.484.004	7.349.469.304	7.141.598.498
Belanja Cetak dan Penggandaan	5.062.753.424	5.735.506.808	7.115.453.061	7.074.492.812	5.922.674.464
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	565.527.650	1.220.405.725	1.343.739.673	1.784.381.737	778.727.600
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	328.125.000	437.320.000	401.150.000	349.312.150	270.025.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	536.078.050	675.975.000	1.212.805.276	862.057.300	1.155.223.250



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Makanan dan Minuman	11.304.752.765	12.369.468.965	17.041.547.821	20.176.140.955	18.018.550.476
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	913.477.973	1.219.638.000	1.752.033.535	1.321.185.803	937.495.250
Belanja Pakaian Kerja	581.627.000	1.194.680.500	943.123.015	999.581.895	665.632.735
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.290.616.000	1.541.321.750	2.478.952.690	1.634.155.355	1.100.952.083
Belanja Perjalanan Dinas	45.148.955.133	57.849.890.872	51.088.630.637	66.398.453.467	68.262.835.881
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.020.800.000	2.061.250.000	1.866.500.000	1.355.500.000	699.000.000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.585.095.500	8.955.194.459	6.630.538.000	503.054.675	4.416.325.500
Belanja Honorarium PNS	-	-	-	9.000.000	-
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	22.591.500	33.575.000	44.036.000	22.835.000	36.005.000
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	81.194.682	362.095.000	1.067.123.963	523.904.050	263.605.440
Belanja Pengadaan Komputer	43.801.000	60.671.000	112.682.000	133.681.000	62.260.000
Belanja Pengadaan Mebeulair	8.850.000	1.111.681.000	1.542.033.040	1.047.776.636	1.187.440.900
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur	74.136.250	19.575.000	76.708.982	46.074.000	33.047.300
Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.315.000	53.670.000	90.540.000	175.669.405	147.805.300
Belanja Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	-	-	-	8.790.000	6.440.000
Belanja Modal	23.070.385.908	33.083.352.595	60.279.592.812	48.081.491.050	29.577.268.849
Belanja Modal Pengadaan Tanah	364.795.320	164.682.340	13.703.980.430	1.690.335.670	370.764.540
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	897.350.000	2.637.480.000	892.325.600	1.432.032.132	648.465.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7.063.903.875	11.772.700.900	18.513.040.670	14.088.189.750	8.737.972.239
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	24.550.000	7.000.000	5.400.000	116.675.000	217.297.500
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Atas Air Bermotor	-	68.649.300	1.032.944.500	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Atas Air Tidak Bermotor	86.223.500	-	73.000.000	-	177.417.500
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	26.987.500	65.737.000	483.780.330	337.681.450	80.697.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	141.092.000	204.450.000	1.031.854.000	1.042.124.533	2.708.972.090



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.713.519.044	1.411.807.925	2.183.506.219	1.964.917.105	716.946.976
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.649.047.805	1.476.475.126	4.136.449.178	1.807.595.883	2.346.955.238
Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.981.954.221	5.366.049.860	6.369.532.623	3.342.889.227	3.070.035.132
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.243.105.688	2.239.549.119	1.456.623.798	2.524.433.572	3.714.516.928
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	238.541.000	60.451.800	-	157.400.100	92.345.000
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	129.491.508	395.292.100	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	807.968.580	939.607.075	1.262.258.700	449.051.000	822.010.675
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	206.326.217	748.123.150	504.089.305	183.782.300	53.995.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	373.005.750	445.687.750	-	456.975.300	483.919.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.528.053.800	4.220.300.250	8.630.807.459	18.359.007.528	3.187.992.431
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	503.407.300	659.518.900	-	-	126.432.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	13.000.000	-	-	-	1.945.984.600
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	21.150.000	20.900.000	-	6.000.000	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	56.912.800	178.890.000	-	122.400.500	74.550.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Selama periode 2013-2017, diketahui bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan. Pada tahun 2013, proporsinya adalah sebesar 64,20% dan pada tahun 2017 berkurang menjadi sebesar 50,51%. Dari proporsi tersebut, dapat diketahui bahwa belanja untuk pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dalam APBD. Diharapkan ke depannya, proporsi belanja untuk pembangunan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah aparatur akan terus meningkat.

Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, 2013-2017

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1.	Tahun Anggaran 2017	792.179.064.181	1.568.369.051.789	50,51
2.	Tahun Anggaran 2016	833.700.362.982	1.794.107.714.209	46,47
3.	Tahun Anggaran 2015	790.508.414.687	1.553.298.792.048	50,89
4.	Tahun Anggaran 2014	708.401.816.759	1.205.958.462.607	58,74
5.	Tahun Anggaran 2013	592.202.139.709	922.397.016.385	64,20

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Besaran belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 442,10 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 710,51 miliar (2017). Peningkatan belanja tersebut disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada komponen belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan partai politik. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanah Laut pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.12 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Rp), 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
I.	Belanja	442.104.559.446	502.427.409.312	625.750.473.252	752.470.438.879	710.511.515.745	11,59
A.	Belanja Tidak Langsung	439.758.458.446	500.183.426.062	623.850.201.052	750.954.927.963	709.238.528.842	11,70
1.	Gaji Dan Tunjangan	286.686.247.092	306.615.276.234	334.280.502.263	451.080.706.240	411.126.857.633	9,92
2.	Tambahan Penghasilan PNS	51.163.253.066	145.754.235.523	153.858.764.467	92.943.757.161	86.948.528.940	28,60
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	1.803.600.000	2.694.000.000	3.046.000.000	3.146.000.000	4.149.800.000	19,43
4.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	183.780.000	-	-	-	-	-
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	425.000.000	485.125.000	916.654.938	820.687.500	1.155.504.400	38,88
6.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	174.608.106	293.148.743	226.014.914	270.602.540	320.040.126	22,17
7.	Tunjangan Profesi Guru	57.501.575.600	-	-	-	-	-
8.	Belanja Hibah	19.845.194.613	10.911.740.562	11.722.987.000	11.719.799.140	21.699.661.082	4,10
9.	Belanja Bantuan Sosial	788.071.000	1.818.690.000	1.419.050.000	138.000.000	4.842.461.000	697,68
10.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.083.265.045	2.535.780.000	2.495.107.470	2.220.417.824,00	3.364.464.978	13,20
11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	19.103.863.924	29.075.430.000	115.885.120.000	188.614.957.558	175.631.210.683	82,54
B.	Belanja Langsung	2.346.101.000	2.243.983.250	1.900.272.200	1.515.510.916	1.272.986.903	(13,45)
1.	Belanja Premi Asuransi	325.301.000	182.733.250	33.772.200	160.010.916	573.986.903	110,00
2.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.020.800.000	2.061.250.000	1.866.500.000	1.355.500.000	699.000.000	(19,94)
II.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000	55.000.000.000	5.446.070.000	-	2.555.674.343	-
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000	55.000.000.000	5.446.070.000	-	2.000.000.000	-
2.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	555.674.343	-
Jumlah (I + II)		450.604.559.446	557.427.409.312	631.196.543.252	752.470.438.879	713.067.190.088	11,36

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.13, terlihat bahwa proporsi belanja wajib dan mengikat dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun selama periode 2013-2017 dapat dikatakan mengalami penurunan. Pada tahun 2013, proporsinya adalah sebesar 48,85%, kemudian terus menurun menjadi sebesar 40,64% pada tahun 2015. Namun, dalam dua tahun terakhir, proporsinya terus meningkat hingga menjadi 45,47% pada tahun 2017. Diharapkan ke depannya, proporsi belanja untuk pembangunan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah aparatur akan terus meningkat.

Tabel 3.13 Analisis Proporsi Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas, 2013-2017

No.	Uraian	Total Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1.	Tahun Anggaran 2017	713.067.190.088	1.568.369.051.789	45,47
2.	Tahun Anggaran 2016	752.470.438.879	1.794.107.714.209	41,94
3.	Tahun Anggaran 2015	631.196.543.252	1.553.298.792.048	40,64
4.	Tahun Anggaran 2014	557.427.409.312	1.205.958.462.607	46,22
5.	Tahun Anggaran 2013	450.604.559.446	922.397.016.385	48,85

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Melihat pada Tabel 3.14, diketahui bahwa sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan selama periode 2013-2017 terus mengalami penurunan setiap tahun dari sebesar Rp 1,26 triliun (2013) menjadi sebesar Rp 695,37 miliar (2017). Selain itu, dalam empat tahun terakhir, defisit riil Kabupaten Tanah Laut semakin membesar karena didorong oleh meningkatnya belanja yang cukup signifikan. Sementara itu, jika melihat pada komponen SiLPA, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki SiLPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Namun demikian, besaran SiLPA pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar Rp 695,37 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 1,04 triliun.



Tabel 3.14 Penutup Defisit Riil Anggaran (Rp), 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pendapatan Daerah	1.225.813.810.722	1.195.273.911.861	1.357.968.750.410	1.449.949.460.709,3	1.354.055.056.539
	Dikurangi realisasi					
2.	Belanja Daerah	913.897.016.385	1.150.958.462.607	1.547.852.752.048	1.793.809.838.254	1.619.982.825.089
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000	55.000.000.000	5.446.070.000	-	2.552.600.000
A.	Defisit Riil	303.416.794.337	(10.684.550.746)	(195.330.071.638)	(343.860.377.544,99)	(268.480.368.550)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	941.832.432.706	1.245.249.227.042	1.234.564.676.297	1.039.234.179.659	695.373.802.114
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	941.832.432.706	1.245.249.227.042	1.234.564.676.297	1.039.234.179.659	695.373.802.114
A-B	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	1.245.249.227.042	1.234.564.676.297	1.039.234.604.659	695.373.802.114,36	436.893.433.564,5

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.15 Komposisi Penutup Penutup Defisit Riil Anggaran (%), 2013-2017

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	310,41	(11.654,67)	(632,04)	(302,23)	(269,02)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	410,41	(11.554,67)	(532,04)	(202,23)	(169,02)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, 2013-2017

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1.	Jumlah SiLPA	941.832.432.706	100,00	1.245.249.227.043	100,00	1.234.564.676.297	100	1.039.234.179.659	100	695.373.802.114	100	5,45
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	24.870.974.256	2,64	39.692.773.993	3,19	28.765.500.552	2,33	5.683.787.293,24	3,97	16.357.039.052,43	9,58	(121,07)
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	171.817.217.494	18,24	(9.684.401.296)	(0,78)	9.334.588.722	0,76	131.877.684.351	13,13	(15.251.749.043)	(1,47)	158,79
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32.852.547.778	3,49	20.356.832.346	1,63	(8.039.821.573)	(0,65)	5.902.119.987	3,70	23.489.374.075	10,03	(104,40)
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	222.202.593.621	23,59	247.496.032.791	19,88	392.916.709.347	20,25	278.639.461.273	13,44	294.566.099.443	15,39	22,26
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.17 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenaan (Rp), 2013-2017

No.	Uraian	2015	2016	2017
1.	Saldo Kas Neraca Daerah	1.052.402.074.890	699.001.655.917	436.893.438.869
	Dikurangi			
2.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	-	-
3.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran)	1.052.402.074.890	699.001.655.917	436.893.438.869

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu hingga tahun 2017, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mendatang.

3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Laut dilakukan berdasarkan *judgement* terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2013-2017 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun yang akan datang. Berdasarkan perhitungan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1,31 triliun, kemudian meningkat menjadi 1,45 triliun pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2018-2023, pendapatan daerah akan meningkat menjadi Rp 1,73 triliun. Pertumbuhan pendapatan daerah diasumsikan bervariasi setiap tahunnya dimana secara rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 5,87 % per tahun. Sama seperti pada periode sebelumnya, komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan berasal dari pos dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan berkembangnya berbagai sektor perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp), 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)						Asumsi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	126,409,455,410.00	119,114,389,085.00	131,201,504,000.00	137,576,260,000.00	143,242,407,000.00	152,126,427,000.00	3.91
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23,080,000,000.00	26,080,000,000.00	29,160,000,000.00	31,127,750,000.00	33,313,900,000.00	35,724,280,000.00	9.16
1.2	Hasil Retribusi Daerah	5,717,341,933.00	6,884,374,500.00	6,968,105,000.00	7,034,912,000.00	7,088,334,000.00	7,135,400,000.00	4.8
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,247,397,477.00	12,090,537,348.00	13,000,000,000.00	14,000,000,000.00	14,500,000,000.00	15,500,000,000.00	6.64
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86,364,716,000.00	74,059,477,237.00	82,073,399,000.00	85,413,598,000.00	88,340,173,000.00	93,766,747,000.00	2.04
2	Dana Perimbangan	992,934,332,200.00	1,097,428,461,200.00	1,144,000,000,000.00	1,202,000,000,000.00	1,262,000,000,000.00	1,322,000,000,000.00	5.92
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209,717,371,200.00	289,619,171,200.00	309,000,000,000.00	338,000,000,000.00	367,000,000,000.00	395,000,000,000.00	14.08
2.2	Dana Alokasi Umum	528,690,162,000.00	560,583,764,000.00	588,000,000,000.00	617,000,000,000.00	648,000,000,000.00	680,000,000,000.00	5.16
2.3	Dana Alokasi Khusus	254,526,799,000.00	247,225,526,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00	0.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	185,965,079,000.00	233,137,681,552.00	244,000,000,000.00	249,000,000,000.00	254,250,000,000.00	259,760,000,000.00	7.27
3.1	Pendapatan Hibah	0.00	37,111,800,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	0.00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83,000,000,000.00	88,897,530,552.00	100,000,000,000.00	105,000,000,000.00	110,250,000,000.00	115,760,000,000.00	6.92
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	102,965,079,000.00	107,128,351,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00	0.00
	Pendapatan	1,305,308,866,610.00	1,449,680,531,837.00	1,519,201,504,000.00	1,588,576,260,000.00	1,659,492,407,000.00	1,733,886,427,000.00	5.87

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Dalam rangka pencapaian proyeksi pendapatan daerah selama periode 2018-2023 yang akan terus meningkat, diperlukan berbagai upaya dan kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- ✓ Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang memiliki keahlian dalam pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga penyusunan anggaran pendapatan dapat lebih sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
- ✓ Penganggaran dan pemungutan PAD mengacu pada peraturan daerah yang berlaku tentang PAD dimaksud, baik pada pajak daerah maupun retribusi daerah.
- ✓ Melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak daerah daerah dengan (1) melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan *online system* terhadap pajak hotel dan pajak restoran; (2) melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui (a) pendataan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir, dan air bawah tanah; (b) melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap pajak PBB dan BPHTB; dan (c) pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang, pemutakhiran data objek tanah dan bangunan, dan penilaian individual terhadap objek PBB-P2; (3) melakukan pemeriksaan terhadap (a) wajib pajak self-assessment (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal dan (b) penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak PPJ; (4) melakukan penagihan piutang pajak antara lain: (a) penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) pajak reklame; (b) PBB-P2 dan jenis-jenis pajak daerah lainnya; (c) melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak; (d) melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak; dan (e) melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh juru sita.
- ✓ Melaksanakan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah daerah dengan (1) melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah terkait pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB, dan pajak reklame (2) melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2

mendekati harga pasar yang wajar; (3) penetapan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (hotel dan restoran) secara elektronik; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan integritas dan kualitas SDM; dan (5) peningkatan koordinasi kelembagaan dengan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah (*tax clearance*), koordinasi dalam rangka *law enforcement*, koordinasi dalam rangka sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak.

- ✓ Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah, kebijakan yang harus dilakukan adalah (1) pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik; (2) menerapkan *banking system* dalam melakukan pembayaran retribusi daerah; (3) menerapkan transaksi non tunai; (4) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); dan (5) menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- ✓ Dalam rangka optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD; (2) menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan; (3) membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan (4) memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.
- ✓ Untuk meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan sebagai berikut: (1) mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; (2) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; (3) mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*; dan (4) mengoptimalkan pendapatan BLUD.

2. Dana Perimbangan

- ✓ Koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi.
- ✓ Mengikuti rapat rekonsiliasi dana bagi hasil dan dana-dana lainnya seperti DAU, DAK, DBH, penyampaian data lain yang diperlukan dalam rangka perhitungan, percepatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- ✓ Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pencairan khususnya menyangkut bagi hasil pajak dari provinsi dilakukan koordinasi dan penyampaian kelengkapan administrasi tepat waktu ke pemerintah provinsi.
- ✓ Koordinasi dengan pemerintah, pihak ketiga dan SKPD terkait MOU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Seperti pada periode sebelumnya, pos belanja daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Berdasarkan perhitungan proyeksi, belanja daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1,44 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp 1,69 triliun pada tahun 2019. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2018-2023, belanja daerah akan meningkat menjadi Rp 1,99 triliun. Pada pos belanja tidak langsung, besaran belanjanya akan terus meningkat setiap tahun dari sebesar Rp 792,69 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 1,03 triliun pada tahun 2023, sedangkan pada pos belanja langsung, selama periode 2019-2023, besaran belanja cenderung akan fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai belanja langsung adalah sebesar Rp 777,77 miliar, kemudian naik menjadi Rp 799,76 miliar. Setelah periode tersebut, besaran belanja langsung terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 959,58 miliar.

Kebijakan belanja daerah selama periode 2018-2023 akan diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut: (1) menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2018-2023 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; (2) mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan



pembangunan; (3) memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan; (4) mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional; (5) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a) subsidi dalam mendukung pelayanan publik; (b) hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; (c) bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; dan (6) memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.19 Proyeksi Belanja Daerah (Rp), 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)						Asumsi Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Tidak Langsung	792,695,250,943.00	913,957,603,643.00	916,249,822,208.00	929,003,964,285.19	971,521,828,559.45	1,032,576,175,587.42	5,56
1.1	Belanja Pegawai	566,228,177,930.00	641,770,455,113.00	642,027,455,108.00	645,878,141,485.19	670,172,048,559.45	695,680,650,987.42	4,31
1.2	Belanja Subsidi	-						0,00
1.3	Belanja Hibah	47,390,675,500.00	18,277,500,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	25,000,000,000.00	51,300,000,000.00	17,51
1.4	Belanja Bantuan Sosial	4,224,400,000.00	10,023,213,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	21,42
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,877,234,193.00	3,296,437,450.00	3,612,810,500.00	3,816,266,200.00	4,040,223,400.00	4,285,968,000.00	8,35
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	167,974,763,320.00	236,589,998,080.00	243,609,556,600.00	252,309,556,600.00	261,309,556,600.00	270,309,556,600.00	10,88
1.7	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0,00
2	Belanja Langsung	646,691,060,413.00	777,771,807,312.64	799,768,948,489.00	841,546,494,414.81	897,757,679,840.55	959,581,844,212.58	8,38
2.1	Belanja Pegawai	21,353,098,100.00	20,309,435,080.00	15,660,575,700.00	17,226,633,270.00	18,949,296,597.00	20,844,226,257.00	0,44
2.2	Belanja Barang dan Jasa	322,732,920,369.00	461,590,523,169.62	403,308,844,808.00	415,408,110,152.00	427,870,353,456.00	440,706,464,060.00	7,88
2.3	Belanja Modal	302,605,041,944.00	295,871,849,063.02	380,799,527,981.00	408,911,750,992.81	450,938,029,787.55	498,031,153,895.58	10,92
Belanja		1,439,386,311,356.00	1,691,729,410,955.64	1,716,018,770,697.00	1,770,550,458,700.00	1,869,279,508,400.00	1,992,158,019,800.00	

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)



3.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terdiri dari atas dua unsur pembentukan yakni, penerimaan pembiayaan daerah (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal/investasi pemerintah daerah). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan (2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;



Tabel 3.20 Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp), 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	256,460,857,786.00	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00	242,287,101,400.00	280,771,592,800.00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,460,857,786.00	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00	242,287,101,400.00	280,771,592,800.00
1.2	Penerimaan Piutang Daerah						
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	22,500,000,000.00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	22,500,000,000.00
2.2	Pembayaran Pokok Utang						
Pembiayaan Netto		255,460,857,786.00	242,048,879,118.64	196,817,266,697.00	181,974,198,700.00	209,787,101,400.00	258,271,592,800.00

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke dalam pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang nilainya didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proyeksi APBD tahun 2018-2023 sebenarnya dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, setelah melalui berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Khusus untuk tahun 2018, angka proyeksi diperoleh berdasarkan APBD Tahun 2018, sedangkan asumsi pada tahun 2019 berasal dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan untuk periode 2018–2023.

Proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanah Laut yang positif atau surplus hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanah Laut relatif cukup besar. Meski demikian, proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 3.21 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp), 2018-2023

No.		Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan			1,305,308,866,610.00	1,449,680,531,837.00	1,519,201,504,000.00	1,588,576,260,000.00	1,659,492,407,000.00	1,733,886,427,000.00
1	Pendapatan Asli Daerah		126,409,455,410.00	119,114,389,085.00	131,201,504,000.00	137,576,260,000.00	143,242,407,000.00	152,126,427,000.00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah		23,080,000,000.00	26,080,000,000.00	29,160,000,000.00	31,127,750,000.00	33,313,900,000.00	35,724,280,000.00
1.2	Hasil Retribusi Daerah		5,717,341,933.00	6,884,374,500.00	6,968,105,000.00	7,034,912,000.00	7,088,334,000.00	7,135,400,000.00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11,247,397,477.00	12,090,537,348.00	13,000,000,000.00	14,000,000,000.00	14,500,000,000.00	15,500,000,000.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		86,364,716,000.00	74,059,477,237.00	82,073,399,000.00	85,413,598,000.00	88,340,173,000.00	93,766,747,000.00
2	Dana Perimbangan		992,934,332,200.00	1,097,428,461,200.00	1,144,000,000,000.00	1,202,000,000,000.00	1,262,000,000,000	1,322,000,000,000.00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		209,717,371,200.00	289,619,171,200.00	309,000,000,000.00	338,000,000,000.00	367,000,000,000.00	395,000,000,000.00
2.2	Dana Alokasi Umum		528,690,162,000.00	560,583,764,000.00	588,000,000,000.00	617,000,000,000.00	648,000,000,000.00	680,000,000,000.00
2.3	Dana Alokasi Khusus		254,526,799,000.00	247,225,526,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		185,965,079,000.00	233,137,681,552.00	244,000,000,000.00	249,000,000,000.00	254,250,000,000.00	259,760,000,000.00
3.1	Pendapatan Hibah		0	37,111,800,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		83,000,000,000.00	88,897,530,552.00	100,000,000,000.00	105,000,000,000.00	110,250,000,000.00	115,760,000,000.00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		102,965,079,000.00	107,128,351,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00
Belanja			1,439,386,311,356.00	1,691,729,410,955.64	1,716,018,770,697.0	1,770,550,458,700.0	1,869,279,508,400	1,992,158,019,800.0
1	Belanja Tidak Langsung		792,695,250,943.00	913,957,603,643.00	916,249,822,208.00	929,003,964,285.19	971,521,828,559.45	1,032,576,175,587.42
1.1	Belanja Pegawai		566,228,177,930.00	641,770,455,113.00	642,027,455,108.00	645,878,141,485.19	670,172,048,559.45	695,680,650,987.42
1.2	Belanja Subsidi		-					
1.3	Belanja Hibah		47,390,675,500.00	18,277,500,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	25,000,000,000.00	51,300,000,000.00
1.4	Belanja Bantuan Sosial		4,224,400,000.00	10,023,213,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		2,877,234,193.00	3,296,437,450.00	3,612,810,500.00	3,816,266,200.00	4,040,223,400.00	4,285,968,000.00
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik		167,974,763,320.00	236,589,998,080.00	243,609,556,600.00	252,309,556,600.00	261,309,556,600.00	270,309,556,600.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.7	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
2	Belanja Langsung	646,691,060,413.00	777,771,807,312.64	799,768,948,489.00	841,546,494,414.81	897,757,679,840.55	959,581,844,212.58
2.1	Belanja Pegawai	21,353,098,100.00	20,309,435,080.00	15,660,575,700.00	17,226,633,270.00	18,949,296,597.00	20,844,226,257.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	322,732,920,369.00	461,590,523,169.62	403,308,844,808.00	415,408,110,152.00	427,870,353,456.00	440,706,464,060.00
2.3	Belanja Modal	302,605,041,944.00	295,871,849,063.02	380,799,527,981.00	408,911,750,992.81	450,938,029,787.55	498,031,153,895.58
Pembiayaan		255,460,857,786.00	242,048,879,118.64	196,217,266,697.00	181,974,198,700.00	209,787,101,400.00	258,271,592,800.00
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	256,460,857,786.00	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00	242,287,101,400.00	280,771,592,800.00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,460,857,786.00	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00	242,287,101,400.00	280,771,592,800.00
1.2	Penerimaan Piutang Daerah						
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	22,500,000,000.00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	22,500,000,000.00
2.2	Pembayaran Pokok Utang						
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		121,383,413,040.00					
APBD		1,561,769,724,396.0	1,702,829,410,955.64	1,746,518,770,697	1,803,050,458,700	1,901,779,508,400	2,014,658,019,800

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah (Rp), 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pendapatan	1,305,308,866,610.00	1,449,680,531,837.00	1,519,201,504,000.00	1,588,576,260,000.00	1,659,492,407,000.00	1,733,886,427,000.00	9,256,145,996,447.00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	256,460,857,786.00	253,148,879,118.64	226,717,266,697.00	214,474,198,700.00	242,287,101,400.00	280,771,592,800.00	1,473,859,896,501.64



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

N o.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Anggaran Sebelumnya							
	Jumlah Penerimaan	1,561,769,724,396.00	1,702,829,410,955.64	1,745,918,770,697.00	1,803,050,458,700	1,901,779,508,400	2,014,658,019,800	10,730,005,892,948.60
	Dikurangi							
4	Belanja Tidak Langsung	792,695,250,943.00	913,957,603,643.00	916,249,822,208.00	929,003,964,285.19	971,521,828,559.45	1,032,576,175,587.42	5,556,004,645,226.06
5	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	22,500,000,000.00	130,100,000,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	768,074,473,453.00	777,771,807,312.64	799,168,948,489.00	841,546,494,414.81	897,757,679,840.55	959,581,844,212.58	5,043,901,247,722.58

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.23 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Rp), 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	768,074,473,453.00	777,771,807,312.64	799,168,948,489.00	841,546,494,414.81	897,757,679,840.55	959,581,844,212.58	5,043,901,247,722.58

Sumber: Analisis Data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah)



Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai kelompok prioritas. Belanja daerah dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi belanja prioritas dan belanja operasional. Belanja prioritas I merupakan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Berkaitan dengan proyeksi belanja dalam RPJMD ini, ada alokasi anggaran belanja yang belum terdistribusi kedalam program dan kegiatan hal ini dikarenakan alokasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program DAK yang informasinya menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2018-2023 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Menurut Urusan Kewenangan

No.	Permasalahan Pembangunan
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.	Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 96,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3,93% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis; ➤ Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 7,37 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan; ➤ Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 11,82 tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai anak umur tertentu di masa yang akan datang hanya pada pendidikan kelas 2 SMA. Angka HLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan; ➤ Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (7-12 tahun) mengalami penurunan dari 99,68% pada tahun 2016 menjadi 99,40% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 0,6% penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SD/MI; ➤ Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (13-15 tahun) mengalami penurunan dari 92,16% pada tahun 2016 menjadi 91,59% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 8% penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SMP/MTS; ➤ Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD sebesar 109,54% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9,54% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD; ➤ Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP sebesar 80,16% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah SMP berapapun usianya di antara penduduk usia 13-15 tahun hanya sebesar 80,16%; ➤ Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah yaitu sebesar 71,31%. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang berusia 13-

No.	Permasalahan Pembangunan
	<p>15 tahun, terdapat hanya 71 orang yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTS;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota; ➤ Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
2.	<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terjadi kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus. Sementara itu, kasus bayi mati lahir pada tahun 2017 adalah sebanyak 56 kasus; ➤ Kasus bayi gizi buruk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 1 kasus. Walaupun kasusnya menurun pada tahun 2017, adanya kasus gizi buruk tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah; ➤ Fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut masih terpusat di Kecamatan Pelaihari (ibukota kabupaten). Selain itu, fasilitas RSUD yang ada kondisinya belum memadai terutama dalam hal daya tampung jumlah pasien. Pengembangan RSUD Kintap diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif layanan fasilitas kesehatan selain di Kecamatan Pelaihari; ➤ Pembangunan RSUD di Kabupaten Pelaihari secara fisik akan selesai dikerjakan pada tahun 2018. Untuk optimalisasi pelayanan RSUD, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD menjadi prima; ➤ Perlu adanya kejelasan pengelolaan RSUD eksisting setelah adanya perpindahan layanan di gedung baru sehingga bangunan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah; ➤ Ketersediaan tenaga medis terutama dokter belum merata antar kecamatan dan sebagian besar masih berada di Kecamatan Pelaihari; ➤ Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi yaitu sebesar 29%. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi hanya sebesar 49%; ➤ Belum seluruh balita di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan imunisasi lengkap. Persentase balita dengan cakupan imunisasi tertinggi pada tahun 2017 adalah pada imunisasi polio 1-4 yaitu sebesar 95,86%, diikuti BCG

No.	Permasalahan Pembangunan
	<p>sebesar 95,23%, dan hepatitis B1-B3 sebesar 93,55%. Dengan masih banyaknya balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai imunisasi kesehatan pada balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih tingginya kasus penyakit di Kabupaten Tanah Laut seperti penyakit hipertensi primer (43.876 kasus), ISPA (17.958 kasus), dan Dyspesia (15.611 kasus); ➤ Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; ➤ Banyak masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga akan menyulitkan dalam akses pelayanan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit. Persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar 57,86%; ➤ Masih banyak masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimana persentasenya hanya sebesar 40%. Hal tersebut menjadi indikasi penyebab masih tingginya kasus diare di masyarakat.
3.	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak. Pada tahun 2017, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 715,28 km, sedangkan kondisi rusak berat sepanjang 127,39 km; ➤ Masih banyak jalan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu ditingkatkan kualitas permukaannya dari kerikil dan tanah menjadi aspal. Panjang jalan dengan permukaan kerikil hingga tahun 2017 sepanjang 917,1 km dan permukaan tanah sepanjang 92,94 km; ➤ Belum terbangunnya jalan penghubung antara sentra produksi menuju pelabuhan dan perlunya pembangunan jalan alternatif lingkaran dalam dan luar. Selain itu, perlu adanya pembangunan ruas jalan strategis kabupaten seperti antara ruas Bentok Darat-Imban, Riam Pinang-Riam Kanan, Telaga-Panjatan-Manaran, Lok Serapang-Awang Makmur-Panggung, dan Kunyit-Tiang Aji; ➤ Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten; ➤ Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, maka terdapat potensi yang tinggi abrasi kawasan pantai. Wilayah yang berpotensi terkena



No.	Permasalahan Pembangunan
	<p>abrasi berada di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau, Takisung, Jorong, Panyipatan, Kintap, dan Bumi Makmur;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih tingginya rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memperoleh sanitasi layak. Persentasenya sanitasi layak pada tahun 2017 secara keseluruhan adalah sebesar 35,98% dimana sanitasi layak di perkotaan sebesar 43,22%, sedangkan di perdesaan sebesar 33,55%; ➤ Persentase rumah tangga yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55% rumah tangga; ➤ Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan; ➤ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian SPM penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada; ➤ Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
4.	<p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan status milik sendiri pada tahun 2017 adalah sebesar 82,69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 17,31% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki rumah; ➤ Masih tingginya kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam kawasan kumuh dimana luasannya mencapai 340 Ha; ➤ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut dimana jumlahnya hingga tahun 2017 mencapai 17.000 unit rumah; ➤ Belum tersedianya legislasi daerah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, norma kebijakan bidang perumahan, dan penanganan kawasan kumuh permukiman; ➤ Masih terdapat <i>backlog</i> (kekurangan) rumah sekitar 80.000 unit di Kabupaten Tanah Laut;
5.	<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p>

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tindak pidana yang terjadi masih cukup tinggi. Pada tahun 2014, jumlah tindak pidana sebanyak 193 kasus, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 253 kasus, selanjutnya pada tahun 2017 tindak pidana mengalami penurunan menjadi 149 kasus; ➤ Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati Peraturan Daerah masih belum optimal; ➤ Masih belum optimalnya penegakan Perda; ➤ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan, terutama di wilayah perkotaan maupun di pesisir; ➤ Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada; ➤ Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat; ➤ Perlunya peningkatan religiusitas masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan;
6.	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM dimana persentasenya sebesar 18,47% pada tahun 2017; ➤ Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial; ➤ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat; ➤ Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial; ➤ Belum tersedianya data yang valid tentang warga komunitas adat terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial; ➤ Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat; ➤ Kabupaten Tanah Laut termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 178. Potensi bencana yang tinggi tersebut dapat mengancam ketentraman hidup masyarakat; ➤ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial; ➤ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1.	Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut masih cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2017 sebesar 67,27%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Dalam kurun waktu 2013-2017, TPAK Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari sebesar 69,41% pada tahun 2013 menjadi sebesar 67,27% pada tahun 2017;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 dari sebesar 2,99% pada tahun 2013 menjadi sebesar 370% pada tahun 2017;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat pengangguran penduduk yang berpendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 85%. Hal tersebut akan berdampak pada munculnya pengangguran terdidik di Kabupaten Tanah Laut;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencari kerja di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh lulusan SMA;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut;
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IDG yang baru mencapai 68,36;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio IPG terhadap IPM yang nilainya lebih dari 100% pada tahun 2017 yang berarti masih terjadi kesenjangan gender di Kabupaten Tanah Laut
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemenuhan hak anak/rendahnya pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak dimana kelas Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kelas pratama;

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih cukup tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus, sedangkan kasus kekerasan pada anak sebanyak 101 kasus; ➤ Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut; ➤ Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal; ➤ Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak; ➤ Belum optimalnya SKPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); ➤ Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam legislatif dimana persentasenya belum mencapai 30%. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 14,29%;
3.	<p>Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata-rata konsumsi kalori di kelompok pengeluaran kuintil 1 di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 hanya sebesar 1.718,48 kkal, sedangkan rata-rata konsumsi protein sebesar 49,48 gram. Angka tersebut masih berada di bawah patokan kecukupan konsumsi kalori (2.150 kkal) dan protein (57 gram); ➤ Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih terbatas jumlahnya yaitu 98 KRPL pada tahun 2017 ➤ Peningkatan akses pangan masyarakat mensyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas; ➤ Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan;

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan;➤ Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah;➤ Belum optimalnya fungsi cadangan pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama berkaitan dengan inflasi pangan;
4.	Pertanahan <ul style="list-style-type: none">➤ Belum optimalnya kinerja penyediaan lahan kawasan industri untuk pengembangan industri terpadu di Kecamatan Jorong;➤ Masih cukup tingginya konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut;➤ Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik di Kabupaten Tanah Laut;➤ Belum optimalnya optimalnya pelayanan administrasi pertanahan;➤ Masih cukup tingginya tanah di Kabupaten Tanah Laut yang belum bersertifikat;
5.	Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none">➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;➤ Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;➤ Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;➤ Belum tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD);➤ Belum optimalnya penegakan pelanggaran lingkungan hidup;➤ Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik pencemaran air dan udara;➤ Masih terbatasnya prasarana utilitas berupa penerangan jalan umum dan masih banyak jaringan penerangan jalan umum yang liar;➤ Terbatasnya kapasitas TPA Bakunci dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Tanah Laut;➤ Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau (RTH);

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tercapainya RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota; ➤ Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemandataan; ➤ Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif; ➤ Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan taman sebagai wahana terbuka hijau kota dan belum adanya standar baku pengelolaan taman kota;
6.	<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang. Persentase penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan pada tahun 2018 adalah sebesar 99,98%. ➤ Belum optimalnya data kependudukan di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang berasal dari perangkat daerah dengan BPS; ➤ Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut belum optimal. Target secara nasional pada tahun 2019 mencapai 100% penduduk telah terjangkau oleh e-KTP dan memiliki akta kelahiran. Persentase penduduk perempuan yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2018 adalah sebesar 92,94%, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 96,13%;
7.	<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa. Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat desa dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat; ➤ Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa. Belum optimalnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian di masing-masing desa; ➤ Belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan di tempat. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah; ➤ Sebagian besar desa di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJMD Desa dan RKP Desa; ➤ Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa; ➤ Belum optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa. Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa;

No.	Permasalahan Pembangunan
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana <ul style="list-style-type: none"> Masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 1,53% dan lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 1,49%; Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB. Rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan selama periode 2012-2017. Pada tahun 2012, rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut sebesar 82,03% dan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 78,77%; Belum optimalnya pelayanan kesehatan reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat yang mengakibatkan belum terpenuhi layanan Unmet Need dimana persentasenya sebesar 25,22% di Kabupaten Tanah Laut; Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal; Masih rendahnya jumlah kader KB berkualitas;
9.	Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> Belum terkoneksi akses jalan dari Pelabuhan Laut Tanjung Dewa menuju sentra produksi; Belum optimalnya fungsi Terminal Tanah Habang Pelaihari. Hal tersebut terjadi karena banyak angkutan umum yang enggan melakukan aktivitas bongkar muat barang dan menaikkan/menurunkan penumpang di terminal; Belum selesainya proyek pembangunan Pelabuhan Swarangan sehingga memperlambat arus barang masuk dan keluar di Kabupaten Tanah Laut; Sarana dan prasarana transportasi umum di Kabupaten Tanah Laut dirasakan kurang memadai sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan menjadi rendah. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya; Belum optimalnya penerimaan PAD dari bidang perhubungan; Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya; Masih kurangnya rambu petunjuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan raya; Fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor masih kurang memadai;
10.	Komunikasi dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Beberapa kecamatan

No.	Permasalahan Pembangunan
	<p>di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki sambungan jaringan internet <i>mobile</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung di berbagai bidang pembangunan daerah. Informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat; ➤ Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat; ➤ Masih terdapat penduduk yang belum memiliki telepon seluler di Kabupaten Tanah Laut dengan persentase 34,94% pada tahun 2017; ➤ Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Tanah Laut masih rendah yaitu sebesar 22,25%; ➤ Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika; ➤ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif;
11.	<p>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Laut masih rendah; ➤ Sebagian besar koperasi di Kabupaten Tanah Laut masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam; ➤ Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas; ➤ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah. Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN; ➤ Kualitas produk UKM di Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk;
12.	<p>Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai penanaman modal asing di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2012, nilai penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Tanah Laut sebesar \$ US 64,16 juta menjadi sebesar \$ US 2,88 juta pada tahun 2018; ➤ Rasio daya serap tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal asing menurun dari sebesar 0,075 pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,054 pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada rasio penyerapan tenaga kerja

No.	Permasalahan Pembangunan
	<p>dari penanaman modal dalam negeri juga menurun dari sebesar 0,003 (2016) menjadi sebesar 0,002 (2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA berada di posisi 5; ➤ Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN berada di posisi 6; ➤ Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut; ➤ Pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Laut yang tertera dalam website masih menggunakan acuan peraturan daerah yang tidak berlaku lagi;
13.	<p>Kepemudaan dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga antar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; ➤ Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM perangkat pertandingan; ➤ Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum muncul atlet unggulan Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi maupun nasional; ➤ Belum optimalnya peran Pemuda Penggerak Pembangunan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut; ➤ Belum terbentuknya Forum Pemuda Tanah Laut (FPTL); ➤ Masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; ➤ Pemuda Kabupaten Tanah Laut yang berprestasi lebih memilih berkarir di luar Kabupaten Tanah Laut;
14.	<p>Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; ➤ Belum adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tanah Laut yang berisi seluruh data pada setiap aspek pembangunan; ➤ Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; ➤ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah;
15.	<p>Persandian</p>



No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah; ➤ Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah; ➤ Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
16.	Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pembinaan pegiat seni dan budaya di Kabupaten Tanah Laut;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terlaksananya festival tahunan Tanah Laut yang menampilkan kebudayaan Tanah Laut;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti Benteng Belanda Tabanio, Cagar Budaya Desa Riam Andungan, dan Bunker Jepang belum dikelola secara terpadu;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promosi budaya lokal Kabupaten Tanah Laut belum optimal;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya belum representatif;
17.	Perpustakaan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan jumlah perpustakaan keliling. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan keliling di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 unit
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem perpustakaan digital di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;
18.	Kearsipan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum semua SKPD/Pemerintah Desa/BUMD memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal;
III.	Urusan Pilihan
1.	Kelautan dan Perikanan



No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none">➤ Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di bidang perikanan tangkap laut karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami keterbatasan;➤ Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif walaupun selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.964,8 ton;➤ Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan;➤ Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;➤ Belum adanya pengembangan industri pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis);➤ Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan;➤ Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kabupaten Tanah Laut;➤ Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan eks asing;➤ Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi <i>traceability</i> produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara;➤ Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas;➤ Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan;



No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none">➤ Produk khas Kabupaten Tanah Laut yang berasal komoditas perikanan belum berkembang dan daya saingnya kalah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan;
2.	Pariwisata <ul style="list-style-type: none">➤ Jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah pengunjung secara keseluruhan sebanyak 196.201 pengunjung dan pada tahun 2016 berkurang menjadi sebanyak 104.145 pengunjung, dan pada tahun 2017 meningkat kembali hingga mencapai level tertingginya yaitu sebanyak 272.650 pengunjung;➤ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Tanah Laut perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas;➤ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;➤ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sebenarnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi➤ Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism development</i>);➤ Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;
3.	Pertanian <ul style="list-style-type: none">➤ Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut mengandalkan jaringan non irigasi. Lahan sawah yang mengandalkan jaringan irigasi pada tahun 2017 seluas 7.209 Ha, sedangkan lahan sawah non irigasi seluas 66.852 Ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaringan irigasi teknis sebagian besar belum menjangkau lahan sawah yang ada;➤ Masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dimana luasannya pada tahun 2017 mencapai 8.579 ha;



No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none">➤ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal;➤ Keterbatasan akses pasar produk pangan;➤ Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian;➤ Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi;➤ Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;➤ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas;➤ Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik;➤ Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan);➤ Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang dan terjadinya penurunan mutu genetik ternak;➤ Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan). Selain itu, lahan penggembalaan peternakan rakyat mengalami penurunan luasan;➤ Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak;➤ Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak; Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung);➤ Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten. Hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat;➤ Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah;➤ Hasil usaha peternakan belum optimal sehingga menurunkan produksi ternak. Selain itu, belum adanya pemetaan potensi agribisnis peternakan sehingga belum menjadi daya tarik bagi investor;➤ Terjadinya pemotongan betina produktif. Belum semua pelaku usaha di rumah potong hewan mengetahui larangan pemotongan betina produktif yang diatur dalam UU Nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan;➤ Saat ini sarana dan prasarana yang ada di RPH Sarang Halang belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar target pangan asal hewan yang dihasilkan RPH dapat tercapai. Selain itu, daya tampung pasar hewan terbatas;

No.	Permasalahan Pembangunan
4.	Perdagangan
	<ul style="list-style-type: none">➤ Ekspor unggulan di Kabupaten Tanah Laut masih didominasi komoditas tambang;➤ Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di berbagai kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya;➤ Bangunan yang ada di pasar lama belum dimanfaatkan secara optimal;➤ Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah rertribusi tera ulang pedagang;➤ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen;➤ Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik;
5.	Perindustrian
	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum terbangunnya kawasan industri Jorong karena masalah pembebasan lahan;➤ Belum terbangunnya sentra IKM terpadu di Kabupaten Tanah Laut seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa di setiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada di dalam atau di luar Kawasan Industri;➤ Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;➤ Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri. Selain itu, kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu masih lemah;➤ Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan;
6.	Transmigrasi
	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi lokal antar kecamatan dan masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program transmigrasi yang direncanakan pada tidak bisa berjalan dengan optimal karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk ➤ Kurangnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi;
IV.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1.	Administrasi Pemerintahan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jaringan kerjasama yang dilakukan masih terbatas pada wilayah regional;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana kecamatan masih belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemilihan kepala desa belum dilakukan secara serentak sehingga visi dan misi RPJM Desa terkadang tidak selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i>;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan);
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum lancarnya pelaksanaan system informasi manajemen pemerintah daerah;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prinsip <i>money follow function</i>, <i>money follow organization</i> harus mulai ditinggalkan, menjadi <i>money follow programme</i>;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terbentuknya BUMD yang mengelola Kawasan Industri Jorong;

No.	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi; ➤ Belum terciptanya pemerataan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR); ➤ Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah; ➤ Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel; ➤ Belum optimalnya kinerja leglatif dalam proses legislasi daerah;
2.	<p>Perencanaan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah; ➤ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun SKPD; ➤ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan SKPD-SKPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi; ➤ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah ➤ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkualitas; ➤ Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; ➤ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan pembangunan;
3.	<p>Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terintegrasi antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan; ➤ Belum ada fakta integritas mulai pimpinan daerah sampai dengan pimpinan SKPD dalam mempertahankan opini WTP; ➤ Masih terjadinya perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban yang masih harus diperbaharui dengan konversi akun; ➤ Perbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatn BMD;



No.	Permasalahan Pembangunan
	➤ Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
	➤ Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dana desa ;
	➤ Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
	➤ Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah;
	➤ Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum Optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017. Hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah penurunan ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang persentasenya mencapai 70,31% pada tahun 2017.
	➤ Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD;
	➤ Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah;
	➤ Belum optimalnya penggalan potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
4.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
	➤ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
	➤ Masih rendahnya profesionalisme birokrasi;
	➤ Belum berkembangnya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut;
	➤ Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja;
	➤ Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi;
5.	Penelitian dan Pengembangan
	➤ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
	➤ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
	➤ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah;

No.	Permasalahan Pembangunan
	➤ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan;
6.	Pengawasan Pembangunan
	➤ Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran satuan kerja perangkat daerah
	➤ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh satuan kerja perangkat daerah
	➤ Masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

4.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Tanah Laut. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah

terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

Pelaksanaan pencapaian SDGs yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya menjadi masalah dunia tetapi juga menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan agenda tersebut untuk menjadi negara maju. Tidak hanya di level nasional, pemerintah daerah diamanahkan untuk menyusun RAD TPB/SDGs paling lama 12 bulan setelah Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini ditetapkan. TPB sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Demikian halnya dengan Kabupaten Tanah Laut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dipandang sangat relevan dalam memandu gerak langkah pembangunan daerah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanah Laut. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya dapat disinkronkan ke dalam bagian permasalahan pembangunan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan, dan indikator kinerja daerah. Secara teknis indikator-indikator SDGs bisa diadopsi sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya pada urusan kewenangan yang relevan, diantaranya adalah; urusan pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan



permukiman, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, kelautan dan perikanan, dan fungsi urusan penunjang pemerintahan.

4.2.2 Kawasan Industri Jorong

Pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebagai fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Pulau Kalimantan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Industri Jorong termasuk salah satu lokasi pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus. Fokus pembangunan industri di Kawasan Industri Jorong adalah untuk hilirisasi produk-produk hasil perkebunan dan pertanian dan produk baja. Dalam perkembangannya, Kawasan Industri Jorong telah diminati oleh PT Jorong Port Development sebagai investor dimana perusahaan tersebut membutuhkan lahan seluas 1.200 Ha (1.000 Ha untuk kawasan industri dan 200 Ha untuk pelabuhan). Dengan ditetapkannya Kawasan Industri Jorong, Kabupaten Tanah Laut harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut melalui pemberian kemudahan dan insentif bagi investor dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Hal yang tak kalah penting adalah pengembangan Kawasan Industri Jorong tersebut tentunya akan menarik banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga Kabupaten Tanah Laut harus menyiapkan SDM yang unggul untuk mendukung Kawasan Industri Jorong.

4.2.3 Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

Struktur ekonomi Kabupaten Tanah Laut selama periode 2012-2017 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, walaupun terus mengalami penurunan kontribusi sepanjang periode tersebut dari sebesar 36,41% pada tahun 2012 menjadi sebesar 24,41% pada tahun 2017. Dengan masih bergantungnya Kabupaten Tanah Laut pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, maka di masa mendatang hal tersebut akan menjadi permasalahan serius mengingat jenis sumber daya yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan cenderung ekstraktif. Beberapa sektor yang dapat menjadi sektor prioritas di Kabupaten Tanah Laut pada masa mendatang adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor industri pengolahan. Pengembangan kedua sektor tersebut sangat potensial mengingat ditetapkannya Kawasan Industri Jorong

sebagai Proyek Strategis Nasional yang berbasis industri hasil perkebunan dan pertanian. Selain itu, pengembangan kedua sektor tersebut sangat potensial mengingat kontribusinya dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi kedua dan ketiga setelah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 19,20%, sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,85%. Program pembangunan yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depannya akan mengarah pada pembangunan sektor potensial daerah seperti sektor pertanian dengan mengarah tidak hanya di tingkat hulu, tetapi juga mengarah pada pengembangan di tingkat hilir (industri pengolahan produk-produk pertanian).

4.2.4 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tanah Laut masih relatif rendah dibandingkan angka nasional. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 4,33% dan terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar 4,65% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebesar 4,60%. Sementara itu, angka ketimpangan di Kabupaten Tanah Laut juga semakin meningkat walaupun masih dalam kategori ketidakmerataan rendah (Rasio Gini $<0,3$). Angka Rasio Gini Kabupaten Tanah Laut terus meningkat dari 0,250 pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,26 pada tahun 2017.

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik kemiskinan.
2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan.
3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

4. Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang ada di kabupaten harus semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Kabupaten Tanah Laut harus meningkatkan perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kabupaten maupun sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

4.2.5 Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak objek wisata baik pariwisata budaya maupun pariwisata alam. Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Benteng Tabanio di Kecamatan Takisung, dan Bunker Jepang Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajungin. Sementara itu, kawasan pariwisata alam di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah Kawasan Taman Wisata Alam Batakan Desa Batakan di Kecamatan Panyipatan, Kawasan Hutan Lindung Bajuin Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajuin, Kawasan Hutan Kota dan Wisata Gunung Khayangan di Kecamatan Pelaihari, Air Terjun Bajuin di Kecamatan Bajuin, Kawasan Gua Marmer, Gua Semprong, dan Gua Liang Bebau di Kecamatan Bajuin, Pantai Batakan di Kecamatan Panyipatan, Pantai Takisung di Kecamatan Takisung, dan Pantai Swarangan di Kecamatan Jorong.

Beberapa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut yang telah terkenal di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pantai Takisung dan Batakan. Dalam rangka peningkatan daya saing pariwisata di tengah jumlah kunjungan wisata yang terus mengalami penurunan, maka diperlukan promosi dan pemasaran destinasi wisata unggulan tersebut. Selain itu, beberapa upaya lain yang dapat dilakukan adalah membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai

dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut nantinya mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). Peningkatan daya saing pariwisata akan memberikan dampak yang luas bagi perekonomian mengingat tingginya *multiplier effect* yang ditimbulkan dan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD.

4.2.6 Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan

Dengan adanya penetapan Kawasan Industri Jorong sebagai Proyek Strategis Nasional dimana selanjutnya akan dibangun Pelabuhan Jorong, maka diperlukan peningkatan konektivitas antara wilayah sentra produksi dengan pelabuhan. Peningkatan konektivitas tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan jalan baru maupun revitalisasi jalan eksisting. Dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah direncanakan sistem jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan yang terdiri atas rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus.

- a) daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Asam-asam dan desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang berada di \pm KM 40;
- b) daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Muara Kintap, Pandan Sari, Mekar Sari, Sungai Cuka, Pasir Putih, Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berada di \pm Km 80;
- c) jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan dapat berubah dan bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- d) ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas akan dipersiapkan menjadi cikal

bakal jalan umum apabila kontrak investor telah berakhir dan atau adanya kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.

4.2.7 Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan daerah yang baru berkembang seperti Kabupaten Tanah Laut yang sangat membutuhkan tenaga berkualitas untuk memajukan daerah. Pendidikan dilaksanakan selama kita masih menghirup nafas kehidupan, sehingga secara tidak langsung pendidikan adalah urat nadi dalam menghadapi zaman yang sudah maju dan berteknologi seperti sekarang ini. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga semua sektor masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, maupun badan usaha lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum memadai yang ditunjukkan dengan data-data sebagai berikut:

- Angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 96,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3,93% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 7,37 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan;
- Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 11,82 tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai anak umur tertentu di masa yang akan datang hanya pada pendidikan kelas 2 SMA. Angka HLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan;

- Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (7-12 tahun) mengalami penurunan dari 99,68% pada tahun 2016 menjadi 99,40% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 0,6% penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SD/MI;
- Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (13-15 tahun) mengalami penurunan dari 92,16% pada tahun 2016 menjadi 91,59% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 8% penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SMP/MTS;
- Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD sebesar 109,54% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9,54% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD;
- Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP sebesar 80,16% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah SMP berapapun usianya di antara penduduk usia 13-15 tahun hanya sebesar 80,16%;
- Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah yaitu sebesar 71,31%. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang berusia 13-15 tahun, terdapat hanya 71 orang yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTS;

4.2.8 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanah Laut dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

4.2.9 Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian wilayah karena mampu memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 19,20%. Sektor pertanian juga dipandang memiliki kontribusi yang besar untuk mengatasi problem kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanah LAut. Jika sektor agro dapat dikelola dengan baik dengan dukungan perbaikan dan penambahan infratsruktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada pengurangan status kemiskinan masyarakat. Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi pengurangan kemiskinan karena sektor agro menampung sebagian besar angkatan kerja dan berlokasi di pedesaan yang identik dengan kantung kemiskinan.

Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi mengatasi angka pengangguran karena sektor agro dapat menampung angakatan kerja yang berlokasi di pedesaan. Pengembangan industri berbasis agro hulu-hilir juga sangat potensial untuk menampung lebih banyak tenaga kerja di pinggiran kota dan perkotaan. Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut secara terstruktur perlu didukung dengan pemihakan regulasi dan anggaran bagi keberlanjutan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang terkait dengan sektor agro diwujudkan dalam tiga program utama yaitu: (1) peningkatan ekonomi lokal dan (2) peningkatan infrastruktur dasar. Selain tiga program utama yang terkait dengan tema pembangunan agro, juga perlu didukung dengan dua program penunjang yang terkait yaitu: (a) penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan dan (b) pengembangan kapasitas kelembagaan.

Salah satu prioritas pada pengembangan sektor agro (pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan) dari berbagai aspek dari hulu ke hilir sangat strategis baik dalam konteks lokal, nasional dan global. Tema utama pembangunan global dan nasional yang memberi prioritas pada pencapaian

ketahanan pangan (*food security*) telah direspon dengan sangat positif oleh Kabupaten Tanah Laut. Dengan dukungan karakteristik yang sangat kondusif untuk pembangunan sektor agro dan juga kelimpahan kepemilikan sumberdaya hayati terkait agro memberikan peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Tanah Laut untuk dapat mewujudkan pembangunan sektor agro yang kompetitif dan berdaya saing.

Pengembangan potensi unggulan bahan baku lokal baik yang merupakan komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dapat mendukung pencapaian diversifikasi pangan. Strategi pembangunan agro yang diprioritaskan pada perbaikan dan penambahan infrastruktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Selain itu, pengembangan sektor agro di Kabupaten Tanah Laut sangat berpotensi untuk menciptakan surplus produk agro yang menjadi sumber ekspor ke luar provinsi bahkan dapat menjadi komoditas ekspor ke luar negeri pada masa-masa mendatang.

4.2.10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan suatu wilayah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi bangunan RSUD dirasakan belum memadai dalam hal kualitas pelayanan, sehingga pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru RSUD H. Boejasin yang nantinya akan selesai pada tahun 2018. Tidak hanya fasilitas bangunan RSUD, hal lain yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah tersedianya alat kesehatan yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga medis. Dengan adanya kelengkapan bangunan disertai alat kesehatan yang modern dan tenaga medis yang terampil, maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut akan meningkat.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

- Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.
- INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan

secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **"DESA DIBINA, KOTA DITATA"**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **"KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS"**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **Tanah Laut yang BERINTERAKSI** pada lokus **"DESA DIBINA, KOTA DITATA"** melalui **"KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS"**. Fokus pada lokus **"DESA DIBINA, KOTA DITATA"** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

Secara lebih detail penjabaran upaya-upaya pencapaian Visi serta indikator kinerja pencapaiannya dijabarkan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya.

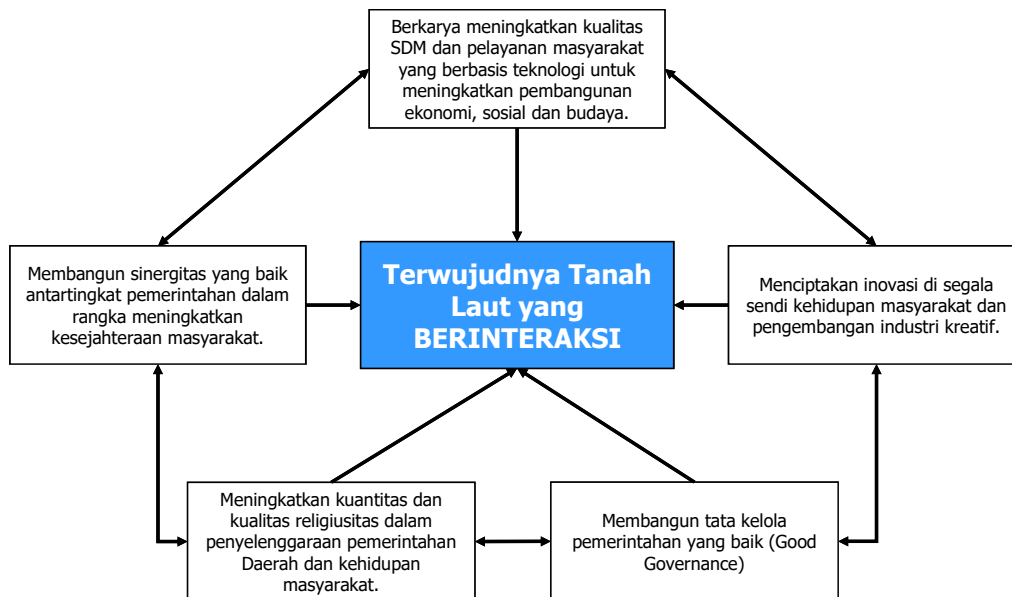
5.2 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.1 di bawah ini.



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 1 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu **“Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”**, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi

Tujuan 2 : Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya



Sasaran 3.1 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya

Sasaran 3.2 : Meningkatkan pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Sasaran 3.3 : Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Dalam kerangka mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: **“Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”**, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1.1 : Meningkatkan inovasi pelayanan publik

Tujuan 2 : Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Dalam kerangka mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: **“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”**, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Sasaran 1.2 : Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran 1.3 : Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Dalam kerangka mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: **“Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat”**, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran 1.1 : Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Sasaran 1.2 : Meningkatnya wawasan kebangsaan

Sasaran 1.3 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Dalam kerangka mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: **“Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 1.2 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah

Sasaran 1.3 : Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Tujuan 3 : Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah



- Sasaran 3.1 : Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
- Sasaran 3.2 : Meningkatnya ketahanan pangan
- Tujuan 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - Sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Tujuan 5 : Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota
 - Sasaran 5.1 : Meningkatnya Pembinaan Desa
 - Sasaran 5.2 : Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 5.7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	MISI 1: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya								
1.1.	Tujuan 1. Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,00	68,10	68,30	68,50	68,70	68,90	70,10
1.1.1.	Sasaran 1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,57	7,97	8,06	9,00	10,00	12,00
		Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12,25	12,83	13,12	13,41	13,70	14,00
1.1.2.	Sasaran 1.2. Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)	-	-	-	500	500	500	500
1.2.	Tujuan 2: Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
1.2.1.	Sasaran 2.1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,76	68,76	68,90	69,10	69,30	69,60	69,80
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Tujuan 3: Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung	Indeks kepuasan masyarakat	65 (Kurang Baik)	65 (Kurang Baik)	70 (Kurang Baik)	75 (Kurang Baik)	76,5 (Baik)	77,5 (Baik(80 (Baik)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya									
1.3.1.	Sasaran 3.1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	2,20	2,20	2,20	1,48	1,38	1,20	1,10
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.	Sasaran 3.2: Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Pembangunan Pemuda	na	na	45,70	45,90	46,00	46,50	46,75
		Jumlah Atlet yang berprestasi	83	57	62	68	74	81	89
1.3.3.	Sasaran 3.3: Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	MISI 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif								
2.1.	Tujuan 1: Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	0	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.	Sasaran 1.1: Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	0	0	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi
2.2.	Tujuan 2: Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	0	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha
2.2.1.	Sasaran 2.1: Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	n.a	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha
2.2.2.	Sasaran 2.2: Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	0	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha
3.	MISI 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)								
3.1.	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	6,0 (Baik)	6,1 (Baik)	6,2 (Baik)	6,3 (Baik)	6,4 (Baik)
3.1.1.	Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B (60,06)	B (63,61)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (77,00)	A (81)	A (81)
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.2.	Sasaran 1.2: Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	-	11,90	11,90	23,81	35,71	47,62	59,52
3.1.3.	Sasaran 1.3: Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	-	5	10	15	20	25	25
4. MISI 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat									
4.1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama							
4.1.1.	Sasaran 1.1: Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Sasaran 1.2: Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	Sasaran 1.3: Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
5. MISI 5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
5.1.	Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	4,60	4,40	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35
5.1.1.	Sasaran 1.1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4,80	4,85	4,9	4,95	5,00	5,05
		Indeks Gini (skor)	0,259	0,258	0,257	0,256	0,255	0,254	0,253



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
		PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	28,57	30,00	31,50	33,07	34,73	36,81	39,02
5.1.2.	Sasaran 1.2: Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	87,75	88,00	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50
5.1.3.	Sasaran 1.3: Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,42	3,30	3,00	2,8	2,6	2,5
5.1.4.	Sasaran 1.4: Meningkatkan perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi)	160 (Tinggi)	150 (Tinggi)	135 (Sedang)	130 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	9.5	10,00	12,50	15,00	20,00	25,00	30,00
5.2.	Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70	70,00	70,50	70,75	71,00	72,00	73,00
5.2.1.	Sasaran 2.1. Meningkatkan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	29,59	34,41	38	43	64	80	85,00
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	80	83	84	87	93	97	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	60,00	62,00	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	20,00 *	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
		Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	60,00 *	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
5.3.	Tujuan 3: Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	5.02	5.02	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06
5.3.1.	Sasaran 3.1: Meningkatkan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (<i>program unggulan # 1</i>)	-	-	100	120	125	130	135
		Pertumbuhan sektor Pertanian	3,50	3,50	3,50	3,51	3,52	3,53	3,57
		Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,56	7,56	7,56	7,57	7,58	7,59	7,60
		Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	275.000	275.000	280.000	285.000	290.000	300.000	350.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.3.2.	Sasaran 3.2: Meningkatkan ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Desa Berketahanan Pangan (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4.	Tujuan 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	-	59,832	60,208	60,584	60,960	61,336	61,712
5.4.1.	Sasaran 4.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	-	59,832	60,208	60,584	60,960	61,336	61,712
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00	65,00	70,00	78,00	87,00	92,00	98,00
5.5.	Tujuan 5: Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun (skor)	0.690	0,700	0,715 (Maju)	0,730 (Maju)	0,750 (Maju)	0,800 (Maju)	0,815 (Mandiri)
5.5.1.	Sasaran 5.1. Meningkatkan Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	0	8	26	26	26	26	20



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Jumlah Desa di bina berciri khas	0	0	5	5	5	5	5
5.5.2.	Sasaran 5.2: Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15,00	15,00	12,00	10,00	7,00	3,00	1,00
		Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)	10	15	20	35	50	60	80

5.4 SINKRONISASI SASARAN RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023 DENGAN SASARAN RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025

Penetapan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2018-2023 juga telah dipadupadankan dengan sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025. Dari sebanyak 83 sasaran yang harus dicapai dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025, hal tersebut selanjutnya direspon dengan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.8 Sinkronisasi Sasaran RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Tertanamnya nilai-nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara <i>kaffah</i> sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial umat beragama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas dan kehidupan keagamaan.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.3 Meningkatnya aksi sosial keagamaan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana untuk beribadah.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial umat beragama
Meningkatnya kesalehan dan kepedulian sosial umat	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial umat beragama
Peningkatan Kerukunan Intern dan antar umat beragama, terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antar umat beragama yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial umat beragama
Peningkatan pendidikan politik pada masyarakat.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan
Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat, bebas, dan efektif sebagai	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
perwujudan demokrasi tiap warga Kabupaten.	
Meningkatnya partisipasi masyarakat Tanah Laut dalam proses politik dan dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan publik.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan
Peningkatan kemandirian partai politik dan dapat berlangsungnya proses demokrasi baik dalam menentukan anggota legislatif maupun kepala daerah.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan lembaga politik.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan
Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi <i>stakeholders</i> Kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola Kabupaten mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Menciptakan sistem pelayanan publik yang prima (<i>exellen service</i>) yang didasarkan pada prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik yang profesional dicirikan oleh adanya transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dari aparatur pemerintah yang di dukung oleh penyiapan sumberdaya manusia (aparatur) yang handal, sarana dan prasarana kerja yang memadai, dan penerapan <i>reward and punishment</i> yang baik dan tepat.	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Menciptakan adanya kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan dengan memperhatikan aspek persyaratan pelayanan, prosedur, unit kerja yang berwenang, dan rincian biaya serta waktu penyelesaian.	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Menciptakan pelayanan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap, <i>Electronic Government</i> , dan Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten.	Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Mewujudkan Kualitas Pendidikan yang baik yang dilandasi moral agama sehingga tercipta generasi yang cerdas, menguasai IPTEKS serta berbudi luhur dan berakhlak.	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
Pendirian kelembagaan dan peningkatan kualitas pendidikan berjenjang mulai pendidikan dasar / ibtidaiyah, menengah pertama / tsanawiyah; menengah/ aliyah termasuk pendidikan kejuruan sampai dengan pendidikan tinggi khususnya politeknik.	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
Pendidikan pesantren dan atau “kepesantrenan” yang sudah ada sekarang harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu model pendidikan “ <i>boarding</i> ” atau sekolah berasrama tetap dijadikan alternatif dan dipertahankan.	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
Memperkuat penyelenggaraan pendidikan, baik dibidang standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik, meningkatkan proses belajar mengajar serta penyediaan, kelengkapan dan optimalisasi sarana dan prasarana termasuk peran perpustakaan. Dilanjutkan pula dengan upaya untuk menghasilkan produk IPTEKS berdaya guna dan kegiatan keilmuan yang	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
dihasilkan semakin intensif dan berkembang.	
Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf nasional dan internasional yang dapat mempersiapkan anak didik agar mampu bersaing pada tatanan nasional dan Internasional.	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
Optimalisasi pendidikan luar sekolah dan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk memberikan keterampilan sesuai potensi lingkungan kepada para peserta didik yang tidak lagi menempuh pendidikan formal.	Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
Meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi	Misi 1, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas; puskesmas pembantu dan Posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu	Misi 1, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.	Misi 1, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata-rata sampai tahun 2025 dengan rata-rata 7 % serta adanya peningkatan PDRB yang signifikan.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sehingga pada tahun 2025 minimal berpendapatan \$ US 3.000 per kapita per tahun.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Meningkatnya jumlah turis, investasi swasta terutama investasi dari mancanegara dan jasa perdagangan.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Berkembangnya industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata yang efisien, berdaya saing tinggi, dan mampu meningkatkan perekonomian daerah melalui perolehan nilai tambah dan efek ganda.	Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
Terwujudnya pembangunan pelabuhan laut berstandart internasional.	
Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumberdaya produktif secara berkelanjutan.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Peningkatan kinerja sektor jasa keuangan terutama perbankan baik yang konvensional maupun syariah dalam pembiayaan dunia usaha khususnya permodalan bagi UMKM.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Semakin berperannya BUMD dan semakin banyaknya wirausaha yang handal dan profesional dalam menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan produktivitas serta mengembangkan jaringan distribusi.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Adanya pembinaan dan kemitraan dari semua pihak kepada UMKM khususnya dari para pengusaha besar swasta yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Adanya kewajiban dari pihak investor kepada para UMKM untuk melakukan kerjasama bisnis sesuai dengan kapasitas	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah

Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
masing-masing. Kerjasama ini merupakan bagian dari CSR dan bagian yang tidak terpisahkan pula dari penguatan ekonomi daerah	
Pengembangan UMKM oleh semua pihak utamanya dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan, peningkatan produktivitas yang sesuai kebutuhan pasar serta solusi permodalan	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Pemerintah daerah membantu dalam penanggulangan masalah sertifikasi tanah / lahan UMKM guna jaminan peminjaman modal kepada perbankan	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Perlunya pembinaan dan upaya pemberian insentif kepada para pendamping UMKM yang membantu mendampingi UMKM khususnya para pendamping yang membantu UMKM dalam hal akses permodalan	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Penyediaan saprodi pertanian pada sentra-sentra produksi dalam tepat waktu, tepat jumlah dan harga yang sesuai.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Peningkatan luas areal, produksi dan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung maupun industri pengolahan.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Pengembangan agro industri untuk memperoleh nilai tambah.	Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian
Optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Peningkatan standar mutu produk.	Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya penerapan teknologi inovatif dalam masyarakat



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan.	Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian
Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro dan perbankan untuk permodalan	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Peningkatan pemasaran produk dan hasil olahannya.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional dan bahkan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, data basis berbagai daerah. Jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas.	Misi 1, Tujuan 3, Sasaran 3. 3 Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
Adanya kemitraan yang saling menguntungkan, saling hormat-menghormati baik dikalangan usaha rakyat, antar investor, antar daerah skala nasional maupun internasional, antar lembaga swasta dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pengembangan daerah.	Misi 5, Tujuan 3, Sasaran 3.1 Meningkatnya kinerja unit usaha unggulan daerah
Produk yang ramah lingkungan.	Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya penerapan teknologi inovatif dalam masyarakat
Terdapat keterkaitan lokal (hulu dan hilir).	Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2.2 Meningkatnya kontribusi industri kreatif
Meningkatnya kualitas air sungai disertai pengendalian dan pemantauan secara kontinu	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Berkurangnya pencemaran air dan tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Meningkatnya cadangan sumberdaya energi kabupaten (<i>resources endowment</i>);	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya indeks keberlanjutan pembangunan Kabupaten (<i>sustainable development index</i>).	Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	
Pencegahan terhadap illegal mining; logging dan fishing	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Adanya perbaikan lingkungan yang rusak akibat eksploitasi bahan tambang; salah satunya dengan reklamasi lahan bekas galian	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pencegahan terhadap usaha penambangan di dalam tanah (perut bumi) yang berada di dalam kawasan konservasi.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur Kabupaten termasuk panjang jalan serta kualitasnya.	Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
Terbangunnya prasarana untuk penyiapan pembangunan bandara.	Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
Bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih untuk masyarakat; meningkatnya debit dan kualitas air bersih.	Misi 5, Tujuan 2, Sasaran 2.1 Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
Menurunnya unsur polutan.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas perumahan bagi seluruh warga Kabupaten.	Misi 5, Tujuan 5, Sasaran 5.2 Meningkatnya cakupan penataan kota
Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman Kabupaten.	Misi 5, Tujuan 5, Sasaran 5.2 Meningkatnya cakupan penataan kota



Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Meningkatnya pengelolaan limbah permukiman.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Kabupaten Tanah Laut terutama ditempuh dengan memantapkan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada nilai agama, tata nilai masyarakat dan adat istiadat, budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, rukun dan damai.	Misi 1, Tujuan 3, Sasaran 3.2 Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
Perlindungan dan pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial dan budaya yang ada yang diarahkan kepada upaya-upaya pelestarian, dan fungsionalisasi khazanah sosial dan budaya yang ada di masyarakat sebagai wadah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	Misi 1, Tujuan 3, Sasaran 3.2 Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
Pemberdayaan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada pengelolaan industri pariwisata secara baik dan berwawasan lingkungan.	Misi 1, Tujuan 3, Sasaran 3.2 Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
Menurunnya angka kriminalitas.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Semakin tingginya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Tidak berkembangnya perdagangan, peredaran dan penggunaan narkoba.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Adanya rasa aman dan meningkatnya kepuasan warga Kabupaten terhadap pelayanan dalam bidang keamanan dan ketertiban.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Meningkatnya penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swadaya.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Peningkatan kesadaran hukum dan budaya tertib.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat

Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025	Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
Konsistensi penegakan peraturan daerah yang telah dibuat untuk memberi rasa aman, nyaman, dan manfaat bagi masyarakat luas.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, dan profesional.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap HAM.	Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan
Terkoordinasinya dan terharmonisasinya pelaksanaan produk hukum yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif warga.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat
Peningkatan pendidikan kaum perempuan.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
Semakin banyaknya kaum perempuan yang memegang jabatan di eksekutif dan semakin besarnya persentase anggota DPRD yang berasal dari kaum perempuan.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.2 Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
Adanya perlindungan hukum dan semakin banyaknya lembaga atau LSM yang memberikan advokasi terhadap adanya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan.	Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1.4 Meningkatnya perlindungan masyarakat

5.5 SINKRONISASI TARGET RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023 DENGAN SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan nasional periode tahun 2015-2019. Oleh sebab itu sasaran-sasaran pokok yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 juga menjadi target yang harus dicapai oleh daerah, tentu saja dengan penyesuaian konteks lokal yang menjadi lingkungan strategis pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, tabel berikut menunjukkan target perbandingan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan target yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023.

Tabel 5.9 Harmonisasi Target Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
1.	SASARAN MAKRO		
1.1.	Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,3	70,10
	Indeks Gini	0,36	0,253
	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Minimal 95%	100%
1.2.	Ekonomi Makro		
	Pertumbuhan ekonomi	8,0%	5,05%
	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0%	4,35%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,0-5,0%	2,5%
2.	SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT		
2.1.	Kependudukan dan Keluarga Berencana		
	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%	1,10%
	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all methods</i>)	66%	86,12%
2.2.	Pendidikan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,8 (tahun)	8,07 (tahun)
	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%	100%
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%	80,0%
	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	81,0%	65,0%
2.3. Kesehatan			
a. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	306	11
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	24	11
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	17	2
b. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	245	30
	Prevalensi HIV	<0,5%	10,05%
c. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi	5.600	100%
	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	5.600	20
2.4. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat	89,50



No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
3.1. Kedaulatan Pangan			
a. Produksi Dalam Negeri			
	Padi	820 juta ton	256.544 ton
	Jagung	241 juta ton	210.573 ton
	Produksi Ikan	188 juta ton	1.472 ton
b. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi			
	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa	989 juta ha	10% jaringan irigasi
	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	301 juta ha	10% jaringan irigasi
3.2. Maritim dan Kelautan			
a. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	87%	100%
b. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
	Pengembangan pelabuhan perikanan	24 unit	11 kawasan
	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	20 juta ha	-
3.3. Pariwisata dan Industri Manufaktur			
a. Pariwisata			
	Wisatawan manca negara	20 juta	-
	Wisatawan Nusantara	275 juta	350.000
3.4. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
a. Ketahanan Air			



No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
	Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk	20%	20%
	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	10 Juta Ha	10% jaringan irigasi
b. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
	Rasio elektrifikasi	96,6%	-
	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	0 ha	0 ha
	Akses Air Minum Layak	100%	85%
	Akses Sanitasi Layak	100%	45%
c. Lingkungan			
	Emisi Gas Rumah Kaca	~ 26%	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,5-68,5	75
	Tambahan Rehabilitasi Hutan	750 ribu ha	-
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN			
4.1. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0% - 8,0%	4,0%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0 % - 5,0 %	3,1%
4.2. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu			
Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)			
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	100%	100%
	Akses Pangan Bernutrisi	100%	100%



No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
	Akses Terhadap Layanan Keuangan	25%	100%
4.3.	Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
	Kepemilikan akte lahir (2013)	77,4%	100%
	Akses air minum	100%	85%
	Akses sanitasi layak	100%	45%
	Akses penerangan	100%	100%
4.4.	Peningkatan daya saing tenaga kerja		
	Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)	1.000 per tahun
	Persentase tenaga kerja formal	51,0%	50%
4.5.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
	Pekerja formal	62,4 juta	40.000 orang
	Pekerja Informal	3,5 juta	40.000 orang
4.6.	Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja		
	Jumlah pelatihan	2.170.377**)	500 tenaga kerja
	Jumlah sertifikasi	863.819**)	
5.	SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
5.1.	Politik dan Demokrasi		
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	77,5 %	70%
	Indeks Demokrasi Indonesia	75	73,43
5.2.	Penegakan Hukum		
	Indeks Pembangunan Hukum	75%	-
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	40	-
	Indeks Penegakan Hukum Tipikor	Naik 20% (skala 5)	-
5.3.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

No.	Sasaran Pembangunan	Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
	Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat	Meningkat
	Integritas Pelayanan Publik	85	90
5.4.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah		
a.	Kinerja Keuangan Daerah		
	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	35%	30,0%
	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	11,0 %	10,0%
	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	30,0 %	25,0%
	Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	60%	WTP
b.	Kinerja Kelembagaan		
	PTSP Kondisi Mantap	55,0 %	100%
	Perda bermasalah	50 perda	Tidak Ada
	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	70%	100%
	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	90%	100%
c.	Kinerja Aparatur		
	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	50,0 %	90%

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Strategi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ditujukan untuk pencapaian misi, tujuan, dan sasaran seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjaring aspirasi warga Kabupaten Tanah Laut dalam pembangunan tahunan maupun lima tahunan. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Kabupaten Tanah Laut mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara *bottom-up* bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui penggerakan partisipasi masyarakat dalam wadah *corporate social responsibility* (CSR), swadaya masyarakat dan lain-lain. Strategi untuk mencapai

sasaran pembangunan daerah untuk setiap misi adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
Misi 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	<p>Peningkatan akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti yang diamanatkan dalam SPM bidang Pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun kesetaraan.</p> <p>Karena ketepatan kelompok sasaran tersebut akan dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan di masa yang akan datang.</p>
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan.
		Peningkatan pemyarakatan paradigma sehat serta keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.
		Peningkatan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan.



Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
		Terkait dengan Program Pelayanan Kesehatan On Call, maka diperlukan Pedoman Teknis yang komprehensif sebagai dasar penyelenggaraannya.
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan pendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
		Peningkatan realisasi pelaku perizinan dan non perijinan jenis non usaha sehingga pelaku usaha memenuhi persyaratan usaha yang telah ditetapkan.
		Peningkatan Kinerja Keluarga Berencana untuk pengendalian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak administratif masyarakat serta meningkatkan ketepatanan perhitungan jumlah penduduk sebagai dasar dari kebijakan publik.
		Peningkatan pelayanan Kecamatan serta optimalisasi peran kecamatan dalam upaya gerakan desa membangun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu dikembangkan untuk memasukkan aspek (kandungan) lokal.
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Peningkatan hasil dari pembinaan adat dan budaya desa yang mendukung pengembangan perekonomian di tingkat desa
		Peningkatan keserasian kebijakan pembinaan kepemudaan untuk memastikan peningkatan jumlah Organisasi Pemuda Aktif, Persentase Wirausaha Muda, serta persentase



Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
		peroleh medali di tingkat nasional dan provinsi
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Memfasilitasi Pelayanan SKPD Berbasis Teknologi Informasi
Misi 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif		
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan publik melalui pola replikasi <i>best practices</i> yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Peningkatan penerapan inovasi pada sistem produksi di tingkat usaha yang potensial.
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Peningkatan pengembangan industri kreatif daerah skala kecil dan menengah.
Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahanan daerah
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembinaan Maturitas Penerapan SPIP
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan publik SKPD.
		Peningkatan pemanfaatan Data/Informasi berbasis TI untuk mendukung penerapan e-Government
Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat		
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai		Penguatan kemitraan pengembangan pengamalan nilai-nilai keagamaan untuk

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
agama di lingkungan birokrasi dan masyarakat	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	peningkatan lembaga keagamaan dalam peningkatan toleransi keagamaan.
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Peningkatan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan
		Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat yang mengarah pada kejujuran dan keadilan
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Diarahkan untuk peningkatan peran lembaga keagamaan dalam peningkatan produktivitas umat
Misi 5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Inklusif
		Peningkatan Keserasian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang bermuara pada APBD yang <i>Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Environment</i>
	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan Kesempatan Kerja untuk pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana serta peningkatan penyelesaian gangguan trantibum
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meningkatkan interkoneksi antarpusat pertumbuhan
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya untuk peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
		pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI		
Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pengembangan bidang ketenagalistrikan
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sesuai potensi daerah
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan kualitas fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan khususnya di wilayah potensial serta peningkatan linkage sektoralnya.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan untuk penguatan cadangan pangan serta desa berketahanan pangan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah dan Persampahan
Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Meningkatnya Desa Membangun	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa untuk mendukung gerakan desa membangun.
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Peningkatan keserasian Perencanaan Pengembangan Kota-kota untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pengurangan permukiman kumuh.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Secara umum, arah kebijakan adalah sebagai berikut.



Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan					
Tahun ke-2018	Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023
Pemantapan Dasar-Dasar Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas	Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas	Memacu Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas	Pemantapan Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas	Stabilisasi Kebijakan BERINTERAKSI yang dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA yang Mantab untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas	Pemantapan Kebijakan BERINTERAKSI dalam MEMBINA DESA DAN MENATA KOTA sebagai Pondasi Pembangunan Periode Berikutnya
Pada tahun 2018 ini, fokus dari program adalah pembangunan dasar-dasar untuk pencapaian Visi Daerah dalam tiap Misi Pembangunan Daerah	Pada tahun 2019 ini, hasil dari tiap misi telah dilaporkan dan dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus program di tahun berikutnya.	Pada tahun 2020 ini, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memacu hasil dari tiap misi pembangunan	Pada tahun 2021 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian target kinerja RPJMD.	Pada tahun 2022 ini, fokus kebijakan harus semakin ditingkatkan untuk memastikan pencapaian target kinerja RPJMD.	Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal serta penyiapan pondasi pembangunan periode berikutnya.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam program merupakan penjabaran dari misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka hal tersebut menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam pencapaian setiap misi pembangunan. Program pembangunan daerah merupakan program-program yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan penerjemahan program unggulan yang merupakan janji kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program unggulan yang diselaraskan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program pembangunan sebagai agenda prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun ke depan menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program pembangunan pada masing-masing misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok program pembangunan, yaitu: 1) Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan; 2) Peningkatan Daya Saing Ekonomi; 3) Reformasi Birokrasi; 4) Peningkatan Religiusitas Kehidupan Masyarakat; dan 5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya berbagai kelompok program pembangunan tersebut akan diramu untuk pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Percepatan program pembangunan tersebut dirumuskan melalui agenda program prioritas dari setiap misi, tujuan, dan sasaran yang ditampilkan pada tabel berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
MISI 1: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya																	
Tujuan 1. Peningkatan layanan bidang pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,00	68,10		68,30		68,50		68,70		68,90		70,10		70,10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															14,00		
Sasaran 1.1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,57		7,97		7,99		8,00		8,05		8,07		8,07		
	Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12,25		12,83		13,12		13,14		13,19		13,22		13,22		
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	PAUD minimal terakreditasi B (%)	39.88	51.34	707,4	52,00	2.848,77	57,00	3.987,96	60,00	4.386,75	64,00	4.825,43	70,00	5.307,97	70,00	22.064,28	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	31.00	31.11		35		37		39		40		41		41		Program Pendidikan Anak Usia Dini
	LKP yang Terakreditasi minimal B (%)	4.54	15.38		17		22		30		39		47		47		
	PKBM yang terakreditasi minimal B (%)	0	36.36		39		47		52		60		62		62		
	Satu desa satu PAUD (%)	62.22	62.22		60		63		65		66		68		68		
	PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (%)	77	77		79		80		84		88		90		90		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional (%)	0	0		20		30		40		50		60		60		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	106.97	103.38	22127.62	100	21560.85	100	36526.33	100	34392.7	100	38063.78	100	40677.56	100	193348.84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	74.81	76		77,00		78,00		79,00		80,00		81,00		81,00		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	92,68	96.5		88.52		88.56		88.58		88.67		88.9		88.9		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	56.27	60		63		64,00		65,00		66,00		67,00		67,00		
	Sekolah yang Terakreditasi A dan B (%)	44,96	44,96		45,00		50,00		55,00		56,00		59,00		59,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SD (%)	0.08	0		0,60		0,45		0,30		0,25		0,20		0,20		
	Angka Putus Sekolah SMP (%)	0,0001	0		0,15		0,10		0,8		0,07		0,05		0,05		
	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Rata – rata lama belajar SD	-	6,15		6,14		6,13		6,12		6,11		6,05		6,05		
	Rata – rata lama belajar SMP	-	3,01		3,05		3,04		3,03		3,02		3,01		3,01		
	Sekolah dengan kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan baik (%)																
	Ruang Kelas	27,00	27,37		28,00		30,00		32,00		33,00		35,00		35,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Perpustakaan	70,00	81,82		83,00		84,00		86,00		87,00		89,00		89,00		
	Laboratorium	61,12	67,12		68,00		69,00		71,00		73,00		75,00		75,00		
	Rata-rata nilai ujian SD/MI	56,06	56,06		56,20		58,40		60,89		61,90		62,29		62,29		
	Rata-rata nilai ujian SMP/MTS	52,07	52,07		54,22		56,07		58,21		60,34		62,45		62,45		
Sasaran 1.2: Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)	-	-		-		500		500		500		500		500		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK (%)	480	480	-	500	723,57	500	1.428,82	500	1.784,58	500	2.211,50	500	3.253,38	2.5	9.401,85	UPT Balai Latihan Kerja
Tujuan 2: Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)																
Sasaran 2.1:	Angka Harapan Hidup	68,76	68,76		68,90		69,10		69,30		69,60		69,80		69,80		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (<i>Program Unggulan #5</i>) (%)	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pembinaan , Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	13,98	10,8	-	10	618.564.000	9,8	1.598.006.600	9,6	1.757.807.260	9,4	1.933.587.986	9,2	2.126.946.785	9,2	7.416.348.631	
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	15,7	15		15		14		13		11		10		10		
	Prevalensi Stunting (%)	2,2	2		2		2		2		2		2		2		
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5) (%)	-	-	-	100,00	18.815.400.000	100,00	64.199.215.250	100,00	70.619.136.775	100,00	77.681.050.453	100,00	85.449.155.498	100,00		
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama	5	5		11		16		26		37		53		53		
	Persentase Peserta JKN	45	45		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Keluarga Sehat	14	15		20		25		30		40		40		40		
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,2	-	3,2	4.050.123.000	3,3	13.949.566.910	3,3	14.965.768.706	3,4	16.064.652.936	3,4	17.253.540.957	3,4	66.283.652.508	Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan Desa Universal Coverage Imunation (UCI)	94,1	94,1	-	100	607.084.200	100	913.859.400	100	959.552.370	100	1.007.529.989	100	1.057.906.488	100	3.938.848.246	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa KLB Penyakit Menular (%)	13	13		0		0		0		0		0		0		
	Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)	41	41		100		100		100		100		100		100		
Tujuan 3: Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks kepuasan masyarakat	65 (kurang baik)	65 (Kurang Baik)		70 (Kurang Baik)		75 (Kurang Baik)		76,5 (Baik)		77,5 (Baik)		80 (Baik)		80 (Baik)		
Sasaran 3.1: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Realisasi Investasi (Rp miliar)	766.614	804.945		845.192		887.452		931.824		978.415		1.027.336		1.027.336		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	2,2	2,20		2,20		1,48		1,38		1,20		1,10		1,10		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengembangan Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Rp miliar)	766.614	804.945	300	845.192	300	887.452	357,5	931.824	393,250	978.415	432,575	1.027.336	475,8325	5.475.164	475,8325	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	200,00	100,00	236,50	100,00	248,33	100,00	260,74	100,00	945,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	961,57	100,00	1.040,23	100,00	1.154,25	100,00	3.156,05	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Peringkat LPPD (skor)	3.055 (sangat tinggi)	3,0574 (sangat tinggi)		3,0600 (sangat tinggi)		3,0750 (sangat tinggi)		3,1000 (sangat tinggi)		3,1250 (sangat tinggi)		3,1750 (sangat tinggi)		3,1750 (sangat tinggi)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	SangatTinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)																
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
	Cakupan Fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	-	-		5		8		11		11		11		11		
	Cakupan pemenuhan IKK (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sasaran 3.2: Meningkatkan pelestarian / pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Organisasi pemuda aktif (%)	100,00	80,00		85,00		93,00		95,00		97,00		99,00		99,00		
	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Pembinaan Pengembangan Pelestarian Adat dan Kebudayaan Daerah	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	701,73	100,00	842,08	100,00	1.010,49	100,00	1.212,59	100,00	3.766,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	1	1		2		2		2		2		2		11		
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1		1		1		1		1		1		1		
	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	-	-		2		2		2		2		2		10		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang persandian	-	-		-		1		1		1		1		4		
Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda (%)	35,00	40,00	-	50,00	-	60,00	1.500,00	70,00	1.575,00	80,00	1.653,75	85,00	1.736,44	85,00	6.465,19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Organisasi pemuda aktif (%)	80,00	80,00		85,00		93,00		95,00		97,00		99,00		99,00		
	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	-	-		2		2		2		2		2		10		
	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-		-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	-	-		-		2		2		2		2		8		
	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	-	60,00	-	70,00	3.423,63	80,00	3.490,51	90,00	3.425,39	100,00	3.352,23	100,00	13.691,76	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	-	-		25,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00		
	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional (%)	-	-		10,00		12,50		14,00		15,00		17,50		17,50		
	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten Tanah Laut (%)	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Kejuaraan cabang olahraga antar desa tingkat kabupaten (Ada/Tidak)	-	-		-		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	83	57		62		68		74		81		89		89		
	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sasaran 3.3: Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	70,00	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	70,00	80,00	-	100,00	-	100,00	300,00	100,00	315,00	100,00	330,75	100,00	347,29	100,00	1.293,04	Dinas Komunikasi dan Informatika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
MISI 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif																	
Tujuan 1: Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah Penghargaan inovasi publik	0	1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		
Sasaran 1.1: Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	0	0		1 Inovasi		2 inovasi	910,39	2 Inovasi	955,90	2 Inovasi	1.003,70	2 Inovasi	1.053,88	2 Inovasi	3.923,87	
Program Pembinaan , Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	n.a	B	-	B	-	B		BB		BB		BB		BB		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	n.a	60 (Baik)		62 (Baik)		65 (Baik)		67 (Baik)		69 (Baik)		71 (Sangat Baik)		71 (Sangat Baik)		
	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	n.a	65 (Kurang Baik)		70 (Kurang Baik)		75 (Kurang Baik)		76,5 (Baik)		77,5 (Baik)		80 (Baik)		80 (Baik)		
Tujuan 2: Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha		5 Unit Usaha		10 Unit Usaha		15 Unit Usaha		20 Unit Usaha		25 Unit Usaha		25 Unit Usaha		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Sasaran 2.1: Meningkatkan Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha		5 Unit Usaha		10 Unit Usaha		15 Unit Usaha		20 Unit Usaha		25 Unit Usaha		25 Unit Usaha		
Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah	Jumlah IKM Unggulan	-	-		-		15	950,00	20	1.150	25	1.200	30	1.300	20		
MISI 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																	
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-		6,00		6,1		6,2		6,3		6,4		6,4		
Sasaran 1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B (60,06)	B (63,61)		B (68,00)		BB (71)		BB (74)		BB (77)		A (81)		A (81)		
	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	-	-	1.219,46	100%	1.074,53	90%	1.500,00	85%	1.800,00	80%	2.187,89	80%	2.500,00		10.281,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan	LPPD (skor)	2.9118 (Tinggi)	2.9846 (sangat tinggi)		3.000 (sangat tinggi)		3.025 (sangat tinggi)		3,05(sangat tinggi)	961,57	3,075(sangat tinggi)	1.040,23	3,1 (sangat tinggi)	1.154,25	3,1 (sangat tinggi)	3.156,05	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	-	WTP		WTP	2.405,92	WTP	2.510,92	WTP	3.197,84	WTP	3.500,00	WTP	11.614,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran 1.2: Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	-	-		11.90		23.81		35.71		47.62		59.92		59.92		
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GG)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,1		1425,94	Level 3,2	1168,64	Level 3,3	1,227,07	Level 3,4	1,288,43	Level 3,5	1,352.85	Level 3,6	1,420,49	Level 3,6	7,883,42	Inspektorat Kabupaten
	Nilai Reformasi Birokrasi	3,4			7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	7,5 (baik)	7,5 (baik)		
	Level kapabilitas APIP	2+ hasil penilaian BPKP			Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3				
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)			75 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		
Sasaran 1.3: Meningkatkan	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	-	-		5		10		15		20		25		25		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
nya pengguna n sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur																	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	80,00	80,00	1.104,30	85,00	1.129,87	90,00	1.139,86	100,00	1.246,99	100,00	1.286,84	100,00	1.354,93	100,00	7.262,79	
MISI 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat																	
Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 1.1: Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik internal dan antar umat beragama (kasus)	0	0	-	0	-	0	300,00	0	600,00	0	753,23	0	906,31	0		
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	10 lembaga	10 lembaga		15 lembaga		20 lembaga		25 lembaga		30 lembaga		40 lembaga		40 lembaga		
Sasaran 1.2: Meningkatkan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0		0		0	150,00	0	160,00	0	170,00	0	180,00	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi	Persentase ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	100	100	-	100	-	100	500,00	100	510,00	100	520,00	100	530,00	100	2.060,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 1.3: Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		11 Kecamatan		
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	573,03	100,00	632,29	100,00	689,75	100,00	716,99	100,00	2.612,06	Kecamatan Pelaihari
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	465,84	100,00	492,62	100,00	522,12	100,00	553,95	100,00	2.034,53	Kecamatan Kurau
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	735,77	100,00	311,65	100,00	341,80	100,00	354,21	100,00	1.743,43	Kecamatan Panyipatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Masyarakat																	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	184,77	100,00	217,78	100,00	257,69	100,00	284,59	100,00	944,83	Kecamatan Kintap
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	298,93	100,00	327,89	100,00	355,00	100,00	384,86	100,00	1.366,69	Kecamatan Jorong
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	379,04	100,00	412,13	100,00	446,10	100,00	477,06	100,00	1.714,33	Kecamatan Takisung
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	381,18	100,00	408,87	100,00	439,02	100,00	462,24	100,00	1.691,32	Kecamatn Bati-Bati



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Masyarakat																	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	491,15	100,00	524,64	100,00	565,31	100,00	603,29	100,00	2.184,38	Kecamatan Tambang Ulang
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	381,64	100,00	416,89	100,00	454,22	100,00	493,73	100,00	1.746,47	Kecamatan Bumi Makmur
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	232,11	100,00	261,36	100,00	297,50	100,00	338,13	100,00	1.129,10	Kecamatan Batu Ampar
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	-	-	100,00	-	100,00	363,30	100,00	385,87	100,00	420,34	100,00	446,79	100,00	1.616,30	Kecamatan Bajuin



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RjMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Masyarakat																	
MISI 5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat																	
Tujuan 1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan (%)	4,60	4,40		4,39		4,38		4,37		4,36		4,35		4,35		Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah
Sasaran 1.1: Meningkatkan kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	4,64	4,80		4,85		4,9		4,95		5,00		5,05		5,05		
	Indeks Gini (skor)	0,259	0,258		0,257		0,256		0,255		0,254		0,253		0,253		
Program Pembinaan , Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	n.a	100,00	-	100,00	-	100,00	778,66	100,00	856,53	100,00	942,18	100,00	1.036,40	100,00	3.613,77	
	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%))	n.a	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	n.a	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sasaran 1.2: Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	160 (tinggi)	160 (tinggi)		150 (tinggi)		135 (tinggi)		130 (tinggi)		125 (tinggi)		120 (tinggi)		120 (tinggi)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,36	68,38	592,75	68,40	247,12	68,42	600,00	68,44	650,00	68,46	682,50	68,50	716,63	68,50	3.489,00	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	n.a	88,00		88,25		88,50		88,75		89,00		89,50		89,50		
Sasaran 1.3: Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,42		3,30		3,00		2,8		2,6		2,5		2,5		
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	-	3,5		4	582,473,050	5	36000000	10	40500000	12	42500000	15	46000000	15	232473050	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Program Perlindungan tenaga kerja dan harmonisasi hubungan industrial	Cakupan sengketa perusahaan – pekerja yang diselesaikan	-	-	-	22,5	166294500	27	17000000	30	17500000	32	18000000	32	18500000	32	876294500	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	9,50	10,00	742,27	12,50	851,15	15,00	1.600,00	20,00	2.150,00	25,00	2.600,00	30,00	3.600,00	30,00	11.543,42	
	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sasaran 1.4: Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160	160 (Tinggi)		150 (Tinggi)		135 (Sedang)		130 (Sedang)		125 (Sedang)		120 (Sedang)		120 (Sedang)		
		(Tinggi)															
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	9,5	10,00		12,50		15,00		20,00		25,00		30,00		50		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi)	160 (Tinggi)	-	150 (Tinggi)	-	135 (Sedang)	608,02	130 (Sedang)	861,61	125 (Sedang)	1.140,70	120 (Sedang)	1.391,27	120 (Sedang)	4.001,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	25,00	25,00		40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		60,00		
	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Desa tangguh bencana (desa)	-	2		4		6		8		10		15		15		
Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	1.47 1,20	100,00	1.72 0,91	100,00	1.883,43	100,00	2.191 ,07	100,00	7.26 6,60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	100	100		100		90		80		70		50		50		
	Jumlah tindak pidana (kasus)	149	140		120		100		100		90		70		70		
Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,00	70,00		70,50		70,75		71,00		72,00		73,00		73,00		
Sasaran 2.1. Meningkatkan Infrastruktur Sosial dan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan # 6) (%)	29,59	34,41		38,00		43,00		64,00		80,00		85,00		85,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Ekonomi yang berkualitas	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	80,00	83,00		84,00		87,00		93,00		97,00		100,00		100,00		
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	60,00	62,00		65,00		70,00		73,00		75,00		80,00		80,00		
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	29.95	34.41	-	38,00	-	43.00	25.000,00	64.00	30.000,00	80.00	35.000,00	85.00	39.392,35	85.00	129.392,35	
	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Keciptakaryaan dan Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	15	20,00		25,00		30,00	28.000,00	35,00	30.000,00	40,00	31.500,00	45,00	33.075,00	45,00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	50	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	55	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	60,00	62,00	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00	60,00	62,00	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Cakupan pembangunan gedung/ bangunan/ fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	80	83,00	-	84,00	-	87,00	21.550,41	93,00	23.226,21	97,00	25.902,52	100,00	30.000,00	100,00	100.679,14	
	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Layanan Angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	100	100,00		100,00		100,00	1.500,00	100,00	1.575,00	100,00	1.653,75	100,00	1.736,44	100,00	6.465,19	Dinas Perhubungan
	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan ketersediaan akses perhubungan menuju Pelabuhan Jorong (%)	-	-		-		15,00		25,00		40,00		50,00		50,00		
Tujuan 3: Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	5,02	5,02		5,02		5,03		5,04		5,05		5,06		5,06		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Sasaran 3.1: Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan # 1)	-	-		100		120		125		130		135		135		
	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,50	3,50		3,50		3,51		3,52		3,53		3,57		3,57		
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7,56	7,56		7,56		7,57		7,58		7,59		7,60		7,60		
	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	250.000	275.000		280.000		285.000		290.000		300.000		350.000		350.000		
Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Persentase pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan # 1)(%)	-	-	-	50,00	-	100,00	233,66	100,00	341,71	100,00	455,17	100,00	477,93	100,00	1.508,47	Bagian Perekonomian Pembangunan
	Persentase koperasi aktif (%)	-	-		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
Program Produksi Tanaman Pangan	Produksi padi (ton)	-	242.073	-	242.073	-	245.055	2.000	248.563	2.100	252.402	2.205	256.544	2.315,25	1.244.637	8.620,25	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan
	Produksi jagung (ton)	-	193.717		193.717		197.520		201.588		205.934		210.573		1.009.332		
	Produksi kedelai (ton)	-	979		979		999		1.021		1.055		1.092		5.146		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi cabai (kuintal)	-	13.261	-	13.261	-	13.699	1.500	14.165	1.575	14.660	1.653,75	15.248	1.736,44	57.772	6.465,19	
	Produksi bawang merah (ton)	-	4.644		4.644		4.797		4.960		5.134		5.319		20.210		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi karet (ton)	-	8.317	-	8.317	-	8.567	1.500	8.817	1.575	9.184	1.653,75	9.517	1.736,44	44.402	6.465,19	
	Produksi kelapa sawit (ton)	-	18.941		18.941		19.373		19.914		20.563		21.266		100.057		
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	165,60	1008	80,00	1008	1.039,86	1070	1.500,00	1162	1.605,00	1262	1.926,00	1360	2.311,20	1360	8.462,06	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	-	43180	20,00	43180	114,96	55325	1.000,00	56708	1.414,68	57708	1.719,25	58708	2.086,91	58708	6.355,79	
Program Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak (ekor)	-	-		800.000.000		840.000.000		850.000.000		860.000.000		870.000.000		870.000.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Produksi daging sapi (kg)	263.356	268.623	186,48	273.996	868,73	279.475	1.305,60	285.065	2.122,62	290.766	2.228,75	296.582	2.340,19	296.582	9.052,37	
	Produksi daging kerbau (kg)	50.204	50.706		51.213		51.725		52.242		52.765		53.293		53.293		
	Produksi daging kambing (kg)	12.608	12.734		12.861		12.99		13.12		13.251		13.384		13.384		
	Produksi daging domba (kg)	408	412		416		420		425		429		433		433		
	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	1.224.846	1.255.467		1.286.854		1.319.025		1.352.001		1.385.801		1.420.446		1.420.446		
	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	6.859.018	7.133.379		7.418.714		7.715.462		8.024.081		8.345.044		8.678.846		8.678.846		
	Produksi daging ayam ras buras (kg)	500.787	513.307		526.139		539.293		552.775		566.595		580.759		580.759		
	Produksi daging itik (kg)	70.958	72.377		73.825		75.301		76.807		78.343		79.91		79.91		
	Produksi telur ayam ras (kg)	70.602.576	72.367.640		74.176.831		76.031.252		77.932.034		79.880.334		81.877.343		81.877.343		
	Produksi telur ayam buras (kg)	2.014.969	2.065.343		2.116.977		2.169.901		2.224.149		2.279.752		2.336.746		2.336.746		
	Produksi telur itik (kg)	1.318.854	1.345.231		1.372.136		1.399.578		1.427.570		1.456.121		1.485.244		1.485.244		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	250.000	275.000	2.088	280.000	4.525	285.000	2.445	290.000	2.500	300.000	2.500	350.000	2.500	350.000	13.489,89	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kualitas, Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi Aktif						95	425	100	500	105	550	110	600	110	2075	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Perdagangan
Sasaran 3.2: Meningkatkan ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Ketersediaan dan distribusi pangan	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	-	131.677		131.677		132.977	271,77	134.377	285,36	134.377	299,63	135.977	314,61	135.977	1.171,38	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
Tujuan 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
Sasaran 4.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (skor)	90	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
	Indeks Kualitas Air (skor)	50	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	60	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60	65		70		78		87		92		98		98		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (skor)	90	85,00	2.654,60	85,00	3.137,27	85,00	3.137,27	85,00	3.137,27	85,00	3.137,27	85,00	3.137,27	85,00	18.340,96	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (skor)	50	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Tata Lingkungan	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	100	100,00	-	100,00	-	100,00	374,10	100,00	564,67	100,00	664,76	100,00	874,87	100,00	2.478,40	
Program Tata Kota dan Kebersihan	Luasan RTH publik kota (Ha)	108,26	108,26	-	108,26	-	110,5	20.000,00	110,5	22.059,76	113,75	23.795,44	113,75	24.603,24	113,75	90.458,45	
	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	100	10,00		20,00		25,00		40,00		45,00		50,00		50,00		
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	-	100,00	-	100,00	-	100,00	1.083,89	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	3.333,89	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	-	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	-	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	-	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
Tujuan 5: Peningkatan Upaya Membina Desa dan	Indeks Desa Membangun (skor)	0,690	0,700 (berkembang)		0,715 (Maju)		0,730 (Maju)		0,750 (Maju)		0,800 (Maju)		0,815 (Mandiri)		0,815 (Mandiri)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
Menata Kota																	
		(berkembang)															
Sasaran 5.1. Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan Kinerja Bina Pemerintahan Desa (Program Unggulan 2) (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	-	6	259,172	26	740,250	26	960,000	26	960,000	26	960,000	20	738,460	130		
	Jumlah desa dibina berciri khas	0	0		5		5		5		5		5		25		
Program Pembinaan, Pendataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (skor)	-	0,700 (50 Desa berkembang)	499,021	0,715 (15 desa Maju)	581,030	0,730 (15 Desa Maju)	3.683,60	0,750 (15 Desa Maju)	3.897,92	0,800 (15 desa Maju)	4.106,75	0,815 (15 desa Mandiri)	4.305,09	0,815 (5 Desa Mandiri)	15,993,37	
	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya (desa)	-	9	46.346	2	37,597	5	289,520	5	301,840	5	314,160	5	318,828	22	400,000	
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	-													130		
	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	-	-	287,997	5	350,000	5	350,000	5	350,000	5	350,000	6	350,000	26	400,000	
	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan BUMDES (desa)	-	-		-		2	250,000	2	100,000	2	100,000	2		8	300,000	
	Jumlah desa yang memiliki BUMDES yang bergerak di industri kreatif (desa)	-	-		-		1		1		1		1		4		
	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	-	100,00	23,000	100,00	-	100,00	300,000	100,00	300,000	100,00	300,000	100,00	150,000	100,00		
	Persentase LPM berprestasi (%)	-	-		2,00		5,00		7,00		10,00		15,00		15,00		
	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	-	100	595,050	100,00	487,655	100,00	600,000	100,00	600,000	100,00	600,000	100,00	600,000	100,00		
	Persentase PKK aktif (%)	-	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	-	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00		100,00		
Program Pembinaan , Pemberdayaan, Tata Kelola Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan																	
	Cakupan kinerja pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa (%)	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan kinerja pembinaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan kinerja evaluasi tingkat perkembangan desa (%)	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan kinerja pembinaan penataan dan administrasi pemerintahan desa (%)	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sasaran 5.2: Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15,00	15,00		12,00		10,00		7,00		3,00		1,00		1,00		
	Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)	-	10		15		20										
Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	-	-		-		15,00	1.500,	20,00	2.000	25,00	2.500	40,00	4.000	40,00	10.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	-	-		-		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15,00	15,00		12,00		10,00	1.000,	7,00	700	3,00	300	1,00	100	1,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	
	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	300	100,00	300	100,00	300	100,00	300	100,00	1.200	
Program peningkatan perdagangan, pelaksanaan & pengawasan kementerian	Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)	10	15		20		35		50		60		80		80		

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perhitungan proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 seperti diuraikan pada Bab III didasarkan pada kondisi pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya. Mendasarkan pada perhitungan proyeksi pendapatan, total pendapatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, total pendapatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 1,31 triliun, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1,45 triliun pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,52 triliun. Selanjutnya hingga tahun 2023 sebagai akhir periode RPJMD, pendapatan daerah diasumsikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi sebesar Rp 1,73 triliun. Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah terbesar Kabupaten Tanah Laut berasal dari pos dana perimbangan terutama DAU. Pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan terbesar berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, pada pos PAD, sumbangan terbesar berasal dari pos lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan masih rendah, sehingga dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk peningkatan ruang fiskal ke depan, perlu adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD baik dari pajak maupun retribusi daerah seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

Beberapa kegiatan penting dan Strategis Dalam RPJMD 2018-2023 :

1. Pembangunan Kantor Gedung terpadu pelayanan masyarakat dan Koordinatif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan Kantor ini direncanakan akan mengambil tempat di Stadion Pertasi Kecana, dan untuk stadion pertasi kecana yang ada saat ini akan dipindahkan ke area perkemahan di kecamatan bajuin. Pembangunan ini dilaksanakan agar :

- Kantor-kantor Pelayanan kepada masyarakat berada dalam satu area perkantoran sehingga akan memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
 - Badan-badan yang bersifat koordinatif juga disatukan agar proses koordinasi dan sinergi berjalan lebih optimal, seperti Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat
 - Kantor Bupati yang ada saat ini sudah berusia kurang lebih 30 Tahun, sehingga memerlukan pembaruan agar lebih baik dan refresentatif. termasuk juga kantor sekretariat daerah.
 - Kondisi kantor yang refresentatif dan memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
 - Kegiatan ini diharapkan juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
2. Adapun untuk pendanaan terhadap kegiatan tersebut di atas akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
3. Dalam pelaksanaan Pencapaian sasaran RPJMD, terhadap adanya usulan prioritas hasil musrenbang kecamatan dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang berkaitan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD, dapat diakomodir sesuai dengan kemampaun keuangan daerah dan diupayakan memperoleh pendanaan dari sumber lain, seperti DAK, APBD Provinsi, APBN, dan Sumber Dana Lainnya, Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada sisi proyeksi belanja, besaran belanja daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1,44 triliun dan meningkat menjadi Rp 1,7 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020, besaran belanja daerah diproyeksikan menaik menjadi Rp 1,72 triliun. Hingga tahun 2023, besaran belanja akan terus meningkat menjadi sebesar Rp 1,99 triliun. Pada tahun 2018, besaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 792,71 miliar dan selanjutnya terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar Rp 1,03 triliyun pada tahun 2023. Pada pos belanja tidak langsung, komponen terbesar digunakan untuk belanja pegawai, diikuti belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan partai politik, dan belanja hibah. Untuk pos belanja langsung, besaran belanjanya mengikuti pola belanja daerah yang diproyeksikan menaik pada tahun 2020. Besaran belanja

langsung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 646,7 miliar dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 959,58 miliar. Komponen belanja terbesar pada pos belanja langsung selama periode 2018-2023 adalah untuk belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

Setelah melakukan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan, diketahui bahwa kapasitas riil untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, kapasitas riil kemampuan keuangan adalah sebesar Rp 646,69 miliar, kemudian bertambah menjadi Rp 777,77 miliar pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 bertambah kembali menjadi sebesar Rp 799,77 miliar. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 959,58 miliar. Dari analisis kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut, selanjutnya dituangkan dalam belanja langsung untuk pendanaan masing-masing urusan baik wajib, pilihan, maupun fungsi penunjang yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		447.267,46	335.225,05	442.417,33	471.718,54	516.754,24	558.730,33
1	Pendidikan	42.934,14	47.308,79	70.231,99	68.067,79	75.690,79	83.641,35
2	Kesehatan	210.767,22	175.229,92	209.001,35	227.470,41	244.747,95	271.473,40
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177.515,72	67.071,25	109.392,41	116.367,60	130.179,53	130.366,41
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	31.381,38	35.358,81	38.916,12	42.588,00	46.618,87
7	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.602,39	8.441,14	10.054,26	11.328,83	12.530,52	13.889,10
9	Sosial	5.447,99	5.792,57	8.378,51	9.567,79	11.017,45	12.741,19
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		44.829,68	66.360,12	49.334,91	54.645,44	56.499,42	64.278,04
1	Tenaga Kerja	0,00	2.849,80	4.759,80	5.272,87	6.410,68	7.760,24
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.434,14	1.140,04	1.901,81	1.997,84	2.266,98	2.413,33
3	Pangan	0,00	710,15	2.382,00	2.526,00	2.739,00	2.995,00
4	Pertanahan	1.199,65	216,78	749,29	861,68	990,94	1.139,58
5	Lingkungan Hidup	0,00	825,95	3.021,27	3.733,40	4.106,73	4.517,95



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.472,00	28.697,70	2.500,13	2.778,95	2.949,55	3.025,06
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.275,34	8.189,11	8.914,20	11.316,02	9.764,18	13.740,99
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.121,11	572,80	924,11	998,60	911,93	851,08
9	Perhubungan	2.121,76	6.195,27	6.506,90	6.832,25	7.173,86	7.532,55
10	Komunikasi dan Informatika	0,00	2.622,71	2.665,34	2.836,65	3.024,03	3.232,67
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0,00	2.529,21	2.328,00	2.391,90	2.511,49	2.637,06
12	Penanaman Modal	949,07	1.717,79	1.803,69	1.893,87	1.988,57	2.087,99
13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	7.694,97	7.831,39	7.988,02	8.147,78	8.300,73
14	Statistik	0,00	28,05	32,50	35,75	39,33	43,26
15	Persandian	0,00	0,00	40,00	43,20	47,52	49,90
16	Kebudayaan	800,00	584,77	1.100,00	1.170,00	1.360,00	1.780,00
17	Perpustakaan	1.422,06	1.577,63	1.656,71	1.739,79	1.826,76	1.918,56
18	Kearsipan	34,55	207,39	217,77	228,65	240,09	252,09
Urusan Pilihan		10.838,94	16.965,39	28.624,75	30.325,63	32.679,04	34.936,59
1	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	1.467,00	1.910,00	2.410,00	2.869,00
2	Pariwisata	3.775,61	6.679,88	5.082,76	5.330,40	5.590,93	5.864,96
3	Pertanian	7.049,83	6.350,85	19.097,60	19.701,07	20.685,78	21.720,07
4	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perdagangan	13,50	0,00	1.247,39	1.456,66	1.602,33	1.762,56
7	Perindustrian	0,00	3.934,66	1.730,00	1.927,50	2.390,00	2.720,00
8	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		96.363,98	130.425,84	139.337,36	144.850,28	151.854,67	161.559,57
1	Penunjang Pemerintahan Umum	81.094,62	102.235,77	110.930,51	114.208,91	118.698,72	125.647,88
2	Penunjang Pemerintahan Perencanaan	0,00	3.878,13	4.931,34	5.436,97	6.003,18	6.645,98
3	Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	0,00	505,12	1.125,00	1.225,00	1.325,00	1.415,00
4	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	4.960,20	9.414,56	5.842,12	6.134,28	6.441,04	6.763,14
5	Penunjang Pemerintahan Keuangan	7.199,70	10.859,12	12.058,15	13.265,97	14.590,37	16.049,40
6	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	3.109,46	3.533,14	4.450,24	4.579,15	4.796,36	5.038,17
TOTAL		599,300.06	548,976.40	659,714.35	701,539.89	757,787.37	819,504.53



Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		447.267,46	335.225,05	442.417,33	471.718,54	516.754,24	558.730,33
1	Pendidikan	42.934,14	47.308,79	70.231,99	68.067,79	75.690,79	83.641,35
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.197,74	47.308,79	70.231,99	68.067,79	75.690,79	83.641,35
	UPTD Dikdas Kecamatan Takisung	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Tambang Ulang	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Bajuin	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Bati-Bati	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Batu Ampar	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Bumi Makmur	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Kintap	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Pelaihari	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Jorong	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Kurau	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD Dikdas Kecamatan Panyipatan	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPTD SKB Pelaihari	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kesehatan	210.767,22	175.229,92	209.001,35	227.470,41	244.747,95	271.473,40
	Dinas Kesehatan	26.559,42	59.613,04	209.001,35	227.470,41	244.747,95	271.473,40
	Instalasi Farmasi	229,04	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD H. Boejasin	171.785,87	95.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Balai Laboratorium Kesehatan	166,01	300,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Panyipatan	578,73	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Batakan	497,70	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Takisung	718,29	1.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Bati Bati	1.114,55	1.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Padang Luas	392,44	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Kurau	549,61	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Kait Kait	297,09	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Tambang Ulang	772,73	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Pelaihari	1.687,03	2.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Sungai Riam	173,43	333,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Tirta Jaya	372,03	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Tanjung Habulu	256,33	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Jorong	522,69	885,32	0,00	0,00	0,00	0,00



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	UPT Puskesmas Tajau Pecah	490,36	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Asam Asam	723,36	1.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Kintap	1.624,12	2.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Sungai Cuka	384,53	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Angsau	336,84	1.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPT Puskesmas Bumi Makmur	535,02	560,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD Kintap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177.515,72	67.071,25	109.392,41	116.367,60	130.179,53	130.366,41
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	177.515,72	67.071,25	109.392,41	116.367,60	130.179,53	130.366,41
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	31.381,38	35.358,81	38.916,12	42.588,00	46.618,87
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	31.381,38	35.358,81	38.916,12	42.588,00	46.618,87
7	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.602,39	8.441,14	10.054,26	11.328,83	12.530,52	13.889,10
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.265,94	1.889,55	3.044,56	3.829,33	4.530,52	5.302,10
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.336,45	6.551,59	7.009,70	7.499,50	8.000,00	8.587,00
9	Sosial	5.447,99	5.792,57	8.378,51	9.567,79	11.017,45	12.741,19
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.545,43	2.381,46	2.563,39	2.819,73	3.101,70	3.411,88
	Dinas Sosial	2.902,56	3.411,11	5.815,12	6.748,06	7.915,75	9.329,31
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	44.829,68	66.360,12	49.334,91	54.645,44	56.499,42	64.278,04
1	Tenaga Kerja	0,00	2.849,80	4.759,80	5.272,87	6.410,68	7.760,24
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	2.849,80	3.866,00	4.274,07	5.015,68	5.575,24
	UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	893,80	998,80	1.395,00	2.185,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1.434,14	1.140,04	1.901,81	1.997,84	2.266,98	2.413,33
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.434,14	1.140,04	1.901,81	1.997,84	2.266,98	2.413,33
3	Pangan	0,00	710,15	2.382,00	2.526,00	2.739,00	2.995,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	710,15	2.382,00	2.526,00	2.739,00	2.995,00
4	Pertanahan	1.199,65	216,78	749,29	861,68	990,94	1.139,58



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	1.199,65	216,78	749,29	861,68	990,94	1.139,58
5	Lingkungan Hidup	0,00	825,95	3.021,27	3.733,40	4.106,73	4.517,95
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	825,95	3.021,27	3.733,40	4.106,73	4.517,95
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.472,00	28.697,70	2.500,13	2.778,95	2.949,55	3.025,06
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.472,00	28.697,70	2.500,13	2.778,95	2.949,55	3.025,06
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.275,34	8.189,11	8.914,20	11.316,02	9.764,18	13.740,99
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.275,34	8.189,11	8.914,20	11.316,02	9.764,18	13.740,99
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.121,11	572,80	924,11	998,60	911,93	851,08
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.121,11	572,80	924,11	998,60	911,93	851,08
9	Perhubungan	2.121,76	6.195,27	6.506,90	6.832,25	7.173,86	7.532,55
	Dinas Perhubungan	2.121,76	6.195,27	6.506,90	6.832,25	7.173,86	7.532,55
10	Komunikasi dan Informatika	0,00	2.622,71	2.665,34	2.836,65	3.024,03	3.232,67
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.622,71	2.665,34	2.836,65	3.024,03	3.232,67
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0,00	2.529,21	2.328,00	2.391,90	2.511,49	2.637,06
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	0,00	2.529,21	2.328,00	2.391,90	2.511,49	2.637,06
12	Penanaman Modal	949,07	1.717,79	1.803,69	1.893,87	1.988,57	2.087,99
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	949,07	1.717,79	1.803,69	1.893,87	1.988,57	2.087,99
13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	7.694,97	7.831,39	7.988,02	8.147,78	8.300,73
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	7.694,97	7.831,39	7.988,02	8.147,78	8.300,73
14	Statistik	0,00	28,05	32,50	35,75	39,33	43,26
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	28,05	32,50	35,75	39,33	43,26
15	Persandian	0,00	0,00	40,00	43,20	47,52	49,90
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	40,00	43,20	47,52	49,90
16	Kebudayaan	800,00	584,77	1.100,00	1.170,00	1.360,00	1.780,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800,00	584,77	1.100,00	1.170,00	1.360,00	1.780,00
17	Perpustakaan	1.422,06	1.577,63	1.656,71	1.739,79	1.826,76	1.918,56
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.422,06	1.577,63	1.656,71	1.739,79	1.826,76	1.918,56
18	Kearsipan	34,55	207,39	217,77	228,65	240,09	252,09



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34,55	207,39	217,77	228,65	240,09	252,09
	Urusan Pilihan	10.838,94	16.965,39	28.624,75	30.325,63	32.679,04	34.936,59
1	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	1.467,00	1.910,00	2.410,00	2.869,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	1.467,00	1.910,00	2.410,00	2.869,00
2	Pariwisata	3.775,61	6.679,88	5.082,76	5.330,40	5.590,93	5.864,96
	Dinas Pariwisata	3.775,61	6.679,88	5.082,76	5.330,40	5.590,93	5.864,96
3	Pertanian	7.049,83	6.350,85	19.097,60	19.701,07	20.685,78	21.720,07
	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	5.207,79	2.968,46	15.003,90	15.002,37	15.752,49	16.540,12
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.842,04	3.382,39	4.093,70	4.698,70	4.933,29	5.179,95
4	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perdagangan	13,50	0,00	1.247,39	1.456,66	1.602,33	1.762,56
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	13,50	0,00	1.247,39	1.456,66	1.602,33	1.762,56
7	Perindustrian	0,00	3.934,66	1.730,00	1.927,50	2.390,00	2.720,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	3.934,66	1.730,00	1.927,50	2.390,00	2.720,00
8	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	96.363,98	130.425,84	139.337,36	144.850,28	151.854,67	161.559,57
1	Penunjang Pemerintahan Umum	81.094,62	102.235,77	110.930,51	114.208,91	118.698,72	125.647,88
	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1.179,69	953,63	885,00	993,00	1.093,00	1.226,00
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	350,00	734,62	844,84	929,32	1.022,25	1.124,48
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	249,14	545,18	910,39	955,90	1.003,70	1.053,88
	Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah	681,84	927,09	778,66	856,53	942,18	1.036,40
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	618,75	783,72	895,90	880,00	880,00	880,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	17.120,08	20.846,44	23.976,22	24.695,51	25.436,37	26.199,47
	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	2.819,10	2.966,55	3.330,53	3.663,58	4.029,93	4.432,92
	Bagian Umum Sekretariat Daerah	11.479,28	15.632,08	15.292,82	15.015,97	14.837,13	15.857,78
	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah	8.245,90	8.001,91	9.204,88	9.665,13	9.955,08	10.253,73
	Sekretariat DPRD	32.002,51	36.731,99	37.863,29	39.756,16	41.743,67	43.832,98
	Kecamatan Batu Ampar	523,54	884,66	930,09	976,59	1.025,42	1.076,69
	Kecamatan Pelaihari	646,56	1.294,24	1.485,10	1.559,36	1.637,32	1.719,19
	Kecamatan Kurau	1.075,00	1.105,67	947,50	994,87	1.044,62	1.096,85
	Kecamatan Panyipatan	154,98	1.942,35	1.969,12	994,87	1.044,62	1.096,85



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RP (Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kecamatan Takisung	623,01	942,17	1.013,93	1.067,04	1.118,86	2.038,07
	Kecamatan Tambang Ulang	603,51	942,81	1.147,10	1.187,70	1.248,14	1.534,55
	Kecamatan Kintap	744,36	1.008,60	930,00	976,00	1.025,00	1.066,00
	Kecamatan Jorong	595,46	870,72	914,27	959,24	1.007,30	1.057,55
	Kecamatan Bati-Bati	637,25	971,41	1.020,64	1.071,67	1.125,26	1.181,51
	Kecamatan Bumi Makmur	682,66	1.039,74	1.092,42	1.147,04	1.204,40	1.264,61
	Kecamatan Bajuin	0,00	897,20	952,79	1.000,42	1.050,46	1.002,97
	KELURAHAN PELAIHARI	62,00	676,99	871,72	940,92	1.032,28	1.131,62
	KELURAHAN KARANG TARUNA	0,00	384,00	956,72	1.025,64	1.100,20	1.180,76
	KELURAHAN SARANG HALANG	0,00	384,00	933,62	1.001,38	1.074,72	1.154,01
	KELURAHAN ANGSAU	0,00	384,00	907,40	954,60	1.006,10	1.062,21
	KELURAHAN PABAHAHANAN	0,00	384,00	875,56	940,47	1.010,71	1.086,80
2	Penunjang Pemerintahan Perencanaan	0,00	3.878,13	4.931,34	5.436,97	6.003,18	6.645,98
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.878,13	4.931,34	5.436,97	6.003,18	6.645,98
3	Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	0,00	505,12	1.125,00	1.225,00	1.325,00	1.415,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	505,12	1.125,00	1.225,00	1.325,00	1.415,00
4	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	4.960,20	9.414,56	5.842,12	6.134,28	6.441,04	6.763,14
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.960,20	9.414,56	5.842,12	6.134,28	6.441,04	6.763,14
5	Penunjang Pemerintahan Keuangan	7.199,70	10.859,12	12.058,15	13.265,97	14.590,37	16.049,40
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.217,00	5.970,59	7.234,89	7.958,38	8.754,22	9.629,64
	Badan Pendapatan Daerah	1.982,70	4.888,53	4.823,26	5.307,59	5.836,15	6.419,76
6	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	3.109,46	3.533,14	4.450,24	4.579,15	4.796,36	5.038,17
	Inspektorat	3.109,46	3.533,14	4.450,24	4.579,15	4.796,36	5.038,17
TOTAL		599,300.06	548,976.40	659,714.35	701,539.89	757,787.37	819,504.53

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikasi rencana program

dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama lima tahun. Untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi program-program prioritas yang merespon isu-isu strategis yang mengemuka. Rencana program prioritas selanjutnya disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, pilihan, dan fungsi penunjang.

Tabel 7.3 Penyederhanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	NAMA SKPD	PROGRAM	
			Sebelum	Sesudah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	8
		UPTD Dikdas Kecamatan Takisung	1	0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	NAMA SKPD	PROGRAM	
			Sebelum	Sesudah
		UPTD Dikdas Kecamatan Tambang Ulang	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Bajuin	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Batu Ampar	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Bati-Bati	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Bumi Makmur	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Jorong	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Pelaihari	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Kintap	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Kurau	1	0
		UPTD Dikdas Kecamatan Panyipatan	1	0
		UPTD SKB Pelaihari	5	0
		Dinas Kesehatan	26	15
		Instalasi Farmasi	3	0
		RSUD H. Boejasin	13	0
		Balai Laboratorium Kesehatan	4	0
		UPT Puskesmas Panyipatan	5	0
		UPT Puskesmas Batakan	5	0
		UPT Puskesmas Takisung	5	0
		UPT Puskesmas Bati Bati	5	0
		UPT Puskesmas Kurau	5	0
		UPT Puskesmas Padang Luas	5	0
		UPT Puskesmas Kait Kait	5	0
2	Kesehatan	UPT Puskesmas Tambang Ulang	5	0
		UPT Puskesmas Pelaihari	4	0
		UPT Puskesmas Sungai Riam	5	0
		UPT Puskesmas Tirta Jaya	5	0
		UPT Puskesmas Tanjung Habulu	5	0
		UPT Puskesmas Jorong	5	0
		UPT Puskesmas Tajau Pecah	5	0
		UPT Puskesmas Asam Asam	5	0
		UPT Puskesmas Kintap	4	0
		UPT Puskesmas Sungai Cuka	5	0
		UPT Puskesmas Angsau	5	0
		UPT Puskesmas Bumi Makmur	5	0
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	RSUD Kintap	0	0
			0	0
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	21	10
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0	0
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	9	6
7	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	8
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	4
9	Sosial	Dinas Sosial	11	11



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	NAMA SKPD	PROGRAM	
			Sebelum	Sesudah
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	6
		UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0	2
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	6
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	6
4	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	4	1
5	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3	4
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	7
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	8
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	2
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	9	9
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	6
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	4	5
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	8
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12	6
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
15	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1
16	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1
17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	1
Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	3
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	7	7
3	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	6	9
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	8
4	Kehutanan		0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral		0	0
6	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	1	3
7	Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5	4
8	Transmigrasi		0	0
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
1	Penunjang Pemerintahan Umum	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	7	2
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2	1
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2	1
		Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah	6	1
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	3	1
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	5	1



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	NAMA SKPD	PROGRAM	
			Sebelum	Sesudah
		Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	3	2
		Bagian Umum Sekretariat Daerah	3	4
		Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	3
		Sekretariat DPRD	12	5
		Kecamatan Batu Ampar	11	9
		Kecamatan Pelaihari	14	9
		Kecamatan Kurau	12	9
		Kecamatan Panyipatan	18	9
		Kecamatan Takisung	11	9
		Kecamatan Tambang Ulang	12	9
		Kecamatan Kintap	14	9
		Kecamatan Jorong	11	9
		Kecamatan Bati-Bati	12	9
		Kecamatan Bumi Makmur	18	9
		Kecamatan Bajuin	7	9
		KELURAHAN PELAIHARI	8	7
		KELURAHAN KARANG TARUNA	1	7
		KELURAHAN SARANG HALANG	1	7
		KELURAHAN ANGSAU	1	7
		KELURAHAN PABAHAHANAN	1	7
2	Penunjang Pemerintahan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	8
3	Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1
4	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	6
5	Penunjang Pemerintahan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	8
		Badan Pendapatan Daerah	7	7
6	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	Inspektorat	6	5

Dari berbagai program prioritas yang telah disebutkan sesuai dengan urusan baik wajib maupun pilihan, hal tersebut sesungguhnya mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada tahun 2018, proyeksi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih terpilih secara umum belum dilaksanakan mengingat pendanaan pembangunan pada tahun tersebut mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada pemerintahan periode sebelumnya (masa transisi). Mulai tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melaksanakan program prioritas baru hasil dari penyederhanaan program di masing-masing perangkat daerah dimana pada tahun 2018 dan 2019, jumlah seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah sebanyak 687 program. Selama periode 2020-2023, jumlah program yang akan dilaksanakan oleh



seluruh perangkat daerah berjumlah 470 program. Penyederhanaan program tersebut dilakukan dalam rangka memudahkan penilaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah dan efektivitas belanja (Tabel 7.3). Secara umum, fokus pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2023 ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembinaan keagamaan, pengentasan kemiskinan, pertanian, pariwisata, kepemudaan, peningkatan wawasan kebangsaan, pemeliharaan lingkungan dan penataan kota, infrastruktur, perumahan rakyat, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					447.267,46		335.225,05		442.417,33		471.718,54		516.754,24		558.730,33		2.772.112,95	
Pendidikan					42.934,14		47.308,79		70.231,99		68.067,79		75.690,79		83.641,35		387.874,85	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dokumen evaluasi Dana Dekonsentasi dan Dana Tugas Pembantuan (%)	100	100	0	100	0	100	297	100	449	100	510	100	510	100	300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Desa Sahabat Keluarga	-	-	0	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	180	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Baik	18195,57	Baik	19486,25	Baik	20689,86	Baik	20964,73	Baik	24099,21	Baik	26408,63	Baik	26408,63	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Baik	393.54	Baik	359.08	Baik	1350	Baik	1241.8	Baik	1072.8	Baik	1857.36	100	1857.36	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	-	-	-	707.4	-	4045.95	-	8343.8	-	7794.56	-	8410	-	8892.8	-	8892.8	
		PAUD minimal terakreditasi B (%)	39.88	51.34	0	52	0	57	0	60	0	64	0	70	0	70	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	31	31.11	0	35	0	37	0	39	0	40	0	41	0	41	0	
		LKP yang Terakreditasi minimal B (%)	4.54	15.38	0	17	0	22	0	30	0	39	0	47	0	47	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	PKBM yang terakreditasi minimal B (%)	0	36.36	0	39	0	47	0	52	0	60	0	62	0	62	0		
	Satu desa satu PAUD (%)	62.22	62.22	0	60	0	63	0	65	0	66	0	68	0	68	0		
	PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (%)	77	77	0	79	0	80	0	84	0	88	0	90	0	90	0		
	PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional (%)	0	0	0	20	0	30	0	40	0	50	0	60	0	60	0		
	Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD (%)	59.37	59.37	95.25	60	1533.61	63	2200	67	2200	70	2330	71	3930	71	3930		
	Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD (%)	77.57	77.57	0	77.58	0	80.12	0	83.22	0	85	0	87	0	87	0		
	Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP (%)	84.43	84.43	0	83	0	85	0	87	0	89	0	92	0	92	0		
	guru yang memiliki sertifikat pendidik PAUD (%)	22.88	22.88	0	25	0	27	0	30	0	33	0	35	0	35	0		
	guru yang memiliki sertifikat pendidik SD (%)	49.54	49.54	0	50	0	52	0	54	0	56	0	57	0	57	0		
	guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP (%)	44.68	44.68	0	45	0	46	0	48	0	49	0	50	0	50	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Peningkatan tenaga kebudayaan & pelaku seni (%)	0	45	0	50	0	55	0	57	0	60	0	62	0	62	0	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Baik	289.5	Baik	177.85	Baik	375	Baik	425	Baik	455	Baik	465	Baik	465	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	BB	388.86	BB	145.2	BB	450	BB	600	BB	750	BB	900	BB	900	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	106.97	103.38	22127.62	100	21560.85	100	36526.33	100	34392.7	100	38063.78	100	40677.56	100	40677.56	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/(%)	74.81	76.3	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	81	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	92.68	88.28	0	88.52	0	88.56	0	88.58	0	88.67	0	88.9	0	88.9	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	56.27	62.7	0	63	0	64	0	65	0	66	0	67	0	67	0	
		Sekolah yang Terakreditasi A dan B (%)		44.96	0	45	0	50	0	55	0	56	0	59	0	59	0	
		-	44.96	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Angka Putus Sekolah SD (%)	0.8	0.08	0	0.6	0	0.45	0	0.3	0	0.25	0	0.2	0	0.2	0	
		Angka Putus Sekolah SMP (%)	0.0001	0.18	0	0.15	0	0.1	0	0.8	0	0.07	0	0.05	0	0.05	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	UPTD Dikdas Kecamatan Tambang Ulang	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Rata – rata lama belajar SD	6.16	6.15	0	6.14	0	6.13	0	6.12	0	6.11	0	6.05	0	6.05	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Rata – rata lama belajar SMP	3.03	3.01	0	3.05	0	3.04	0	3.03	0	3.02	0	3.01	0	3.01	0		
		Sekolah dengan kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan baik (%)		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Ruang Kelas	27	27.37	0	28	0	30	0	32	0	33	0	35	0	35	0		
		Perpustakaan	70	81.82	0	83	0	84	0	86	0	87	0	89	0	89	0		
		Laboratorium	61.12	67.12	0	68	0	69	0	71	0	73	0	75	0	75	0		
		Rata-rata nilai ujian SD/MI	56.06	56.06	0	58.4	0	60.89	0	61.89	0	61.9	0	62.29	0	62.29	0		
		Rata-rata nilai ujian SMP/Mts	52.07	52.07	0	54.22	0	56.07	0	58.21	0	60.34	0	62.45	0	62.45	0		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4		UPTD Dikdas Kecamatan Tambang Ulang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4		UPTD Dikdas Kecamatan Takisung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Bajuin
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	26.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	26.4	UPTD Dikdas Kecamatan Batu Ampar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Bati-Bati
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Bumi Makmur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Jorong
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Kintap
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas Kecamatan Kurau
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	31.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	31.4	UPTD Dikdas Kecamatan Pelaihari
	Program Pelayanan	-	-	-	25.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.4	UPTD Dikdas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Administrasi Perkantoran																	Kecamatan Panyipatan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	195.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	195.8	UPTD SKB Pelaihari
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	-	55	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	55	
	Program Pendidikan Menengah	-	-	-	90	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	90	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	14.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14.2	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	-	95	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	95	
Kesehatan					210.76 7,22		175.22 9,92		209.00 1,35		227.47 0,41		244.74 7,95		271.47 3,40		1.338.69 0,25	
	Program Informasi Kesehatan Medik	Indeks kepuasan pelanggan pada rumah sakit	82	82	0	85	0	85	906.58	85	1042.4 6	85	1131.8 3	-	1229.3 8	85	4364.25	Dinas Kesehatan
	Program Jamkesmas	-	-	-	1485.8	-	1000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan pelanggan pada rumah sakit	82	82	48.64	85	41.93	85	18.9	85	21.85	85	20.84	85	21.88	85	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	172.03	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat yang memenuhi standar mutu,khasiat dan keamanan	100	100	450.56	100	3144.42	100	121.07	100	133.17	100	146.49	100	161.14	100	3706.29	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	6296.17	100	12898.55	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	0	-	0	3.3	41188.87	3.3	43281.2	3.4	45483.9	3.4	54021.73	-	0		
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Persentase yang terakreditasi utama	5	5	0	11	0	16	81514.11	26	89775.52	37	98293.07	53	108122.38	53	108122.38	
		Persentase penanganan krisis kesehatan dan public service center (psc)119 (termasuk pelayanan on call		0	0	20	0	30	0	50	0	55	0	-	0	60	0	
		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	60	0	-	0	
		Persentase peserta JKN	45	45	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase Keluarga sehat		15	0	20	0	-25	0	30	0	40	0	-	0	50	0	
		-	14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	50	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	-	62.19	-	81	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, (Kefarmasian dan Alat Kesehatan,	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.2	3.2	0	3.3	0	3.3	13949.57	3.3	14965.77	3.4	16064.65	3.4	17253.54	3.4	23310.91	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)																	
	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		15	0	15	0	14	1598.01	13	1757.81	11	1933.59	10	2126.95	10	7416.35	
		AKB per 1000 Kelahiran hidup	13.98	10	0	10	0	9.8	0	9.6	0	9.4	0	-	0	9.2	0	
		Prevalensi stunting	25	25	0	24	0	23	0	22	0	21	0	-	0	20	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	20	0	-	0	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit	82	-	0	-	0	85	1708.75	85	1789.63	85	2067.59	-	2274.35	85	2274.35	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks kepuasan masyarakat	3.2	3.2	0	3.3	0	3.3	5401	3.3	5941.1	3.4	6535.21	3.4	7503.73	3.4	25381.04	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-	-	-	519.43	-	458.27	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	141.58	-	127.27	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Cakupan desa UCI (Universal Chaild Imunisation)	94.1	94.1	0	100	0	100	913.86	100	959.55	100	1007.5 3	100	1057.9 1	100	3938.85	
	Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Persentase desa/kelurahan mengalami klb penyakit menular	13	13	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Persentase pelayanan orang dengan penyakit tidak menular (Hipertensi, DM)	41	41	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0	100	0	
	Program Pendidikan Kedinasan	-	-	-	248.8	-	282	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	100	100	1062.9 5	100	3316.3 2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100	100	0	-	8684.1 9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Rumah Sakit Mata																	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	-	-	-	30.25	-	28.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	40	-	31.04	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	35.4	38	2112.4	40	1878.07	40	1878.07	40	2065.87	45	2272.46	45	2499.7	50	10594.16	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	60	-	54	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	13	-	51.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	-	-	-	30.25	-	110.76	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100	100	75	100	67.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

[illegible]

[illegible]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keluarga sehat	14	15	3627.6 3	20	21169. 04	25	218.5	30	229.43	40	240.9	50	252.94	50	0	
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25738.4 4	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	39.2	100	64.71	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	13.31	-	21.02	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Balai Laboratoriu m Kesehatan
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	6.2	-	6.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100	100	107.3	100	208.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100	100	119.2	100	160.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Instalasi Farmasi
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	97.51	100	84.39	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	12.33	-	13.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Informasi Kesehatan Medik	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	RSUD H. Boejasin
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks level IT	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	20	-	18	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	13757.96	100	15648.97	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks keuangan (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas	Indeks utilisasi (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Indeks pendidikan (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga , Masyarakat dan Lingkungan	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pemeliharaan Sarana dan	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

[illegible]

[illegible]



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)		100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	34.92	-	9.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Panyipatan
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	74.95	-	64.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	243.37	-	225	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	9952.4 9	-	10470. 29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Jamkesmas	-	-	-	379	-	582.42	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	64.64	100	89.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	11	-	11.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	23.47	-	28.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	100.62	100	135	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	414.48	-	889.19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	28.17	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	16.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	17.17	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	21.16	100	59.31	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	624	-	1602.93	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Takisung
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	75.79	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Takisung
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

UPT Puskesmas Takisung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	6.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Kurau
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	-	100	0	100	135	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Jamkesmas	-	-	-	420.69	-	518.42	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	52.23	100	55.28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemenuhan, Peningkatan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur,	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

[illegible]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan																	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	12.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	13.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	18.09	100	88.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	975	-	1689.48	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	98.5	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Bati Bati
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	25	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan	-	-	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Prasarana Aparatur																		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	6.05	100	100.16	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	171.53	-	383.76	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	22.71	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	11.49	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	79.36	100	90	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Jamkesmas	-	-	600.08	-	653.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		UPT Puskesmas Tambang Ulang	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	94.5	100	93.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

UPT Puskesmas Tambang Ulang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan																	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	26.5	-	19.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	17.48	-	27	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	34.17	100	135	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	1506.9 2	-	1985.6 6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	135.6	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	25.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan		100	19.41	100	99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Jamkesmas	kesehatan di area kerja puskesmas (%)															UPT Puskesmas Sungai Riam	
		-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-	-	-	117	-	270.42	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	28	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
Pembantu dan Jaringannya																			UPT Puskesmas Tirta Jaya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	16.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	3.93	100	63	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
	-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Jamkesmas	-	-	-	290	-	339.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	34.62	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

UPT Puskesmas Tirta Jaya

[illegible]



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	16	-	19.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	36	-	41.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	100	0	100	135	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	419.8	-	1280.78	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	44.26	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Tajau Pecah
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas	-	-	-	16	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

UPT
Puskesmas
Tajau Pecah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pembantu dan Jaringannya																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	10.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	100	0	100	130.08	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	351.8	-	586.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	34.24	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	kualitas sumber daya manusia (%)		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya		-	-	26.65	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	5.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	104.5	100	299.12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas		-	-	484.46	-	938.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	74.93	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Asam Asam
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	33	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)		100	115.97	100	458.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		- 100	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			
	Program Jamkesmas	-	-	-	1434.1	-	2097.7 1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	UPT Puskesmas Kintap
		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	91.94	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0					
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0					
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0					
	- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0					
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas	-	-	-	26.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

UPT
Puskesmas
Kintap



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pembantu dan Jaringannya																UPT Puskesmas Sungai Cuka	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	100	71.28	100	71.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
	Program Jamkesmas	-	-	-	262.65	-	626.01	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	73.62	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompok I	Kelompok I	0	Kelompok I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0

[illegible]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan																	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	3.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	100	0	100	69.09	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Jamkesmas	-	-	-	360	-	408.54	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	46.84	100	34.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bumi Makmur	
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kelompok penilaian kinerja puskesmas	Kelompo k I	Kelompo k I	0	Kelompo k I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100	100	0	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	-	-	-	15	-	12.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	13.94	-	5.19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100	100	99.24	100	100.21	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	RSUD Kintap
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Informasi Kesehatan Medik	Indeks capaian indikator medik (area klinik)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Indeks level IT	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinik)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks keuangan (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks utilisasi (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga , Masyarakat dan Lingkungan	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks pendidikan (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	kualitas sumber daya manusia (%)																
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penggadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		dengan Renstra dan RKPD (dokumen)																
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				177.51 5,72		67.071, 25		109.39 2,41		116.36 7,60		130.17 9,53		130.36 6,41		730.892, 93		
	Program Keciptakarya	-	-	34473. 73	-	12172. 32	-	0	-	0	-	0	-	0	-	46646.0 5		
	Program Keciptakarya dan Pengaturan Jasa Konstruksi	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	30	30	0	35	0	40	53933. 26	45	54562. 54	50	60693. 94	55	52357. 28	-	33075	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)		50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	75	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)		60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	-	0	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)		62	0	65	0	70	0	73	0	75	0	80	0	-	0	
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)		20	0	25	0	30	0	35	0	40	0	45	0	-	0	
		Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun ditingkat kabupaten (%)		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0	
		Cakupan penyatuan layanan publik, SKPD koordinatif dan kantor bupati (%)		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	-	0	
		IKM		B	3797.2	B	5657.28	B	5657.28	B	5657.28	B	5657.28	B	5657.28	-	32083.6	
		IKM		B	22.03	B	64.99	B	64.99	B	64.99	B	64.99	B	64.99	-	346.98	
		IKM		B	315.12	B	289.29	B	75	B	78.75	B	82.69	B	86.82	-	927.67	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	-	10143.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10143.15	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-	36594.16	-	15524.33	-	0	-	0	-	0	-	0	-	52118.49			
													519					



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	-	-		1199.9 5	-	7432.3 8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8632.33	
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km / jam)		34.41	0	38	0	48	25000	64	30000	80	35000	85	39392. 35	-	129392. 35	
Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	-	0		
Persentase jalan yang dipelihara			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0		
Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0		
Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-		0	-	2.52	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.52	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM		B	0	B	0	B	1641.8 9	B	1641.8 9	B	1641.8 9	B	1641.8 9	-	6567.56	
IKM			-	0	-	0	B	29.06	B	29.06	B	29.06	B	29.06	-	116.24		
IKM			-	0	-	0	B	30	B	31.5	B	33.08	B	34.73	-	129.31		
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	-	-		533.47	-	150	-	0	-	0	-	0	-	0	-	683.47	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-		-	42962.61	-	8042.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	51005.51	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-		-	11347.13	-	8194.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19541.53	
	Program Pengembangan Teknologi Konstruksi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium	Persentase teknologi konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)		100	0	100	62.34	100	62.34	100	62.34	100	62.34	100	80.95	-	330.31	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-		-	137.63	-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	237.63	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sugai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-		-	607.39	-	1525	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2132.39	
	Program Pengendalian	-		-	299.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	299.29	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pemanfaatan Ruang																	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	-		-	0	-	27.55	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27.55	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	0	-	45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-		-	15	-	30.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45.2	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan	Berfungsinya secara optimal alat-alat konstruksi (%)		100	0	100	0	100	184.29	100	179.04	100	173.53	100	178.45	-	715.31	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		-	80.1	-	1641.89	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1721.99	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	IKM		B	0	B	0	B	30	B	31.5	B	33.08	B	34.73	-	129.31	
	Program Perencanaan	-		-	29.07	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	39.07	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Pembangunan Daerah																		
	Program Perencanaan Tata Ruang	-		-	314.73	-	1083.89	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1398.62	
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)		65	0	70	0	78	1083.89	87	750	92	750	98	750	-	3333.89	
		Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten		50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	75	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)		83	0	84	0	87	21550.41	93	23226.21	97	25902.52	100	30000	-	100679.14	
Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	-	0		
Persentase beton / bronjong / pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai stamdar (%)'			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP		-	0	-	0	B	50	B	52.5	B	55.13	B	57.88	-	215.51	
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-	33379.96	-	8.81	-	0	-	0	-	0	-	0	-	42189.48	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong	-		-	1264	-	4977.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6241.1	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					0,00		31.381,38		35.358,81		38.916,12		42.588,00		46.618,87		194.863,18	
3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	-	0	Baik	7027	Baik	6392.95	Baik	7132	Baik	7845	Baik	8630	Baik	29999.95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.1.3	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Nilai IKM	baik	-	0	baik	15	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	15	
5.5.2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kesesuaian antara Pagu & RPJMD		-	0	100%	248.34	-	0	-	0	-	0	-	0	-	249.34	
3.1.2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	Baik	1672.88	Baik	1840.17	Baik	2024.19	Baik	2226.61	Baik	7763.85	
5.5.2	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)		-	0	-	0	300 rumah	3050	300 rumah	3465	300 rumah	3811	300 rumah	4192	1200 rumah	14518	
5.5.2	Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan	IKM	baik	-	0	baik	9486.49	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9486.49	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5.5. 2	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni		-	0	100%	269.96	-	0	-	0	-	0	-	0	-	270.96	
3.1. 1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	IKM	baik	-	0	baik	31.5	-	0	-	0	-	0	-	0	baik	31.5	
3.1. 1	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	Baik	-	0	baik	46	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	46	
5.5. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	IKM	baik	-	0	baik	11941.08	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11941.08	
2.1. 1	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	-	-	0	-	0	Baik (81,25)	16.5	Baik (81,25)	18.15	Baik (81,25)	19.97	Baik (81,25)	21.96	Baik (81,25)	76.58	
3.1. 1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip	-	-	0	-	0	Baik (81,25)	155.74	Baik (81,25)	191	Baik (81,25)	210	Baik (81,25)	231	Baik (81,25)	787.74	
5.5. 1	Program Rehabilitasi/Pem eliharaan Jalan dan Jembatan	ikm	baik	-	0	baik	2316.01	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2316.01	
5.4. 1		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas	-	-	0	-	0	1 RTH	24070.74	-	26269.8	-	28677.84	-	31317.3	1 rth	110335.68	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Tata Kota dan Kebersihan	wilayah kota/kawasan perkotaan (unit RTH)																
		Jumlah timbunan sampah di TPA Bakunci yang dapat di kurangi (Ton)	-	0	-	0	3650 ton	0	4745 ton	0	5840 ton	0	6935	0	6935 ton	0		
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					10.602,39		8.441,14		10.054,26		11.328,83		12.530,52		13.889,10		66.846,24	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	IKM	Baik	Baik	18	Baik	6.75	-	0	-	0	-	0	-	0	-	24.75	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	3885.17	Baik	3587.44	Baik	3811	Baik	4092	Baik	4137	Baik	4300	Baik	22788.61	
	Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	01:05.0	1 : 5.000	0	1 : 4.500	0	1 : 4.000	290	1 : 3.000	493	1 : 2.900	550	1 : 2.500	600	1 : 2.500	2200	
		Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	0.1	1 : 100	0	1 : 90	0	1 : 80	0	1 : 70	0	1 : 60	0	1 : 50	0	1 : 50	0	
		Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	1 : 5	1 : 5	0	1 : 5	0	1 : 5	0	1 : 5	0	1 : 5	0	1 : 5	0	1 : 5	0	
		Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	2	2	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	77	0	
	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	1372	100,00	1509	100,00	1600	100,00	1700	100,00	7266.6	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	100	100	0	100	0	90	0	80	0	70	0	50	0	50	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Pemadaman Kebakaran	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah tindak pidana (kasus)	149	140	0	120	0	100	0	100	0	90	0	70	0	70	0	
		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	240	100,00	264	100,00	400	100,00	450	100,00	2230	
	Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	235	100,00	258	100,00	390	100,00	450	100,00	1440	
		Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-	100,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	3197.8 9	100	1568.7 5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4766.64	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	1044	Baik	866	Baik	900	Baik	1060	Baik	2586.08	

[illegible]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	C++	B	9.76	B	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9.76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	7.5	1 dokumen	7.5	1 dokumen	8	1 dokumen	10	1 dokumen	43.1		
	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	6 dokumen	0		
	Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0		
	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0		
	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	100,00	100,00	707.37	100,00	775.39	100,00	733.56	100,00	825	100,00	866.01	100,00	1003.3 9	100,00	3427.96	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	535	100,00	600	100,00	645.6	100,00	720.86	100,00	2501.46		
	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	10 lembaga	10 lembaga	0	15 lembaga	0	20 lembaga	0	25 lembaga	0	30 lembaga	0	40 lembaga	0	40 lembaga	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	0	300	0	600	0	753.23	0	906.31	0	2559.54	
		Jumlah desa peduli toleransi		-	0	0	0	1 desa	0	1 desa	0	1 desa	0	1 desa	0	4 desa	0	
		-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Penyuluhan Pendidikan Politik Kabupaten dan Masyarakat	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)		100,00	0	100,00	0	100,00	490	100,00	560	100,00	609.45	100,00	692.4	100,00	2351.85	
		-	100,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)		70,00	0	70,00	0	-	0	70,00	0	-	0	-	0	70,00	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah Desa sadar politik (desa)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara RI Bagi Masyarakat (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	415	100,00	450	100,00	475.2	100,00	536.45	100,00	1876.65	
		Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)		5,00	0	7,00	0	10,00	0	12,00	0	15,00	0	20,00	0	20,00	0	
		-	5,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah Desa multi etnis (multikulturalisme)		-0	0	0	0	1 desa	0	1 desa	0	1 desa	0	1 desa	0	4 desa	0	
	Program Pemenuhan,	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	105	100,00	231.83	100,00	571.15	100,00	759.79	100,00	1667.77	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)																
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase tercapainya peningkatan tentang politik bagi masyarakat maupun pengurus parpol, LSM, & Orkemas	12 kali	1 kl keg (pemilhn Bup & Wabup di 11 Kec.), 5 baliho 11 kec	193	Pemilu serentak Pilpres dan Pileg	359.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	552.35	
	Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	398	100,00	490	100,00	532.43	100,00	600	100,00	2020.43	
		Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Jumlah Desa sadar penyelesaian konflik	-	0	-	0	1 desa	0	2 desa	0	2 desa	0	2 desa	0	7 desa	0		
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tercapainya pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dimasyarakat	4,5 kali dan 7 kec	7 kali	161.43	13 kl penyln, 2 kl rpt tim, 6 kl rpt PPWK	526.83	-	0	-	0	-	0	-	0	-	858.65	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan aparatur	1 keg. Dan 5 kali	250 orang	143.75	225 orang	157.68	-	0	-	0	-	0	-	0	-	301.43	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit masyarakat	3 kali	2 kl/Kab. (200 org peserta)	41.74	2 kali/ kabupate n	42.59	-	0	-	0	-	0	-	0	-	84.33	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26 buku	12	10	4	13.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	23.5	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 buah	-	0	1 Unit	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	25	100,00	25	100,00	25	100,00	25	100,00	100	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase rencana strategis dan rencana kerja skpd yg tersusun	-	2	8.65	3	7.21	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.86	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	1 dokumen	0	-	43	-	47.5	-	52.45	-	57.9	1 dokumen	200.84	
		Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	6 dokumen	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sosial					5.447,9 9		5.792,5 7		8.378,5 1		9.567,7 9		11.017, 45		12.741, 19		52.945,5 0	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	IKM Nilai B	-	-	17.85	-	15.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	100,00	Baik	866.24	Baik	991.67	Baik	982.55	Baik	982.55	Baik	1031.6 7	100,00	1083.2 6	100,00	5628.38	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani	-	-	328.41	-	270.8	65	150	80	160	95	170	110	180	-	0	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan dan pelatihan	-	-	0	20	0	30	0	40	0	50	0	60	0	-	0	Dinas Sosial
		Jumlah korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mendapat pelayanan	0	-	0	-	0	35	0	40	0	45	0	50	0	-	0	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	10,00	10,00	793.18	12.5	851.15	15	1500	20	2030	25	2470	30	3460	30	11543.4 2	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

[illegible]



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		melaksanakan usaha kesejahteraan sosial																
		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan kesejahteraan sosial	2	2	0	4	0	6	0	9	0	10	0	15	0	15	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah kegiatan saresehan tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan		-	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	-	0	
		Cakupan kegiatan Sarasehan tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan serta taman makam pahlawan dan situs bersejarah yang terpelihara	0	-	0	3	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0	
		Cakupan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelayanan sosial	-	-	0	-	43.6	60	150	80	160	100	170	120	180	-	0		
	Jumlah tuna sosial dan eks napi yang mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan		-	0	40	0	60	0	80	0	100	0	120	0	-	0		
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Jumlah lanjut usia yang mendapat pembinaan dalam panti dan luar panti	-	-	0	-	342	344	550	365	650	380	750	395	850	-	0		
	Jumlah LUT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	-	0	252	0	296	0	310	0	320	0	330	0	-	0		
	Jumlah Lanjut Usia terlantar di Luar Panti yang mendapat pelayanana dan pembinaan	0	-	0	-	0	50	0	55	0	60	0	65	0	-	0		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan	-	-	0	134	263.75	140	300	155	400	160	500	165	700	-	263.75		
	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pendidikan dan keterampilan	0	-	0	40	0	10	0	20	0	20	0	20	0	-	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Jumlah penyandang cacat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	-	0	94	0	130	0	135	0	140	0	145	0	-	0	
	Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	100,00	100	0	100	0	100	850	100	750	100	900	100	1000	100	3400	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial, orang terlantar, eks napi yang mendapat playanan dan perlindungan sosial.	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	100,00	Baik	0	Baik	0	Baik	90	Baik	94.5	Baik	99.23	Baik	104.19	100,00	387.91	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP B	NILAI SAKIP C	-	2	-	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan	IKM Nilai B	-	-	101.88	-	85.41	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	IKM	100	Baik	0	Baik	0	Baik	15	Baik	15.75	Baik	16.54	100,00	17.36	100,00	64.65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)		100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
Jumlah event		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	107	1 dokumen	127.35	1 dokumen	137.72	1 dokumen	137.72	1 dokumen	30.17		
	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	6 dokumen	0		
	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0		
	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0		
	Hasil evaluasi dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0		
	Perlindungan Masyarakat	Jumlah kejadian bencana	202 Kali	249 Kali	685.59	245 Kali	76.5	245 Kali	0	235 Kali	0	200 Kali	0	200 Kali	0	190 Kali	762.09	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah pameran	1 Kali	1 Kali	15	1 Kali	15	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	-	30	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	1641.34	Baik	1887.18	Baik	1910.39	Baik	2101.43	Baik	2311.57	Baik	2542.73	Baik	8866.12	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan wilayah bencana	11 Kec	11 Kec	92.86	10 Kec	72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	134.85	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai dan Gedung	58 Orang/ 1 unit	58 Orang/ 1 unit	54.77	58 Orang/ 1 unit	49.29	60 Orang/ 1 unit	35	65 Orang/ 1 unit	38.5	70 Orang/ 1 unit	42.35	75 Orang/ 1 unit	46.59	58 Orang/ 1 unit	266.49	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	150 (Tinggi)	150 (tinggi)	0	145 (tinggi)	0	140 (tinggi)	600	135 (sedang)	660	130 (sedang)	726	125 (sedang)	798.6	120 (Sedang)	2784.6	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Peringatan Dini	9 Kec	9 Kec	55.87	8 Kec	232.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	288.06	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM	Baik	Baik	0	Baik	49.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49.29	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Jumlah Pameran	-	-	0	-	0	1 Kali	18	1 Kali	19.8	1 Kali	21.78	1 Kali	23.96	100,00	60	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Lakip	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					44.829,68		66.360,12		49.334,91		54.645,44		56.499,42		64.278,04		335.947,61	
Tenaga Kerja					0,00		2.849,80		4.759,80		5.272,87		6.410,68		7.760,24		27.053,39	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	0	Baik	15	0	0	0	0	0	0	0	0	Baik	15	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	Baik	0	Baik	1017.6	Baik	1152	Sangat Baik	929.07	Sangat Baik	1363.48	Sangat Baik	1568.94	Sangat Baik	4618.11	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	-	0	-	0	Baik	1483	Sangat Baik	1999.6	Sangat Baik	1963.2	Sangat Baik	2094.8	Sangat Baik	7134	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	18	0	0	0	0	0	0	0	0	Baik	18	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	-	B	0	BB	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	B	6.3	
	Program Peningkatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	274.31	0	0	0	0	0	0	0	0	Baik	274.31	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara Pagu Renstra dan Renja		90	0	95	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	90	6.3	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	BB	-	0	-	0	BB	21	BB	21	A	24	A	24	A	90	
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	20	20	0	22,5	166.29	25	170	27	184.4	30	215	35	257.5	20	166.29	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	-	2,6	0	3	582.47	3.5	300	4	350	5.5	500	6.5	585	2,6	582.47	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten	-	36	0	50	763.53	60	740	65	790	75	950	75	1045	36	763.53	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	0	-	0	Baik	15	Sangat Baik	18	Sangat Baik	35	Sangat Baik	35	Sangat Baik	103	UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	0	-	0	Baik	878.8	Sangat Baik	980.8	Sangat Baik	1360	Sangat Baik	2150	Sangat Baik	5369.6	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					1.434,14		1.140,04		1.901,81		1.997,84		2.266,98		2.413,33		11.154,14	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Tercapainya Kerjasama Informasi dengan masyarakat	0	1 kali	10.82	Baik	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	100,00	556.82	Baik	647.28	Baik	1218.49	Baik	1332.2	Baik	1458.7	Baik	1593.03	Baik	6249.7	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	5.55	100,00	0	100,00	200.57	100,00	222.48	100,00	248.01	100,00	271.28	100,00	1342.34	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,36	68,38	59.27	68,40	52.08	68,42	0	68,44	0	68,46	0	68,50	0	68,50	52.08	
Prosentase Perempuan dilembaga Legislatif		14,29	14,29	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0		
Prosentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD		0	0	0	0	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0	12.5	0		
Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala SKPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)		30,00	30,00	0	40,00	0	42,00	0	45,00	0	47,50	0	50,00	0	50,00	0		
Persentase Sumbangan pendapatan Perempuan dalam Keluarga		46,89	47,83	0	48,78	0	27.96	0	39.23	0	41.48	0	43.73	0	45.98	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	-	-	0	-	0	1	0	1	0	2	0	2	0	6	0		
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	-	-	0	2	0	4	0	6	0	8	0	10	0	10	0		
	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0		
	Penyelesaian pengaduan	100,00	268,21	393.15	100,00	145.69	100,00	221.74	100,00	176.29	100,00	256.63	100,00	270.76	100,00	1071.11		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan	perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)																
		Persentase Anak Korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	5	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standart	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Ratio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	1:1.000	1:1.000	0	1:1.000	0	1:1.000	0	1:1.000	0	1:1.000	0	1:1.000	0	1:1.000	0	
		Kabupaten Layak Anak (kategori)	Pratama	Madya	0	Madya	31	Madya	96	Madya	97	Madya	127	Madya	99	135	0	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	100	100	80	68,40	81.43	68,42	130.01	68,44	134.87	68,46	141.64	68,50	144.26	68,50	632.21	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	100	88,00	268.93	88,25	139.93	88,50	0	88,75	0	89,00	0	89,50	0	89,50	139.93	
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	100,00	59.6	Baik	27.63	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0			
												544						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Prasarana Aparatur																		
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Nilai IKM	100	100,00	0	100,00	0	100,00	25	100,00	25	100,00	25	100,00	25	100,00	0	
		Jumlah Media Pelayanan KIE Kb melalui Media Massa, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Cetak	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	385.89
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 Dok	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	265.92
		Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	10	B	10	B	10	B	10	0	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	190.43
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Pangan					0,00		710,15		2.382,00		2.526,00		2.739,00		2.995,00		11.352,15	
	Program Ketersediaan dan distribusi pangan	Rasio peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan (rasio diatas 114%)	-	-	0	-	0	surplus	640	surplus	680	surplus	710	surplus	750	-	2780	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Komsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH	-	84	0	86	0	87	650	88	665	89	685	90	740	89	2740	
	Program Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	0	Baik	900	Baik	966	Baik	1039	Baik	1130	Baik	4035	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Administrasi Perkantoran																	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	0	Baik	107	Baik	100	Baik	165	Baik	200	Baik	572	
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Jumlah desa mandiri pangan	-	-	0	10	710.15	-	0	-	0	-	0	-	0	10	710.15	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	0	Baik	30	Baik	50	Baik	65	Baik	85	Baik	230	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip	-	B	0	B	0	B	55	B	65	BB	75	BB	90	BB	285	
Pertanahan					1.199,65		216,78		749,29		861,68		990,94		1.139,58		5.157,92	
Program Administrasi Tata Guna Tanah dan Fasilitas Umum	Cakupan fasilitas penyediaan tanah untuk Kawasan Industri Jorong	-	-	0	-	0	25,00	749.29	40,00	861.68	50,00	990.94	60,00	1139.58	60,00	3741.49	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	
	Cakupan penyelesaian konflik tanah	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Pemerintah Kabupaten Tanah Laut																
		Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	50,00	50,00	0	60,00	0	70,00	0	80,00	0	90,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-	-	0	-	46.63	-	0	-	0	-	0	-	0	-	46.63	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	1199.6 5	-	68.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1267.79	
	Program Penataan Tata Guna Tanah	-	-	-	0	-	53.71	-	0	-	0	-	0	-	0	-	53.71	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	0	-	48.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	48.3	
Lingkungan Hidup					0,00		825,95		3.021,2 7		3.733,4 0		4.106,7 3		4.517,9 5		16.205,3 0	
5.4. 1	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)		-	0	-	0	100%	538.09	100%	801.9	100%	882.09	100%	970.3	100%	3196.38	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5.4. 1	Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)		-	0	-	0	100%	1000	100%	1100	100%	1210	100%	1331	100%	4646	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Laboratorium Lingkungan (K3)																	
5.4. 1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	-	-	0	-	0	100%	740	100%	914	100%	1005.4	100%	1105.9 4	100%	3769.34	
5.4. 1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IKM	BAIK	-	0	BAIK	303	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
5.4. 1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IKM		-	0	BAIK	262.98	-	0	-	0	-	0	-	0	-	565.98	
5.4. 1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKM	Baik	-	0	Baik	259.97	-	0	-	0	-	0	-	0	-	259.97	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
5.4. 1	Program Tata Lingkungan	Target IKLH Kab. Tanah Laut (Nilai)	-	-	0	-	0	60.58	743.18	60.96	917.5	61.33	1009.2 4	61.71	1110.7 1	61.71	3780.63	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					31.472,00		28.697,70		2.500,13		2.778,95		2.949,55		3.025,06		71.423,39	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	1553	Baik	1532	Baik	1665.13	Baik	1843.06	Baik	1915.51	Sangat Baik	1937.37	Sangat Baik	8893.07	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
	Program Pemenuhan,	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	0	-	0	Baik	200	Baik	200	Baik	210	Sangat Baik	220.5	Sangat Baik	830.5	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	100	100	386	100	1785	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1785	
	Program Pendataan dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	57.03	66.80	0	-	0	89	100	93	150	96	162.5	97	175.63	100	588.13	
		Rasio pasangan berakte nikah (%)	0.07	0.08	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	Program Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	82.77	94.91	0	-	0	100	300	100	336.5	100	348.33	100	360.74	100	1345.57	
		Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.81	0.83	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
		Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100	100	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		Cakupan Penduduk rentan administrasi kependudukan (%)	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	
		Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	60	0	
	Program Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	100	100	0	-	0	100	210	100	221.39	100	282.21	100	296.32	100	1009.92	
		Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Ada	0	-	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (inovasi)	6	2	0	-	0	-	0	1	0	-	0	1	0	-	0	
		Kerjasama pemanfaatan data yang ditindaklanjuti (%)	-	100	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	0	Baik	109.92	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Baik	Baik	0	Baik	17.23	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17.85	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	29533	Baik	25243	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25243	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	B	B	0	-	0	Baik	15	Baik	17	Baik	19	Baik	21	Baik	72	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian pagu renstra dengan Renja SKPD		-	0	Sesuai	10.55	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10.55	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	-	0	B	10	B	11	B	12	B	13.5	B	46.5	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Evaluasi Kinerja SKPD																	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.275,34		8.189,11		8.914,20		11.316,02		9.764,18		13.740,99		56.199,84	
	Program Bina Adat dan Budaya Desa	-	-	-	0	-	37.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	37.6	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Baik	778.38	Baik	884.46	Baik	1224.5	Baik	1174.42	Baik	1481.78	Baik	1388.36	Baik	6931.9	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	1555.12	-	611.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2166.41	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan	-	-	-	59.29	-	443.53	-	0	-	0	-	0	-	0	-	502.82	
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	100,00	-	0	-	0	100,00	1937.9	100,00	1897.5	100,00	2205	100,00	1873.28	130	7913.68	
		Jumlah Desa Dibina Berciri Khas	5 Desa	-	0	-	0	5 Desa	0	5 Desa	0	5 Desa	0	5 Desa	0	5 Desa	0	
		Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	6	0	26	0	
		Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna dalam	-	-	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	

[illegible]



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pembinaan, Pendataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		yang Dibina, Tim Evaluasi Raperdes tentang APBDes Kecamatan																
		Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	100,00	-	0	-	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Indeks Desa Membangun (skor)	0,700 (berkemb ang)	0,700 (berkemb ang)	0	0,715 (Maju)	0	0,730 (Maju)	1034	0,750 (Maju)	1078	0,800 (Maju)	1300	0,815 (Mandiri)	1114.4	0,815 (Mandiri)	4526.4	
		Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya (desa)	-	-	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	22	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	Baik	-	0	-	0	Baik	1311	Baik	921	Baik	1112.6	Baik	704.86	Baik	3871	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	46.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	46.35	
	Program Pengembangan Data/informasi	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	-	100,00	499.02	100,00	581.03	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1080.05	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-	-	308.83	-	198.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	507.41	
	Program Peningkatan Kapasitas	-	-	-	0	-	3917.9 1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3917.91	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Aparatur Pemerintah Desa																	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	433.52	-	879.75	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1313.27	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	Baik	Baik	0	Baik	12.3	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	187.57	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	531.59	-	487.66	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1019.25	
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan Pembinaan Kelompok PKK (%)	100,00	-	0	-	0	50,00	698.8	55,00	712.8	60,00	852.8	65,00	922.12	100,00	1775.32	
		Jumlah PKK Aktif	147 PKK Aktif	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	147 PKK Aktif	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM	Baik	Baik	63.24	Baik	135	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	198.24	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	55	100,00	35	100,00	40	100,00	35	100,00	343.46	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	Dokume n	Dokume n	0	Dokume n	0	Dokume n	43	Dokume n	47.3	Dokume n	42	Dokume n	42.97	Dokume n	0	
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					1.121,11		572,80		924,11		998,60		911,93		851,08		5.379,63	
	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	0	0	0	0	35.65	18.51	424.11	18.51	498.6	18.51	411.93	18.51	360.08	18.51	702.32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,53	1,66	0	1,66	0	1,63	0	1,61	0	1,58	0	1,56	0	1,56	0	
	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif	65	65	564.5	65	343.89	65	0	65	0	65	0	65	0	65	343.89	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%)	45,00	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70,00	0	70,00	0		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	60,00	70	0	70	0	70,00	500	70	500	70	500	70	491	70	831.33		
	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	65,00	87	0	87	0	87	0	87	0	87	0	87	0	87	0		
	Angka Kelahiran Remaja (perempuan uisa 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	0	0	0	0	0	73.81	0	71.05	0	68.43	0	65.95	0	63.60	0		
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	0	0	0	0	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0		
	Angka pemakaian kontrasepsi modern/mCPR bagi perempuan menikah uisa 15 - 49	9,00	9,00	0	9,00	0	77.76	0	77.76	0	77.76	0	77.76	0	77.76	0		
	Desa sadar KB (desa)	0	0	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0		
	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0		
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	2,20	2,20	0	2,33	0	2,30	0	2,27	0	2,24	0	2,22	0	2,22	0			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan PUS yang ingin Ber KB Tidak terpenuhi (Unmet Need)	9	9	556.61	9	127.92	9	0	9	0	9	0	9	0	9	1003.66	
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	0	0	0	-	65.34	-	0	-	0	-	0	-	0	-	65.34	
Perhubungan					2.121,76		6.195,27		6.506,90		6.832,25		7.173,86		7.532,55		36.362,59	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	C	C	2121.76	C	2562.3	B	2377.9	B	2423.9	B	2483.86	A	2497	A	12344.96	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah pelabuhan /terminal	-	-	0	2 pelabuhan, 2 terminal	790.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	790.99	Dinas Perhubungan
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	0	-	0	B	322.1	B	490.45	B	399	A	530	A	1741.55	
	Program Pengembangan Sektor Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan dan Dermaga Penyebrangan	-	-	0	-	0	1 pelabuhan, 1 dermaga	936	1 pelabuhan, 2 dermaga	973.85	1 pelabuhan, 3 dermaga	1045.9	1 pelabuhan, 4 dermaga	1074	1 pelabuhan, 4 dermaga	4029.75	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	jumlah pemasangan rambu2 dan rambu2 laut	50	50	0	75 buah	1079.98	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1079.98	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen BMD	-	-	0	2 dokumen	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	-	-	0	22 orang	383	-	0	-	0	-	0	-	0	-	383	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	0	-	261.78	B	541.3	B	550	A	599	A	609	A	2561.08	
	Program Peningkatan Layanan Angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Jumlah Fasilitas Jalan	-	-	0	-	0	73 unit	1906	78 unit	1946.45	80 unit	2143	83 unit	2270	83 unit	8265.45	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Layanan Angkutan Darat	-	-	0	40,70 %	921.14	42.60%	240	44.20%	258	46.12%	285	48.23%	292	48.23%	1997.96	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Dermaga Penyebrangan	-	-	0	-	0	1 dermaga	147.75	1 dermaga	149	2 dermaga	169	2 dermaga	210	2 dermaga	675.75	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penyebrangan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	-	-	0	B	4.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4.8	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	0	B	0	B	28	B	32	B	39	A	40	A	139	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	-	-	0	B	0	B	7.85	B	8.6	BB	10.1	BB	10.55	A	37.1	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah fasilitas LLAJ	-	-	0	18 unit	184.28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	184.28	
Komunikasi dan Informatika					0,00		2.622,71		2.665,34		2.836,65		3.024,03		3.232,67		14.381,40	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	64%	-	0	27%	172.81	-	0	-	0	-	0	-	0	91%	172.81	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	0	Baik	955.11	Baik	852	Baik	863.06	Baik	949.21	Baik	1001.96	Baik	3665.87	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemenuhan,	IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	163.08	Baik	171.51	Baik	182.58	Baik	199.57	Baik	716.74	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																	
	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	-	0	0	0	27%	615.79	27%	666.29	27%	699.61	27%	720.6	108%	2702.29	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang menerapkan e-government	55%	-	0	8.90%	1404.87	8.90%	1011.42	8.90%	1111.01	8.90%	1166.56	8.90%	1283.22	100%	5977.07	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	IKM	Baik	-	0	Baik	4.5	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	4.5	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	45%	45	-	0	-	0	-	0	-	0	45%	45	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas	Baik	-	0	Baik	2.55	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	2.55	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	0	0	0	0	0	Baik	15	Baik	16.2	Baik	17.01	Baik	17.86	Baik	66.07	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	NILAI SAKIP	B	B	0	B	0	B	8.05	B	8.58	B	9.06	B	9.46	B	35.17	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Cakupan layanan telekomunikasi	2 buah	-	0	2 buah	37.87	-	0	-	0	-	0	-	0	2 buah	37.87	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					0,00		2.529,21		2.328,00		2.391,90		2.511,49		2.637,06		12.397,66	
	Program Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Jumlah fasilitasi akses pemasaran usaha kecil	-	-	0	1	35.74	-	0	-	0	-	0	-	0	1	35.74	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	2064.14	Baik	1809	Baik	1797.9	Baik	1867.49	Baik	1943.06	Baik	9481.6	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	0	Baik	50	Baik	50	Baik	50	Baik	50	Baik	200	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Usaha kecil terfasilitasi permodalan	-	-	0	25	44.68	-	0	-	0	-	0	-	0	25	44.68	
	Program Peningkatan	Koperasi aktif	-	85	0	85	384.65	-	0	-	0	-	0	-	0	85	384.65	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
	Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi dan UKM	Koperasi aktif	-	-	0	-	0	95	425	100	500	105	550	110	600	110	2075	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	0	Baik	0	Baik	20	Baik	20	Baik	20	Baik	20	Baik	80	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip	-	B	0	B	0	B	24	B	24	B	24	BB	24	BB	96	
Penanaman Modal					949,07		1.717,79		1.803,69		1.893,87		1.988,57		2.087,99		10.440,98	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	935.07	100,00	1094.82	100,00	1094.82	100,00	1094.82	100,00	1094.82	100,00	1094.82	100,00	6409.17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	50	100,00	52.5	100,00	55.13	100,00	57.88	100,00	215.51	
	Program Pengembangan Investasi Daerah	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	30	6	0	6	0	6	300	6	315	6	330.75	8	347.29	38	1293.04	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Realisasi Investasi (Rp miliar)		804.945	0	845.192	0	887.452	0	931.824	0	978.415	0	1.027.336	0	5.475.164	0	
		-	800	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	5,00	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN)		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	
		-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah investor berskala nasional (PMA)	2	2	0	-	0	-	0	1	0	-	0	1	0	2	0	
		Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN (%)		1,00	0	1,00	0	2,00	0	4,00	0	5,00	0	7,00	0	7,00	0	
		-	1,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	603.709	603.709	0	633.894	0	665.589	0	698.868	0	733.811	0	770.502	0	4.106.373	0	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	201.236	201.236	0	211.298	0	221.863	0	232.956	0	244.604	0	256.834	0	1.368.791	0	
		Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	Ada	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	
		Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-	100,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	Ada	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	0	-	44.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	44.45	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	0	-	130.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	130.5	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Jasa Usaha	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	150	100,00	150	100,00	212.24	100,00	258.27	100,00	770.52	
		Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	78.87	100,00	145.05	100,00	152.3	100,00	175	100,00	551.22	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Tertentu	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	100,00	100,00	5	100,00	0	100,00	100	100,00	105	100,00	110.25	100,00	120	100,00	440.25	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	-	-	-	0	-	150.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	150.45	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	5	-	10.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.8	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	0	-	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	
	Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha	-	-	-	0	-	44.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	44.99	
	Program Peningkatan Realisasi	-	-	-	0	-	45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Perijinan dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	49.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49.5	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	20	100,00	21	100,00	22.05	100,00	23.15	100,00	86.2	
Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)		100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	-	-	-	0	-	125.98	-	0	-	0	-	0	-	0	-	125.98	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	4	-	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10.3	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	1 dokumen	0	-	10	-	10.5	-	11.03	-	11.58	1 dokumen	43.1	
		Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	6 dokumen	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		dengan Renstra dan RKPD (dokumen)																
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Kepemudaan dan Olah Raga					0,00		7.694,97		7.831,39		7.988,02		8.147,78		8.300,73		39.962,89	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	-	0	Baik	2629.87	Baik	2612.76	Baik	2612.76	Baik	2612.76	Baik	2615.41	Baik	13083.56	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-		-	0	-	1390	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1390	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga	Jumlah Cabang Olah Raga dan Atlet Berprestasi		-	0	-	0	30 Cabor 68 Atlet	2425	30 Cabor 194 Atlet	2479.38	30 Cabor 110 Atlet	2579.38	30 Cabor 120 Atlet	2200	-	9683.76	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	IKM	Baik	-	0	Baik	0	Baik	701	Baik	701	Baik	701	Baik	701	Baik	2804		
				-		-	0	-	249.68	-	0	-	0	-	0	-	0	-	249.68
				-		-	0	Baik	11.25	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	11.25
	Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan	-		-	0	-	1816.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1816.15		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Peningkatan	-		-	0	-	304.71	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	304.71		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	-	0	-	225.05	-	0	-	0	-	0	-	0	-	225.05		
	Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Organisasi Aktif	-	0	-	0	5 OKP dan 5 Jenis Wirausa ha	2047.6 3	7 OKP dan 5 Jenis Wirausa ha	2147.6 3	9 OKP dan 5 Jenis Wirausa ha	2205.0 3	11 OKP dan 5 Jenis Wirausa ha	2733.3 3	-	9133.62		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Baik	-	0	Baik	27.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27.14	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Olah Raga	-	-	-	0	-	750	-	0	-	0	-	0	-	0	-	750	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	Baik	134.18	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	134.18	
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-	-	-	0	-	149.44	-	0	-	0	-	0	-	0	-	149.44	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Dan Kinerja SKPD	IKM	Baik	-	0	Baik	0	Baik	20	Baik	21	Baik	22.05	Baik	22.05	Baik	85.1	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	Baik	7.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7.5	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	-	-	0	-	0	Baik	25	Baik	26.25	Baik	27.56	Baik	28.94	Baik	107.75	
Statistik					0,00		28,05		32,50		35,75		39,33		43,26		178,89	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Buku ”Satu Data Kabupaten Tanah Laut”	Ada	-	0	Ada	28.05	Ada	32.5	Ada	35.75	Ada	39.33	Ada	43.26	Ada	178.89	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian					0,00		0,00		40,00		43,20		47,52		49,90		180,62	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	-	0	0	0	2.40%	40	2.40%	43.2	2.40%	47.52	2.40%	49.9	2.40%	180.62	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan					800,00		584,77		1.100,00		1.170,00		1.360,00		1.780,00		6.794,77	
	Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah	Budaya lokal yang dilestarikan (%)	100	100	800	100	584.77	100	1100	100	1170	100	1360	100	1780	100	1780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Adat tradisi yang dilestarikan (%)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
Perpustakaan					1.422,06		1.577,63		1.656,71		1.739,79		1.826,76		1.918,56		10.141,51	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	92,13	100,00	1218.49	100,00	991.62	Baik	723.48	Baik	764.65	Baik	798.63	Baik	819.89	100,00	6275.77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Layanan Perpustakaan	Nilai IKM	2,00	2,00	0	5,00	0	Baik	440.87	Baik	467.03	Baik	497.57	Baik	563.72	5,00	2772.42	
		Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan kellinging (%)	20,00	20,00	0	20,00	0	20,00	0	20,00	0	20,00	0	20,00	0	100,00	0	
		Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Desa Gemar Membaca (desa)	-	-	0	1	0	2	0	2	0	5	0	5	0	15	0	
		Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perpustakaan	-	-	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	100,00	100,00	0	100,00	0	Baik	458.86	Baik	472.93	Baik	495.15	Baik	474.26	100,00	215.51	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan minat baca masyarakat (%)	-	-	84.47	-	461.38	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Program Peningkatan	Tercapainya SDM yang berkualitas dan terlatih	-	-	0	-	36	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36		



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Kearsipan					34,55		207,39		217,77		228,65		240,09		252,09		1.180,54	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Tercapainya pemeliharaan arsip daerah	-	-	0	-	57.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	57.8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	217.77	100,00	228.65	100,00	240.09	100,00	252.09	100,00	938.6	
		Pengelolaan arsip secara baku di tingkat SKPD (%)	10,00	10,00	0	20,00	0	25,00	0	40,00	0	50,00	0	60,00	0	60,00	0	
Program Pengembangan dan Tata Kelola Kearsipan		Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	5,00	5,00	0	7,00	0	10,00	0	15,00	0	20,00	0	25,00	0	25,00	0	
		Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kearsipan	-	-	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tercapainya sosialisasi / penyuluhan kearsipan	-	-	0	-	51.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	51.99	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	-	-	34.55	-	97.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	132.15	
Urusan Pilihan					10.838, 94		16.965, 39		28.624, 75		30.325, 63		32.679, 04		34.936, 59		154.370, 34	
Kelautan dan Perikanan					0,00		0,00		1.467,0 0		1.910,0 0		2.410,0 0		2.869,0 0		8.656,00	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase berkembangnya unit usaha yang dibina	-	-	0	-	0	10	150	20	180	30	210	40	230	-	230	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	-	43,180	0	-	0	55,325	802	56,708	1000	57,708	1250	58,708	1469	58,708	4521	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	-	1,008	0	-	0	1,070	515	1,162	730	1,262	950	1,360	1170	1,360	3365	
Pariwisata					3.775,6 1		6.679,8 8		5.082,7 6		5.330,4 0		5.590,9 3		5.864,9 6		32.324,5 4	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	1156.0 6	100,00	1016.4 1	100,00	1067.2 3	100,00	1120.5 9	100,00	1176.6 2	100,00	1235.4 5	100,00	6772.35	Dinas Pariwisata
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	75	100,00	78.75	100,00	82.69	100,00	86.82	100,00	323.26	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kualitas Sumber Daya Manusia																	
5.3.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	250	275	2088	280	4525	285	2445	290	2500	300	2500	350	2500	350	16558	
		PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	460,50	506,55	0	557,21	0	612,93	0	674,22	0	741,64	0	815,80	0	815,80	0	
		Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-	100,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan (%)		20,00	310.65	20,00	118.5	20,00	100	20,00	100	20,00	100	20,00	100	100,00	829.15	
		-	20,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	
		Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-	100,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	-	-	0	2	0	2	1378.53	2	1513.21	2	1712.87	2	1923.01	10	6527.61	
	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Promosi Pariwisata	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-	122	-	932.67	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1054.67	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	0	-	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.3	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	98.9	-	74.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	173.6	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	10	100,00	10.5	100,00	11.03	100,00	11.58	100,00	43.1	
		Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		resmi perangkat daerah (%)																
	-	-	-	0	-	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.3		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	1 dokumen	0	-	7	-	7.35	-	7.72	-	8.1	1 dokumen	30.17	
		Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPd (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	6 dokumen	0	
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Pertanian					7.049,83		6.350,85		19.097,60		19.701,07		20.685,78		21.720,07		94.605,20	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	2413.14	Baik	1026.55	Baik	3028.48	Baik	3331.33	Baik	3664.46	Baik	4030.91	Baik	15081.72	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan kelembagaan petani (kel)	1,200	-	0	-	0	10	488.03	20	536.83	30	590.52	40	649.57	40	2264.95	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	0	-	0	Baik	650	Baik	530	Baik	563	Baik	899.3	Baik	2642.3	
	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tercapainya Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	100%	100%	966.05	100%	1561.84	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tecapainya peningkatan dan pengolahan hasil produksi perkebunan		-	13.53	100%	156	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tercapainya Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-	-	274.07	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi bawang merah (kw)	4,644	-	0	-	0	1,064	1585.2	1,096	1743.72	1,128	1918.09	1,160	2109.9	1,160	7356.89	
		Produksi cabai (kw)	13,261	-	0	-	0	13,669	0	14,165	0	14,660	0	15,248	0	15,248	0	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi padi (ton)	242,073	-	0	-	0	245,055	1400	248,563	1540	252,402	1694	256,544	1863.4	256,544	6497.4	
		Produksi jagung (ton)	193,717	-	0	-	0	197,520	0	201,588	0	205,934	0	210,573	0	210,573	0	
		Produksi kedelai (ton)	979	-	0	-	0	500	0	550	0	600	0	650	0	650	0	
	Program Peningkatan Produksi	Produksi Karet (ton)	8,317	-	0	-	0	8,567	525.46	8,817	578.01	9,184	635.81	9,517	699.39	9,517	2438.66	
		Produksi Kelapa Sawit (ton)	18,941	-	0	-	0	19,373	0	19,914	0	20,563	0	21,266	0	21,266	0	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Tanaman Perkebunan																		
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	0	-	0	Baik	75	Baik	82.5	Baik	90.75	Baik	99.83	Baik	348.07		
	Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Cakupan penyediaan prasarana dan sarana pertanian	100	-	0	-	0	100	6951.7 3	100	6329.9 8	100	6232.8 6	100	5788.5 2	100	25303.0 9		
	Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Tercapainya Program Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian	-	-	1541	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip	BB	-	0	-	0	BB	300	BB	330	BB	363	A	399.3	A	1392.3		
	Program perlindungan tanaman pertanian/perkebu nan	Tercapainya perlindungan tanaman pertanian/perkebunan	-	-	0	100%	224.07	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Petrernakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Kelembagaan Usaha Prasarana dan Sarana	Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain	5	-	0	-	0	2	710	3	943.2	4	1000	5	1140.4 5	14	3793.65		
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	100	-	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk hasil ternak yang sehat	100	100	0	100	0	100	95	100	115	100	130	100	145	100	485	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	912.93	Baik	1166.35	Baik	1300	Baik	1312	Baik	1329	Sangat Baik	1350	Sangat Baik	7170.28	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	Baik	915.95	Baik	1000	Baik	935.29	Sangat Baik	950	Sangat Baik	3801.24	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	1	2	114.47	1	122.37	-	0	-	0	-	0	-	0	-	236.84	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset ternak Daerah	-	-	0	3	17.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	Baik	Baik	0	Baik	8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya (%)	20	26	61.84	2	141.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	203.14	
	Program Peningkatan	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu	4	6	69.92	1	88.72	8	40	12	50	16	55	20	60	20	363.64	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	serta Kualitas Produksi hasil Peternakan (Produk)																
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase sarana dan prasarana peternakan yang terdistribusi dengan lancar	100	100	70.26	100	384.77	-	0	-	0	-	0	-	0	-	455.04	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Baik	Baik	379	Baik	3.71	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4.09	
	Program Peningkatan Populasi & Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Sapi Potong (ekor)	75,642	-	174.96	-	868.73	90,000	930	93,000	1165	96,000	1360	99,000	1405	99,000	4725	
Produksi daging (ton)		-	-	0	10,500	0	11,000	0	11,500	0	12,000	0	12,500	0	12500	0		
Produksi telur (ton)		-	-	0	85,000	0	87,000	0	90,000	0	92,000	0	95,000	0	95000	0		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM	Baik	Baik	52.69	Baik	574.24	-	0	-	0	-	0	-	0	-	626.93	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	-	-	0	-	0	Baik	90	Baik	100	Baik	110	Sangat Baik	115	Sangat Baik	415	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keseuaian antara pagu Renstra dengan Renja	Baik	Baik	5.97	Baik	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12.27	
	Program Perencanaan,	Nilai Sakip	-	-	0	-	0	BB	12.75	BB	13.5	BB	14	A	14.5	A	54.75	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD																	
Kehutanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Energi dan Sumber Daya Mineral					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Perdagangan					13,50		0,00		1.247,3 9		1.456,6 6		1.602,3 3		1.762,5 6		6.082,44	
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Penertiban pasar	12	12	0	-	0	12	351.51	12	416.19	12	457.81	12	503.59	12	1729.1	
	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Peningkatan PAD	0	5,000,00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	
		Pengelolaan pasar rakyat (kecamatan)	11	11	0	-	0	11	351.51	11	416.19	11	457.81	11	503.59	11	1729.1	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan PAD	0	5,000,00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	
	Program Peningkatan Perdagangan Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian	IKM	Baik	Baik	0	-	0	baik	544.37	baik	624.28	baik	686.71	baik	755.38	Baik	2610.74	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP di tera	0	0	13.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13.5	
Perindustrian					0,00		3.934,6 6		1.730,0 0		1.927,5 0		2.390,0 0		2.720,0 0		12.702,1 6	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri	-	-	0	-	0	100	735	100	800	100	1050	100	1200	100	3625	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah	Persentase IKM unggulan	-	-	0	-	0	25	500	25	550	25	625	25	650	25	2150	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (%)	-	-	0	-	0	40	450	50	525	60	650	65	800	65	3675	
	Prog. Penataan Struktur Industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (%)	-	20	0	30	2345.2 2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2345.22	
	Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan jumlah IKM	-	58,34	0	10	27	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27	
	Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang	-	15	0	20	854.05	-	0	-	0	-	0	-	0	-	854.05	
	Prog. Peningkatan Kemampuan Tek. Industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	-	15	0	20	202.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	202.5	
	Prog. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah IKM Unggulan	-	10	0	13	505.89	-	0	-	0	-	0	-	0	-	505.89	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	0	-	0	Baik	45	Sangat Baik	52.5	Sangat Baik	65	Sangat Baik	70	Sangat Baik	70	
Transmigrasi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					96.363,98		130.425,84		139.337,36		144.850,28		151.854,67		161.559,57		824.391,70	
Penunjang Pemerintahan Umum					81.094,62		102.235,77		110.930,51		114.208,91		118.698,72		125.647,88		652.816,41	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	312.73	B	312.73	B	312.73	B	312.73	B	1250.92	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	600	-	322.48	-	0	-	0	-	0	-	0	-	922.48	Kecamatan Kurau
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentrman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	18	B	18	B	18	B	18	B	72	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan	IKM	-	-	0	-	0	B	37.49	B	37.49	B	42	B	42	B	158.98	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	pemerintahan Desa																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	326.75	Baik	261.38	Baik	361.64	Baik	387.01	Baik	397.01	Baik	407.01	BAIK	2.14	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	18	B	18	B	22	B	22	B	80	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	0	-	36.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36.58	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	Baik	0	Baik	195.84	Baik	145.73	Baik	167.73	Baik	194.88	Baik	237.11	BAIK	941.29	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	16	-	18.74	-	0	-	0	-	0	-	0	-	34.74	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28	
	Program Peningkatan	IKM	-	B	0	B	0	B	14.12	B	14.12	B	16	B	16	B	60.24	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pelayanan Masyarakat																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	6.5	-	8.03	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14.53	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	6	-	22.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28.45	
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	-	-	-	29.5	-	24.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	54.49	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	50.25	-	195.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	246.05	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	12	-	11.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	23.35	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	0	B	10.29	B	10.29	B	12.5	B	12.5	B	45.58	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	8.03	BB	29.5	BB	29.5	BB	29.5	BB	29.5	BB	126.03	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM		-	0	-	0	B	785.77	B	121.72	B	171.47	B	223.7	B	1302.66	Kecamatan Panyipatan
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	IKM	B	B	49.91	B	1286.16	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1336.08	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM		-	0	-	0	B	37.6	B	15.6	B	15.6	B	15.6	B	84.4	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	IKM		-	0	-	0	B	107.6	B	55.6	B	55.6	B	55.6	B	274.4	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	0	Baik	428.13	Baik	584.68	Baik	537.68	Baik	537.68	Baik	537.68	Baik	2197.72	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM		-	0	-	0	B	55.35	B	39	B	39	B	39	B	172.35	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi	IKM		-	0	B	10.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10.58	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pengelolaan Keuangan Desa																	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	IKM	B	B	8.8	B	9.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18.15	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	-	0	-	0	Baik	323.5	Baik	169	Baik	169	Baik	169	Baik	830.5	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM	B	B	2.98	B	2.98	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.96	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	IKM	B	-	0	B	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	
	Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat	IKM	B	B	3	B	2.97	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.97	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	IKM		B	10.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10.14	
	Program Peningkatan Keamanan dan	IKM	B	-	0	B	15.09	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.09	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kenyamanan Lingkungan																	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi	IKM	B	B	5	B	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	IKM	B	-	0	B	4.06	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4.06	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM		-	0	-	0	B	6	B	5	B	5	B	5	B	21	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip		-	0	-	4.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4.8	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	IKM	B	-	0	B	6.65	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.65	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	IKM		-	49.99	B	48.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	98.69	
	Program Peningkatan	IKM	Baik	-	0	Baik	86	-	0	-	0	-	0	-	0	-	86	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Sarana dan Prasarana Aparatur																	Bagian Tata Pemerintah n Sekretariat Daerah
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	IKM	B	-	0	B	3.59	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.59	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	IKM	B	B	15.8	B	14.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30.09	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM		-	0	-	0	B	60.62	B	44.27	B	44.27	B	44.27	B	193.43	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	0	BB	8	BB	7	BB	7	BB	7	BB	29	
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	IKM		B	9.36	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9.36	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase permasalahan di bidang pemerintahan yang diselesaikan dengan baik	100	100	78.8	100	55.9	-	0	-	0	-	0	-	0	100	134.7	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	2,9118 (tinggi)	3,0574 (sangat tinggi)	0	3,0600 (sangat tinggi)	0	3,0750 (sangat tinggi)	735	3,1000 (sangat tinggi)	828	3,1250 (sangat tinggi)	911	3,1750 (sangat tinggi)	1006	3,1750 (sangat tinggi)	0	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah dokumen	1	1	301.09	1	57.46	-	0	-	0	-	0	-	0	3	358.55	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rapat		4	119.98	10	134.19	-	0	-	0	-	0	-	0	14	254.17	
		Jumlah Pelaksanaan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut		-	0	2 kali	134.2	2 kali	150	2 kali	165	2 kali	182	2 kali	220	10 kali	851.2	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah penyelesaian batas antar daerah	2 Batas Daerah	1 Batas Daerah	19.91	1 Batas Daerah	9.66	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama	1	2	49.92	3	37.24	-	0	-	0	-	0	-	0	5	87.16	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase permasalahan di bidang pemerintahan yang diselesaikan dengan baik	100	100	470.27	100	483.53	-	0	-	0	-	0	-	0	100	883.8	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	3	139.72	2	41.45	-	0	-	0	-	0	-	0	5	181.17	
	Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	Terpasilitanya Penyusunsn produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100	100	0	100	0	100	844.84	100	929.32	100	1022.25	100	1124.48	100	3920.88	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum	765 produk hukum	775 produk hukum	230	1000 produk hukum	538.79	-	0	-	0	-	0	-	0	2139 produk hukum	768.8	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fasilitasi Kasus	4 Kasus	4 Putusan Perdata/T UN	120	4 Fasilitasi Kasus	195.83	-	0	-	0	-	0	-	0	4 Kasus	315.84	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Nilai Reformasi Birokrasi (skor)	-	B	82.37	B	41.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	124.07	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	-	B	166.77	B	503.48	-	0	-	0	-	0	-	0	-	670.25	
	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Indeks Nilai Reformasi Birokrasi (skor)	B	B	0	B	0	B	910.39	BB	955.9	BB	1003.7	BB	1053.88	BB	3923.87	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	n.a	B	0	B	0	B	0	BB	0	BB	0	BB	0	BB	0	
		Indeks kepuasan masyarakat (skor)	n.a	65 (Kurang Baik)	0	70 (Kurang Baik)	0	75 (Kurang Baik)	0	76,5 (Baik)	0	77,5 (Baik)	0	80 (Baik)	0	80 (Baik)	0	
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah MOU yang ditindaklanjuti	2 dok	2 dok	343.84	2 dok	202.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	546.33	Bagian Perekonomian
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	100	100	0	100	0	100	778.66	100	856.53	100	942.18	100	1036.4	100	3613.77	Pembanguna n Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Keuangan Non Bank yang dikembangkan	6 LPUK	6 LPUK	29.53	6 LPUK	279.23	-	0	-	0	-	0	-	0	-	58.76	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kredit yang diberikan kepada UMKM	-	225 M	25	250 M	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	75	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	-	WTP	263.77	WTP	237.19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	500.96	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Realisasi Investasi	-	-	0	5	89.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	89.1	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Laju Inflasi Daerah	4	4	19.7	4	69.07	-	0	-	0	-	0	-	0	-	88.77	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Kerjasama Pembangunan	-	400 paket	150 paket, 4 dokumen	519.82	150 paket, 4	360	-	0	-	0	-	0	-	0	-	879.82	Bagian Pengadaan Barang dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
				Dokume n														Jasa Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)		-	0	-	0	100	895.9	100	880	100	880	100	880	100	3535.9	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	400 paket	150 paket	98.93	150 Paket	198.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	297.65	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	5 kali	11 orang	0	20 Orang	225	-	0	-	0	-	0	-	0	-	225	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	2047.4 8	Baik	2173.7 9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4221.27	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	34.65	Baik	37.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	72.25	Bagian Kesejahteraa n Rakyat Sekretariat Daerah
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Pembinaan Olahraga	48 kali	40 kali	150	40 kali	135	-	0	-	0	-	0	-	0	-	285	
	Program Pembinaan, Pengembangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	0	100	0	Baik	23976. 22	Baik	24695. 51	Baik	25436. 37	Baik	26199. 47	Baik	100307. 57	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat																	
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Guru TPA/Madin/Ponpes yang Aktif	2,850	2,850	13688.86	2,850	17300	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30988.86	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	1199.09	Baik	1200.05	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2399.14	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Media Informasi	100	100	2377.3	100	2479.65	4	2603.64	4	2733.82	4	2870.51	4	3014.03	4	16078.94	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Nilai IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	726.89	Baik	929.76	Baik	1159.42	Baik	1418.89	Baik	4234.96	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Tenaga Ahli Pemberitaan	Orang	Orang	116.1	Orang	160.83	-	0	-	0	-	0	-	0	-	276.93	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nilai IKM	Baik	Baik	325.7	Baik	326.07	-	0	-	0	-	0	-	0	-	651.77	
	Program Fasilitasi	Nilai IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	500	Baik	500	Baik	500	Baik	500	Baik	2000	Bagian Umum



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Kegiatan dan Kebijakan KDH																	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Baik	4540.4	Baik	5871.2 1	Baik	6500	Baik	6825	Baik	7166.2 5	Baik	7524.5 6	Baik	38427.4 2	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	-	0	-	0	Baik	8142.8 2	Baik	7540.9 7	Baik	7020.8 8	Baik	7683.2 2	Baik	30387.8 9		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP	0	WTP	148.69	WTP	150	WTP	150	WTP	150	WTP	150	WTP	748.69	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM	Baik	Baik	6938.8 8	Baik	9612.1 8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	16551.0 6	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik	Baik	8145.9	Baik	7848.1 6	Baik	8240.5 7	Baik	8652.6	Baik	9085.2 3	Baik	9539.4 9	Baik	51511.9 5	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN	120	-	0	120	18.19	-	0	-	0	-	0	-	0	120	18.19	
3.1. 2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	Jumlah ASN	-	-	0	-	0	120	914.31	120	960.03	120	814.72	120	656.36	120	3345.42	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Kualitas Sumber Daya Manusia																	Kecamatan Takisung
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai	217 stel	120	100	120	100	-	0	-	0	-	0	-	0	120	200	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN	120	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	BB	0	BB	28.16	-	0	-	0	-	0	-	0	BB	28.16	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	Penyelamatan Dokumen Arsip	100	-	0	100	7.4	-	0	-	0	-	0	-	0	100	7.4	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Tingkat Maturitas SPIP		-	0	-	0	Level 3	50	Level 3	52.5	Level 3	55.13	Level 3	57.88	Level 3	215.51	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	B	B	0	B	0	B	373.02	B	379.73	B	394.62	B	407	BB	1554.37	
	Program Kemitraan Pengembangan	IKM	B	B	50	B	336.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	386.35	

Kecamatan
Takisung



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Wawasan Kebangsaan																	
	Program Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	B	B	0	B	0	B	10.43	B	10.7	B	11.24	B	43.91	BB	43.91	
	Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	B	B	0	B	0	B	93.85	B	96.46	B	101.53	B	395.39	BB	395.39	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	B	B	350.49	B	360.01	B	373.03	B	403.41	B	426.97	B	455.02	BB	2368.93	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	B	B	0	B	0	B	70.63	B	72.75	B	76.39	B	299.53	BB	299.47	
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa	IKM	B	B	50	B	21.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	71.9	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	IKM	B	B	0	B	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana	IKM	B	B	0	B	0	B	45	B	53.47	B	55.15	B	230.67	B	217.6	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM	B	B	0	B	3.71	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.71	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	IKM	B	B	49.9	B	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	64.9	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	IKM	B	B	0	B	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	B	B	0	B	0	B	20.5	B	21.12	B	22.17	B	86.41	BB	86.41	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Keseimbangan Gender Dalam Pembangunan	IKM	B	B	0	B	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	IKM	B	B	60.32	B	80.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	140.9	
	Program Peningkatan Sarana dan	IKM	B	B	47.3	B	44	-	0	-	0	-	0	-	0	-	91.3	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Prasarana Aparatur																	Kecamatan Pelaihari
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	IKM	B	B	15	B	17.62	-	0	-	0	-	0	-	0	-	32.62	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	B	B	0	B	0	B	20.42	B	21.38	B	22.28	B	87.51	BB	87.4	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	0	B	7.05	B	8.02	B	8.51	B	32.63	BB	9.57	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	573.03	B	632.29	B	689.75	B	716.99	B	2612.06	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	57.98	-	385.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	75	B	75	B	80	B	90	B	320	
	Program Koordinasi dan	IKM	-	-	0	-	0	B	70	B	73.5	B	77.18	B	81.03	B	301.71	



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	0	-	13.49	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	9.39	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9.39	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	0	-	15.07	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	15	B	20	B	25	B	30	B	90	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	0	-	6.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.3	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-		-	32.45	-	32.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan	-	-	-	18.33	-	104.67	-	0	-	0	-	0	-	0	-	123	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Prasarana Aparatur																	Kecamatan Tambang Ulang
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-		-	0	-	8.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	-		-	0	-	16.32	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	16.5	-	21.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	0	B	25	B	26.25	B	27.56	B	28.94	B	107.75	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	5	Baik	5.25	Baik	5.51	Baik	5.79	Baik	21.55	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	405	B	450.63	B	477.14	B	503	B	1835.77	
	Program Kemitraan	-	-	-	40	-	382.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	422.4	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
	Program Keseserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	0	-	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15		
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	50	B	45	B	45	B	45	B	185	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	-	B	0	B	0	B	74	B	87	B	83	B	69	B	313	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	365.29	Baik	348.37	Baik	370.95	Baik	363.07	Baik	407	Baik	433.55	BAIK	2.27	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	78	B	73	B	75	B	303	B	303	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	50	-	20	-	0	-	0	-	0	-	0	-	70	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	0	-	12.04	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12.04	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	137	Baik	135	Baik	122	Baik	140	BAIK	534	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	50	-	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	65	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	IKM		-	0	Baik	18	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		B	0	-	0	B	12.15	B	13	B	13	B	13	B	51.15	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	IKM	-	B	0	B	9	-	0	-	0	-	0	-	0	B	9	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	-	-	0	-	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Capaian Kinerja dan Keuangan																		
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	-	-	-	50	-	35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	85	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	48.22	-	77	-	0	-	0	-	0	-	0	-	125.22	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	0	B	15	B	16	B	19	B	20	B	70	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	0	B	5	B	5	B	7	B	8	B	25	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	180.45	B	182.45	B	242.45	B	242.45	B	847.8	Kecamatan Kintap
	Program Kemitraan Pengembangan	-	-	-	57	-	97.84	-	0	-	0	-	0	-	0	-	154.84	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Wawasan Kebangsaan																	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	15	B	15	B	15	B	15	B	60	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	-	-	0	-	0	B	98	B	103	B	103	B	103	B	407	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	381.78	Baik	525.4	Baik	504.05	Baik	518.05	Baik	523.05	Baik	518.05	Baik	2.96	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	15	B	20	B	22	B	25	B	82	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	24	B	69.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	93.9	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	Baik	100	Baik	100	Baik	80	Baik	100	Baik	80	Baik	93	Baik	553	
		-	-	-	27	-	14.39	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	16	-	18.74	-	0	-	0	-	0	-	0	-	34.74	
	Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		-	3	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	-		-	0	-	2.34	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	-		-	8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	10	B	10	B	12	B	12	B	44	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	0	-	3.96	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.96	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	-	-	-	60	-	80	-	0	-	0	-	0	-	0	-	140	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	24.58	-	68.57	-	0	-	0	-	0	-	0	-	93.15	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	15	-	13.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28.5	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	0	B	15	B	15	B	15	B	45	B	90	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP		-	0	B	3.96	A	12.5	A	12.5	A	12.5	A	12.5	BB	53.96	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	298.93	B	327.89	B	355	B	384.86	B	1366.68	Kecamatan Jorong
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	34.47	-	329.39	-	0	-	0	-	0	-	0	-	363.86	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	50	B	52.5	B	55.13	B	57.88	B	215.51	
	Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	-	-	0	-	0	BB	50	BB	52.5	BB	55.13	BB	57.88	BB	215.51	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	B	B	338.49	B	343.4	B	350.34	B	357.35	B	364.49	B	371.78	B	2.13	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	75	B	78	B	82	B	86	B	323	
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	60	-	7.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	67.14	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	B	0	B	0	B	50	B	50	B	50	B	50	B	200	
	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	-	-	-	38.9	-	14.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	53.89	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Kompetitif Usaha Kecil Menengah																	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	0	-	39.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-		39.15
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	0	-	11.82	-	0	-	0	-	0	-	0	-		11.82
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	B	B	20	B	5.96	B	15	B	15	B	17.5	B	20	B		93.46
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	0	-	6.25	-	0	-	0	-	0	-	0	-		6.25
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	-	-	-	40.73	-	30.78	-	0	-	0	-	0	-	0	-		71.51
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	32.87	-	65.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-		97.97
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	30	-	16.74	-	0	-	0	-	0	-	0	-		46.74



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	0	B	20	B	21	B	22.05	B	23.15	B	86.2	Kecamatan Bati-Bati
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	-	B	0	B	0	BB	5	BB	5	BB	6	BB	6	BB	22	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	369.8	B	380.42	B	403.4	B	415.74	B	1569.36	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	IKM	B	Baik	45	-	378.67	-	0	-	0	-	0	-	0	B	423.67	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	B	-	0	B	0	B	18	B	18.36	B	19.28	B	19.65	B	75.29	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	B	-	0	B	0	B	79	B	81.12	B	86.09	B	87.81	B	334.02	
		IKM	B	B	424.54	B	408.15	B	334.02	B	363.24	B	378.47	B	405.61	B	1.89	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	B	-	0	B	0	B	67.43	B	69.21	B	72.47	B	75.05	B		284.16
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	44.66	-	26.82	-	0	-	0	-	0	-	0	-		71.48
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	B	0	B	0	B	109.89	B	114.32	B	118.5	B	124.5	B		467.21
	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	-	-	-	22	-	54	-	0	-	0	-	0	-	0	-		76
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	20.05	-	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-		35.05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	B	B	0	B	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-		6
	Program Peningkatan	-	-	-	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		19



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
5.5. 1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	IKM	B	B	0	Baik	25.97	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25.97	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	B	B	0	B	0	B	15	B	15	B	15	B	20	B	65	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	C	-	9	-	7.5	-	0	-	0	-	0	-	0	Cukup	16.5	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	17.5	-	23.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	40.9	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	IKM	B	-	17.5	-	10.9	-	0	-	0	-	0	-	0	B	28.4	
	Program Perencanaan	IKM	B	-	18	Baik	15	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	33	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pembangunan Daerah																	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	B	-	0	B	0	B	20	B	21	B	22.05	B	23.15	B	86.2	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	C	C	0	C	0	C	7.5	B	9	B	10	B	10	B	526.21	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	B	0	B	387.8	B	327	B	337.5	B	350.5	B	357.5	B	1760.3	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-		-	42.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	42.5	Kecamatan Bumi Makmur
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	Baik	-	0	-	0	B	20	B	22	B	24	B	25	B	91	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan	IKM	Baik	-	0	-	119.08	B	148.12	B	154.25	B	158.85	B	161.01	B	741.31	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	pemerintahan Desa																	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-		-	72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	72	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	B	B	405.67	B	421.51	B	454.3	B	472.72	B	495.29	B	514.8	B	2.76	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	15	B	54	B	65.16	B	67.62	B	69	B	270.78	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	52	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	52	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	B	0	B	60.97	B	45.5	B	42.5	B	51.45	B	78	B	278.42	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-		-	11.25	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11.25	
	program penataan peraturan perundang- undangan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengelolaan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Kekayaan Budaya																	
	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil memnengah	-	-	-	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	14.5	B	15	B	20.07	B	21	B	21.5	B	92.07	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	-	-	-	6.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.5	
	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-	-	6.51	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.51	
	Program Peningkatan	-		-	37	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	37	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Peran Serta Kepemudaan																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	14.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14.5	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	15.73	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.73	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	B	0	B	18.72	B	24	B	27.24	B	29.59	B	30.5	B	130.05	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	2.16	BB	4.5	BB	5.6	BB	6.1	BB	7.3	BB	25.66	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	151.3	Baik	151.3	Baik	193.55	Baik	212.07	Baik	708.22	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	0	-	401.85	-	0	-	0	-	0	-	0	-	401.85	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	16	Baik	16	Baik	20	Baik	16	Baik	68	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat																	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	-	-	0	-	0	Baik	47.73	Baik	47.73	Baik	47.73	Baik	47.73	Baik	190.92	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	-	0	Baik	393.88	Baik	432.98	Baik	476.74	Baik	465.67	Baik	422.97	Baik	2192.24	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	40.31	Baik	41.84	Baik	49.83	Baik	55.31	Baik	187.29	
	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	0	Baik	13.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13.1	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	-	0	Baik	0	Baik	231.01	Baik	231.01	Baik	235.31	Baik	207.67	Baik	905	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	0	Baik	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM		-	0	-	0	-	6.14	Baik	6.75	Baik	7.42	Baik	8.17	Baik	28.48	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	-	0	-	64.55	-	0	-	0	-	0	-	0	-	64.55	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	3.1	-	0	-	0	-	0	-	0	Baik	3.1	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	Baik	5.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.72	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	16.29	Baik	16.92	Baik	17.61	Baik	18.37	Baik	69.19	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	B	-	0	Baik	0	B	11.03	B	12.13	B	13.34	B	14.68	BB	51.18	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	B	0	B	0	B	18	B	18	B	22	B	22	B	80	KELURAHAN PELAIHARI
	Program fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan	IKM	-	-	0	-	0	B	37.49	B	37.49	B	42	B	42	B	158.98	
		IKM	-	-	0	-	0	B	200.6	B	205.6	B	214.8	B	220.8	B	841	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IKM	-	B	0	B	384	B	422.4	B	464.6	B	511.1	B	562.21	B	2344.32	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	B	0	B	195.84	B	145.73	B	167.73	B	194.88	B	237.11	B	941.29	
	Program Pengembangan Data/Informasi/St atistik Daerah	-	-	-	0	-	36.58	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36.58	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	16	-	18.74	-	0	-	0	-	0	-	0	-	34.74	
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	-	-	-	28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28	
	Program Peningkatan	IKM	-	-	0	-	0	B	18	B	18	B	18	B	18	B	72	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi																	KELURAH AN ANGSAU
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	12	-	11.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	23.35	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	6	-	22.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28.45	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	B	B	0	B	8.03	BB	29.5	B	29.5	B	29.5	B	29.5	B	126.03	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	84	B	84	B	87.5	B	89.5	B	345	
	Program fasilitasi Penyelenggaraan	IKM	-	-	0	-	0	B	50.5	B	62	B	57.5	B	57.5	B	227.5	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Urusan Pemerintah Kelurahan																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	-	-	0	-	0	B	232.8	B	244	B	248	B	250	B	974.8	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IKM	-	B	0	B	384	B	422.4	B	464.6	B	511.1	B	562.21	B	2344.32	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	B	71.7	B	52	B	53	B	53	B	229.7	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Keamanan dan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	kenyamanan Lingkungan																	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi	IKM	-	-	0	-	0	B	39	B	40	B	41	B	42	B	162	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	-	-	0	-	0	B	7	B	8	B	8	B	8	B	31	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	100	B	141	B	141	B	141	B	523	KELURAH AN SARANG HALANG
	Program fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan	IKM	-	-	0	-	0	B	35	B	35	B	35	B	37	B	142	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	-	-	0	-	0	B	186	B	206	B	217	B	230	B	839	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IKM	-	-	0	-	384	B	422.4	B	464.6	B	511.1	B	562.21	B	2344.32	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	B	125.2	B	71.2	B	87.2	B	94	B	377.6	
	Program Pengembangan Data/Informasi/St atistik Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Mikro Kecil Menengah																	
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi	IKM	-	-	0	-	0	B	58.02	B	76.58	B	76.42	B	82.8	B	293.82	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	-	-	0	-	0	B	7	B	7	B	7	B	7	B	28	
	Program fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan	-	-	-	0	-	0	B	40	B	43.5	B	44	B	54.5	-	182	
	Program fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	0	-	0	B	70.66	B	96.4	B	129.69	B	94.79	B	391.54	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	-	-	0	-	0	B	183.5	B	199.97	B	207.92	B	219.8	B	811	
		-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IKM	-	-	0	-	384	B	422.4	B	464.6	B	511.1	B	562.21	B	2344.32	KELURAHAN PABAHAN AN
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	B	0	B	0	B	115	B	89	B	65	B	95	B	364	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	IKM	-	-	0	-	0	B	32	B	35	B	40	B	46	B	153	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	B	B	0	B	0	B	12	B	12	B	13	B	14.5	B	51.5	
	Program fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	232.72	Baik	217.94	Baik	246.72	Baik	291.02	Baik	988.4	
	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan	IKM	-	-	0	-	0	Baik	26.5	Baik	34	Baik	36.58	Baik	37.73	Baik	134.81	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	172.6	Baik	205.6	Baik	214.8	Baik	220.8	Baik	813.8	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan &	IKM	-	-	0	Baik	384	Baik	422.4	Baik	464.6	Baik	511.1	Baik	562.21	Baik	2344.32	

KELURAH
AN
KARANG
TARUNA



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	Baik	69.5	Baik	61	Baik	43	Baik	16	Baik	189.5	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi	IKM	-	-	0	Baik	0	Baik	27	Baik	35.5	Baik	40	Baik	45	Baik	147.5	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	SAKIP	-	-	0	-	0	Baik	6	Baik	7	Baik	8	Baik	8	Baik	29	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	125,41	100,00	218.19	100,00	363.54	-	0	-	0	-	0	-	0	-	290.83	Sekretariat DPRD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masayarakat (IKM)	4.341	100,00	4168	100,00	3835	Baik	4017	Baik	4177	Baik	4344	Baik	4518	Baik	3879	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	100,00	3.2	100,00	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	-	-	-	0	100,00	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	-	-	0	-	0	Baik	3223	Baik	1959	Baik	2037	Baik	2119	Baik	1737	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100,00	0	100,00	0	Baik	378.08	Baik	393.2	Baik	408.93	Baik	425.29	Baik	1605.5	
		Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Pengelolaan Informasi, Humas, Keprotokalan dan Perlengkapan DPRD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	50	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	100,00	5.15	100,00	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	

[illegible]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	7,50	100,00	18	100,00	67.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	67.5	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	30,33	100,00	40.8	100,00	63.03	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50.42	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	2.419	100,00	2648	100,00	2193	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.18	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	2,10	100,00	2.72	100,00	2.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.72	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	24.45	-	22.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	22.2	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai Sakip	-	-	0	1 dokumen	0	Baik	91.21	Baik	94.96	Baik	98.74	Baik	102.69	Baik	84.21	Kecamatan Batu Ampar
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	185	B	210	B	220	B	240	B	855	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	46.35	-	120.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	167.07		
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	10	B	0	B	0	B	10	B	20	
	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa	IKM	-	-	0	-	0	B	92	B	92	B	100	B	110	B	394	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	234.12	Baik	441.85	Baik	399.07	Baik	465.22	Baik	486.05	Baik	475	Baik	2.5	
		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	48	B	55	B	60	B	65	B	228	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	-	-	-	47	-	33.07	-	0	-	0	-	0	-	0	-	80.07	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	-	-	-	47.27	-	38.92	-	0	-	0	-	0	-	0	-	86.19	
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	145.05	Baik	113.4	Baik	118.4	Baik	115.7	Baik	492.55	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan unggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	27.11	-	14.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27.11	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	0	-	19.75	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19.75	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	IKM	-	-	0	-	0	B	10	-	0	-	0	B	10	-	20	
	Program Peningkatan Pengembangan	-	-	-	0	-	2.28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.28	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	pengelolaan aset daerah																	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-		-	9.3	-	22.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	-	65	-	80.87	-	0	-	0	-	0	-	0	-	145.87	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	39.67	-	99.31	-	0	-	0	-	0	-	0	-	138.98	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	7.72	-	10.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18.02	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM	-	-	0	-	0	B	33.97	B	33.97	B	33.97	B	40	B	141.91	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	B	0	B	0	B	7	B	7	B	7	B	10.99	BB	31.99	
Penunjang Pemerintahan Perencanaan					0,00		3.878,13		4.931,34		5.436,97		6.003,18		6.645,98		26.895,60	
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	IKM	Baik	-	0	Baik	123.25	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD		-	0	100%	44.28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	-	0	Baik	1450.9 4	Baik	1786.8 9	Baik	2250.1 8	Baik	2292.4 4	Baik	2490.3	Baik	8819.81	
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	B	-	0	-	0	B	795.13	B	986.74	B	1089.4 2	B	1244.3 6	B	4115.64	
11	Program pengembangan perumahan	Rumah layak huni		-	0	-	278.22	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	IKM	Baik	-	0	Baik	230.29	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	B	-	0	B	10.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM	Baik	-	0	Baik	222.03	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	0	-	9.41	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
4	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	B	-	0	-	0	B	100	B	115	B	205	B	145	B	565	
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD		-	0	100%	1074.53	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD		-	0	-	0	90%	1300	90%	1130	85%	1500	80%	1760	80%	5690	
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi		-	0	100%	48.99	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		-	0	-	0	90%	191.32	90%	196.32	85%	201.32	80%	206.32	80%	795.28	
8	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan		-	0	-	0	90%	600	90%	568.73	85%	500	80%	550	80%	2218.73	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pengembangan Wilayah	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah																
10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh		-	0	100%	320.92	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang Perencanaan Sosial dan Budaya		-	0	100%	64.28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya		-	0	-	0	90%	128	90%	150	85%	160	80%	180	80%	618	
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	B	-	0	-	0	BB	30	A	40	A	55	A	70	A	195	
Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan					0,00		505,12		1.125,00		1.225,00		1.325,00		1.415,00		5.595,12	
9	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti		-	0	-	0	60%	1125	70%	1225	75%	1325	80%	1415	80%	5090	
		Persentase hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti		-	0	100%	505.12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
14	Program Pengembangan Data/Informasi	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah																		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					4.960,20		9.414,56		5.842,12		6.134,28		6.441,04		6.763,14		39.555,34	
Program Mutasi, Data dan Informasi	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	0	0	0	0	0	26 Orang	1452.91	26 Orang	1455.41	26 Orang	1457.91	26 Orang	1460.41	100,00	5826.64		
	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	0	0	0	0	0	612 Orang	0	612 Orang	0	612 Orang	0	612 Orang	0	612 Orang	0		
	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	0	0	0	0	0	234 Orang	0	234 Orang	0	234 Orang	0	234 Orang	0	234 Orang	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	100	100	2388.55	100	2119.26	0	0	0	0	0	0	0	0	100	4507.81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	IKM	0	0	0	0	0	Baik	1819.95	Baik	1814.61	Baik	1813.87	Baik	1933.47	Baik	7381.89		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbina dan Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100	100	2132.99	100	3275.98	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5408.97		
	Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	20 Jam	2457.92	20 Jam	2757.92	20 Jam	3057.92	20 Jam	3257.92	20 Jam	11531.68		
	Persentase ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	94.74	0	97.58	0	99	0	100	0	100	0		
	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan	0	0	0	0	0	56.49	0	64.85	0	69.04	0	73.22	0	73.22	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
dan Pelatihan Struktural																		
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	0	0	0	0	0	Baik	46.6	Baik	41.6	Baik	46.6	Baik	46.6	Baik	181.4	
	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Pendidikan Kedinasan Aparatur	100	100	426.61	100	3996.7 1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	4423.32	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 dokumen	1 dokumen	0.81	1 dokumen	1.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	1.82	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	11.24	100	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	100	32.84	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	0	0	0	0	0	Baik	25	Baik	25	Baik	25	Baik	25	Baik	100	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	IKM	0	0	0	0	0	Baik	39.74	Baik	39.74	Baik	39.74	Baik	39.74	Baik	158.96	
Penunjang Pemerintahan Keuangan					7.199,7 0		10.859, 12		12.058, 15		13.265, 97		14.590, 37		16.049, 40		74.022,7 1	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	2053.43	100,00	2304.77	100,00	2167.79	100,00	2550.58	100,00	2933.16	100,00	3066.36	100,00	8169.86	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	574.18	100,00	1060	100,00	660.3	100,00	759.35	100,00	3053.83	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	736.74	-	781.25	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1517.99	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	2300	-	2661.35	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4961.35	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	20	-	75	-	0	-	0	-	0	-	0	-	95	
	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	1202.37	WTP	1216	WTP	1398.4	WTP	1608.16	WTP	5424.93	
		Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	15,00	15,00	0	15,00	0	15,00	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	15,00	15,00	0	15,00	0	15,00	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	
		Persentase belanja pendidikan 20%	Dilaksan akan	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	
		Persentase belanja kesehatan 10%	Dilaksan akan	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	Dilaksan akan	0	
		Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	50:50:00	50:50:00	0	50:50:00	0	55:45:00	0	55:45:00	0	60:40:00	0	60:40:00	0	60:40:00	0	
	Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	85,00	85,00	0	87,00	0	89,00	1670.2 5	90,00	1391.5	92,00	1600.2 2	95,00	1840.2 5	95,00	6502.22	
		Persentase SKPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrua (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	925.09	100,00	976.3	100,00	1122.7 4	1291.15	1291.1 5	100,00	4315.28	
		Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	597.71	100,00	650	100,00	917.4	100,00	934.37	100,00	3097.48	
Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	9.46	-	8.72	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18.18	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	87.5	-	132.05	-	0	-	0	-	0	-	0	-	219.55	
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	25	100,00	35	100,00	40	100,00	45	100,00	145	
		Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	9.87	-	7.45	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17.32	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	0	1 dokumen	0	100,00	72.5	100,00	79	100,00	82	100,00	85	1 dokumen	318.5	
		Tersedianya okumen Renja Perangkat Daerah yang selara dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	12 dokumen	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	B	0	B	0	BB	0	BB	0	BB	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	878.15	100,00	1458.4 4	100,00	1460.7 2	100,00	1473.2 3	100,00	1488.1 1	100,00	1499.2 8	100,00	8257.93	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai IKM	-	0	-	0	B	361.04	B	368.75	B	426.9	B	455.19	-	1611.88		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Ketersediaan dokumen sensus barang milik daerah	-	2 Dok	2.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.2	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah	(9,20)	14,60	1073.2 3	9,75	3101.4 9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4174.72	
		Persentase pertumbuhan PAD	11,72	-29	0	(3,89)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	14	8,49	0	8,22	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Peningkatan dan Pengembangan	Persentase Pertumbuhan	120,19	28,02	0	(1,01)	0	11,81	638.79	6,75	739.74	7,02	827.02	7,24	895.41	7,24	3100.96	



Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Pengelolaan Pajak Daerah	penerimaan pajak daerah																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Persentase Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB	153,75	(7,04)	0	(2,94)	0	19,70	1900.3	9,81	2200.4 2	9,22	2400.5 2	11,35	2780.4 9	11,35	9281.73	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Lain- lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	Persentase Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah	115,12	(13,58)	0	(3,63)	0	1,22	396.41	0,96	453.45	0,76	613.1	0,66	699.39	0,66	2162.35	
		Persentase pertumbuhan pendapatan lain-lain	111,47	17,72	0	10,89	0	4,32	0	4,54	0	4,50	0	4,32	0	4,32	0	
		Ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah	3 Dok	3 Dok	0	6 Dok	0	6 Dok	0	6 Dok	0	6 Dok	0	6 Dok	0	30 Dok	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek peraturan Perundang-undangan yang terealisasi	86,00	100,00	0	100,00	121	-	0	-	0	-	0	-	0	-	121	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	B	3.34	BB	5.39	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8.73	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana	100,00	100,00	23.58	100	197.27	-	0	-	0	-	0	-	0	-	220.85	
	Program Penyebarluasan	Pelaksanaan pameran pembangunan	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	20	100,00	22	100,00	24.5	100,00	28	100,00	94.5	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
		-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dengan Renstra SKPD	100,00	100,00	2.2	100,00	4.94	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7.14	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD	-	-	0	1 Dok	0	1 Dok	46	1 Dok	50	1 Dok	56	2 Dok	62	5 Dok	214	
		Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	10 dokumen	0	
		Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	B	B	0	BB	0	BB	0	BB	0	BB	0	BB	0	BB	0	
		Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
		Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	
Penunjang Pemerintahan Pengawasan					3.109,46		3.533,14		4.450,24		4.579,15		4.796,36		5.038,17		25.506,52	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	baik	baik	476.04	100,00	686.3	baik	872	baik	960	baik	1045	baik	1125	baik	5164.34	Inspektorat
	Program Pemenuhan, Peningkatan	IKM	baik	100,00	0	100,00	0	baik	1050	baik	975	baik	975	baik	987.5	baik	3987.5	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	0	-	3.15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.15	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	-	-	-	0	-	296.22	-	0	-	0	-	0	-	0	-	296.22	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM	baik	-	94.95	baik	209.85	-	0	-	0	-	0	-	0	-	304.8	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan yang material pada obrik	40 SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya material	-	1112.5 3	50%	1168.9 8	40%	1276.1 7	30%	1339.9 7	20%	1406.9 7	10%	1477.3 2	10%	7781.94	
		Persentase PKPT yang dapat dilaksanakan	80%	-	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	
		Persentase Entitas Pelaporan Keuangan dengan Laporan Keuangan sesuai Standar	100%	-	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GG)		Pesentase pengawasan Pengaduan masyarakat/ instansi yang ditindaklanjuti	100%	-	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	1	75%	0	
		Persentase Temuan Hasil Pengawasan katagori tuntas ditindaklanjuti	Jumlah rekomen dasi yang belum tuntas di TL : 698	-	0	0.7	0	0.72	0	0.75	0	0.8	0	0.82	0	-	0	
		Persentase kebijakan pengawasan internal yang diterbitkan dan diterapkan	7 buah kebijakan	-	0	5 buah 100%	0	5 buah 100%	0	5 buah 100%	0	5 buah 100%	0	5 buah 100%	0	-	0	
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,1	-	1425.9 4	Lefel 3,2	1168.6 4	Level 3,3	1227.0 7	Level 3,4	1288.4 3	Level 3,5	1352.8 5	Level 3,6	1420.4 9	Level 3,6	7883.42	
		Nilai Reformasi Birokrasi	3,4	-	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0	7,5	7,5	7,5 (baik)	0	
		Level kapabilitas APIP	2+ hasil penilaian BPKP	-	0	Lefel 3	0	Lefel 3	0	Lefel 3	0	Lefel 3	0	Lefel 3	0	-	0	
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)	-	0	75 (BB)	0	75 (BB)	0	75 (BB)	0	75 (BB)	0	75 (BB)	0	75 (BB)	0	
		Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD	-	0	1 SKPD	0	1 SKPD	0	1 SKPD	0	1 SKPD	0	1 SKPD	0	5 SKPD	0	
		IKM	baik	100,00	0	100,00	0	baik	25	baik	15.75	baik	16.54	baik	17.36	baik	64.65	
TOTAL					599,30 0.06		548,97 6.40		659,71 4.35		701,53 9.89		757,78 7.37		819,50 4.53		4,086,82 2.60	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ditampilkan pada Tabel 8.1 dan 8.2;



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Tahun Ke					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,57	7,97	7.99	8.00	8.05	8.07
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12,25	12,83	13,12	13,14	13,19	13,22
3.	Angka harapan hidup (tahun)	68,76	68,76	68,90	69,10	69,30	69,60	69,80
4.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	2,20	2,20	2,20	1,48	1,38	1,20	1,10
5.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Jumlah Atlet yang berprestasi	83	57	62	68	74	81	89
9.	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Jumlah inovasi pelayanan publik yang didaftarkan	0	0	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi
11.	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	2 Unit Usaha *	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha
12.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	CC	B	B	B	BB	BB	BB
13.	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Indeks keterbukaan informasi publik	65,00 *	65,00	67,00	69,00	70,00	72,00	75,00
15.	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD
16..	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
18..	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
19.	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4,80	4,85	4,9	4,95	5,00	5,05
20.	Indeks Gini (skor)	0,259	0,258	0,257	0,256	0,255	0,254	0,253
21.	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,00 *	88,00	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,42	3,30	3,00	2,80	2,60	2,5
23.	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi) *	160 (Tinggi)	150 (Tinggi)	135 (Sedang)	130 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)
24.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	9,5	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00
25.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	29,59	34,41	38	43	64	80	85
26.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	80	83	84	87	93	97	100
27.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	60,00	62,00	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00
28.	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan #1)	-	-	100	120	125	130	135
30.	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,50	3,50	3,50	3,51	3,52	3,53	3,57
31.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7,56	7,56	7,56	7,67	7,68	7,69	7,60
32.	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	275.000	275.000	280.000	285.000	290.000	300.000	350.000
33.	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Target Tahun Ke						
		Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
34..	Desa Berketahanan Pangan (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35..	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00 *	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
36.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00	65,00	70,00	78,00	87,00	92,00	98,00
37.	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38.	Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)	100 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39.	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	0	8	26	26	26	26	20
40.	Jumlah Desa Dibina Berciri Khas	0	0	5	5	5	5	5
41.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15,00	15,00	12,00	10,00	7,00	3,00	1,00
42.	Luasan RTH publik kota (Ha)	108,26	108,26	108,26	110,5	110,5	113,75	113,75
43	Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)	10	15	20	35	50	60	80
44	Indeks Pembangunan Pemuda	na	na	45,70	45,90	46,00	46,50	46,75
45	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	20,00 *	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
46	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	60,00 *	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1.1.1.1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	4,64	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	4,64	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
1.1.1.2	Tingkat Inflasi Daerah (%)	3,82	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.1.3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	28,57	30,00	31,50	33,07	34,73	36,81	39,02	39,02
1.1.1.4	Indeks Gini (skor)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25
1.1.1.5	Penduduk miskin (orang)	15.308	15.155	15.003	14.853	14.705	14.558	14.412	14.412
	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,60	4,40	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35	4,35
1.1.1.6	Indeks Pembangunan Manusia (skor)	68,00	68,10	68,30	68,50	68,70	68,90	70,10	70,10
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Angka melek huruf (%)	97,00 *	97,00	99,70	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,57	7,97	7,99	8,00	8,05	8,07	8,07
1.2.3	Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12,25	12,83	13,12	13,14	13,19	13,22	13,22
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	106,97	103,38	100	100	100	100	100,00	100,00
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	74.81	76	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
1.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	92,68	96.5	88.52	88.56	88.58	88.67	88.9	88.9
1.2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	56.27	60	63	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
1.2.8	Angka harapan hidup (tahun)	68,76	68,76	68,90	69,10	69,30	69,60	69,80	69,80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.9	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10	Persentase balita gizi kurang (%)	6,90	6,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.11	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,27	68,00	69,90	70,30	71,00	71,12	71,90	71,90
1.2.13	Rasio penduduk yang bekerja (%)	64,77	65,42	66,07	66,73	67,40	68,07	68,75	68,75
1.2.14	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00 *	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	5,00 *	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.16	Indeks kepuasan masyarakat	65 (Kurang Baik) *	65 (Kurang Baik)	70 (Kurang Baik)	75 (Kurang Baik)	76,5 (Baik)	77,5 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)
1.2.17	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,69	11,00	11,00	11,00	11,00	11,61	12,35	12,35
1.2.18	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.19	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00 *	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.2.20	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	84,60	86,29	88,02	89,78	91,57	93,41	95,27	95,27
1.2.21	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.22	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.23	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.24	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00 *	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.25	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.26	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.27	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,95	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.28	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7,56	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga								
1.3.1	Jumlah grup kesenian	5 *	5	7	9	10	12	15	15
1.3.2	Jumlah gedung kesenian	1 *	1	1	1	1	1	1	1
1.3.3	Jumlah gedung olahraga	2 *	2	2	2	2	2	3	3
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Angka melek huruf (%)	97,00 *	97,00	99,70	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00
2.1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,57	7,97	7,99	8,00	8,05	8,07	8,07
2.1.1.3	Harapan lama sekolah (tahun)	11,82	12,25	12,83	13,12	13,14	13,19	13,22	13,22
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	30,00 *	50,00	55,00	57,00	60,00	65,00	70,00	70,00
2.1.1.5	Rasio Murid-Guru PAUD (rasio)	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
2.1.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	106,97	103,38	100	100	100	100	100	100
2.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	74,81	76	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
2.1.1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	92,68	96,5	88,52	88,56	88,58	88,67	88,9	88,9
2.1.1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	56,27	60	63	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
2.1.1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	99,70 *	99,70	99,75	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00
2.1.1.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	92,50 *	92,50	93,00	94,00	95,00	96,00	97,50	97,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.1.12	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	0,08	0	0,60	0,45	0,30	0,25	0,20	0,20
2.1.1.13	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	0,0001	0	0,15	0,10	0,8	0,07	0,05	0,05
2.1.1.14	Angka Kelulusan UN (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.15	Angka Kelulusan UN (AL) SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,83	98,97	99,40	99,55	99,70	99,75	99,80	99,80
2.1.1.17	Cakupan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik (%)	80,00 *	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	95,00	95,00
2.1.1.18	Cakupan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	70,00 *	70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	85,00	85,00
2.1.1.19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (rasio)	1 : 110 *	1 : 110	1 : 105	1 : 100	"1 : 95	1 : 90	1 : 85	1 : 85
2.1.1.20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (rasio)	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
2.1.1.21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
2.1.1.22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.23	Cakupan siswa SD yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.24	Cakupan siswa SMP yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.25	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	65,28	67,00	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.1.26	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	50,00 *	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	65,00	65,00
2.1.1.27	Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup yang meningkat keterampilannya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.28	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.29	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.30	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.31	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.32	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SD (skor)	100,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
2.1.1.33	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP (skor)	65,00 *	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2.1.1.34	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses listrik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.35	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses internet untuk tujuan pengajaran (%)	5,00 *	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00
2.1.1.36	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran (%)	20,00 *	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
2.1.1.37	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses air minum layak	30,00 *	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00
2.1.1.38	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas dasar per jenis kelamin (%)	30,00 *	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00
2.1.1.39	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas cuci tangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.1.40	Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (%)	70,00 *	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.41	Jumlah Desa yang memiliki PKBM aktif (desa)	1 *	1	2	5	10	15	20	20
2.1.1.42	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pendidikan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.1.42	Rata-rata nilai ujian SD/MI	56,06	56,06	58,40	60,89	61,89	61,90	62,29	62,29
2.1.1.44	Rata-rata nilai ujian SD/Mts	52,07	52,07	54,22	56,07	58,21	60,34	62,45	62,45
2.1.2 Kesehatan									
2.1.2.1	Angka harapan hidup (tahun)	68,76	68,76	68,90	69,10	69,30	69,60	69,80	69,80
2.1.2.2	Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (<i>Program Unggulan #5</i>) (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.3	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00 *	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.2.4	Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.5	Cakupan <i>buffer stock</i> obat Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.6	Persentase Instalasi farmasi kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	50,00 *	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.1.2.8	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki puskesmas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.9	Cakupan puskesmas terakreditasi (%)	50,00 *	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.10	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (tema)	3 *	3	5	5	5	5	5	28
2.1.2.11	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	30,00 *	30,00	27,50	25,00	22,50	20,00	15,00	15,00
2.1.2.12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (%)	20,00 *	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00	10,00	10,00
2.1.2.13	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)	2,00 *	2,00	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00	10,00
2.1.2.14	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	5,00 *	5,00	5,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00
2.1.2.15	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.2.16	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang yang dapat ditangani (%)	100,00 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.18	Angka kematian akibat keracunan (kasus)	10 *	10	10	10	10	5	5	50
2.1.2.19	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.20	Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk (kasus)	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.2.21	Tingkat kematian akibat malaria (kasus)	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.22	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	50 *	50	50	45	40	35	30	30



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.24	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	30	30	30	30	25	25	20	20
2.1.2.25	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.27	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.28	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	50	50	50	45	40	35	30	30
2.1.2.29	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.30	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.31	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.32	Penderita diare yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.33	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,50 *	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,05
2.1.2.34	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
2.1.2.36	Jumlah Lembaga Mitra Pembangunan Kesehatan (lembaga)	3	3	3	5	5	5	5	26



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.37	Persentase penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.38	Persentase penyalahgunaan narkoba yang menyelesaikan program rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.39	Persentase penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.40	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.2.41	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	0,10 *	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05
2.1.2.42	Unmet need pelayanan kesehatan (%)	6,00 *	6,00	5,00	4,50	4,00	3,00	2,00	2,00
2.1.2.43	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.44	Bidan yang Kompeten PPIA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.45	Cakupan perawatan balita gizi buruk (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.46	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.47	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.2.48	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	25	25	24	23	22	21	20	20
2.1.2.49	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.50	Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.2.51	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.52	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.1.2.53	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	13,98	10,8	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2
2.1.2.54	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	15,7	15,00	15,00	14,00	13,00	11,00	10,00	10,00
2.1.2.55	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	35,00	50,00	50,00
2.1.2.56	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.57	Cakupan penanganan kesehatan bayi (%)	89,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.58	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	65,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.59	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	986,00	986,00	987,00	987,50	988,00	988,50	988,70	988,70
2.1.2.60	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.2.61	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.62	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.63	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	35,00	35,00	30,00	30,00	25,00	25,00	20,00	20,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.64	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.65	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.66	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.67	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.68	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.1.2.69	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	56,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.70	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	300 *	500	525	550	575	600	700	700
2.1.2.71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.72	Cakupan Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.73	Cakupan SDM kesehatan yang terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.74	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1 : 5263	1 : 5000	1 : 5000	1 : 4000	1 : 4000	1 : 4000	1 : 3000	1 : 3000
2.1.2.75	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	1 : 100.000	1 : 50.000	1 : 50.000	1 : 50.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000
2.1.2.76	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1 : 1.219	1 : 1.219	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 900	1 : 900	1 : 900
2.1.2.77	Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	1 : 121	1 : 121	1 : 121	1 : 100	1 : 110	1 : 110	1 : 100	1 : 100
2.1.2.78	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.79	Cakupan masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.80	Angka kematian dari percobaan bunuh diri (kasus)	5	5	5	5	5	5	5	30
2.1.2.81	Cakupan Rumah sakit yang sudah terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.82	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (%)	20,00 *	20,00	17,50	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00
2.1.2.83	Indeks Kinerja Pelayanan RSUD dan Pelayanan Puskesmas (kategori)	Kategori Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik	Kategori: Baik
2.1.2.84	Nilai Capaian SPM Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.85	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.86	Jumlah desa yang memiliki kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	5 *	5	10	10	10	10	10	55
2.1.2.87	Cakupan Kelurahan/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	91,40	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
2.1.2.88	Persentase desa yang memiliki rumah tangga berPHBS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.89	Persentase desa ODF	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
2.1.2.90	Persentase desa STBM	29,03	30,00	37,00	44,00	52,00	60,00	65,00	65,00
2.1.2.91	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.92	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kesehatan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.2.93	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.94	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.95	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.96	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.97	Indeks keuangan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.98	Indeks utilisasi (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.99	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.100	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.101	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.102	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.103	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.104	Indeks pendidikan (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.105	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.106	Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.107	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.108	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.109	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.110	Indeks level IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.111	Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.112	Jumlah inovasi pelayanan di rumah sakit	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.2.113	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.114	Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.115	Jumlah inovasi pelayanan di masing-masing puskesmas	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	29,59	34,41	38	43	64	80	85	85
2.1.3.2	Persentase terhubungnya antar wilayah kecamatan melalui transportasi darat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.3	Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)	10	10	10	10	10	10	10	60
2.1.3.4	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatnya kualitasnya (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
2.1.3.5	Persentase jalan yang dipelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.6	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.7	Panjang jalan di Kota Pelaihari yang dilebarkan (km)	-	-	-	2,50	2,50	2,50	-	7,50
2.1.3.8	Cakupan pengerasan dan pengaspalan Jalan Swarangan (%)	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.3.9	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	20,00 *	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
2.1.3.10	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.11	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	30,00 *	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
2.1.3.12	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	50,00 *	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.1.3.13	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	60,00 *	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
2.1.3.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan (%)	70,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.15	Cakupan pembangunan Kantor Bupati (%)	-	-	-	40,00	70,00	80,00	100,00	100,00
2.1.3.16	Cakupan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.17	Tersedianya standar satuan harga jasa konstruksi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.3.18	Cakupan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.19	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	83,00 *	83,00	84,00	87,00	93,00	97,00	100,00	100,00
2.1.3.20	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.3.21	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.22	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	0,50 *	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,50
2.1.3.23	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.24	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun (kebijakan)	-	-	-	1	-	-	1	2
2.1.3.25	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	40,00 *	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
2.1.3.26	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	50,00 *	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.1.3.27	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	50,00 *	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.1.3.28	Persentase pengawasan dalam pembangunan jalan desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.29	Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3.30	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1	1	1	1	1	1	1	4
2.1.3.31	Persentase teknologi konstruksi terbaru yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)	10,00 *	10,00 *	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
2.1.3.32	Cakupan pemeliharaan alat-alat konstruksi yang dimiliki (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.4.1	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)	10 *	10 *	10 *	10	10	10	10	40
2.1.4.2	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	15	15-	12	10,00	7,00	3,00	1,00	1,00
2.1.4.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	40 *	50 *	60 *	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.1.4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15,00 *	15,00	12,00	10,00	7,00	3,00	1,00	1,00
2.1.4.5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	10,00 *	10,00	8,00	6,00	5,00	4,00	2,00	2,00
2.1.4.6	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.4.7	Jumlah kawasan pengembangan rumah komersil yang dibangun (kawasan)	1	1	2	2	2	2	2	11
2.1.4.8	Luasan RTH publik kota (Ha)	108,26	108,26	108,26	110,5	110,5	110,5	113,75	113,75
2.1.4.9	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	10,00 *	10,00	20,00	25,00	40,00	45,00	50,00	50,00
2.1.4.10	Jumlah inovasi pelayanan di bidang perumahan dan rakyat dan kawasan permukiman	1	1	1	1	1	1	1	4
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
2.1.5.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (skor)	70 (sedang)	70 (sedang)	71 (sedang)	71,5 (sedang)	72 (sedang)	72,5 (sedang)	73,43 (sedang)	73,43 (sedang)
2.1.5.2	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.3	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	10 Lembaga	10 lembaga	15 lembaga	20 lembaga	25 lembaga	30 lembaga	40 lembaga	40 lembaga



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.5.5	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.6	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.7	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)	5,00 *	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00
2.1.5.8	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.9	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.10	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.11	Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.12	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.14	Cakupan fasilitasi pembinaan seni budaya daerah bagi remaja usia sekolah (%)	5,00 *	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00
2.1.5.15	Cakupan fasilitasi pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat miskin (%)	2,00 *	2,00	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	15,00
2.1.5.16	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.17	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)	-	70,00	70,00	-	70,00	-	-	70,00
2.1.5.18	Jumlah Desa sadar politik (desa)	5	5	5	5	5	5	5	25
2.1.5.19	Jumlah Desa Peduli Toleransi	5	5	5	5	5	5	5	25
2.1.5.20	Jumlah inovasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1	1	1	1	4



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.5.21	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.22	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	100	100	100	90	80	70	50	50
2.1.5.23	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.24	Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.25	Jumlah tindak pidana (kasus)	145 *	140	120	100	100	90	70	70
2.1.5.26	Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.27	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1 : 5.000	1 : 5.000	1 : 4.500	1 : 4.000	1 : 3.000	1 : 2.900	1 : 2.500	1 : 2.500
2.1.5.28	Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	1 : 100	1 : 100	1 : 90	1 : 80	1 : 70	1 : 60	1 : 50	1 : 50
2.1.5.29	Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
2.1.5.30	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.31	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.5.32	Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	2	2	15	15	15	15	15	77
2.1.5.33	Jumlah inovasi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.6	Sosial								
2.1.6.1	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	9,50	10,00	12,50	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.6.2	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.4	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.6	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.7	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.8	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif yang Aktif	2	2	4	6	9	10	15	15
2.1.6.9	Cakupan peningkatan SDM kesejahteraan sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.10	Cakupan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.11	Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.12	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.13	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.14	Jumlah inovasi pelayanan Dinas Sosial	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.6.15	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	160 (Tinggi) *	160 (Tinggi)	150 (Tinggi)	135 (Sedang)	130 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)	120 (Sedang)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.6.16	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.17	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	25,00 *	25,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
2.1.6.18	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.19	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.6.20	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.21	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.22	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.23	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.24	Desa tangguh bencana (desa)	2	2	4	6	8	10	15	15
2.1.6.25	Jumlah inovasi pelayanan BPBD	-	-	-	1	1	1	1	4
2.1.6.26	Angka Kemiskinan (%)	4,60	4,40	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35	4,35
2.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.2.1	Tenaga Kerja								
2.2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,27	68,00	69,90	70,30	71,00	71,12	71,90	71,90
2.2.1.2	Rasio penduduk yang bekerja (%)	64,77	65,42	66,07	66,73	67,40	68,07	68,75	68,75
2.2.1.3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.2.1.4	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.5	Tingkat Pengangguran (%)	3,70	3,60	3,50	3,40	3,00	3,20	3,10	3,10



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.1.6	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.7	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.8	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	-	-	25	27	30	32	35	35
2.2.1.9	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (%)	40,00 *	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00
2.2.1.10	Penetapan UMK (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.1.11	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.12	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	100 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.13	Persentase tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan setelah mendapatkan pelatihan (%)	100 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.14	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK (%)	-	-	500	500	500	500	500	2.500
2.2.1.15	Jumlah inovasi pelayanan bidang tenaga kerja	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (skor)	160 (tinggi)	160 (tinggi)	150 (tinggi)	135 (sedang)	130 (sedang)	125 (sedang)	120 (sedang)	120 (sedang)
2.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Laut (%)	14,29 *	14,29	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.2.2.3	Proporsi kursi perempuan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kalimantan Selatan	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2.4	Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala SKPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)	30,00	30,00	40,00	42,00	45,00	47,50	50,00	50,00
2.2.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,89	47,83	48,78	49,76	50,76	51,77	52,81	52,81
2.2.2.6	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	-	-	-	1	1	2	2	6
2.2.2.7	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.8	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.9	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.10	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.11	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.12	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	-	-	2	4	6	8	10	10
2.2.2.13	Kabupaten Layak Anak (kategori)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
2.2.2.14	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.2.15	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.16	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2.17	Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.2.18	Rasio KDRT (rasio)	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.000
2.2.2.19	Desa peduli perempuan dan anak (desa)	2 *	2 *	2	2	2	2	2	10
2.2.2.20	Jumlah inovasi pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.3	Pangan								
2.2.3.1	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2.2.3.2	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	84,60	86,29	88,02	89,78	91,57	93,41	95,27	95,27
2.2.3.3	Cakupan ketersediaan data harga pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.4	Cakupan pengawasan mutu dan keamanan pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.5	Cakupan pemantauan distribusi pangan di pintu masuk utama kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.6	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.7	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.8	Jumlah inovasi pelayanan bidang pangan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.3.8	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	-	131.677	132.977	134.377	134.377	135.977	135.977	135.977
2.2.4	Pertanahan								
2.2.4.1	Cakupan fasilitasi penyediaan tanah untuk Kawasan Industri Jorong	-	-	-	25,00	40,00	50,00	60,00	60,00
2.2.4.2	Cakupan penyelesaian konflik tanah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.4.3	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.4.4	Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	50,00 *	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.4.5	Jumlah inovasi pelayanan bidang pertanahan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.5	Lingkungan Hidup								
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (skor)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2.2.5.3	Indeks Kualitas Air (skor)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.2.5.4	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.5	Cakupan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.6	Cakupan ketersediaan data lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.7	Persentase sungai yang dipantau baku mutunya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.8	Rasio kualitas udara yang dipantau pada titik pengamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.9	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air (%)	-	-	-	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
2.2.5.10	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.11	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.12	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.13	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.14	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.5.15	Jumlah inovasi pelayanan bidang lingkungan hidup	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.5.16	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.17	Cakupan penyediaan alat-alat laboratorium prioritas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.2.6.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.2	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.3	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.4	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.5	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.6	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.7	Rasio pasangan berakte nikah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.8	Persentase kepemilikan KK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.9	Cakupan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.10	Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.11	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (inovasi)	-	-	-	1	-	1	-	2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.6.12	Cakupan kerjasama administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.13	Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	2 *	2	5	10	20	40	60	60
2.2.6.14	Jumlah inovasi pelayanan bidang lingkungan hidup	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.2.7.1	Indeks Desa Membangun (skor)	0,700* (berkmbang)	0,700 (berkembang)	0,715 (Maju)	0,730 (Maju)	0,750 (Maju)	0,800 (Maju)	0,815 (Mandiri)	0,815 (Mandiri)
2.2.7.2	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.3	Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.4	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	8*	8	26	26	26	26	20	130
2.2.7.5	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.6	Cakupan pendampingan penyusunan RPJM Desa (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.7	Cakupan pendampingan evaluasi kinerja RPJM Desa (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.8	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya (desa)	-	-	2	5	5	5	5	22
2.2.7.9	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	-	-	2	4	5	5	7	18
2.2.7.10	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan BUMDES (desa)	-	-	-	2	2	2	2	8



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.7.11	Jumlah desa yang memiliki BUMDES yang bergerak di industri kreatif (desa)	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.7.12	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.13	Persentase LPM berprestasi (%)	-	-	2,00	5,00	7,00	10,00	15,00	15,00
2.2.7.14	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.15	Persentase PKK aktif (%)	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
2.2.7.16	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.17	Cakupan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.18	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.19	Cakupan desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.20	Cakupan desa yang tertib administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.21	Jumlah inovasi pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2 *	2	2	2	2	2	2	2
2.2.8.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	2,20	2,20	2,20	1,48	1,38	1,20	1,10	1,10
2.2.8.3	Ketersediaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.8.4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi	2 *	2 *	2	4	5	6	7	7



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan								
2.2.8.5	Ketersediaan regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.8.6	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,53	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25
2.2.8.7	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	5,00 *	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.8.8	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (%)	78,76	79,94	81,14	82,36	83,59	84,85	86,12	86,12
2.2.8.9	Peserta anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti KB (%)	45,00 *	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
2.2.8.10	Persentase anggota Bina Keluarga (BKR) Berstatus Ber-KB (%)	60,00 *	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
2.2.8.11	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	65,00 *	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2.2.8.12	Persentase PUS yang mendapat KIE (%)	15,00 *	15,00	25,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
2.2.8.13	Unmeet need KB pada pasangan usia subur (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.8.14	Desa sadar KB (desa)	-	-	2	5	5	5	5	22
2.2.8.15	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.9	Perhubungan								
2.2.9.1	Jumlah kasus kecelakaan (kasus)	20 *	20	20	20	20	20	20	20
2.2.9.2	Cakupan revitalisasi terminal yang dikelola kabupaten (%)	-	-	10,00	20,00	25,00	40,00	50,00	50,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.9.3	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum (Rp Juta)	12,60	13,86	15,25	16,77	18,45	20,29	22,32	22,32
2.2.9.4	Penerimaan retribusi pengelolaan terminal (Rp Juta)	122,29	125,34	128,48	131,69	134,98	138,36	141,82	141,82
2.2.9.5	Persentase angkutan umum yang layak digunakan di terminal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.6	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.7	Cakupan pemasangan petunjuk jalan di ruas jalan kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.8	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.9	Cakupan penegakan pelanggaran lalu lintas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.10	Cakupan kesiapsiagaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam acara prioritas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.11	Pertumbuhan arus penumpang angkutan darat (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.9.12	Pertumbuhan barang yang terangkut angkutan darat (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
2.2.9.13	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan darat (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
2.2.9.14	Cakupan ketersediaan akses perhubungan menuju Pelabuhan Jorong (%)	-	-	-	15,00	25,00	40,00	50,00	50,00
2.2.9.15	Cakupan monitoring sarana pehubungan laut, sungai, dan penyeberangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.9.16	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2.9.17	Pertumbuhan barang yang melalui dermaga pelabuhan	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.9.18	Cakupan ketersediaan sarana navigasi angkutan laut, sungai, dan penyeberangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.19	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan laut (%)	6,00 *	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
2.2.9.20	Cakupan ketersediaan alat untuk pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.21	Persentase pelayanan tepat waktu dalam pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.22	Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp Juta)	433,85	455,54	478,32	502,24	527,35	553,71	581,40	581,40
2.2.9.23	Cakupan fasilitasi pembangunan Pelabuhan Jorong (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.24	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perhubungan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.2.10.1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	80,00 *	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.2	Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	80,00 *	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.3	Cakupan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.10.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	50,00 *	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2.2.10.5	Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	40,00 *	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
2.2.10.6	Cakupan fasilitasi pembangunan BTS di Kabupaten Tanah Laut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.7	Cakupan ketersediaan sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.8	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	80,00 *	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.9	Persentase SKPD yang mempublikasikan kinerjanya dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.10	Persentase SKPD di Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan dan terhubung sistem e-Government (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.11	Persentase SKPD yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.12	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat syarat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.13	Cakupan desa yang dapat mengakses layanan telekomunikasi (%)	50,00 *	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2.2.10.14	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.11.1	Persentase unit UMKM yang Terfasilitasi melalui Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% (Program Unggulan # 1) (%)	-	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.11.2	Jumlah UMKM yang berkembang (unit)	2	2	2	2	2	2	2	10
2.2.11.3	Jumlah UMKM baru yang terbentuk (unit)	5	5	5	5	5	5	5	25
2.2.11.4	Cakupan pembinaan UMKM dalam manajemen usaha dan pemasaran (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.2.11.5	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.11.6	Cakupan penerbitan izin UKM yang tepat syarat dan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.11.7	Jumlah koperasi baru yang terbentuk (unit)	3 *	3	4	4	4	4	4	20
2.2.11.8	Persentase koperasi aktif (%)	50 *	50	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
2.2.11.9	Persentase koperasi maju (%)	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	7,50	7,50
2.2.11.10	Cakupan pembinaan koperasi terkait manajemen dan pengembangan usaha koperasi (%)	20,00 *	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.2.11.11	Desa koperasi (desa)	2 *	2	2	2	2	2	2	10
2.2.11.12	Desa tematik UKM (desa)	1	1	1	1	1	1	1	5
2.2.11.13	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.11.14	Koperasi Aktif	85	85	90	95	100	105	110	110
2.2.12	Penanaman Modal								
2.2.12.1	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	30	6	6	6	6	6	8	38
2.2.12.2	Realisasi Investasi (Rp miliar)	800,000 *	804.945	845.192	887.452	931.824	978.415	1.027.336	5.475.164



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.12.3	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.12.4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	2	2	2	2	2	2	2	10
2.2.12.5	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	2	2	-	-	1	-	1	2
2.2.12.6	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN (%)	1,00 *	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	7,00	7,00
2.2.12.7	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	603.709 *	603.709	633.894	665.589	698.868	733.811	770.502	4.106.373
2.2.12.8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	201.236 *	201.236	211.298	221.863	232.956	244.604	256.834	1.368.791
2.2.12.9	Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.12.10	Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.11	Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.12.12	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.13	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.14	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.15	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.12.16	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.17	Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.12.18	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang penanaman modal	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga								
2.2.13.1	Persentase Wirausaha Muda (%)	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00
2.2.13.2	Organisasi pemuda aktif (%)	80,00	80,00	85,00	93,00	95,00	97,00	99,00	99,00
2.2.13.3	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	2 *	2	2	2	2	2	2	10
2.2.13.4	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.13.5	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.13.6	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	2 *	2	2	2	2	2	2	8
2.2.13.7	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.13.8	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	60,00 *	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
2.2.13.9	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	25,00 *	25,00	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
2.2.13.10	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional (%)	10,00	10,00	10,00	12,50	14,00	15,00	17,50	17,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.13.11	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.13.12	Kejuaraan cabang olahraga antar desa tingkat kabupaten (Ada/Tidak)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.13.13	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	-	-	1	1	1	2	2	7
2.2.13.14	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.13.15	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pemuda dan olahraga	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.14	Statistik								
2.2.14.1	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.14.2	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.4	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.5	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.6	Ketersediaan Buku Statistik Daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.7	Persentase data SKPD yang dimuat dalam database satu data (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.14.8	Ketersediaan data kinerja sektoral dalam SIPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.14.9	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang statistik	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.15	Persandian								
2.2.15.1	Persentase perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi penting milik pemerintah daerah (%)	-	-	-	20,00	25,00	40,00	50,00	50,00
2.2.15.2	Persentase konten informasi prioritas yang telah diamankan dengan menggunakan persandian dibandingkan jumlah seluruh konten informasi yang ada (%)	-	-	-	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
2.2.15.3	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang persandian	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.16	Kebudayaan								
2.2.16.1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.2	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.3	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.4	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.5	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	1	1	2	2	2	2	2	11
2.2.16.6	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.16.7	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.8	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.16.9	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	-	-	2	2	2	2	2	10
2.2.16.10	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang persandian	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.17	Perpustakaan								
2.2.17.1	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan (%)	2,00 *	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.17.2	Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan keliling (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.2.17.3	Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.17.4	Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.17.5	Desa Gemar Membaca (desa)	-	-	1	2	2	5	5	15
2.2.17.6	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perpustakaan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.2.18	Kearsipan								
2.2.18.1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.18.2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat SKPD (%)	10,00	10,00	20,00	25,00	40,00	50,00	60,00	60,00
2.2.18.3	Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.18.4	Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.18.5	Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.18.6	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	5,00 *	5,00	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
2.2.18.7	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kearsipan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3	Urusan Pilihan								
2.3.1	Kelautan dan Perikanan								
2.3.1.1	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.1.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	-	1.008	1.008	1.070	1.162	1.262	1.360	1.360
2.3.1.3	Nilai tukar pembudidaya ikan (skor)	100,00	100,00	102,50	105,06	107,69	110,38	113,14	113,14
2.3.1.4	Cakupan pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina (%)	10,00 *	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.3.1.5	Jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang dikembangkan (kawasan)	1	1	1	1	1	1	1	4
2.3.1.6	Produksi perikanan tangkap (ton)	-	43.180	43.180	55.325	56.708	57.708	58.708	58.708
2.3.1.7	Nilai tukar nelayan (skor)	100,00 *	100,00	101,50	103,02	104,57	106,14	107,73	107,73
2.3.1.8	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.1.9	Cakupan pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (%)	10,00 *	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.3.1.10	Jumlah sentra produksi perikanan tangkap yang dikembangkan (kawasan)	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.1.11	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	1.135,00	1.191,75	1.251,34	1.313,90	1.379,60	1.448,58	1.521,01	1521,01
2.3.1.12	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang/tahun)	45,00 *	45,00	45,68	46,36	47,06	47,76	48,48	48,48



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.1.13	Cakupan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang dibina (%)	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.3.1.14	Jumlah sentra produksi olahan produk ikan yang dikembangkan (kawasan)	1	1	1	2	2	2	2	8
2.3.1.15	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.2	Pariwisata								
2.3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	275.000	275.000	280.000	285.000	290.000	300.000	350.000	350.000
2.3.2.2	PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	460,50	506,55	557,21	612,93	674,22	741,64	815,80	815,80
2.3.2.3	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.2.4	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.2.5	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2.3.2.6	Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	2	2	2	2	2	2	2	10
2.3.2.7	Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.2.8	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	-	-	2	2	2	2	2	10
2.3.2.9	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.2.10	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.2.11	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pariwisata	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.3	Pertanian								
2.3.3.1	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00 *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.3.2	Produksi padi (ton)	-	242.073	242.073	245.055	248.563	252.402	256.544	1.224.637
2.3.3.3	Produksi jagung (ton)	-	193.717	193.717	197.520	201.588	205.934	210.573	1.009.332
2.3.3.4	Produksi kedelai (ton)	-	979	979	999	1.021	1.055	1.092	5.146
2.3.3.5	Produksi kacang tanah (ton)	1.188	3.343	1.999	2.129	2.283	2.356	2.651	2.651
2.3.3.6	Produksi kacang hijau (ton)	77	59	168	181	189	196	238	238
2.3.3.7	Produksi ubi kayu (ton)	736	23.670	18.058	20.137	21.504	22.886	24.380	24.380
2.3.3.8	Produksi ubi jalar (ton)	2.252	13.056	2.858	3.000	3.603	5.677	3.783	3.783
2.3.3.9	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas tanaman pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.10	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman pangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.11	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman pangan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.12	NTP Tanaman Pangan (skor)	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12	108,24	110,41	110,41
2.3.3.13	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.3.14	Produksi cabai (kuintal)	-	13.261	13.261	13.699	14.165	14.660	15.248	57.772
2.3.3.15	Produksi tomat (ton)	5.016 *	5.016	5.562	5.857	6.167	6.494	6.821	6.821
2.3.3.16	Produksi bawang merah (ton)	-	4.644	4.644	4.797	4.960	5.134	5.319	4.644



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.17	Produksi buah naga (ton)	289 *	289	339	373	410	451	494	494
2.3.3.18	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas hortikultura unggulan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.19	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman hortikultura (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.20	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman hortikultura secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.21	NTP Hortikultura (skor)	100,00	100,00	103,00	106,09	109,27	112,55	115,93	115,93
2.3.3.22	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.3.3.23	Produksi karet (ton)	-	8.317	8.317	8.567	8.817	9.184	9.517	44.402
2.3.3.24	Produksi kelapa sawit (ton)	-	18.941	18.941	19.373	19.914	20.563	21.266	100.057
2.3.3.25	Cakupan fasilitasi pengembangan dan peremajaan komoditas perkebunan unggulan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.26	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman perkebunan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.27	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman perkebunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.28	NTP Tanaman Perkebunan	100,00 *	100,00	103,50	107,12	110,87	114,75	118,77	118,77
2.3.3.29	Cakupan petani yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.30	Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan mikro (unit)	20 *	20	2	4	6	9	15	56



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.31	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi produksi pertanian terbaru (unit)	2	2	2	4	4	4	4	20
2.3.3.32	Penerapan Demplot teknologi pertanian (lokasi)	2	2	2	9	16	23	30	82
2.3.3.33	Jumlah kelompok tani baru (pemula) (unit)	227 *	227	155	95	70	50	40	637
2.3.3.34	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Pemula - Lanjut (unit)	153 *	153	267	105	79	55	40	699
2.3.3.35	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Lanjut - Madya (unit)	36 *	36	4	6	6	7	7	66
2.3.3.36	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Madya - Utama (unit)	-	-	1	1	1	1	1	5
2.3.3.37	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani (kali per tahun)	21.120 *	21.120	21.145	21.250	21.160	21.160	21.170	21.170
2.3.3.38	Cakupan pengadaan sarana dan alat mesin pertanian sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.39	Cakupan pemberian saran dan alat mesin pertanian kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.40	Fasilitasi pengembangan percetakan sawah/perluasan area tanam (Ha)	2.605 *	2.605	2.705	2.705	2.755	2.905	3.005	3.105
2.3.3.41	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan usaha tani (km)	42 *	42	15	15	20	10	10	112
2.3.3.42	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan produksi (km)	68 *	68	10	20	20	20	20	158
2.3.3.43	Fasilitasi pengembangan/pembuatan embung (unit)	28 *	28	7	3	3	3	3	47
2.3.3.44	Fasilitasi pengembangan jaringan irigasi (ha)	4.740 *	4.740	500	300	300	250	200	6.290



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.45	Fasilitasi optimalisasi pengelolaan lahan (Ha)	2.050 *	2.050	350	350	400	500	500	4.150
2.3.3.46	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.3.47	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.3.48	Cakupan peternak yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.49	Persentase kelompok peternak yang dapat mengembangkan usahanya (%)	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	25,00	25,00
2.3.3.50	Cakupan ketersediaan data profil dan potensi pengembangan peternakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.51	Persentase pelaku usaha peternakan binaan yang bermitra dengan pihak lain	5,00	7,00	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	20,00
2.3.3.52	Realisasi investasi sektor peternakan (Rp miliar)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
2.3.3.53	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana peternakan sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.54	Cakupan pemberian sarana dan prasarana peternakan kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.55	Produksi daging sapi (kg)	263.356	268.623	273.996	279.475	285.065	290.766	296.582	296.582
2.3.3.56	Produksi daging kerbau (kg)	50.204	50.706	51.213	51.725	52.242	52.765	53.293	53.293
2.3.3.57	Produksi daging kambing (kg)	12.608	12.734	12.861	12.990	13.120	13.251	13.384	13.384
2.3.3.58	Produksi daging domba (kg)	408	412	416	420	425	429	433	433
2.3.3.59	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	1.224.846	1.255.467	1.286.854	1.319.025	1.352.001	1.385.801	1.420.446	1.420.446



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.60	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	6.859.018	7.133.379	7.418.714	7.715.462	8.024.081	8.345.044	8.678.846	8.678.846
2.3.3.61	Produksi daging ayam ras buras (kg)	500.787	513.307	526.139	539.293	552.775	566.595	580.759	580.759
2.3.3.62	Produksi daging itik (kg)	70.958	72.377	73.825	75.301	76.807	78.343	79.910	79.910
2.3.3.63	Produksi telur ayam ras (kg)	70.602.576	72.367.640	74.176.831	76.031.252	77.932.034	79.880.334	81.877.343	81.877.343
2.3.3.64	Produksi telur ayam buras (kg)	2.014.969	2.065.343	2.116.977	2.169.901	2.224.149	2.279.752	2.336.746	2.336.746
2.3.3.65	Produksi telur itik (kg)	1.318.854	1.345.231	1.372.136	1.399.578	1.427.570	1.456.121	1.485.244	1.485.244
2.3.3.66	Cakupan fasilitas pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.67	Cakupan fasilitas pengembangan pakan ternak unggul bagi peternak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.68	Cakupan fasilitas pendistribusian semen bibit ternak unggul (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.69	Cakupan fasilitas pelaksanaan inseminasi buatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.70	Jumlah Desa Lumbung Ternak (desa)	5	5	5	5	5	5	5	25
2.3.3.71	Cakupan fasilitas pencegahan penyakit ternak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.72	Cakupan fasilitas pemeriksaan penyakit ternak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.73	Cakupan pengawasan produk asal hewan di wilayah prioritas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.74	Persentase jaminan pangan asal hewan yang ASUH (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.75	Cakupan fasilitas penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.76	Cakupan pembinaan kelompok pengolah hasil peternakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.77	Cakupan fasilitasi pemasaran produk pasca panen hasil peternakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.3.78	NTP Peternakan (skor)	100 *	100,00	104,00	108,16	112,49	116,99	121,67	121,67
2.3.3.79	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.4	Perdagangan								
2.3.4.1	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,95	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.3.4.2	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.3	Persentase penyelesaian keluhan konsumen yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.4	Cakupan monitoring ketersediaan stok dan harga barang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.5	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.6	Cakupan fasilitasi peningkatan pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.7	Cakupan fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.8	Cakupan pengembangan BPPMB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.9	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.4.10	Cakupan pelayanan kemetrolgian daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.11	Cakupan standarisasi UTP bidang perdagangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.12	Cakupan pembinaan bagi pedagang kakilima dan asongan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.13	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.14	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.15	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.16	Penerimaan retribusi pelayanan pasar (Rp)	1.113.011.500	1.135.271.730	1.157.977.165	1.181.136.708	1.204.759.442	1.228.854.631	1.253.431.724	1.253.431.724
2.3.4.17	Cakupan ketersediaan data profil pasar daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.18	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perdagangan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.5	Perindustrian								
2.3.5.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7,56	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.3.5.2	Pertumbuhan jumlah IKM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.5.3	Jumlah IKM berkembang	5	5	5	5	5	5	5	30
2.3.5.4	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	2	2	2	2	2	2	2	10
2.3.5.5	Jumlah sentra industri rakyat	1	1	1	1	2	4	5	5
2.3.5.6	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	5,00 *	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.5.7	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.5.8	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha
2.3.5.9	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha
2.3.5.10	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha
2.3.5.11	Cakupan fasilitasi rencana pengembangan Kawasan Industri Jorong (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.5.12	Jumlah inovasi pelayanan dalam bidang perindustrian	-	-	-	1	1	1	1	4
2.3.5.13	Jumlah IKM	-	-	40	50	60	70	80	80
2.3.5.14	Jumlah IKM Unggulan	-	-	15	20	25	30	35	35
2.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
2.4.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan								
2.4.1.1	Cakupan penyepakatan batas antar kelurahan (%)	20,00 *	20,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.2	Cakupan penyepakatan batas wilayah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.3	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.4	Peringkat LPPD (skor)	3,0574 (sangat tinggi)	3,0574 (sangat tinggi)	3,0600 (sangat tinggi)	3,0750 (sangat tinggi)	3,1000 (sangat tinggi)	3,1250 (sangat tinggi)	3,1750 (sangat tinggi)	3,1750 (sangat tinggi)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.5	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.4.1.6	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4.1.7	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.1.8	Cakupan Fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	5	5	5	8	11	11	11	11
2.4.1.9	Cakupan pemenuhan IKK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.10	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.11	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.12	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.13	Persentase produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang harmonis, menjamin kepastian hukum dan mengayomi kepentingan daerah dan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.14	Persentase produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri dan Gubernur (%)	0	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.15	Cakupan penanganan masalah hukum non litigasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.16	Persentase pelayanan bantuan hukum/konsultasi/advokasi hukum bagi aparatur, masyarakat dan pemerintah desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.17	Persentase pelayanan advokasi hukum bidang tindak pidana bagi masyarakat melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.18	Persentase terpublikasikannya produk hukum daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.19	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.20	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.21	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hukum	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.22	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B (60,06)	B (63,61)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (77,00)	A (81,00)	A (81,00)	BB
2.4.1.23	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	-	-	6,0(Baik)	6,1 (Baik)	6,2 (Baik)	6,3 (Baik)	6,4 (Baik)	6,4 (Baik)
2.4.1.24	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	65 (Kurang Baik)	65 (Kurang Baik)	70 (Kurang Baik)	75 (Kurang Baik)	76,5 (Baik)	77,5 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)
2.4.1.25	Penghargaan inovasi publik (jumlah)	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	6 penghargaan
2.4.1.26	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	0	0	1	2	2	2	2	2
2.4.1.27	Indeks keterbukaan informasi publik (skor)	65,00	65,00	67,00	69,00	70,00	72,00	75,00	75,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.28	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD) (%)	-	-	5 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	25 SKPD
2.4.1.29	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.30	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.31	Cakupan SKPD Kabupaten Tanah laut yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.32	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.33	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Organisasi	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.34	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.35	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.36	Cakupan Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi yang terlaksana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.37	Persentase Rekomendasi dari TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.38	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.4.1.39	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.40	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.41	Cakupan monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.42	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Perekonomian Pembangunan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.42	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.43	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.44	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.45	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	6
2.4.1.46	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.47	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.48	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.49	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syariah Keagamaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.50	Persentase Permohonan Bantuan Hibah yang terlaksana secara tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.51	Jumlah Guru TPA, Madin, Ponpes dan PAH yang aktif (orang)	3.060	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072
2.4.1.52	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.52	Cakupan ketersediaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.53	Cakupan pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspos ke media	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.54	Cakupan kegiatan keprotokolan KDH/ WKDH/ Kepada SKPD /tamu Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.55	Cakupan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.56	Cakupan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.57	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.57	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa perkantoran (makanan dan minuman, komunikasi, air, listrik, kendaraan dinas/operasional, dan perlengkapan) untuk kantor dan rumah jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.58	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.59	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.60	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana /aset milik Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.61	Cakupan BMD yang telah diappraisal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.62	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.1.63	Persentase SKPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.64	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.65	Tersedianya Kodefikasi Barang Milik Daerah se-Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.66	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.67	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Umum	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.68	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, penunjang SKPD, dan administrasi keuangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.69	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.70	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen
2.4.1.71	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen
2.4.1.72	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB
2.4.1.73	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.1.74	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.1.75	Cakupan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.76	Jumlah inovasi pelayanan di Bagian Tata Usaha dan Keuangan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.77	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.78	Cakupan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.79	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD (%)								
2.4.1.80	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Prolegda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.81	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.82	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.83	Cakupan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.84	Cakupan fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.85	Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.86	Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.87	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.88	Cakupan informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.89	Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.90	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.91	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	50 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.92	Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.93	Jumlah inovasi pelayanan di Sekretariat DPRD	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.94	Cakupan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan umum di kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.95	Cakupan koorinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.96	Cakupan perwakilan desa yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan di kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.97	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.98	Cakupan monitoring dan evaluasi hasil Musrenbang Desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.99	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	-	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
2.4.1.100	Cakupan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan SOP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.101	Jumlah inovasi pelayanan di kecamatan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.1.102	Cakupan ketersediaan profil yang berisi data potensi pengembangan kelurahan (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.1.103	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.104	Cakupan RW yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi di lingkup kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.105	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.106	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lingkup kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.107	Jumlah inovasi pelayanan di lingkup kelurahan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan								
2.4.2.1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.2.2	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.3	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.4	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.5	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.2.6	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.7	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.8	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten Tanah Laut (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.2.9	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.10	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.11	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.12	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.13	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.14	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2.15	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.2.16	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.17	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.18	Cakupan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.19	Jumlah inovasi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan								
2.4.3.1	Cakupan kajian kelitbangan yang disusun menjadi rekomendasi kebijakan daerah (%)	50,00	50,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2.4.3.2	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin (%)	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.4.3.3	Cakupan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.3.4	Jumlah inovasi pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan	1	1	1	1	1	1	1	4
2.4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan								
2.4.4.1	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.2	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.4	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4.5	Persentase peserta ujian dinas yang lulus (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.4.6	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.7	Cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural secara tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.8	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	19	20	50	50	50	50	50	270
2.4.4.9	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.10	Cakupan ketersediaan sistem administrasi kepegawaian secara online (%)	50,00 *	50,00	60,00	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.11	Cakupan ketersediaan data aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.12	Cakupan ketersediaan pembinaan dan pengembangan karir PNS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.4.13	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan								
2.4.5.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,69	11,00	11,00	11,00	11,00	11,61	12,35	12,35
2.4.5.2	Pertumbuhan PAD (%)	5,00	5,00	5,00	12,76	12,70	10,18	10,33	10,33
2.4.5.3	Persentase pelanggaran wajib pajak daerah (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.4.5.4	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah (%)	5,00 *	5,00	13,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
2.4.5.5	Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.5.6	Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.7	Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB (%)	5,00 *	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.4.5.8	Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (%)	5,00 *	5,00	20,41	19,83	20,00	20,00	20,00	20,00
2.4.5.9	Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.10	Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.11	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.5.12	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.5.13	Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.14	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.15	Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.4.5.16	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.4.5.17	Persentase belanja pendidikan 20%	20	21,21	20,62	20,09	19,62	19,20	18,83	18,83
2.4.5.18	Persentase belanja kesehatan 10%	10	10	10,5	11	11,5	12	13	13
2.4.5.19	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	50 : 50	50 : 50	50 : 50	55 : 45	55 : 45	60 : 40	60 : 40	60 : 40



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.5.20	Persentase SKPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrua (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.21	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	85,00	85,00	87,00	89,00	90,00	92,00	95,00	95,00
2.4.5.22	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.23	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.5.24	Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1	1	1	1	4
2.4.6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan								
2.4.6.1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,1	Level 3,2	Level 3,2	Level 3,3	Level 3,4	Level 3,5	Level 3,6	Level 3,6
2.4.6.2	Nilai Reformasi Birokrasi	3,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5 (baik)
2.4.6.3	Level kapabilitas APIP	2+ hasil penilaian BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2.4.6.4	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)	75(BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
2.4.6.5	Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	5 SKPD
2.4.6.6	Persentase temuan yang material pada obrik	40 SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya material	50%	50%	40%	30%	20%	10%	10%
2.4.6.7	Persentase PKPT yang dapat dilaksanakan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.6.8	Persentase Entitas Pelaporan Keuangan dengan Laporan Keuangan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.6.9	Pesentase pengawasan Pengaduan masyarakat/ instansi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
3	ASPEK DAYA SAING								
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
3.1.1.1	Pengeluaran per kapita penduduk per tahun (Rp)	10.925,00	11.143,50	11.366,37	11.593,70	11.825,57	12.062,08	12.303,32	12.303,32
3.1.1.2	Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	56,53	55,40	54,29	53,21	52,14	51,10	50,08	50,08
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
3.3.1	NTP Tanaman Pangan (skor)	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12	108,24	110,41	110,41
3.3.2	NTP Hortikultura (skor)	100,00	100,00	103,00	106,09	109,27	112,55	115,93	115,93
3.3.3	NTP Tanaman Perkebunan	100,00	100,00	103,50	107,12	110,87	114,75	118,77	118,77
3.3.4	NTP Peternakan (skor)	100,00	100,00	104,00	108,16	112,49	116,99	121,67	121,67
3.3.5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	1 : 210	1 : 210	1 : 225	1 : 240	1 : 250	1 : 260	1 : 275	1 : 275
3.3.6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
3.3.7	Kawasan industri yang dikembangkan (kawasan)	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3.8	Jumlah hotel (unit)	2	2	2	2	4	4	4	4
3.3.9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	50,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi								
3.3.1	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.2	Jumlah demo	2	2	2	2	2	2	2	12



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.3	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)
3.3.5	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia								
3.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	30,00	30,00	35,00	37,50	40,00	45,00	50,00	50,00
3.4.2	Rasio ketergantungan (%)	49,85	49,00	48,00	47,50	47,00	46,50	45,00	45,00

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023. RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini disusun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanah Laut melalui pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Karena itu, RPJMD Kabupaten Tanah Laut harus dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Tanah Laut untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tanah Laut. RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Laut merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penguatan pengendalian dan evaluasi di tiap SKPD harus lebih dioptimalkan dan diinstitutionalisasi untuk memastikan pencapaian target indikator kinerja daerah. Pengendalian dan evaluasi itu harus menjadi instrumen untuk (*prove*) kinerja serta untuk perbaikan (*im-prove*) pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD sangat ditentukan kualitas sinergitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (*korbinwas*) untuk peningkatan sinergitas antar sektor (*urusan*) pun harus diperkuat dan diinstitutionalisasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Bupati;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Tanah Laut;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut;

6. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Tanah Laut, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Tanah Laut akan menjadi kabupaten yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi).